



HUKUM KELUARGA *MATRILINEAL* MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*

DISERTASI

Diserahkan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor (Dr) pada Program Studi Hukum Keluarga
Konsentrasi Ahwal Al-Syakhsiyah



Oleh:

SYAMSI YUSRIZAL
NIM: 31695104861

Promotor

Prof. Dr. H. Sudirman. M, M.A

Co Promotor

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441 H / 2019 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





HUKUM KELUARGA *MATRILINEAL* MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*

DISERTASI

Diserahkan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor (Dr) pada Program Studi Hukum Keluarga
Konsentrasi Ahwal al-Syakhsiyah



Oleh:

SYAMSI YUSRIZAL
NIM: 31695104861

Promotor

Prof. Dr. H. Sudirman. M, M.A

Co Promotor

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441 H / 2019 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lembaran Pengesahan

Nama Syamsi Yusrizal
Nomor Induk Mahasiswa 31695104861
Gelar Akademik Dr. (Doktor)
Judul Hukum Keluarga Matrilineal Minangkabau dalam perspektif Maqashid Syari'ah.

Tim Penguji

Prof. Dr. Afrizal, M. MA
Penguji I / Ketua

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M. Si
Penguji II / Sekretaris

Dr. Jumni Nelli, M. Ag
Penguji III

Prof. Dr. Yaswirman, MA
Penguji IV

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA.
Penguji V

Prof. Dr. H. Sudirman. M. Johan, MA
Penguji VI/ Promotor

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc, MA
Penguji VII/ Co-Promotor

Tanggal Ujian/Pengesahan 03 Desember 2019



Persetujuan Ujian Terbuka

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Promotor Disertasi, dengan ini menyetujui bahwa Disertasi berjudul **"Hukum Keluarga *Matrilineal* Minangkabau dalam Perspektif *Maqāshid* Syarī'ah"** yang ditulis oleh:

Nama : Syamsi Yusrizal
NIM : 31695104861
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah)

Untuk diajukan dalam Sidang Ujian Terbuka Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal, November 2019
Promotor,

Prof. Dr. H. Sudirman. M, M.A
NIP. 19530518 198003 1 002

Tanggal, November 2019
Co. Promotor,

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A
NIP. 19791217 201101 1 006

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah)

Dr. Jumni Nelli. M.Ag
NIP. 19720628 200501 2 004

UIN SUSKA RIAU

1. Uraian yang meringkas sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa menghilangkan informasi yang meringkasnya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prof. Dr. H. SUDIRMAN. M, M.A
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi Saudara
Syamsi Yusrizal

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama	: Syamsi Yusrizal
NIM	: 31695104861
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah)
Judul	: Hukum Keluarga <i>Matrilineal</i> Minangkabau dalam Perspektif <i>Maqāshid Syari'ah</i>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam Sidang Ujian Terbuka Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Pekanbaru, November 2019
Promotor,

Prof. Dr. H. Sudirman. M, M.A
NIP. 19530518 198003 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. H. HIDAYATULLAH ISMAIL, Lc., M.A
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi Saudara
Syamsi Yusrizal

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama	: Syamsi Yusrizal
NIM	: 31695104861
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah)
Judul	: Hukum Keluarga <i>Matrilineal</i> Minangkabau dalam Perspektif <i>Maqāshid Syarī'ah</i>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam Sidang Ujian Terbuka Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Pekanbaru, November 2019
Co. Promotor,

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A
NIP. 19791217 201101 1 006



SURAT PERNYATAAN

1. Uraian yang terdapat sebagai berikut adalah sebagai berikut:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Syamsi Yusrizal
NIM	: 31695104861
Tempat Tanggal Lahir	: Kapujan, 22 September 1984
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: **"Hukum Keluarga Matrilineal Minangkabau dalam Perspektif Maqāshid Syarī'ah"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Disertasi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya 'plagiat' dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, November 2019
Saya yang menyatakan,



Syamsi Yusrizal
Syamsi Yusrizal
NIM. 31695104861



KATA PENGANTAR



Sembunyi mengharap rahmat dan redha Allah, penulis sampaikan puji syukur yang sedalam-dalamnya ke-hadirat Allah, yang telah memberikan *hidayah*, *taufiq*, dan *hidayah*-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Sehubungan itu penulis sampaikan *do'a* kepada Allah untuk melimpahkan shalawat beserta salam-Nya kepada *sayyid al-mustafa, Khattam an-nubuwwah wa al-mursalin*; Muhammad *shallā Allāh 'alaih wa sallam*, sebagai suri tauladan (*prototype*) bagi manusia yang menyadari dan menginsyafkan tugas penunaian amanah Allah dalam menjalani kehidupan yang bagi seorang mukmin kehidupan itu sendiri berfungsi sebagai sajadah ibadah untuk mendapatkan rahmat dan redha Allah.

Penulisan disertasi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas terstruktur akademik untuk memperoleh gelar Doktor Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsyah) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau dan merupakan salah satu bentuk *jihaḥ intelektual* yang dapat penulis lakukan dalam membumikan ajaran *Ilahiah* dibidang Hukum Keluarga Ahwal al-Syakhsyah).

Penyusunan dan penyajian disertasi ini hanya dapat terlaksana atas bimbingan, arahan dan bantuan 'moril' serta 'materil'. Untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia c/q Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti 'studi' S.3 (Strata Tiga) dengan Program Beasiswa 5000 Doktor Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Ketua Yayasan Madrasah Arabiyah Bayang dan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Madrasah Arabiyah (STAIMA) Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan 'studi' S.3 (Strata Tiga) dengan mengikuti Program Beasiswa 5000 Doktor Kementerian Agama Republik Indonesia.
3. Bapak **Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak **Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A** (mantan Rektor) yang telah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penulis untuk menyelesaikan dan meraih gelar akademik Doktor.
4. Bapak **Prof. Dr. Afrizal M, M.A.**, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak **Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag.**, (mantan Direktur), yang telah banyak memberikan bantuan moril dalam penulisan disertasi ini.
5. Bapak **Drs. H. Iskandar Arnel, M.A., Ph.D.**, selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak **Dr. Zamsiswaya, M.Ag.**, (mantan Wakil Direktur), yang telah banyak memberikan bantuan moril dalam penulisan disertasi ini.



0. Ibuk **Dr. Jumni Nelli, M.Ag.**, selaku Ketua Program Studi S.3 (Strata Tiga) Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsyah) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak **Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A.**, (mantan Ketua Program Studi S.3 (Strata Tiga) Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsyah)), yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam rangka menulis disertasi ini.
 - Bapak **Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A.**, sebagai Penasehat Akademik dan 'Almarhum' Bapak **Prof. Dr. H. Mahdini, M.A.**, (mantan Penasehat Akademik), yang telah memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
 - Bapak **Prof. Dr. H. Sudirman. M, M.A.**, dan Bapak **Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A.**, sebagai Promotor dan Co. Promotor yang penuh kearifan dan kesabaran dalam membimbing penulis serta telah memberikan banyak tambahan ilmu yang sangat berharga dalam rangka menyelesaikan penulisan disertasi ini.
 - Bapak **Prof. Dr. H. Alaidin Koto, M.A** dan **Prof. Dr. Yaswirman, M.A.**, sebagai Penguji III/Penguji Internal dan Penguji IV/Penguji Eksternal dalam Ujian Tertutup Disertasi yang telah memberikan saran, koreksi dan evaluasi terhadap disertasi ini.
 0. Segenap Guru Besar dan Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, informasi, pemikiran dan wawasan, baik selama mengikuti perkuliahan maupun selama penulisan disertasi ini.
 1. Bapak dan Ibuk segenap Pegawai Administrasi, Akademik, dan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bantuan dalam penulisan disertasi ini.
 2. Penghargaan dan cinta terbesar penulis ditujukan kepada Ayahanda **Sanusi**, dan Ibunda 'Almarhumah' **Yurnis**, yang telah memberikan cinta kasih, mengasuh, mendidik dan memberikan motivasi dalam mencapai cita-cita penulis, kepada kakak-kakakku (**Zaimusral, Bendriani** dan **Zaimal Elpetani, S.Ag**), adikku (**Boni Syaukani, A.Ma**) dan terkhusus kepada istriku tercinta (**Rika Wulandari, S.Pd.I**) serta teristimewa kepada anak-anakku tersayang (**Mujtahid Nurul Fajri Syamrika, Farisah Hammamah Syamrika, Adiba Aqila Ramadhan Syamrika, dan Hafizah Al-Fathunnisa' Inara Syamrika**), sebagai sumber inspirasi dan spirit bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.
 13. Teman-teman seperjuangan konsentrasi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsyah) angkatan 2016 Program Beasiswa 5000 Doktor Kementerian Agama RI Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan motivasi, dorongan serta semangat untuk sepenuhnya penulisan disertasi ini.
- Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih, semoga amal dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan pahala di sisi Allah, 'Amin'. Akhirnya, penulis menyadari bahwa karya 'ilmiah' ini sangat jauh dari kesempurnaan. Penulis sangat mengharapkan sumbangan saran dan

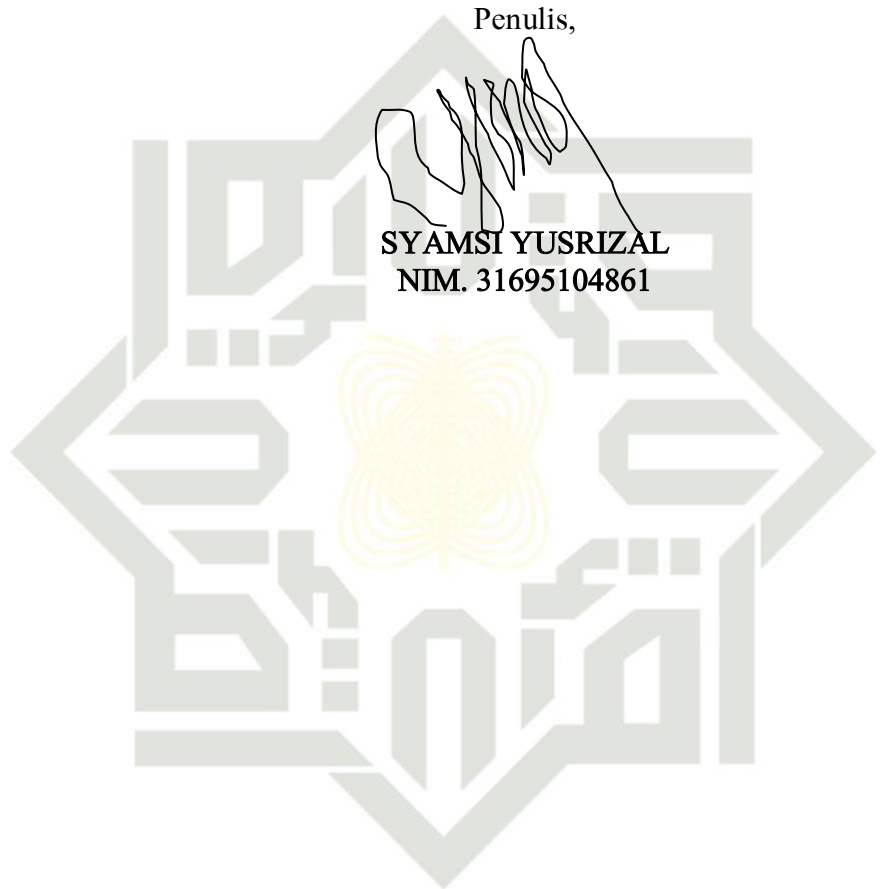


kritikan yang *konstruktif* dari semua pihak demi kesempurnaan disertasi ini. Kiranya karya ‘ilmiah’ ini dapat menambah *khazanah* ilmu pengetahuan keislaman, khususnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim

Pekanbaru, November 2019

Penulis,


SYAMSI YUSRIZAL
 NIM. 31695104861



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Syamsi Yusrizal, Nim. 31695104861, disertasi berjudul: **"Hukum Keluarga Matrilineal Minangkabau Perspektif Maqāshid Syari'ah"**. Program Studi Hukum Keluarga (AH) Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Tahun 2019, 340 halaman.

Adapun yang memotivasi peneliti dalam membahas disertasi ini dilatarbelakangi bahwa ketika menjawab perbedaan pendapat masyarakat adat Minangkabau tentang polemik hukum keluarga *matrilineal* secara substansi hukum *perspektif maqāshid syari'ah*.

Tujuan penulisan disertasi ini adalah mengungkapkan hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau pada aspek perkawinan, tanggungjawab suami terhadap istri dan anak, perceraian, dan harta pusaka perspektif *maqāshid syari'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara terperinci terhadap permasalahan sebagaimana adanya. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: *primer*, *sekunder*, dan data *tertier*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diungkapkan sebagai berikut: 1. Hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau pada aspek perkawinan perspektif *maqāshid syari'ah* adalah: Masyarakat Minangkabau membagi larangan perkawinan menjadi tiga, yaitu: **Pertama**, *nikam bumi*. **Kedua**, *cegak telu*. **Ketiga**, *pecah pinggan*. Makna perkawinan secara prinsipil bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan *kemudharatan*. Ditinjau dari lima prinsip dasar (*al-Dharuriyah al-Khams*) atau *maslahah* yang bersifat primer (*al-Maslahah al-Mu'tabarah*), makna perkawinan bisa dianalisa sebagai berikut: **Pertama**, untuk mewujudkan prinsip menjaga keturunan (*hifdzu al-Nasl*). **Kedua**, menjaga agama (*hifdzu al-Din*). Kesamaan agama menjadi prinsip utama dalam perkawinan. **Ketiga**, sistem larangan kawin satu suku ini dipakai untuk mengekalkan kekerabatan *matrilineal*. Konsep *al-'urf* berdasarkan pengertian *muhab* atau *jaiz* (pembolehkan) dapat dijadikan tolak ukurnya; 2. Hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau pada aspek tanggungjawab suami terhadap istri dan anak perspektif *maqāshid syari'ah* adalah: Pergeseran atau tahapan bentuk perkawinan di Minangkabau ada tiga bentuk yang berimplikasi kepada tanggungjawab suami terhadap istri dan anaknya, yaitu perkawinan bertandang, perkawinan menetap dan perkawinan bebas. Seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istri dengan nafkah yang dihasilkan dari pekerjaan yang baik sesuai dengan kadar kemampuannya. Bagian *hifdzun an-nafs* diambil dari *maslahah*, tujuan syariat adalah untuk kemaslahatan kehidupan manusia, dan untuk menghindari *mafsadat* bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat; 3. Hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau pada aspek terjadinya perceraian perspektif *maqāshid syari'ah* adalah: Perceraian dalam keluarga *matrilineal* Minangkabau adalah: **Pertama**, ketika terjadi perceraian, hak asuh anak berada pada istri. **Kedua**, ketika terjadi perceraian, suami yang berangkat (pergi) dari rumah. **Ketiga**, harta yang didapat selama hubungan pernikahan (harta pusako randah/harta gono gini) pada umumnya tidak dibagi secara hukum yang berlaku. Kewajiban memelihara, mendidik, mencukupi kebutuhan hidup anak, serta menjaga hak dan harta anak harus dilakukan untuk kepentingan anak. Dan ini terus berlaku walaupun terjadi perceraian; dan 4. Hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau pada aspek harta pusaka perspektif *maqāshid syari'ah* adalah: Ada 3 (tiga) asas pokok dalam hukum kewarisan Adat Minangkabau, yaitu: **Pertama**, asas *unilateral*. **Kedua**, asas *kolektif*. **Ketiga**, asas keutamaan. Secara umum *klasifikasi* harta di Minangkabau ada dua jenis, yaitu: Harta pusako tinggi adalah harta kaum yang diterima secara turun temurun dari ninik ke-mamak, dari mamak kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu diwariskan secara *kolektif* menurut garis keturunan ibu (*matrilineal*). Harta Pusako Randah adalah segala harta yang didapat dari hasil usaha pekerjaan sendiri, termasuk di dalamnya adalah harta pencaharian suami isteri. Harta pusaka rendah diwariskan menurut hukum *faraidh*. Harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau tidak bisa digunakan konsep warisan Islam, karena ia bukanlah harta warisan sebagaimana terdapat dalam *faraidh*. Adapun harta pusaka rendah adalah harta yang merupakan hasil pencaharian seseorang yang dia miliki secara utuh dan sempurna, dan dia punya kuasa penuh terhadap harta tersebut, sehingga konsep pewarisannya harus mengikuti *faraidh*.



ABSTRACT

Syamsi Yusrizal, Nim. 31695104861, dissertation entitled: "*Minangkabau Matrilineal Family Law Perspective Maqāshid Syarī'ah*". Family Law Study Program (AH) Postgraduate S3 UIN Sultan Syarif Kasim Riau. In 2019, 340 pages.

As for what motivated the researchers in discussing this dissertation, it was motivated that they would answer the differences of opinion of the Minangkabau indigenous people about the polemic of matrilineal family law in substance from the perspective of *maqāshid syarī'ah*.

The purpose of writing this dissertation is to reveal Minangkabau matrilineal family law in the aspects of marriage, husband's responsibility towards his wife and children, divorce, and inheritance perspective *maqāshid syarī'ah*.

This research is a library research using a descriptive qualitative method, which provides a detailed description of the problem as it is. Data sources used in this study can be classified into three parts, namely: primary, secondary, and tertiary data.

Based on the results of research that has been done, it can be expressed as follows: 1. Minangkabau matrilineal family law on the aspect of marriage perspective *maqāshid syarī'ah*: Minangkabau people divide the marriage ban into three, namely: **First**, stabbing the earth. **Second**, to prevent telur. **Third**, break the dish. The meaning of marriage in principle aims to realize benefit and eliminate kemudharatan. Judging from the five basic principles (*al-Dharuriyah al-Khams*) or masalah that are primary (*al-Maṣ laḥ aḥ al-Mu'tabarah*), the meaning of marriage can be analyzed as follows: **First**, to realize the principle of protecting offspring (*hifdzu al-Nash*). **Second**, guarding religion (*hifdzu al-Din*). The similarity of religion becomes the main principle in marriage. **Third**, the system of prohibiting the marriage of one tribe is used to perpetuate matrilineal kinship. The concept of al-furf based on understanding mubah or jaiz (acquisition) can be used as a benchmark; 2. Minangkabau matrilineal family law on aspects of husband's responsibility towards his wife and children perspective *maqāshid syarī'ah* are: Shifting or stages of the form of marriage in Minangkabau there are three forms that have implications for the husband's responsibility towards his wife and children, namely marital marriage, permanent marriage and free marriage. A husband has an obligation to provide a living for his wife with a living generated from good work in accordance with the level of his ability. The part of hifdzun n-nafs is taken from masalah, the purpose of the Shari'a is for the benefit of human life, and to avoid interpretations for human life in this world and the hereafter; 3. Minangkabau matrilineal family law on the aspect of divorce perspective *maqāshid syarī'ah* is: Divorce in the Minangkabau matrilineal family are: **First**, when divorce occurs, custody of the child is on the wife. **Second**, when there is a divorce, the husband who departs (leaves) from home. **Third**, assets acquired during marital relations (*pusako randah / gono gini assets*) are generally not shared according to applicable law. The obligation to maintain, educate, meet the needs of children's lives, as well as protect the rights and property of children must be done for the benefit of children. And this continues to be the case despite divorce; and 4. Minangkabau matrilineal family law on the aspect of inheritance perspective *maqāshid syarī'ah* are: There are 3 (three) main principles in the Minangkabau Indigenous inheritance law, namely: **First**, the unilateral principle. **Second**, the collective principle. **Third**, the principle of virtue. In general, the classification of assets in Minangkabau there are two types, namely: High *pusako* treasure is the inheritance of the people who are hereditary from *ninik* to *mamak*, from *mamak* to nephew according to maternal lineage, inherited collectively according to maternal lineage (matrilineal). *Pusako Randah* assets are all assets obtained from the results of their own work, including husband and wife's livelihood assets. Low heritage is inherited according to *faraidh* law. High inheritance treasure in the Minangkabau custom cannot be used as a concept of Islamic heritage, because it is not inheritance as contained in the *faraidh*. The low inheritance property is a property that is the result of someone's livelihood that he has in full and perfect, and he has full power over these assets, so the concept of inheritance must follow *faraaidh*.



DAFTAR ISI

HALAMAN	No
HALAMAN JUDUL	i
PERSetujuan UJIAN TERBUKA	ii
PERSetujuan TIM PENGUJI SIDANG UJIAN TERTUTUP	iii
NOTA DINAS PROMOTOR	iv
NOTA DINAS CO-PROMOTOR	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN	xv
DAFTAR PEDOMAN <i>TRANSLITERASI</i> ARAB-INDONESIA	xvi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	30
C. Tujuan Penelitian	31
D. Manfaat Penelitian	31
BAB II	
LANDASAN TEORITIS	33
A. KERANGKA TEORI	33
1. Hukum Keluarga <i>Matrilineal</i> Minangkabau	33
a. Asal Usul Minangkabau	33
b. Batas dan Wilayah Kultural Minangkabau	43
c. Agama Suku Minangkabau Pra Islam dan Islam	48
d. Budaya, Adat, Tingkatan Adat, Undang-Undang dan Hukum Adat Minangkabau	65
e. Sejarah Hukum Keluarga <i>Matrilineal</i> Minangkabau	101
f. Sistem Adat Minangkabau	104
g. Hubungan Kekerabatan dan Tradisi Perkawinan Minangkabau	115
2. <i>Maqāshid Syarī'ah</i>	133
a. Pengertian <i>Maqāshid Syarī'ah</i>	133
b. Dasar Hukum <i>Maqāshid Syarī'ah</i>	136
c. Sejarah <i>Maqāshid Syarī'ah</i>	147
d. Pembagian <i>Maqāshid Syarī'ah</i>	156
e. Essensi dan Eksistensi <i>Maqāshid Syarī'ah</i>	164
f. Urgensi <i>Maqāshid Syarī'ah</i>	170
g. Metode Mengetahui <i>Maqāshid Syarī'ah</i>	172
h. <i>Maqāshid al-Syarī'ah</i> Kontemporer	174
B. TINJAUAN PENELITIAN YANG RELEVAN	185



BAB III

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

BAB V

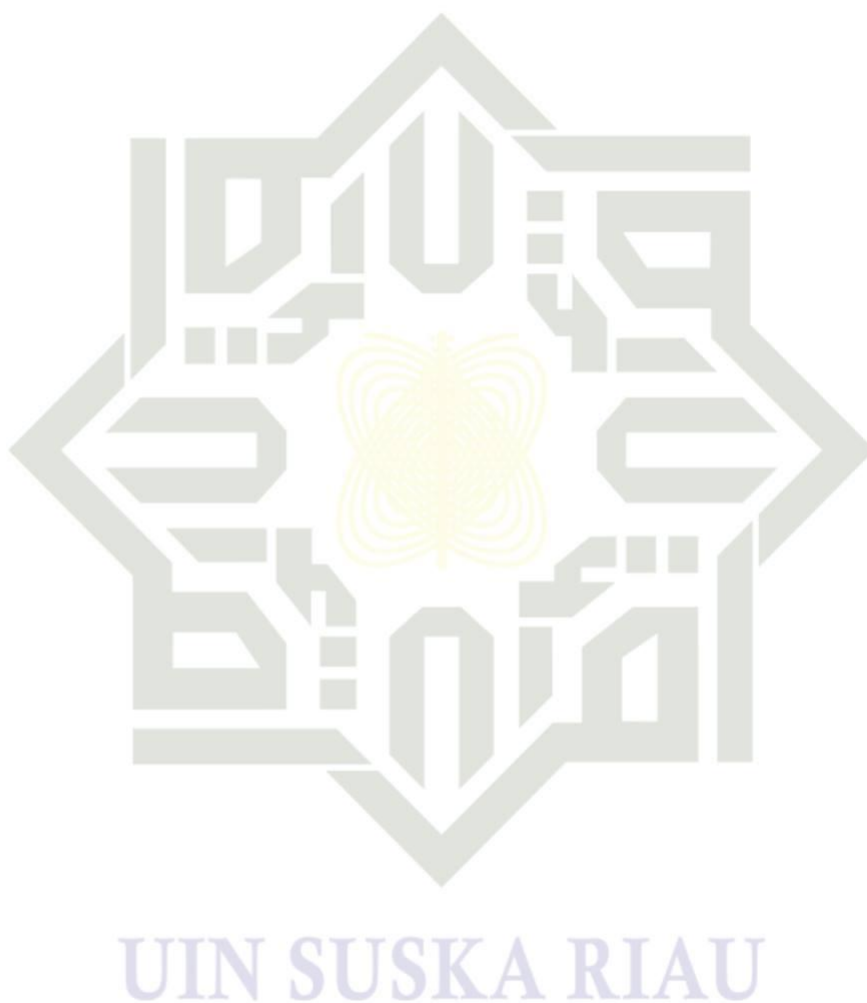
DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

METODE PENELITIAN	192
A. Jenis Penelitian	192
B. Sumber Data	192
1. Data Primer	193
2. Data Sekunder	194
3. Data Tertier	196
C. Teknik Pengumpulan Data	196
D. Teknik Analisa Data	197
HUKUM KELUARGA <i>MATRILINEAL</i> MINANGKABAU	
<i>PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH</i>	199
A. Hukum Keluarga <i>Matrilineal</i> Minangkabau pada Aspek Perkawinan Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i>	199
1. Perkawinan dalam Keluarga <i>Matrilineal</i> Minangkabau	199
2. Perkawinan dalam Keluarga <i>Matrilineal</i> Minangkabau Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i>	218
B. Hukum Keluarga <i>Matrilineal</i> Minangkabau pada Aspek Tanggungjawab Suami terhadap Istri dan Anak Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i>	241
1. Tanggungjawab Suami terhadap Istri dan Anak dalam Keluarga <i>Matrilineal</i> Minangkabau	241
2. Tanggungjawab Suami terhadap Istri dan Anak dalam Keluarga <i>Matrilineal</i> Minangkabau Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i>	250
C. Hukum Keluarga <i>Matrilineal</i> Minangkabau pada Aspek Terjadinya Perceraian Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i>	270
1. Perceraian dalam Keluarga <i>Matrilineal</i> Minangkabau	270
2. Perceraian dalam Keluarga <i>Matrilineal</i> Minangkabau Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i>	279
D. Hukum Keluarga <i>Matrilineal</i> Minangkabau pada Aspek Harta Pusaka Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i>	286
1. Harta Pusaka dalam Keluarga <i>Matrilineal</i> Minangkabau	286
2. Harta Pusaka dalam Keluarga <i>Matrilineal</i> Minangkabau Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i>	300
PENUTUP	320
A. Kesimpulan	320
B. Rekomendasi	322
DAFTAR KEPUSTAKAAN	324
LAMPIRAN-LAMPIRAN	336

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

Certificate Of Achievement English Proficiency Test.....	336
Sertifikat Arabic Proficiency Test	337
Curriculum Vitae	338



Hak Cipta dan Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PEDOMAN *TRANSLITERASI* ARAB-INDONESIA

Pedoman *Transliterasi* ‘Arab-Latin’ yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pedoman *transliterasi* yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Daftar huruf-huruf ‘Arab’ dan *transliterasi*-nya dengan huruf ‘Latin’ sebagai berikut:

Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ء	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
گ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ک	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	’	<i>Apostrof</i>
ي	Ya	Y	Ye



Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti *vokal*-nya tanpa diberi tanda apapun. Jika *hamzah* (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas *vokal* tunggal atau *monoftong* dan *vokal* rangkap atau *diftong*. *Vokal* tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, *transliterasi*-nya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, *transliterasi*-nya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	<i>Fathah</i> dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*
هَوْلًا : *hauila*

Maddah

Maddah atau *vokal* panjang yang lambangnya berupa *harkat* dan huruf, *transliterasi*-nya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*
رَامَ : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat *harkat fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, *transliterasi*-nya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *harkat sukun*,



transliterasi-nya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al-** serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan **ha** (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam *transliterasi* ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 الْحَجُّ : *al-ḥajj*
 نُؤْمِنُ : *nu''ima*
 أَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf ber-*harkat kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
 عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman *transliterasi* ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, **al-**, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
 الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan *transliterasi* huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:



تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
 النَّوْءُ : *al-nau'*
 سَيِّئٌ : *syai'un*
 عَمَلٌ : *umirtu*

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara *transliterasi* di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīḥal al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf *kapital* (*All Caps*), dalam *transliterasi*-nya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf *kapital* berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (**al-**), maka yang ditulis dengan huruf *kapital* tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syaḥru Ramaḍān al-laḏī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣir al-Dīn al-Ṭūsī-Abū Naṣr al-Farābī-**Al-Gazālī**-Al-Munqiz min al-Ḍalāl



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sering disebut negara kepulauan, karena banyaknya pulau-pulau yang terbentang di perairan Indonesia dan juga dikenal dengan berbagai macam bahasanya, hampir setiap daerah memiliki ciri khas bahasa¹ masing-masing. Begitu juga dengan adat istiadat dan kebudayaan yang ada di Indonesia yang memiliki klan, marga, suku, dan ras yang berbeda-beda. Minangkabau² merupakan salah satu kebudayaan Indonesia yang menganut sistem kekerabatan *matrilinea*³.

¹Bahasa Minangkabau termasuk salah satu anak cabang rumpun bahasa Austronesia. Walaupun ada perbedaan pendapat mengenai hubungan bahasa Minangkabau dengan bahasa Melayu, ada yang menganggap bahasa yang dituturkan masyarakat ini sebagai bagian dari dialek Melayu, karena banyaknya kesamaan kosakata dan bentuk tuturan di dalamnya, sementara yang lain justru menganggap bahasa ini merupakan bahasa mandiri yang berbeda dengan Melayu serta ada juga yang menyebut bahasa Minangkabau merupakan bahasa Proto-Melayu. Lihat Mengantar Simanjuntak, *Aspek Bahasa dan Pengajaran*, (Jakarta: Sarjana Enterprise, 1992). Selain itu dalam masyarakat tutur bahasa Minang itu sendiri juga sudah terdapat berbagai macam dialek bergantung kepada daerahnya masing-masing. Lihat Tamsin Medan, *Bahasa Minangkabau Dialek Kubuang Tigo Balch*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), dan lihat juga Nadra, *Rekonstruksi Bahasa Minangkabau*, (Padang: Andalas University Press, 2006). Pengaruh bahasa lain yang diserap ke-dalam bahasa Minang umumnya dari Sanskerta, Arab, Tamil, dan Persia. Kemudian kosakata Sanskerta dan Tamil yang dijumpai pada beberapa prasasti di Minangkabau telah ditulis menggunakan bermacam aksara diantaranya Dewanagari, Pallawa, dan Kawi. Menguatnya Islam yang diterima secara luas juga mendorong masyarakatnya menggunakan Abjad Jawi dalam penulisan sebelum berganti dengan Alfabet Latin. Meskipun memiliki bahasa sendiri, orang Minang juga menggunakan bahasa Melayu dan kemudian bahasa Indonesia secara meluas. Historiografi tradisional orang Minang, Tambo Minangkabau, ditulis dalam bahasa Melayu dan merupakan bagian sastra Melayu atau sastra Indonesia lama.

²Nama Minangkabau berasal dari dua kata yaitu, *minang* dan *kabau*. Nama itu dikaitkan dengan suatu legenda yang dikenal di dalam tambo. Dari tambo tersebut, konon pada suatu masa ada satu kerajaan asing (biasa ditafsirkan sebagai Majapahit) yang datang dari laut dan akan melakukan penaklukan untuk mencegah pertempuran masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau. Pasukan asing tersebut menyetujui dan menyediakan seekor kerbau yang besar dan *agresif*, sedangkan masyarakat setempat menyediakan seekor anak kerbau yang masih menyusui. Dalam pertempuran, anak kerbau yang masih menyusui tersebut menyangka kerbau besar tersebut adalah induknya, maka anak kerbau itu langsung berlari mencari susu dan menanduk, hingga mencabik-cabik perut kerbau besar tersebut. Kemenangan itu menginspirasi masyarakat setempat memakai nama Minangkabau yang berasal dari ucapan "*Manang Kabau*" (artinya menang kerbau). Lihat Edwar Djamaris, *Tambo Minangkabau*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 220–221. Kisah tambo ini juga dijumpai dalam *Hikayat Raja-raja Pasai* dan juga menyebutkan bahwa kemenangan itu menjadikan negeri yang



Menurut *tambo* yang diterima secara turun temurun, menceritakan bahwa

nenek moyang orang Minangkabau berasal dari keturunan Raja Iskandar Zulkarnain, raja di negeri Rum. Walaupun tambo tersebut tidak tersusun secara *systematis* dan lebih kepada legenda berbanding fakta serta cenderung kepada sebuah karya sastra yang sudah menjadi milik masyarakat banyak.⁴ Tambo Minangkabau adalah suatu karya sastra sejarah, suatu karya sastra yang menceritakan sejarah (asal usul) suku bangsa, asal usul negeri serta adat istiadatnya, yaitu Minangkabau. Karya sastra sejarah ini dapat juga disebut *historiografi tradisional*, penulisan sejarah secara turun-temurun.⁵

Masyarakat Minangkabau merupakan bagian dari masyarakat *Deutro Melayu* (Melayu Muda) yang melakukan *migrasi* dari daratan China Selatan ke-pulau Sumatera sekitar 2500/2000 tahun yang lalu. Diperkirakan kelompok masyarakat ini masuk dari arah timur pulau Sumatera, menyusuri aliran sungai Kampar sampai ke-dataran tinggi yang disebut *darek* dan menjadi kampung

di belukannya bernama *Pariangan* menggunakan nama tersebut. Lihat A.H. Hill, *Hikayat Raja-raja Pasai*, (London: Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1990). Penggunaan nama Minangkabau juga digunakan untuk menyebut sebuah nagari, yaitu Nagari Minangkabau, yang terletak di Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

³ **Matrilineal Minangkabau** adalah suatu sistem kekerabatan *matrilineal* yang berlaku di Minangkabau sejak dulu kala sampai saat ini. Penerapan sistem *matrilineal* di Minangkabau bisa saja berbeda dalam beberapa aspek dibandingkan penerapan sistem ini di beberapa wilayah lainnya di dunia. Pada masa kini, sistem yang dianggap lebih tua ini sudah langka di dunia. Ada beberapa etnis di dunia yang masih menerapkan sistem ini, di antaranya etnis Mosou di Provinsi Yunnan dan Sichuan di China bagian Selatan, etnis Kalash di wilayah lembah Chitral, Pakistan bagian Utara, perempuan Meghalaya di India, dan beberapa suku lainnya. Lihat www.republika.co.id, 14-10-2012. Diakses 22-12-2018. Lihat juga <http://id.m.wikipedia.org>. Diakses 22-12-2018. Penganut adat *matrilineal* yaitu: Suku Indian di Apache Barat, Suku Khasi di Meghalaya, India Timur Laut, Suku Nakhi di Provinsi Sichuan dan Yunnan, Tiongkok, Penduduk asli Amerika Serikat: suku Navajo, sebagian besar Suku Pueblo, Suku Crow, dll., dan beberapa suku kecil di kepulauan Asia Pasifik. Masyarakat Minangkabau yang menganut sistem *matrilineal* sudah sejak lama menjadi teka-teki yang sering membuat orang luar mengambil kesimpulan yang keliru terhadap suku bangsa ini. Di satu sisi masyarakat Minangkabau dipandang sangat menganut Islam yang menganut sistem kekeluargaan *patrilineal*, sementara di sisi lain mereka tetap kukuh dengan *matrilineal*-nya. Lihat Tsuyoshi Kato, *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2005), h. 35

⁴ Akbar Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Padang: PT. Grafika Jaya Sumbar, 2015), h. 23

⁵ Ewar Djamaris, *op. cit.*, h. 1



alamatan orang Minangkabau. Beberapa kawasan *darek* ini kemudian membentuk

semacam *konfederasi* yang dikenal dengan nama *luhak*, yang selanjutnya disebut

sebagai dengan nama *Luhak Nan Tigo*, yang terdiri dari *Luhak Limo Puluah Koto*,

Luhak Agam, dan *Luhak Tanah Data*.⁶ Pada masa pemerintahan Hindia Belanda,

kawasan *luhak* tersebut menjadi daerah *teritorial* pemerintahan yang disebut

afdeling, dikepalai oleh seorang *residen* yang oleh masyarakat Minangkabau

disebut dengan nama *Tuan Luhak*.⁷

Pertumbuhan dan perkembangan penduduk masyarakat Minangkabau

menyebarkan ke-kawasan *darek* yang lain serta membentuk beberapa kawasan

tertentu menjadi kawasan *rantau*. Konsep *rantau* bagi masyarakat Minangkabau

merupakan suatu kawasan yang menjadi pintu masuk ke-alam Minangkabau.

Rantau juga berfungsi sebagai tempat mencari kehidupan, kawasan perdagangan.

Rantau di Minangkabau dikenal dengan *Rantau Nan Duo* terbagi atas *Rantau di*

Hilia (kawasan Pesisir Timur) dan *Rantau di Mudiak* (kawasan Pesisir Barat).⁸

Awalnya penyebutan orang Minangkabau belum dibedakan dengan orang

Melayu, namun sejak abad ke-19, penyebutan Minangkabau dan Melayu mulai

dibedakan melihat budaya *matrilineal* yang tetap bertahan berbanding *patrilineal*.⁹

⁶ *Ibid.*, h. 24

⁷ *Ibid.*, h. 24

⁸ *Ibid.*, h. 24

⁹ *Patrilineal* adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Kata ini seringkali disamakan dengan *patriarkat* atau *patriarki*, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. *Patrilineal* berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu *pater* yang berarti ayah, dan *linca* yang berarti garis. Jadi, *patrilineal* berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Sementara itu, *patriarkat* berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *pater* yang berarti "ayah", dan *archein* yang berarti memerintah. Jadi, *patriarki* berarti kekuasaan berada di tangan ayah atau pihak laki-laki. Suku yang menganut adat *patrilineal* di Indonesia, yaitu suku Batak, suku Rejang, dan suku Gayo. Adat *patrilineal* lebih umum digunakan kelompok masyarakat dunia dibandingkan *matrilineal* yang lebih jarang penggunaannya. Lihat <http://id.m.wikipedia.org>. Diakses 22-12-2018



yang dianut oleh masyarakat Melayu umumnya. Kemudian pengelompokan ini

terus berlangsung demi kepentingan sensus penduduk maupun politik.¹⁰

Amir Syarifuddin, mengungkapkan bahwa masyarakat Minangkabau sering juga disebut dengan orang Minang¹¹ yang dikenal dengan masyarakat adat *matrilineal*, yaitu masyarakat yang menganut garis keturunan ibu. Anak yang dilahirkan, baik laki-laki maupun perempuan menurut hukum adat sepenuhnya tunduk pada garis keturunan ibunya, bukan garis keturunan bapaknya. Mulai dari suku anak mengikuti suku ibunya, misalnya ibu sukunya Koto dan bapak

¹⁰ *Ibid.*, h. 25

¹¹ **Orang Minangkabau**, yaitu: Minangkabau atau disingkat Minang merujuk pada *entitas* *kultural* dan *geografis* yang ditandai dengan penggunaan bahasa, adat yang menganut sistem kekerabatan *matrilineal*, dan identitas agama Islam. **Secara geografis, Minangkabau** meliputi daratan Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian Utara Bengkulu, bagian Barat Jambi, pantai Barat Sumatera Utara, Barat Daya Aceh, dan Negeri Sembilan di Malaysia. **Lihat P.E de Josselin De Jong, Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia**, (Jakarta: Bhartara, 1990). Dalam percakapan awam, orang Minang seringkali disamakan sebagai orang Padang. Hal ini merujuk pada nama ibu kota provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang. Namun, mereka biasanya akan menyebut kelompoknya dengan sebutan *urang awak* yang dimaksudkan sama dengan orang Minang sendiri. Menurut Ali Akbar Navis, Minangkabau lebih merujuk kepada kultur etnis dari suatu kelompok Melayu yang tumbuh dan besar, karena sistem *monarki*, serta menganut sistem adat yang diwariskan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau *matrilineal*. **Lihat A. Datuak Baruah dan A. Datuak Madjoindo, Tambo Minangkabau dan Adatnya**, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999). Walaupun budayanya sangat kuat diwarnai ajaran agama Islam. Thomas Stamford Raffles, setelah melakukan *ekspedisi* ke-pedalaman Minangkabau tempat kedudukan Kerajaan Pagaruyung menyatakan bahwa Minangkabau ialah sumber kekuatan dan asal bangsa Melayu, yang kelak penduduknya tersebar luas di Kepulauan Timur. Masyarakat Minang bertahan sebagai penganut *matrilineal* terbesar di dunia. Selain itu, etnis ini telah menerapkan sistem *proto-demokrasi* sejak masa pra-Hindu dengan adanya kerapatan adat untuk menentukan hal-hal penting dan permasalahan hukum. Prinsip adat Minangkabau tertuang dalam pernyataan "*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*" (Adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Alquran), yang berarti adat berlandaskan ajaran Islam. Orang Minangkabau sangat menonjol pada bidang perniagaan, sebagai *profesional* dan *intelektual*. Mereka merupakan pewaris dari tradisi lama Kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang gemar berdagang dan *dinamis*. Lebih dari separuh jumlah keseluruhan anggota masyarakat ini berada dalam perantauan. Minang perantauan pada umumnya bermukim di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Medan, Batam, Palembang, Bandar Lampung, dan Surabaya. Di luar wilayah Indonesia, etnis Minang terkonsentrasi di Kuala Lumpur, Seremban, Singapura, Jeddah, Sydney, dan Melbourne. Masyarakat Minang memiliki masakan khas yang populer dengan sebutan masakan Padang yang sangat digemari di Indonesia bahkan mancanegara.

¹² **Suku dalam tatanan Masyarakat Minangkabau** merupakan basis dari organisasi sosial, sekaligus tempat pertarungan kekuasaan yang *fundamental*. Pengertian awal kata *suku* dalam Bahasa Minang dapat bermaksud *satu perempat*, sehingga jika dikaitkan dengan pendirian suatu nagari di Minangkabau, dapat dikatakan sempurna apabila telah terdiri dari komposisi empat suku yang mendiami kawasan tersebut. Selanjutnya, setiap suku dalam tradisi Minang, diurut dari garis keturunan yang sama dari pihak ibu, dan diyakini berasal dari satu keturunan nenek moyang yang



1. Diarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sukunya Tanjung, anak sukunya Koto sesuai dengan garis suku ibunya, begitu seterusnya bila anak punya keturunan, anak-anaknya mengikuti garis keturunan ibunya, sampai pada kehidupan anak itu sehari-hari hidup dalam rumah dan keluarga ibunya.¹³

M. Nasroen mengatakan bahwa adat Minangkabau itu asli, karena keturunannya diambil berdasarkan garis ibu atau *matrilineal*. Hal tersebut dengan sendirinya membuktikan betapa tua adat Minangkabau itu. Sebab, yang asli selalu tua dan tidak mencontoh dari luar. Koentjaraningrat dan Wilken juga mengatakan bahwa sistem *matrilineal* lebih tua daripada sistem *patrilineal*, karena pada sistem *patrilineal* yang sekarang terdapat di Indonesia masih terdapat sisa-sisa dari sistem *matrilineal*.¹⁴ Maluku adatnya *patrilineal*, ketika suatu keluarga tidak memiliki keturunan, ditempuh sistem “mengambil anak”. Anak yang menurut keturunan ayah, dinyatakan menurut syarat-syarat tertentu menjadi anggota keluarga ibunya yang akan melanjutkan keturunan ibunya. Penyebab sistem *matrilineal* diganti kedudukannya oleh *patrilineal*, karena di daerah-daerah itu sistem *matrilineal* tidak sejiwa dengan adatnya.¹⁵

sama. Lihat A. Datuak Batuah dan A. Datuak Madjoindo, *Tambo Minangkabau dan Adatnya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999). Selain sebagai basis politik, suku juga merupakan basis dari unit-unit ekonomi. Kekayaan ditentukan oleh kepemilikan tanah keluarga, harta, dan sumber-sumber pemasukan lainnya yang semuanya itu dikenal sebagai harta pusaka. Harta pusaka merupakan harta milik bersama dari seluruh anggota kaum-keluarga. Harta pusaka tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat menjadi milik pribadi. Harta pusaka semacam dana jaminan bersama untuk melindungi anggota kaum-keluarga dari kemiskinan. Jika ada anggota keluarga yang mengalami kesulitan atau tertimpa musibah, maka harta pusaka dapat digadaikan. Suku terbagi-bagi ke dalam beberapa cabang keluarga yang lebih kecil atau disebut *payuang* (payung). Adapun unit yang paling kecil setelah *sapayuang* disebut *saparuik*. Sebuah *paruik* (perut) biasanya tinggal pada sebuah Rumah Gadang secara bersama-sama. Lihat P.E de Josselin De Jong, *Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia*, (Jakarta: Bhartara, 1990).

¹³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), h. 182

¹⁴ Latief Datuak Bandaro, *Etnis dan Adat Minangkabau Permasalahan dan Masa Depannya*, Bandung: Angkasa, 2002), h. 43

¹⁵ M. Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 34



Berbeda dengan Minangkabau, *matrilineal* merupakan suatu sistem yang

sempurna dan meliputi seluruh sisi kehidupan seseorang dan masyarakat, sehingga sistem *matrilineal* berlaku sampai sekarang.¹⁶ Untuk mencapai kekerabatan yang sempurna, tentu menghendaki proses yang lama dan sempurna oleh pengalaman berabad-abad lamanya, apalagi yang akan contoh tidak ada pula.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Minangkabau merupakan suatu daerah di Indonesia masyarakatnya menganut sistem *matrilineal*, yaitu garis keturunan (keturunan dalam artian hidup berkelompok dan menetap) atau kekerabatan kepada ibu yang identik dengan bernasab ke-ayah dan bersuku ke-ibu mulai dari lingkungan yang kecil dari keluarga sampai kepada yang lebih besar seperti nagari¹⁷. Sistem garis keturunan atau kekerabatan kepada ibu memiliki khas tersendiri yaitu setiap anak yang lahir, baik laki-laki maupun

¹⁶ Bertahannya sistem *matrilineal* Minangkabau terasa istimewa, tidak hanya karena banyak ilmuwan yang meramalkan keruntuhannya, melainkan juga karena Sumatera Barat bukan sebuah daerah terbelakang yang terasing dari pengaruh-pengaruh luar. Tyuyoshi Kato, *op. cit.*, h. 12

¹⁷ Daerah Minangkabau terdiri atas banyak nagari. Nagari ini merupakan daerah otonom dengan kekuasaan tertinggi di Minangkabau. Tidak ada kekuasaan sosial dan politik lainnya yang dapat mencampuri adat pada satu nagari. Nagari yang berbeda akan mungkin sekali mempunyai *tipikal* adat yang berbeda. Tiap nagari dipimpin oleh sebuah dewan yang terdiri dari pemimpin suku dari semua suku yang ada di nagari tersebut. Dewan ini disebut dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Hasil musyawarah dan mufakat dewan inilah suatu keputusan dan peraturan yang mengikat untuk nagari itu dihasilkan. Faktor utama yang menentukan dinamika masyarakat Minangkabau adalah terdapatnya kompetisi yang konstan antar nagari, kaum-keluarga, dan individu untuk mendapatkan *status* dan *prestise*. Oleh karenanya, setiap kepala kaum akan berlomba-lomba meningkatkan *prestise* kaum-keluarganya dengan mencari kekayaan (berdagang) serta menyekolahkan anggota kaum ke tingkat yang paling tinggi. Pembentukan suatu nagari sejak dahulunya telah dikenal dalam istilah pepatah yang ada pada masyarakat adat Minang itu sendiri yaitu “*Dari Taratak manjadi Dusun, dari Dusun manjadi Koto, dari Koto manjadi Nagari, Nagari ba Panghulu*”. Jadi, dalam sistem administrasi pemerintahan di kawasan Minang dimulai dari *struktur* terendah disebut dengan *Taratak*, kemudian berkembang menjadi *Dusun*, kemudian berkembang menjadi *Koto* dan kemudian berkembang menjadi *Nagari*. Biasanya setiap nagari yang dibentuk minimal telah terdiri dari 4 suku yang mendominasi kawasan tersebut. Lihat A. Datuak Batuah dan A. Datuak Madjoindo, *Tambo Minangkabau dan Adatnya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999). Selanjutnya sebagai pusat administrasi nagari tersebut dibangunlah sebuah *Balai Adat* sekaligus sebagai tempat pertemuan dalam mengambil keputusan bersama para penghulu di nagari tersebut.



perempuan dalam perkawinan harus mengikuti klan atau suku ibunya dan suku itu akan melekat pada diri seseorang selama-lamanya.

Sistem *matrilineal* (menarik keturunan atau kekerabatan melalui garis perempuan), seperti yang dipraktekkan secara *tradisional* oleh orang Minangkabau di Sumatera Barat adalah satu di antara dua tipe sistem keturunan *unilineal* (menarik keturunan melalui satu garis tunggal). Tipe sistem *unilineal* kedua yaitu sistem *patrilineal*, seperti yang diamalkan suku Batak, suku Rejang, dan suku Gayo dan lain sebagainya. Sementara itu, orang Jawa dan orang Dayak menarik keturunan melalui dua garis, yaitu garis pria dan garis wanita. Tipe ini disebut sistem *non-unilineal*, atau *sistem kognatik*. Pelaksanaan tipe *non-unilineal* Jawa berbeda dari tipe *non-unilineal* Dayak.¹⁸

Sistem keturunan *unilineal*, baik yang *matrilineal* maupun yang *patrilineal*, terdapat tiga prinsip yang bisa dikatakan secara teoritis berlaku universal. Prinsip-prinsip tersebut adalah: **Pertama**, wanita bertanggungjawab memelihara anak-anak; **Kedua**, pria dewasa punya wewenang terhadap wanita dan anak-anak; dan **Ketiga**, perkawinan *eksogami*-kelompok merupakan satu 'keperluan'. Ciri-ciri khas sistem *matrilineal* yang membedakan sistem ini dari sistem *patrilineal* adalah: **Pertama**, keturunan ditelusuri melalui garis wanita; **Kedua**, anggota kelompok keturunan direkrut melalui garis wanita; dan **Ketiga**, pewarisan harta dan suksesi politik disalurkan melalui garis wanita. Sedangkan ciri-ciri sistem *patrilineal* adalah sebaliknya, semuanya berdasarkan garis lelaki.¹⁹

1. Diarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarung mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸ Schneider, D.M. dan K. Gough, *Matrilineal Kinship*, Penerjemah: Arief Rahman, (Jakarta: Daya Press, 1994), h. 5

¹⁹ *Ibid.*, h. 5



Keturunan dan kekerabatan menurut orang di luar lingkungan *antropologi*,

kedua istilah ini tidak penting perbedaannya. Schneider dan Gough membedakan pengertian 'keturunan' dan 'kekerabatan'. Keturunan atau *descent* adalah garis hubungan darah antara seseorang dengan orang lain yang diakui masyarakat. Garis hubungan darah tersebut memungkinkan untuk mengetahui mana orang-orang yang seketurunan dengannya, dan mana yang bukan. Prinsip garis keturunan terutama berfungsi dalam pembentukan kelompok-kelompok sosial, khususnya dalam masyarakat *unilineal tradisional*. Satu kelompok sosial yang terbentuk atas dasar prinsip keturunan (*descent group*) adalah satu kelompok yang anggotanya merasa seketurunan atau sedarah. Garis keturunan itu ditarik dari seorang nenek moyang yang sudah meninggal. Garis keturunan, seperti garis kekerabatan, terutama ditentukan oleh prinsip kultural, bukan prinsip biologis.²⁰

Kekerabatan atau *kinship*, mengacu pada sejumlah status (posisi atau kedudukan sosial), dan saling hubungan antar status sesuai dengan prinsip *kultural* yang berlaku. Prinsip hubungan kekerabatan ini terutama digunakan untuk menarik garis pemisah antara kaum kerabat (*kin*) dan bukan kaum-kerabat (*non-kin*); menentukan hubungan kekerabatan seseorang dengan yang lain secara tepat; mengukur jauh/dekatnya hubungan kekerabatan seseorang dengan yang lain; dan menentukan bagaimana seseorang harus berperilaku terhadap seseorang yang lain sesuai dengan aturan-aturan kekerabatan yang disepakati bersama.²¹

Orang-orang yang seketurunan atau sedarah pada orang Minangkabau, menyebut diri mereka ber-*dunsanak*. *Dunsanak* adalah kelompok orang-orang

²⁰ *Ibid.*, h. 2

²¹ *Ibid.*, h. 2



keturunan. Pertalian darah ini ditarik melalui garis perempuan. Seseorang (*ego*)

ber-*dunsanak* dengan saudara-saudara satu ibu, dengan saudara-saudara ibu, dengan saudara-saudara nenek, dengan anak-anak saudara perempuan ibu, dan sejenisnya. Orang-orang yang ber-*dunsanak* ini membentuk kelompok-kelompok keturunan, yang dalam bahasa Inggris disebut *descent group*. Kelompok keturunan di Minangkabau seperti ini beragam tingkatannya sesuai dengan jarak hubungan keturunan seseorang dengan yang lain. Kelompok keturunan yang paling besar adalah *suku*, di bawahnya adalah *payuang*, kemudian *paruik*, *rumah gadang*, dan seterusnya sampai ke kelompok terkecil yang disebut *samande*.²²

Sementara itu, kerabat adalah para *urang sumando* dan sepupu yang terjalin melalui garis laki-laki. Di Minangkabau, seseorang (*ego*) adalah berkerabat dengan para suami dan isteri dari *dunsanak*-nya. Mereka itu disebut golongan *urang sumando*. Termasuk pula ke dalam golongan kerabat adalah anak-anak dari hasil perkawinan mereka, kerabat *dunsanak* dari ayah dari ibu dan bapak. Status terakhir ini agak membingungkan bagi mereka yang kurang mengenal masyarakat *matrilineal* yang juga termasuk kerabat adalah *dunsanak* dari bapak. ‘*Urang sumando*’, yaitu suami dari perempuan Minangkabau yang lazimnya berbeda suku dengannya, atau orang di luar suku Minangkabau yang kedudukannya diberi tempat tersendiri dan dengan penghormatan tersendiri.²³

Urang Sumando menurut istilah adat “*Dijapuik dijangkau*,²⁴ dinikahkan di *surau nan bagonjong satu, dihadapan saksi nan baduo, nan dipati jo doa*,²⁵

²² *Ibid.*, h. 3

²³ *Ibid.*, h. 3

²⁴ *Dijapuik dijangkau*, artinya suami yang disebut “*orang sumando*” dipinang secara adat oleh pihak keluarga perempuan, setelah menikah diajak secara adat tinggal bersama istrinya di rumah dan



dimasukkan ka rumah nan gadang,²⁶ kabiliak nan dalam,²⁷ kakunci nan taguah,²⁸

kok kaciak dibari namo, lah gadang dibari gala²⁹”.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kaum Minangkabau terdiri dari dua bentuk yaitu: **Pertama**, kekerabatan dalam suku, terjadi karena sistem *matrilineal* yang dianut orang Minangkabau. Contoh: ibu-anak, *mamak-kamanakan*, dsb. **Kedua**, kekerabatan luar suku, terjadi karena adanya perkawinan. Contoh: *sumando-pasumandan*, *minantu-mintuo*, *induk bako-anak pisang*, dan sebagainya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipinjam atau disebarkan kepada orang lain.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan keluarga perempuan/istri, dan selanjutnya di rumah istri itulah suami istri dan anak keturunannya tinggal seterusnya. Penjemputan suami adalah ke rumah keluarga suami yang dilepas secara adat oleh pihak keluarga suami.

²⁵ *Dinikahkan di surau nan bagonjong satu, dihadapan saksi nan baduo, nan dipati jo doa*, artinya suami istri harus dinikahkan secara syariat Islam yang dahulunya lazim dilaksanakan di Masjid atau Mushala yang masa lalu punya satu kubah, yang memenuhi syarat rukun nikah seperti wali nikah dan sekurang-kurangnya dua orang saksi sampai diakhiri dengan doa khusus buat pengantin, hal seperti inilah nantinya disebut dengan “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*”, karena antara adat dan *syara’* diranah Minang bagaikan roh dengan tubuh, bagaikan daging dengan tulang, yaitu dua faktor yang tidak dapat dipisahkan dan hanya dapat dibedakan.

²⁶ *Dimasukkan ka rumah nan gadang*, artinya pihak suami tinggal hidup bersama di rumah istri, yang dahulunya berupa rumah adat yang bergonjong khas ala adat Minangkabau yang lazim disebut dengan rumah gadang (rumah besar yang biasanya didiami oleh beberapa kepala keluarga), yang berarti pihak istri telah punya rumah dan tempat tinggal tersendiri, sehingga tidak perlu lagi memikirkan rumah tempat tinggal kecuali suami istri itu ingin lebih nyaman dan berkembang, sehingga membuat rumah sendiri.

²⁷ *Kabiliak nan dalam*, artinya suami istri diberi kamar khusus tersendiri di rumah gadang, terutama bila istri mempunyai saudara perempuan lain yang tentunya harus diberi kamar tersendiri, berarti dalam satu rumah gadang, bisa terdapat beberapa kepala keluarga.

²⁸ *Kakunci nan taguah*, artinya *biliak* atau kamar diberi kunci yang teguh dan kuat, kuncinya hanya dipegang oleh suami istri saja, karena mungkin banyak barang rahasia yang disimpan oleh suami istri dalam kamarnya.

²⁹ *Kok kaciak dibari namo, lah gadang dibari gala*, artinya pihak suami yang disebut orang *sumando* tentu waktu kecilnya sudah diberi nama oleh orang tuanya, misal Ahamad, namun setelah dia menikah diberi gelar adat oleh *datuk kepala sukunya* dengan gelar adat seperti Sutan, Sidi dan lain-lain, termasuk bila pihak suami berasal dari daerah luar ranah Minang, namun gelar itu tidak dapat dipusakakan kepada keluarganya didaerah asalnya, sebab gelar itu hanya terbatas untuk dirinya semata, hal itulah disebut dengan istilah adat “*sahabih lagu sahabih nyanyi*”, yang perlu digaris bawah bahwa seorang suami itu harus dipanggil dengan gelar adat oleh pihak keluarga istri dan masyarakat adat lainnya, bila tidak demikian maka pihak keluarga istri disebut dengan istilah tidak beradat, merupakan ungkapan yang sangat tidak bagus didengar oleh orang Minang, bahkan bisa berakibat pihak suami dilarang pulang ke rumah istrinya oleh pihak keluarga suami, karena dianggap tidak sopan dan tidak saling menghargai, tentunya berakibat pada kerukunan kehidupan rumah tangga akan terganggu, karena untuk membawa balik suami pulang ke rumah istrinya seperti sedia kala haruslah melalui acara hukum adat dengan melakukan jemput ulang kembali.



Masyarakat Minangkabau semuanya punya suku, tidak ada orang

Minangkabau yang tidak punya suku, pada dasarnya tidak harus disebutkan di akhir namanya, sebagaimana yang lazim disebutkan sebagai identitas diri pada suku masyarakat lainnya, seperti masyarakat daerah Sumatera Utara yang pada dasarnya menurut ketentuan hukum adat menganut azaz *patrilineal*, yang berarti mengambil garis keturunan dari pihak bapak, yang lazimnya mencantumkan nama suku di ujung namanya,³⁰ dan tentu berbeda pula dengan masyarakat yang menganut azaz hukum *bilateral*, yang menarik garis keturunan dari ibu dan bapak secara tidak terpisahkan, seperti masyarakat Jawa dan lain sebagainya.³¹

Suku merupakan suatu kesatuan masyarakat bahwa anggota- anggotanya satu sama lain merasa berhubungan dalam pertalian darah dilihat dari perempuan yang menurunkan mereka. Suku di Minangkabau pada dasarnya ada 4 (empat), yaitu *Koto*, *Piliang*, *Bodi*, dan *Caniago*. Seiring berkembangnya zaman dan semakin banyaknya penduduk, maka suku-suku tersebut dibagi-bagi, hingga masing-masing suku mempunyai cabang.³²

Setiap suku di Minangkabau punya pimpinan yang disebut dengan “*datuk*”, di bawah datuk ada lagi “*mamak*” yang kekuasaannya terbatas pada anggota keluarga sekelompok anggota suku, seperti seisi “*rumah gadang*”, yaitu rumah bergonjong yang merupakan rumah adat, tempat beberapa kepala keluarga hidup bersama yang terdiri dari beberapa kamar keluarga.³³ Gelar-gelar adat,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2001), h. 41

³¹ *Ibid.*, h. 41

³² Hairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 16

³³ Rumah adat Minangkabau disebut dengan Rumah Gadang, yang biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk dalam suku tersebut secara turun temurun. Lihat Elizabeth E.



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil penelitian, yang telah dipublikasikan dalam media cetak atau elektronik, tanpa izin dari UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil penelitian, yang telah dipublikasikan dalam media cetak atau elektronik, tanpa izin dari UIN Suska Riau.

seperti penghulu, datuak, mamak dan lainnya merupakan gelar yang tidak berwujud itu disebut dengan istilah “*sako*”, setiap “*sako*” merupakan milik suku tertentu, dan setiap “*sako*” berakibat hukum terhadap benda tanah adat yang disebut dengan “*pusako*” artinya berupa tanah (benda berwujud). Kedua kata itu sering dirangkai sebutannya dengan istilah “*sako jo pusako*”, artinya istilah adat yang menjadi ciri khas suatu suku yang berakibat langsung pada pemilikan tanah adat, istilah tanah adat ini milik suku dengan datuknya.³⁴

Graves, *Asal Usul Elite Minangkabau Modern: Respons terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007). Rumah adat ini dibuat berbentuk empat persegi panjang dan dibagi atas dua bagian muka dan belakang. Lihat Azinar Sayuti dan Rifai Abu, *Sistem Ekonomi Tradisional sebagai Perwujudan Tanggapan Aktif Manusia terhadap Lingkungan Daerah Sumatera Barat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1995), h. 202. Umumnya berbahan kayu, dan sepiintas kelihatan seperti bentuk rumah panggung dengan atap yang khas, menonjol seperti tanduk kerbau yang biasa disebut *gonjong* dan dahulunya atap ini berbahan ijuk sebelum berganti dengan atap seng. Lihat Ali Akbar Navis, *Cerita Rakyat dari Sumatera Barat 3*, (Jakarta: Grasindo, 1992). Di halaman depan Rumah Gadang, biasanya didirikan dua sampai enam buah *Rangkang* yang digunakan sebagai tempat penyimpanan padi milik keluarga yang menghuni Rumah Gadang tersebut. Hanya kaum perempuan bersama suaminya beserta anak-anak yang menjadi penghuni Rumah Gadang, sedangkan laki-laki kaum tersebut yang sudah beristri, menetap di rumah istrinya. Jika laki-laki anggota kaum belum menikah, biasanya tinggal di Surau. Surau biasanya dibangun tidak jauh dari kompleks Rumah Gadang tersebut, selain berfungsi sebagai tempat ibadah, juga berfungsi sebagai tempat tinggal lelaki dewasa yang belum menikah. Sehubungan dalam budaya Minangkabau, tidak semua kawasan boleh didirikan Rumah Gadang. Hanya pada kawasan yang telah berstatus nagari saja rumah adat ini boleh didirikan. Oleh karenanya di beberapa daerah rantau Minangkabau seperti Riau, Jambi, Negeri Sembilan, pesisir barat Sumatera Utara dan Aceh, tidak dijumpai rumah adat bergonjong.

³⁴ **Penghulu** atau biasa yang digelar dengan datuak, merupakan kepala kaum keluarga yang diangkat oleh anggota keluarga untuk mengatur semua permasalahan kaum. Penghulu biasanya seorang laki-laki yang terpilih di antara anggota kaum laki-laki lainnya. Setiap kaum-keluarga akan memilih seorang laki-laki yang pandai berbicara, bijaksana, dan memahami adat untuk menduduki posisi ini. Hal ini dikarenakan ia bertanggung jawab mengurus semua harta pusaka kaum, membimbing kemenakan, serta sebagai wakil kaum dalam masyarakat nagari. Setiap penghulu berdiri sejajar dengan penghulu lainnya, sehingga dalam rapat-rapat nagari semua suara penghulu yang mewakili setiap kaum bernilai sama. Seiring dengan bertambahnya anggota kaum, serta permasalahan dan konflik intern yang timbul, maka kadang-kadang dalam sebuah keluarga posisi kepenghuluan ini dipecah menjadi dua. Atau sebaliknya, anggota kaum yang semakin sedikit jumlahnya, cenderung akan menggabungkan gelar kepenghuluannya kepada keluarga lainnya yang sesuku. Hal ini mengakibatkan berubah-ubahnya jumlah penghulu dalam suatu nagari. Memiliki penghulu yang mewakili suatu kaum dalam rapat nagari, merupakan suatu *prestise* dan harga diri, sehingga setiap kaum akan berusaha sekuatnya memiliki penghulu sendiri. Kaum-keluarga yang gelar kepenghuluannya sudah lama *terlipat* (tidak ada), akan berusaha membangkitkan kembali posisinya dengan mencari kekayaan untuk "membeli" gelar penghulunya yang telah lama terbenam. Bertegak penghulu memakan biaya cukup besar, sehingga tekanan untuk menegakkan penghulu selalu muncul dari keluarga kaya. Lihat Elizabeth E. Graves, *op. cit.*, h. 25



Perkawinan³⁵ di Minangkabau diatur oleh syarak dan adat. Perkawinan

menurut syarak (disebut *kawin gantuang*) dianggap belum selesai, untuk lebih jelasnya sebagaimana uraian sebagai berikut: **Pertama**, perkawinan dalam suku nagari yaitu: Bentuk perkawinan yang lebih dianjurkan di Minangkabau. Sedangkan yang lebih ideal adalah perkawinan antar keluarga terdekat, seperti menikahi anak *mamak* (*pulang ka-mamak*) atau menikahi *kamanakan* bapak (*pulang ka-bako*). **Kedua**, perkawinan luar suku, yaitu: Menikah dengan orang non-Minangkabau. Perkawinan dengan perempuan dari luar suku Minangkabau tidak disukai, karena bisa merusak struktur adat dan si anak tidak akan mempunyai suku. Sebaliknya, perkawinan dengan laki-laki di luar suku Minangkabau tidak dipermasalahkan, karena tidak merusak struktur adat dan anak tetap mempunyai suku dari ibunya.³⁶

³⁵ **Perkawinan** dalam adat budaya Minangkabau merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan, dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru pelanjut keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yakni pihak keluarga istrinya. Sementara bagi keluarga pihak istri, menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas Rumah Gadang mereka. Dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau, biasa disebut *baralek*, mempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan. Dimulai dengan *maminang* (meminang), *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin pria), sampai *basandiang* (bersanding di pelaminan). Setelah *maminang* dan muncul kesepakatan *manantuan hari* (menentukan hari pernikahan), maka kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Islam yang biasa dilakukan di masjid, sebelum kedua pengantin bersanding di pelaminan. Pada nagari tertentu setelah *ijab kabul* di depan penghulu atau *tuan kadi*, mempelai pria akan diberikan gelar baru sebagai panggilan pengganti nama kecilnya. Lihat Soewardi Idris, *Sekitar Adat Minangkabau*, (Jakarta: Kulik-Kulik Alang, 2004). Kemudian masyarakat sekitar akan memanggilnya dengan gelar baru tersebut. Gelar panggilan tersebut biasanya seperti *sutan*, *bagindo* atau *sidi* (*sayyidi*) di kawasan Pesisir Pantai. Sementara itu di kawasan Luhak Limo Puluah Koto, pemberian gelar ini tidak berlaku.

³⁶ **Sistem adat Minangkabau** menurut tambo pertama kali dicetuskan oleh dua orang bersaudara, Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang. **Datuk Katumanggungan** mewariskan sistem adat Koto Piliang yang *aristokratis*, sedangkan **Datuk Parpatih Nan Sabatang** mewariskan sistem adat Bodi Caniago yang *egaliter*. Dalam perjalanannya, dua sistem adat yang dikenal dengan *kelarasan* ini saling isi mengisi dan membentuk sistem masyarakat Minangkabau. Dalam masyarakat Minangkabau, ada tiga pilar yang membangun dan menjaga keutuhan budaya serta adat istiadat. Mereka adalah alim ulama, cadik (cerdik) pandai, dan ninik mamak, yang dikenal dengan istilah "*Tungku Tigo Sajarangan*". Ketiganya saling melengkapi dan bahu membahu dalam posisi yang sama tingginya. Dalam masyarakat Minangkabau yang *demokratis* dan *egaliter*, semua urusan masyarakat dimusyawarahkan oleh ketiga unsur itu secara mufakat. Lihat L.C. Westenank, *De Minangkabausche Nagari*, Penerjemah: Muhammad Hamdi, (Bandung: Jaya Abadi, 1998), h. 59



Ketiga, perkawinan terlarang (*perkawinan pantang*), yaitu: Perkawinan

yang dilarang sesuai syariat Islam, seperti menikahi ibu, ayah, saudara, anak saudara seibu dan seapak, dll. Perkawinan yang merusak sistem adat, yaitu:

Pertama, menikahi orang yang setali darah menurut garis ibu, orang sekaum atau orang sesuku. *Kedua*, perkawinan yang dilarang untuk memelihara kerukunan sosial, seperti menikahi orang yang diceraikan kerabat, memadu perempuan yang sekerabat, menikahi anak tiri saudara kandung, dan menikahi orang yang dalam pertunangan. Orang yang tetap melakukan perkawinan terlarang ini akan diberi sanksi, misalnya membubarkan perkawinan itu, diusir dari kampung, atau hukum denda dengan meminta maaf pada semua pihak pada suatu perjamuan dengan memotong seekor atau dua ekor ternak.³⁷

Prinsip dalam sistem keturunan *matrilineal* adalah: **Pertama**, harus dicarinya jodoh di luar kelompok keturunan. Prinsip ini bisa diperdebatkan, baik tentang asal mulanya, maupun kesahihan sifat *universal*-nya. Dalam tulisan ini, prinsip ini dianggap saja sebagai hal yang ‘benar’, karena kawin dengan anggota kelompok yang berarti kawin dengan *dunsanak*, atau ‘saudara’, menjadi *incest*. Perkawinan *incest* pada orang Minangkabau tidak seragam batasannya. Pada sebagian nagari, seseorang tidak boleh kawin dengan anggota satu suku dan pada nagari yang lain, orang boleh kawin dengan anggota satu suku, tapi tidak dengan anggota kelompok yang lebih kecil, yaitu *payuang*. Orang Nagari yang menganut ketentuan yang kedua, mereka boleh kawin dalam lingkungan suku, tapi tidak boleh dalam lingkungan *payuang*. Kelompok *payuang* ini disebut dengan istilah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ *Ibid.*, h. 60



kampung. Jadi, *kampung* adalah kelompok perkawinan, atau *marriage group*.

Prinsip *eksogami* mereka disebut dengan istilah '*eksogami kampung*'.³⁸

Kedua, prinsip yang perlu ditinjau secara khusus pada sistem *matrilineal* adalah bahwa kewajiban, wewenang, dan kontrol atas wanita dan anak-anak dalam suatu kelompok keturunan berada di tangan lelaki dewasa dalam kelompok tersebut. Ini berlaku dalam aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Untuk mengangkatnya, wewenang ini disebut dengan istilah '*wewenang politikal-ekonomi*'.

Pada orang Minangkabau, semua lelaki dewasa, khususnya yang telah berumah tangga, mempunyai wewenang politikal-ekonomi atas kaum wanita dan anak-anak dalam lingkungan *kampung*-nya. Mereka disebut dengan istilah *mamak*, atau *niniak-mamak*. Pihak yang dikuasai, yaitu wanita dan anak-anak, disebut dengan istilah *kamanakan*.³⁹

Secara sosial, wewenang politikal-ekonomi ini diwakilkan oleh para *ninik-mamak* pada salah seorang yang tertua dan berwibawa di antara mereka. Pada tingkat suku, pemegang wewenang ini disebut *penghulu suku*. Pada tingkat *kampung* disebut *datauk kampung*. Pada tingkat kelompok keturunan yang lebih kecil, misalnya kelompok *rumah gadang*, pemegang wewenang ini disebut *mamak*. Para suami atau bapak tidak mempunyai wewenang kekuasaan atas isteri dan anak mereka. Mereka disebut sebagai kelompok *urang sumando*, yaitu orang yang kawin dengan anggota kelompok *suku*, *payuang*, *paruik*, atau *rumah gadang*.

³⁸ Schneider, D.M. dan K. Gough, *op. cit.*, h. 6

³⁹ *Ibid.*, h. 6



tersebut. Wewenang mereka adalah atas *kamanakan*-nya sendiri yang ada di dalam *kampung* mereka.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kedua prinsip tersebut, yaitu seorang lelaki dewasa, di satu pihak harus kawin dengan wanita di luar *kampung*-nya. Namun, di pihak lain, ia berkewajiban menjalankan wewenang politikal-ekonomi atas *kamanakan* yang berada di *kampung*-nya sendiri. *Exogami kampung* dan wewenang politikal-ekonomi para lelaki dewasa, telah menimbulkan ketidakserasian dalam kehidupan sosial, yang secara nyata merupakan masyarakat *matrilineal* dimanapun di muka bumi ini, termasuk di Minangkabau.

Hazairin mengemukakan, pergeseran atau tahapan bentuk perkawinan di Minangkabau ada tiga bentuk yang berimplikasi kepada tanggungjawab suami terhadap istri dan anaknya, yaitu perkawinan bertandang, perkawinan menetap dan perkawinan bebas.⁴¹ **Pertama**, bentuk perkawinan bertandang yaitu didasarkan kepada prinsip *exogami*, dalam arti positif *exogami* merupakan suatu sistem perkawinan bahwa seseorang harus kawin dengan anggota *klan* yang lain, sedangkan dalam arti negatif seseorang dilarang kawin dengan anggota se-*klan*.⁴²

Pada masa dahulu, suami tidak mempunyai tanggungjawab penuh terhadap anak-anak dan istrinya. Tanggungjawab terhadap anak-anak dan istrinya berada di pundak *mamak*.⁴³ Seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan mamaknya daripada dengan ayahnya sendiri, karena dalam kehidupan sehari-hari

⁴⁰ *Ibid.*, h. 7

⁴¹ H. Shahr Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991), Cet. ke-V, h. 14

⁴² Hazairin, *Hendak ke-Mana Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1976), h. 7

⁴³ Jamaris Jamna, *Pendidikan Matrilineal*, (Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2004), Cet. ke-I, h. 6



dia lebih mengenal mamaknya sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap dirinya.⁴⁴

Perkawinan bertandang' bentuk ini, ibulah yang berkuasa penuh terhadap harta benda, pendidikan, dan keserasian dalam keluarga. Untuk dapat mempertahankan sistem ini hanya dengan model *exogami semenda*. Bentuk perkawinan yang *orisinal* di Minangkabau adalah kawin bertandang. Ciri khas perkawinan *bertandang* adalah tidak ada harta bersama seperti dalam fiqh dan undang-undang, karena suami tidak berhak terhadap harta benda isteri dan segala hal yang bersangkutan dengan rumah tangga.⁴⁵

Kedua, bentuk perkawinan menetap yaitu merupakan perkembangan dari bentuk perkawinan pertama, yang dimaksud dengan perkembangan keadaan ialah ketika rumah *gadang* (besar) dipandang tidak lagi mencukupi untuk ditempati, sehingga mereka harus pindah dan membentuk keluarga sendiri dengan mata pencarian dan mengurus harta kekayaan sendiri, selanjutnya akan diwariskan pula kepada anak-anaknya (harta pusaka rendah).⁴⁶

Masuknya ajaran Islam, yang mengajarkan bahwa seorang suami merupakan pemimpin dalam keluarga, harus bertanggungjawab terhadap isteri dan anak-anaknya, membawa perubahan dalam kehidupan rumah tangga. Sebelumnya tanggungjawab terhadap anak berada di tangan mamaknya, secara perlahan berubah ke tangan ayahnya. Begitu juga mamak lebih memperhatikan kehidupan isteri dan anak-anaknya pula. Ayah tidak hanya di rumah pada malam

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴ Edison Piliang dan Nasrun Datuak Marajo Sungut, *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2014), Cet. ke-IV, h. 320

⁴⁵ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), Cet. ke-I, h. 177

⁴⁶ *Ibid.*, h. 178



hari saja, tetapi juga siang hari untuk berkumpul dan memberikan perhatian sepenuhnya untuk anak-anak dan istrinya. Hubungan ayah dengan anak-anak dan isteri semakin dekat, dia menjalankan kewajibannya sebagaimana ajaran agama. Ayah mulai menetap di rumah isteri dan anak-anaknya, seperti ini dinamakan bentuk perkawinan menetap.⁴⁷

Ketiga, bentuk perkawinan bebas, yaitu kebiasaan merantau yang dilakukan oleh laki-laki Minang untuk mencari penghidupan, juga berpengaruh terhadap bentuk perkawinan, bahwa seorang laki-laki Minang yang telah berkeluarga membawa anak-anak dan istrinya ikut merantau. Di daerah rantau mereka menjadi satu keluarga yang mandiri, dan membentuk keluarga inti terdiri dari anak, ibu, dan ayah. Peran ayah semakin dominan dalam keluarga, sehingga peran *mamak* menjadi semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Bentuk perkawinan yang telah membentuk keluarga sendiri terlepas dari kaumnya, dinamakan perkawinan bebas.⁴⁸

Ada kecenderungan bahwa bentuk keluarga masyarakat Minang dari bentuk kolektif telah berubah menuju keluarga inti. (Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak disebut juga dengan *nuclear family*, dan keluarga tidak hanya anggota inti juga kerabat lainnya termasuk struktur *extended family*). Perubahan ini juga membawa pengaruh terhadap hubungan *mamak* kemenakan yang berlangsung selama ini. Selama ini tanggungjawab terhadap anak-anak berada di tangan *mamak*nya, dengan berubahnya bentuk keluarga menjadi keluarga inti, tanggungjawab tersebut beralih kepada ayahnya. Pendidikan dan ekonomi

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁷ Taufik Abdullah, *Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau*, (Jakarta: Pustaka Nusa, 1996), h. 1-24

⁴⁸ *Ibid.*



keluarga sepenuhnya berada di tangan suami atau ayah, sedangkan tanggungjawab mamak tetap terasa pada saat melakukan prosesi perkawinan.⁴⁹

Setelah masuknya pengaruh agama Islam serta pengaruh ekonomi uang yang dibawa Belanda dan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus menerus, maka perubahan tidak dapat dielakkan. Meskipun perubahan telah banyak terjadi, tanggung jawab sosial dan moral *mamak* terhadap anggota kelompok *domestik* dan *samande* tetap merupakan bagian dari prinsip kultural masyarakat Minangkabau. Ini adalah konsekuensi dari prinsip *duo local* yang masih tetap dipegang. *Paralel* dengan itu, tetap pula dipegang teguh prinsip endogami *nagari*.⁵⁰

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, beberapa bentuk perkawinan menurut adat Minang tersebut, ketika terjadi perkawinan seorang suami tinggal di rumah istrinya atau di sekitar lingkungan keluarga istrinya. Anak-anaknya

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Masyarakat Minang merupakan sebagai pemeluk agama Islam, jika ada masyarakatnya keluar dari agama Islam (*murtad*), secara langsung yang bersangkutan juga dianggap keluar dari masyarakat Minang, dalam istilahnya disebut "*dibuang sepanjang adat*". Agama Islam diperkirakan masuk melalui kawasan Pesisir Timur, walaupun ada anggapan dari Pesisir Barat, terutama pada kawasan Pariaman, namun kawasan *Arcat* (Aru dan Rokan), serta Inderagiri yang berada pada Pesisir Timur juga telah menjadi kawasan pelabuhan Minangkabau, dan Sungai Kampar maupun Batang Kuantan berhulu pada kawasan pedalaman Minangkabau. Sebagaimana pepatah yang ada di masyarakat, "*Adat manurun, Syarak mandaki*" (Adat diturunkan dari pedalaman ke-pesisir, sementara agama (Islam) datang dari pesisir ke-pedalaman), Lihat Taufik Abdullah, *Ibid.*, h. 1-24, serta hal ini juga dikaitkan dengan penyebutan "*Orang Siak*" merujuk kepada orang-orang yang ahli dan tekun dalam agama Islam, masih tetap digunakan di dataran tinggi Minangkabau. Lihat Syamsu As dan Muhammad Syamsu As, *Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996). Sebelum Islam diterima secara luas, masyarakat Minangkabau dari beberapa bukti *archeologis* menunjukan pernah memeluk agama Buddha terutama pada masa kerajaan Sriwijaya, Dharmasraya, sampai pada masa-masa pemerintahan Adityawarman dan anaknya Ananggawarman. Kemudian perubahan struktur kerajaan dengan munculnya Kerajaan Pagaruyung yang telah mengadopsi Islam dalam sistem pemerintahannya, walau sampai abad ke-16, *Suma Oriental* masih menyebutkan dari tiga raja Minangkabau hanya satu yang telah memeluk Islam. Kedatangan Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piobang dari Mekah sekitar tahun 1803, memainkan peranan penting dalam penegakan hukum Islam di pedalaman Minangkabau. Walau pada saat bersamaan muncul tantangan dari masyarakat setempat yang masih terbiasa dalam tradisi adat, dan puncak dari konflik ini muncul Perang Padri sebelum akhirnya muncul kesadaran bersama bahwa *adat berasaskan* Alquran. Lihat Sjafrudin Aboe Nain, *Memorie Tuanku Imam Bonjol (Terjemahan)*, (Padang: PPIM, 2004).



akan mengikuti suku ibunya berdasarkan sistem *matrilineal* dan bukan suku ayahnya, sedangkan suku suami tersebut tetap seperti sukunya semula, dengan arti kata dia tidak masuk ke dalam suku istrinya.⁵¹

Sistem *matrilineal* terdapat pula pada alam dan alam merupakan sumber dari falsafah adat Minangkabau “*alam takambang jadi guru*” (alam terkembang jadi guru),⁵² yang mengandung (hamil) dan umumnya yang memelihara anak-anak waktu kecil, menyusukan, mengajarnya berjalan, makan, berbicara dan sebagainya adalah si ibu, sedangkan ayah pekerjaannya pada sisi lain dalam penghidupan.⁵³

Bahkan ketika ayah bercerai dengan ibu, terlepas apakah ayah yang mengajukan perkara permohonan cerai talak atau ibu mengajukan gugatan cerai ke-Pengadilan Agama setempat, manakah yang terbaik untuk anak-anaknya. Seandainya anak dibawa oleh ayah, nasibnya kebanyakan tidak akan lebih baik, karena akan berada dalam asuhan ibu tiri, wanita lain yang kasih sayangnya tidak sedalam dan sebesar kasih sayang ibu kandung terhadap anak-anaknya.⁵⁴

Ketika perceraian terjadi, berdasarkan sistem *matrilineal* suami yang berangkat (pergi) dari rumah, sementara isteri dan anak-anaknya tetap tinggal di rumah tersebut. Hal ini juga sangat erat kaitannya dengan sifat dan kodrat perempuan, karena mereka pada umumnya makhluk yang tidak sekuat laki-laki. Adat Minangkabau menetapkan laki-laki yang harus meninggalkan rumah jika

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵¹ Mochtar Naim, *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984), 19

⁵² Erman Hasan, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, (Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1998), h. 4

⁵³ M. Nasroen, *op. cit.*, h. 34

⁵⁴ Pemilikan keluarga sangat penting artinya sebagai jaminan sosial bagi anggota keluarga yang perempuan. Bahkan seorang mamak tidak dapat memutuskan sendiri mengenai soal penggunaan harta pusaka tanpa persetujuan pihak perempuan. Elizabeth E. Graves, *op. cit.*, h. 14



terjadi perceraian. Sebelum seorang suami pergi dari rumah meninggalkan isteri dan anak-anaknya yang bisa berujung kepada perceraian, biasanya diawali dengan pertengkaran dan perselisihan di dalam keluarga tersebut.⁵⁵

Terdapat dua jenis harta pusaka dalam adat Minangkabau, yakni harta pusaka tinggi⁵⁶ dan harta pusaka rendah⁵⁷. Harta pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan dan hanya boleh digadaikan. Menggadaikan harta pusaka tinggi hanya dapat dilakukan setelah dimusyawarahkan di antara petinggi kaum, diutamakan digadaikan kepada suku yang sama, tetapi dapat juga digadaikan kepada suku lain. Tergadainya harta pusaka tinggi karena empat hal: **Pertama**, ‘*gadiah gadang indak balak*’ (perawan tua yang belum bersuami), apabila tidak ada biaya untuk mengawinkan anak wanita, sementara umurnya sudah telat. **Kedua**, ‘*mayik tabujua di ateh rumah*’ (mayat terbujur di atas rumah), apabila tidak ada biaya untuk mengurus jenazah yang harus segera dikuburkan. **Ketiga**, ‘*rumah gadang katirisan*’ (rumah besar bocor), apabila tidak ada biaya untuk renovasi rumah, sementara rumah sudah rusak dan lapuk, sehingga tidak layak huni. **Keempat**, ‘*mambangik batang tarandam*’ (membongkar kayu yang terendam), apabila tidak ada biaya untuk pesta pengangkatan penghulu (*datuak*)

1. Diarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁵ Ida Ariani, “Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia)”, *Jurnal Filsafat*, Vol. 25, No. 1, (Februari, 2015), h. 9

⁵⁶ Harta pusaka tinggi adalah harta milik seluruh anggota keluarga yang diperoleh secara turun temurun melalui pihak perempuan/harta pusaka tinggi merupakan warisan turun-temurun dari leluhur yang dimiliki oleh suatu keluarga atau kaum. Harta ini berupa rumah, sawah, ladang, kolam, dan hutan. Anggota kaum memiliki hak pakai dan biasanya pengelolaan diatur oleh datuk kepala kaum. Hak pakai dari harta pusaka tinggi ini antara lain; hak membuka tanah, memungut hasil, mendirikan rumah, menangkap ikan hasil kolam, dan hak menggembala.

⁵⁷ Harta pusaka rendah merupakan hasil pencaharian seseorang yang diwariskan menurut hukum Islam.



atau biaya untuk menyekolahkan seorang anggota kaum ke tingkat yang lebih tinggi.

Menurut hukum Islam, harta haruslah diturunkan sesuai dengan *faraidh* yang sudah diatur pembagiannya antara pihak perempuan dan laki-laki. Seluruh harta pusaka tinggi di Minangkabau diturunkan kepada anggota keluarga perempuan dari garis keturunan ibu. Hal ini menimbulkan *kontroversi* dari sebagian ulama. Ulama Minangkabau yang paling keras menentang pengaturan harta pusaka tinggi yang tidak mengikuti hukum waris Islam adalah Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syeikh Tahir Jalaluddin Al-Azhari, dan Agus Salim.⁵⁸ Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, imam dan khatib Masjidil Haram Mekkah, menyatakan bahwa harta pusaka tinggi termasuk harta *syubhat*, sehingga haram untuk dimanfaatkan. Dia konsisten dengan pendapatnya itu dan oleh sebab itulah ia tidak mau kembali ke ranah Minang.⁵⁹ Sikap Abdul Karim Amrullah berbeda dengan ulama-ulama di atas. Dia mengambil jalan tengah dengan memfatwakan bahwa harta pusaka tinggi termasuk kategori wakaf, yang boleh dimanfaatkan oleh pihak keluarga namun tidak boleh diperjualbelikan. Bagaimanapun juga, bentuk wakaf yang seperti ini tentu tidaklah sama dengan wakaf yang disyariatkan Islam, karena dalam pemanfaatannya hanya diperuntukkan bagi orang tertentu dengan aturan-aturan adat (bukan aturan Islam). Lagipula adakalanya pusaka tinggi ini bisa digadaikan dalam situasi tertentu.⁶⁰

Asal muasal pusaka tinggi ini secara umum adalah hasil dari pembagian lahan saat membuka lahan sebagai tempat hunian baru. Bahwa lahan tersebut

⁵⁸ Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), h. 23

⁵⁹ *Ibid.*, h. 103

⁶⁰ *Ibid.*, h. 103



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

belum ada pemiliknya. Pada hakikatnya, harta pusaka tinggi merupakan amanah dari leluhur yang tidak diketahui siapa pemilik aslinya, dan diwasiatkan berdasarkan garis keturunan ibu. Harta ini diwariskan layaknya harta pusaka biasa atau warisan biasa, tentu harus jelas siapa yang mewariskannya. Itulah alasan logis harta pusaka tinggi tidak diperbolehkan untuk diwarisi oleh ayah.

Sampai sekarang hukum adat Minang itu sangat kuat mempengaruhi kehidupan masyarakat Minang, disebut dengan ungkapan “*adat lamo pusako usang*” yang artinya adat itu keberadaannya sejak lama dari nenek moyang terdahulu, bahkan semenjak Islam belum masuk ke-ranah Minang, umumnya hukum adat itu tidak tertulis, namun dipatuhi oleh masyarakatnya, selanjutnya akan dipusakakan ke-generasi berikutnya, bahkan sudah sejak lama organisasi hukum adat LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau), melestarikan kehidupan adat Minangkabau, organisasi tersebut terdapat pada setiap Desa atau Kenagarian.⁶¹

Ruang lingkup “*adat basandi syara*” sangat luas, meliputi semua segi kehidupan masyarakat Minangkabau, termasuk berupa benda yang tidak berwujud “*sako*” yang berupa gelar datuk, suku dan lainnya serta yang berwujud seperti tanah “*pusako*”, dan lain-lain, disebut dengan “*pusako*”, semuanya diatur dalam hukum adat yang sudah turun temurun sejak dari nenek moyang terdahulu sebagaimana uraian di atas. Berkaitan dengan ketentuan hukum perkawinan, seperti tidak dibolehkan menikah satu suku, kewajiban suami terhadap istri dan anak, perceraian dan lain-lain. Begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan hukum

⁶¹ “*Kenagari*”, berarti LKAAM terdapat pada tingkat nagari, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten dan Kota, dan pada tingkat Provinsi Sumatera Barat.



kewarisan adat tentang ketentuan “*harta pusako tinggi*” dan “*harta pusako rendah*”. Begitu kompleks tentang persoalan hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau yang perlu dikaji *perspektif maqāshid syarī’ah*.

Telah menjadi sebuah keniscayaan bahwa suatu masyarakat selalu mengalami perubahan yang sering kali diikuti oleh perubahan pola pikir dan tata lailai yang apabila dihubungkan dengan hukum Islam, tidak jarang dapat menimbulkan beragam persoalan. Persoalan-persoalan itu membutuhkan pemecahan, sehingga salah satu sifat dasar Islam yang selalu sesuai untuk setiap sistem masyarakat di mana dan kapan pun mereka berada (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makan*) dapat dibuktikan.

Gambaran kemampuan Islam menjawab setiap persoalan dapat dilakukan dengan mengemukakan prinsip-prinsip syarī’at Islam mengenai tatanan hidup, baik secara *vertikal* antara manusia dengan Tuhannya maupun secara *horizontal* antara sesama manusia dan makhluk lainnya. Dalam pada itu perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam terutama pada periode *modern* telah mengundang sejumlah masalah berkaitan dengan hukum Islam. Untuk itu perlu dikembangkan suatu metode penggalan hukum yang dapat menjamin validitas produk hukum.⁶² Sumber hukum Islam adalah wahyu Allah yang dituangkan dalam Alquran (arab: *al-Qur’ān*) yang bersifat *qadīm* dan suci dan Sunnah Rasulullah *ṣallā Allāh ‘alaih wa sallam*, yang oleh karenanya hukum Islam

1. Diarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarung mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶² Amir Mu’allim, *Ijtihad suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), h. 15



dinyatakan sebagai mendahului dan tidak didahului, mengontrol dan tidak dikontrol oleh masyarakat.⁶³

Menyelesaikan masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam *nas* (Arab: *naṣ*, jamak: *nuṣūṣ*) salah satunya adalah dengan *metode maqāshid syarī'ah*. *Maqāshid* jamak dari kata *maqsud* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan.⁶⁴ *Syarī'ah* adalah sebuah kebijakan (*hikmah*) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Makna *maqāshid syarī'ah* secara istilah adalah *al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam*⁶⁵ yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa pertimbangan *maqāshid syarī'ah* menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam *nas*.

Maqāshid syarī'ah dalam pengertian demikian merupakan upaya untuk mengantisipasi tantangan-tantangan baru yang timbul sebagai akibat perubahan kehidupan. Peran manusia sebagai khalifah Allah dituntut untuk selalu berpikir, bukan dalam pengertian bebas tanpa kontrol, tetapi berpikir dalam batas-batas bingkai Islam melalui sebuah prosedur yang disebut *istinbāt*.⁶⁶ Secara sederhana *istinbat* dapat didefinisikan dengan mengeluarkan kandungan hukum dari nas-

⁶³ Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Hukum Islam*, terj. M. Yudian W. Asmin, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), h. 45

⁶⁴ Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *al-Madkhal al-Fiqhi: al-Qawaid al-Kulliyyah*, (Damsyik: Dar al-Ma'arif, 1980), h. 186

⁶⁵ *Ibid.*, h. 186

⁶⁶ Muhammad bin 'Alī al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥūl Ilā Tahqīq al-Ḥaqq Min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz II, (Riyād: Dar al-Faḍīlah, 2000), h. 1025, Ibrahim Hosen, "Memecahkan Permasalahan Hukum Baru", dalam Jalaluddin Rahmat (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 22-25



nas⁶⁷ dengan ketajaman nalar serta kemampuan optimal yang telah diatur dalam teori hukum Islam yang disebut dengan usul fikih.

Perjalanan sejarahnya yang awal, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini terlihat dari instruksi Rasulullah *ṣallā Allāh alaihi wa sallam* kepada para sahabat dalam menghadapi realitas umat waktu itu. Tapi dalam melakukan *istinbāṭ* hukum para sahabat tidaklah mengalami problem *metodologis* apapun, karena apabila mereka mendapatkan kesulitan mereka dapat secara langsung bertanya kepada Nabi. Peran *istinbāṭ* hukum pada masa ini masih sangat terbatas pada masalah-masalah yang sangat sederhana, karena pada periode ini sekalipun Islam telah dianut oleh masyarakat yang berbeda dalam lingkungan jazirah Arab, tetapi tradisi, corak, kehidupan sosial, dan tingkat ekonominya tidak jauh berbeda, sehingga masalah-masalah yang muncul dan menuntut penyelesaian hukum, baik secara *kualitatif* maupun *kuantitatif* hampir sama dan bahkan beberapa masalah yang dihadapi oleh umat menjadi latar belakang turunnya ayat Alquran.⁶⁸ Selanjutnya ia mengalami masa-masa pertumbuhan, perkembangan, kemajuan, kemunduran, kejumudan, dan kebangkitan kembali.⁶⁹

Sesungguhnya pada masa *jumud*-pun kegiatan *istinbāṭ* hukum tidak pernah berhenti sama sekali. Kenyataan ini didukung oleh suatu fakta bahwa

⁶⁷ Adapun yang dimaksud dengan nas di sini adalah teks-teks Alquran atau hadis. Lihat Haisam Hilal, *Mu'jam Muṣṭalah al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Jil, 2003), h. 337

⁶⁸ Ahmad Hassan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, a.b. Agah Garnadi, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), h. 2-3

⁶⁹ Untuk diskusi tentang perkembangan hukum Islam dapat dilihat misalnya dalam Muṣṭafā Ahmad al-Zarqā', *Al-Madkhal al-Fiqhī al-'Am*, Juz I, (Beirut: Dār al-Qalam, 1998), h. 159-247, Muḥammad Salām Madkūr, *Al-Madkhal Li al-Fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Dār al-Kitāb al-Hadīṣ, 1996), h. 30-dan seterusnya, Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.), Wahb al-Zuhailī, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Maktabī, 2001), H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005).



2. Diarung mengemukakan dan memperbanyak sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan *istinbāt* hukum tetap dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua kelompok penjaga syariat, yakni para kadi dan para mufti. Para kadi melakukan proses *istinbat* melalui keputusan pengadilan. Sedangkan para mufti melakukan *istinbāt* melalui fatwa-fatwanya. Produk hukum kelompok pertama lebih mengikat pihak-pihak yang bersangkutan karena mereka berhadapan langsung dengan badan pengadilan, dan kelompok yang kedua bersifat nasehat hukum. Demikian tidak jarang para kadi menggunakan fatwa-fatwa para mufti setempat dalam keputusannya, dan tidak jarang pula para mufti diikutsertakan dalam proses syariat untuk memberikan nasehat kepada para kadi.⁷⁰ Sementara pada zaman kontemporer, kegiatan *istinbāt* hukum dilakukan dengan mengambil tiga bentuk yaitu melalui perundang-undangan, melalui fatwa, dan melalui penelitian-penelitian baik dalam bentuk tesis, disertasi, dan penelitian-penelitian lainnya.⁷¹

Persoalan yang dihadapi umat manusia bertambah banyak dan kompleks seiring dengan perkembangan zaman, sehingga usaha-usaha *istinbāt* hukum terus berlanjut dan dikembangkan. Kebanyakan persoalan tersebut tidak didapatkan hukumnya yang jelas dan tegas dalam Alquran dan Sunnah, atau dalam ijtihad-ijtihad yang dilakukan ulama sebelumnya, padahal masalah-masalah tersebut sudah tentu membutuhkan pemecahannya. Persoalan-persoalan tersebut sering kali mengambil bentuk yang baru, beraneka macam sesuai dengan situasi dan

⁷⁰ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Kajian tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 1-4

⁷¹ Yusuf al-Qarḍāwī, *Al-Ijtihād Fi al-Syārī'ah al-Islāmiyyah Ma'a Naẓarāt Taḥfiliyyah Fī al-Ijtihād al-Mu'āṣir*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1996), h. 134



kontemporer biasa disebut dengan *maqâshid syarî'ah*.⁷²

Munculnya persoalan-persoalan baru itu berpengaruh terhadap dinamika pengembangan kaidah-kaidah *istinbâ'at* sebagai perangkat penting dalam penggalan hukum. Pada masa kekinian, para ulama mengembangkan metode penggalan hukum khususnya yang terkait dengan persoalan-persoalan yang benar-benar baru atau persoalan yang pernah ada tapi muncul dalam bentuk baru yang dihadapi manusia melalui sebuah metode yang disebut dengan metode *maqâshid syarî'ah*.

Pemikiran *maqâshid syarî'ah* sudah dimulai sejak Imam al-Tirmizi al-Hakim (W. 285 H), Ia adalah orang yang pertama kali menggunakan kata *maqâshid* dalam kitabnya *al-Shalâh wa Maqâshiduhâ, al-Haj wa Asrâruhu, Isbât al-'Ilal*, dan lainnya. Setelah itu muncul Abu Mansur al-Maturidy (W. 333 H) dengan karyanya *Maqshad al-Syara'*, kemudian disusul Abu Bakar al-Qaffâl al-Syâsy (W. 365 H) dengan *Ushûl al-Fiqh* dan *Mahâsin al-Syarî'ah*, Abu Bakar al-Abhar (W. 375 H) dan al-Baqillâny (W. 403 H) masing-masing dengan karyanya, *al-Taqrîb wa al-Irsyâd fî Tartîb Thurûq al-Ijtihâd*. Pasca al-Baqillany muncullah Imam Haramain al-Juwaenîy (W. 478 H) dengan *al-Burhân, al-Waraqât, al-Ghiyâsi, Mughîtsul Khalq*, al-Ghazali (W. 505 H) dengan karyanya di bidang fikih dan ushul fikh seperti; *al-Mustashfa, al-Mankhûl, al-Wajîz, Ihya Ulûm al-Dîn*, Fakhruddin al-Râzy (W. 606 H) dengan *al-Ma'âlim fî Ushul al-Fiqh*, Ali bin Muhammad al-Amidy (W. 631 H) dengan bukunya *al-Ihkâm Fi Ushûl al-Ihkâm*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷² Wahbah al-Zuhailî, *Subul al-Istifâdah Min al-Nawâzil Wa al-Fatâwâ Wa al-'Amal al-Fiqhî Fi al-Fatbîqât al-Mu'âsirah*, (Damaskus, Dâr al-Maktabî, 2001), h. 9



dan *Ghâyatul Maram*, Ibn Hajib (W. 646 H) dengan *Nafâis al-Ushûl*, *Syarh al-*

Mahshûl, *al-Furûq*, *al-Ihkâm fî Tamyîz al-Fatâwa ‘an al-Ahkâm wa Tasharruf al-*

Qadli wa al-Imâm, Izzu al-Dîn Abdu al-Salâm (W. 660 H) dengan *Qawaid al-*

Ihkâm fî Masâlih al-Anâm, al-Qarâfi dengan *al-Furûq*-nya (W. 684 H), al-

Gaidhawî (W. 685 H), Ibn Subuki (W. 771 H), al-Asnawi (W. 772 H), al-Thufi

(W. 776 H), dan Ibn Taimiyyah (w. 728 H), dan Ibnu al-Qaiyim al-Jauzi dalam

kitabnya *I’lâm al-Muwaqqi’în* (W. 751 H).⁷³

Generasi selanjutnya adalah Imam al-Syatibi (W. 790 H),⁷⁴ Ia adalah

tokoh pertama yang memperkenalkan studi *maqâshid syarî’ah* sebagai teori baku

dalam suatu bidang ilmu yang terpisah dari yang lain. Al-Syatibi menjelaskan

konsep *maqâshid syarî’ah* dalam kitab *al-Muwâfaqât*. Pada paruh pertama abad

20, tampillah Imam Muhammad Thahir ibnu ‘Asyûr (W. 1393 H) sebagai

reformis studi *maqâshid*, yang menawarkan pendekatan baru dalam mempelajari

maqâshid syarî’ah yang disesuaikan dengan realitas kekinian dan *konteks*

modern. Upaya reformasi ini, tertuang dalam karya briliannya, *maqâshid al-*

syarî’ah al-Islamiyyah yang terbit pertama kali di Tunisia, tahun 1946 M.⁷⁵

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dengan dasar inilah penulis

melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷³ Ahmad al-Raisuni menguraikan satu persatu pemikiran *maqâshid* pada era pasca Tabi’in, ia menjelaskan pokok pikiran para ulama pada masa itu tentang *maqâshid* dan beberapa karya tentang *maqâshid*. Selanjutnya lihat al-Raisuni, *Nazhariyât al-Maqâshid Inda al-Imâm al-Syâtibi*, h. 40-71

⁷⁴ Nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhm al-Gharnathi Abu Ishaq yang terkenal dengan sebutan al-Syatibi. Gelar akademik beliau adalah *al-Imâm al-‘Allâmah al-Muhaqqiq al-Qudwah al-Hafîz al-Jalîl al-Mujtahid*. Tidak diketahui persis dimana dan kapan ia lahir, Abu Ja’fan berpendapat ia lahir pada 720 H di Granada. Menurut muridnya yang bernama Abdullah al-Majaric, al-Syatibi wafat pada tahun 790 H, karya beliau yang terkenal adalah kitab *al-Muwâfaqât* yang memuat lima pokok pembahasan yang paling terkenal adalah pembahasan ilmu *maqâshid syarî’ah*. Lihat Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyât al-Maqâshid Inda al-Syâthibi*, (Virginia, USA, IIIT, 1995), h. 109-112

⁷⁵ Andriyaldi, *Teori Maqâshid Syari’ah dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur*, Jurnal Islam dan Realitas Sosial, Vol. 7, No.1, (Januari-Juni 2014), h. 25.



tema yang sama tentang hukum keluarga *matrilineal*. Menurut penulis, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini akan fokus membahas tentang hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau dengan *metodeistinbath hukum* melalui *maqāshid syarī'ah*, yang akan menjawab secara rinci persoalan tersebut, yang masih hangat dibicarakan, dipertentangkan dan saling menyalahkan serta menyudutkan tanpa membahas substansi persoalan, dengan penelitian ini akan menjawab perbedaan pendapat masyarakat adat Minangkabau tentang polemik hukum keluarga *matrilineal* secara substansi hukum adat dan hukum Islam. Oleh sebab itu, penulis akan membahas hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau dalam perspektif *maqāshid syarī'ah*. Penelitian sebelumnya pada umumnya membahas tentang mendeskripsikan persepsi masyarakat, tokoh, pelanggaran adat, sangsi, dan pelaksanaan sangsi.

B Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka fokus penelitian yang akan dikaji dalam disertasi ini adalah:

1. Bagaimana hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau pada aspek perkawinan perspektif *maqāshid syarī'ah*?
2. Bagaimana hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau pada aspek tanggungjawab suami terhadap istri dan anak perspektif *maqāshid syarī'ah*?
3. Bagaimana hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau pada aspek terjadinya perceraian perspektif *Maqāshid Syarī'ah*?
4. Bagaimana hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau pada aspek harta pusaka perspektif *maqāshid syarī'ah*?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka

tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Mengungkapkan hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau pada aspek perkawinan perspektif *maqāshid syarī'ah*.

2. Mengungkapkan hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau pada aspek tanggungjawab suami terhadap istri dan anak perspektif *maqāshid syarī'ah*

3. Mengungkapkan hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau pada aspek terjadinya perceraian perspektif *Maqāshid Syarī'ah*

4. Mengungkapkan hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau pada aspek harta pusaka perspektif *maqāshid syarī'ah*.

D Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan mengenai hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau perspektif *maqāshid syarī'ah*, karena suatu persoalan semakin berkembang secara hukum harus diketahui status hukumnya. Para ulama telah mengembangkan metode *istinbāṭ* guna mengantisipasi persoalan-persoalan baru tersebut dengan suatu metode yang disebut *maqāshid syarī'ah*. Penelitian ini dimaksudkan memberikan wawasan sekaligus gambaran metode *maqāshid syarī'ah* beserta cara kerjanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan sumbangan positif sebagai berikut:

- a. Bagi para pihak yang terlibat secara langsung dalam kerja-kerja *istinbāṭ*. Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang model *istinbāṭ* bagi persoalan-persoalan baru yang hendak digali status hukumnya, yaitu persoalan-persoalan *maqāshid syarī'ah*.
- b. Disamping itu, penelitian ini dapat menghidupkan semangat intelektual, sehingga hukum Islam yang senantiasa sesuai di setiap zaman dan tempat (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*) menjadi kenyataan.
- c. Penelitian ini juga berguna bagi masyarakat khususnya bagi mereka yang memperdalam khasanah keislaman dan menambah perbendaharaan pengetahuan yang nantinya dapat digunakan sebagai salah satu bahan informasi atau bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.
- d. Peneliti lain; sebagai bahan kajian dan referensi yang dapat dijadikan rujukan oleh peneliti lain khususnya yang terkait langsung dengan hukum keluarga matrilineal Minangkabau dalam perspektif *maqashid syariah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. KERANGKA TEORI

1. Hukum Keluarga *Matrilineal* Minangkabau

Asal Usul Minangkabau

Sumber pra sejarah bersifat *autentik* yang dapat menuntun untuk mengetahui asal usul suku Minangkabau¹ termasuk langka. Oleh demikian, dapat diketahui melalui *literatur tradisional* disebut dengan *tambo*² dan dari *petatah petitih* yang senantiasa terpelihara secara turun temurun dari generasi ke-generasi secara lisan.

Kebenaran dari isi *tambo* itu tidaklah seluruhnya terjamin, mengingat bahwa penyampaianya berlangsung secara lisan dari *ninik* turun ke-*mamak* dari *mamak* turun ke-*kemenakan*, dari generasi ke-generasi berikutnya dan baru kemudian ditulis setelah nenek moyang orang Minangkabau mengenal tulisan Arab sesudah masuknya Islam di Minangkabau. Hal ini terbukti dari

¹Minangkabau sebuah daerah di pulau Sumatera, sekarang identik dengan wilayah *teritorial* Sumatera Barat, memiliki kultur budaya yang unik dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Minangkabau merupakan salah satu masyarakat yang masih tetap memegang *matrilineal* (sistem kekerabatan menurut garis ibu). Para Antropolog mencatat saat ini, suku bangsa yang masih memegang sistem *matrilineal*, kurang dari 10 suku bangsa, diantaranya, Minangkabau (Sumatera Barat, Indonesia), Campa (Vietnam), Muangthai (segitiga emas Thailand), suku bangsa di India, Afrika, dan Badui (Timur tengah).

²Term *tambo* berasal dari bahasa Sansakerta, *tamboy* atau *tambe* yang berarti **bermula**. Tsuyosi Kato memahami *Tambo* sebagai cerita zaman dahulu kala atau *historiography tradisional*. *Tambo*, yang pada awalnya disampaikan secara lisan yang kemudian ditulis dengan bahasa Arab, merupakan kumpulan cerita tentang asal usul, ketentuan-ketentuan serta hukum adat. Ia melukiskan perihal asal usul serta batas-batasan alam Minangkabau serta merumuskan antara Darek dan Rantau. Lebih konkritnya, ia menjelaskan tentang asal muasal adat dan detil-detil aturan serta regulasi tentang masyarakat, hubungan *interpersonal* dan etika sosial. Secara umum *Tambo* bisa dikategorisasikan kedalam dua jenis; **Pertama, *tambo alam***, yaitu mengisahkan tentang asal usul nenek moyang serta banggunya kerajaan Minangkabau. **Kedua, *tambo adat***, yaitu tambo yang bermuatan adat atau sistem serta *regulasi* pemerintahan Minangkabau masa lalu. Lihat Ali Akbar Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Padang: PT. Grafika Jaya Sumbar, 2015), h. 45.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tambo asli yang ditulis tangan dengan tulisan Arab berbahasa Melayu. Kekhawatiran lain disebabkan oleh adanya kecenderungan pihak penyampai *kaba* atau *tambo* tersebut untuk menyelipkan di dalamnya pendapat dan perasaan pribadinya. Ada pihak-pihak yang terlalu membesarkan kekhawatiran itu, hingga menganggap bahwa *tambo* itu kebenarannya hanya sekitar dua persen saja.³

Dasar dari anggapan itu, karena ditemukan dalam *tambo* tersebut hal-hal yang tidak *rasional* menurut akal, seperti tentang asal usul nenek moyang orang Minangkabau, munculnya tokoh Dt. Katumanggungan dan Dt. Perpatih Nan Sabatang pada masa-masa waktu yang terpisah yang antara satu dan yang lainnya berjarak waktu ratusan tahun dan lain-lain berita.⁴ Sedangkan menurut penulis bahwa tokoh Dt. Katumanggungan dan Dt. Perpatih Nan Sabatang hanya penyebutan gelar yang turun temurun dipakai secara adat, tapi orang yang menyandang gelar tokoh tersebut berbeda.

Tambo atau uraian mengenai asal usul orang Minangkabau dan menerangkan hukum-hukum adatnya, termasuk sumber yang mulai langka di wilayah Minangkabau sekarang. Sungguhpun, penelusuran tambo sulit untuk diberikan rujukan seperti sejarah, apa yang disebut dalam tambo masih dapat dibuktikan ada dan bertemu di dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Tambo diyakini oleh orang Minangkabau sebagai peninggalan orang-orang tua. Bagi orang Minangkabau, tambo dianggap sebagai sejarah kaum. Walaupun di dalam catatan dan penulisan sejarah sangat diperhatikan

³ A. Sir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), Cet. ke-1, h. 124

⁴ *Ibid.*, h. 124



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanggalan atau tarikh dari sebuah peristiwa, serta di mana kejadian, bagaimana terjadinya, bila masanya, dan siapa pelakunya, menjadikan penulisan sejarah otentik. Sedangkan tambo tidak terlalu mengutamakan penanggalan, akan tetapi menilik kepada peristiwanya. *Tambo* lebih bersifat sebuah kisah, sesuatu yang pernah terjadi dan berlaku.⁵

Tambo dan *kaba*⁶ dapat dinilai tidak *rasional* apabila membacanya menurut apa adanya seperti membaca cerita atau berita, tetapi apabila diperhatikan lebih mendalam akan dipahami bahwa penulis *tambo* yang biasanya tidak disebutkan nama, menulis *tambo* dengan menggunakan bahasa *perlambang*, *kias* dan *banding* yang sukar ditangkap menurut lahirnya. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran tersendiri dengan cara membandingkan antara satu *tambo* dengan yang lainnya dan dengan kenyataan atau fakta sejarah yang diketahui kemudian, dihubungkan pula dengan *petatah petitih* yang senantiasa dapat dipelihara dari masa ke-masa. Disamping adanya anggapan yang mengecilkan arti dari *tambo* itu, ternyata banyak dari peneliti Barat dalam hubungannya dengan penelitian dan penulisan tentang asal usul Minangkabau yang menjadikan *tambo* tersebut sebagai sumber.⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asal usul Minangkabau menurut sumber pra sejarah bersifat *autentik* termasuk langka,

⁵ Batuah dan Madjoindo, *Tambo Minangkabau*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1956), h. 7

⁶ *Kaba* merupakan cerita rakyat dalam bentuk bahasa yang liris, susunan kalimat yang tetap, empat buah kata dalam satu kalimat dan dengan penggunaan pantun yang dominan. Menurut pendapat yang umum, *kaba* berasal dari bahasa Arab *akhbar* yang kemudian terintegrasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kabar dan ke dalam terminologi Minangkabau *kaba*. Pemaparan lebih luas lihat A. A. Nafis, *op. cit.*, h. 243-253. Azra memahami *kaba* sebagai legenda cerita kepahlawanan. Lihat Azyumardi Azra, *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*, Penerjemah: Roding Rasyidin, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), Cet. ke-1, h. 4

⁷ Batuah dan Madjoindo, *op. cit.*, h. 7



diantaranya dapat diketahui melalui *literatur tradisional* disebut dengan *tambo* dan dari *petatah petitih* yang terpelihara secara turun temurun bahwa penyampaian berlangsung secara lisan dari *ninik* ke-*mamak* dari *mamak* ke-*kemenakan*, dari generasi ke-generasi berikutnya dan baru ditulis setelah nenek moyang Minangkabau mengenal tulisan Arab sesudah masuknya Islam di Minangkabau.

Nenek moyang suku Minangkabau berasal dari percampuran bangsa Melayu tua yang telah datang pada zaman Neolithicum dengan bangsa Melayu muda yang menyusul kemudian pada zaman perunggu. Kedua bangsa ini adalah serumpun dengan bangsa Astronesia.⁸ Kelompok pengembara Astronesia yang meninggalkan kampung halamannya di bagian Hindia, menuju ke-Selatan mencari daerah baru untuk kehidupan mereka. Dalam rangka pencarian tanah baru itu, setelah mereka mendarat dipantai Timur Sumatera, bergerak ke-arah pedalaman pulau Sumatera sampai ke-sekitar gunung merapi, karena disana mereka telah mendapatkan tanah subur dilembar gunung merapi, mereka menetap dan membangun negeri pertama yaitu Pajajaran Tanah Datar. Setelah kemudian mereka berkembang, berdirilah negeri-negeri di se-lingkaran gunung merapi dan se-aliran batang Bengkawah. Hal ini sesuai dengan pepatah adat sebagai berikut: “*Dari mana titik Pelita, dari semak turun ke padi, dari mana asal nenek moyang kita, dari puncak gunung merapi*”.⁹

⁸ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 125

⁹ *Ibid.*, h. 126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penamaan asal usul nenek moyang Minangkabau dengan bangsa Melayu adalah karena merupakan cikal bakalnya berasal dari suatu tempat yaitu Malaya dari belahan tanah Hindustan. Kemudian keturunan yang berasal dari tempat itu diberi nama dengan menisbatkan kepada tempat itu yaitu Melayu.¹⁰

Membandingkan asal usul nenek moyang Minangkabau menurut pandangan tersebut di atas, dengan apa yang tersebut dalam setiap *tambo* yang menggambarkan asal usul Minangkabau, akan dapat ditarik titik-titik kesamaan, di dalam *tambo* disebutkan bahwa pada suatu waktu ketika *bumi bersentak naik* dan *langit bersentak turun* datanglah keturunan Raja Iskandar Zulkarnain yaitu Sri Maharaja Diraja dan mendarat di puncak gunung Merapi. Disana ia kawin dengan Indo Jelita, adik perempuan dari ninik Dt. Suri Dirajo. Dari hasil perkawinan itu lahir Dt. Katumanggungan. Kemudian setelah Sri Maharaja Diraja meninggal, Indo Jelita dikawini oleh seorang pengikut dan penasihat Sri Maharaja Diraja yaitu Cati Bilang Pandai. Dari perkawinan kedua ini lahir Dt. Perpatih Nan Sabatang dan beberapa orang putera dan puteri lagi. Putera dan Puteri Indo Jelita itulah yang kemudian menjadi cikal bakal nenek moyang Minangkabau.¹¹

Sehubungan dari jalan cerita dalam *tambo* itu, dapat ditarik suatu anggapan bahwa Dt. Suri Dirajo dengan saudaranya puteri Indo Jelita lebih dahulu datang dan mendarat di gunung Merapi. Tokoh Indo Jelita yang kemudian keturunannya melalui garis keibuan berkuasa di daerah baru itu

¹⁰ *Ibid.*, h. 127

¹¹ *Ibid.*, h. 126



menandakan bahwa paham yang dianut oleh pendatang yang lebih dahulu itu adalah *matriarcaat*. Bila dihubungkan dengan bangsa tua yang lebih dahulu datang ke-pusat pulau Sumatera yang juga menganut sistem *matriarcaat*, kiranya dapat ditafsirkan bahwa tokoh Indo Jelita dan Dt. Suri Dirajo yang terdapat dalam *tambo* itu adalah perlambang dari bangsa Melayu tua yang telah mendiami daerah sekitar gunung Merapi pada masa Neoliticum.¹²

Raja Iskandar dengan keturunannya adalah lambang keperkasaan dan peaklukan. Bila dihubungkan arus gelombang pendatang baru bangsa Melayu Muda yang memasuki jantung pulau Sumatera dari pantai timur, berat dugaan bahwa inilah yang dimaksud dengan kedatangan anak Raja Iskandar Zulkarnain. Berlangsungnya akulturasi antar bangsa Melayu Tua dengan Melayu Muda yang menghasilkan suku bangsa dan budaya Minangkabau dilambangkan dengan perkawinan Sri Maharaja Diraja dengan Puteri Indo Jelita.

Walaupun terdapat beberapa pandangan tentang asal usul nenek moyang Minangkabau, tetapi terdapat titik kesamaan tentang tempat yang mula-mula dibangun dan menjadi tempat asal bagi keturunan suku bangsa Minangkabau yaitu Pariangan Tanah Datar. Anggapan umum bagi rakyat yang tinggal di Pariangan pada waktu ini, bahwa anggapan itu tentunya diwarisi secara turun temurun, bahwa ditempat itu sudah terdapat penduduk asal sebelum adanya dua tokoh *mitos* dalam *tambo* tersebut di atas. Penduduk sudah tergabung dalam suku-suku tertentu sebelum dua datuk tersebut menciptakan suku-suku yang bernama Koto, Piliang, Bodi dan Chaniago yang

¹² *Ibid.*, h. 127

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian tersebar diseluruh luhak dan rantau. Hal ini dapat dilihat dari nama-nama suku yang asing dibandingkan dengan nama suku yang terdapat lain di luar lingkungan Pariangan. Hal juga berarti bahwa suku yang sudah lama terbentuk di Pariangan itu, tidak terpengaruh oleh nama suku yang kemudian diciptakan oleh Dt. Katumanggungan dan Dt. Perpatih Nan Sabatang.¹³

Asal nenek moyang di puncak gunung Merapi atau di lereng sebelah atas yang kemudian disebut Pariangan itu dalam *tambo* disebutkan bahwa tempat itu telah kering, karena air yang menggenangi keseluruhan lereng gunung Merapi telah menyusut ke-batas tersebut dalam waktu bumi bersentak naik. Perkembangan penduduk selanjutnya adalah dari atas turun kebawah, pandangan ini dikaitkan dengan pandangan Gazalba di atas akan terlihat titik temu. Penduduk pertama yaitu pada zaman Melayu tua pada zaman Neoeoticum langsung menuju ke lereng gunung Merapi yang ketinggian. Sasaran ini dapat dipahami dari maksud kedatangan mereka yaitu untuk mendapatkan tanah yang subur. Dari segi keamanan terhadap bangsa penakluk yang datang kemudian, cara pemilihan tempat ini adalah tepat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perkembangan selanjutnya dari penduduk adalah dari atas turun ke bawah.¹⁴

¹³ Kedua tokoh ini dianggap oleh komunitas Minangkabau sebagai orang yang menciptakan pertama kali adat Minangkabau yang diantaranya terdiri dari *kato nan ampek*, (empat kata). **Pertama**, *kato pusako*, yaitu: menempatkan sesuatu pada tempatnya, artinya kata yang telah terbiasa dalam *syara'* yang lazim seperti ungkapan hadits melayu...*adat nan basandi alua, syara' nan basandi Kitabullah*. **Kedua**, *kato mufakkek*, yaitu: aklamasi yang berasaskan demokrasi dan rasional. **Ketiga**, *kato dahulu kato batapati*, yaitu: keputusan yang telah dihasilkan oleh alim ulama, *niniak mamak* dan intelektual, tetapi belum ditemukan keputusan final, sehingga dibuat suatu kesepakatan bahwa, pembicaraan akan dilanjutkan di kemudian hari yaitu dengan melengkapi kesepakatan terdahulu untuk kemudian direalisasikan. **Keempat**, yaitu: *kato kamudian kato bacari*, yaitu: bahwa suatu kebenaran itu selalu bernilai, sehingga ada kemungkinan berubah di kemudian hari. Lihat Syekh Sulaiman Arrasully, *Pertalian Adat dan Syara'*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 110-111

¹⁴ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 127



Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asal usul nenek moyang Minangkabau yang lebih dahulu datang dan mendarat di gunung merapi yaitu tokohnya Dt. Suri Dirajo dengan saudaranya puteri Indo Jelita yang telah datang pada zaman Neolithicum yang disebut sebagai bangsa Melayu tua. Selanjutnya datang keturunan Raja Iskandar Zulkarnain yaitu Sri Maharaja Diraja serta penasehatnya Cati Bilang Pandai pada zaman perunggu yang disebut sebagai bangsa Melayu muda. Kedua bangsa ini adalah seumpun dengan bangsa Asrtonesia dari bagian Hindia yaitu Malaya dari belahan tanah Hindustan.

Kedatangan Sri Maharaja Diraja dan mendarat di puncak gunung merapi. Disana ia kawin dengan Indo Jelita, adik perempuan dari ninik Dt. Suri Dirajo, dari perkawinan itu lahir Dt. Katumanggungan. Setelah Sri Maharaja Diraja meninggal, Indo Jelita dikawini oleh seorang pengikut dan penasehat Sri Maharaja Diraja yaitu Cati Bilang Pandai, dari perkawinan kedua itu lahir Dt. Parpatih Nan Sabatang dan beberapa orang putera puteri lagi. Putera dan puteri Indo Jelita itulah yang kemudian menjadi cikal bakal nenek moyang Minangkabau. Paham yang dianut adalah paham *matriarcat*.

Adapun di dalam *tambo* disebutkan bahwa dalam perkembangan selanjutnya, muncul tiga daerah di sekeliling gunung merapi yang disebut Luhak yaitu: Luhak Agam, Luhak Tanah Datar, Luhak Lima Puluh Kota. Penamaan ketiga luhak tersebut (Luhak berarti sumur) dengan nama-nama tersebut mengambil dari tiga sumur besar yang terdapat di gunung merapi. Sumur yang satu ditumbuhi *mesiang* Agam, yang satu tanahnya datar dan yang satu lagi tempat minum 50 keluarga. Dari sinilah muncul nama-nama

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Luhak Agam, Tanah Datar dan Lima Puluh Kota.¹⁵ Ini berarti bahwa penduduk yang mendiami luhak Agam sekarang ini, nenek moyangnya biasa mandi atau mengambil air di sumur yang ditumbuhi menses agam. Demikian pula penduduk Luhak Tanah Datar yang nenek moyangnya biasa menggunakan sumur yang datar tanahnya, dan penduduk Luhak 50 Kota yang dulunya nenek moyangnya mempergunakan sumur yang waktu itu tempat minum 50 keluarga.¹⁶

Cerita dalam *tambo* ini setidaknya akan dapat menuntun untuk mengenal perkembangan selanjutnya dari nenek moyang suku bangsa Minangkabau. Suatu anggapan bahwa nenek moyang Minangkabau mula-mula bertempat di bagian lereng atas dari lereng gunung Merapi. Sewaktu mereka telah berkembang, mereka harus mendapatkan tanah baru untuk pertanian. Tanah baru itu tentunya mengarah ke-bawah karena mereka tidak mungkin lebih ke-atas lagi.

Apabila dibuat sebuah lingkaran dari puncak gunung Merapi sebagai pusat lingkaran, maka terlihat arus gerakan pencarian tanah baru itu mengalir ke selingkar gunung Merapi. Belahan sebelah selatan disebut luhak Tanah Datar, belahan barat dan bagian utara adalah luhak Agam, belahan timur dan bagian utara adalah luhak Lima Puluh Kota. Ketiga luhak inilah yang merupakan inti dan asal dari Minangkabau yang oleh orang Minangkabau

¹⁵ Batuah dan Madjoindo, *op. cit.*, h. 14

¹⁶ *Ibid.*, h. 15



sendiri disebut alam Minangkabau dan oleh penulis Barat disebut Minangkabau asli.¹⁷

Perkembangan selanjutnya penduduk yang berada di tiga luhak tersebut bergerak keluar lebih menjauh titik lingkaran dengan arah yang menyebar, sehingga radius dari lingkaran yang berpusat diatas gunung Merapi itu semakin meluas. Luhak Agam bergerak lebih kearah utara sampai ke perbatasan propinsi Sumatra Utara sekarang, mencakup Pasaman, Rao dan Luhak Sikaping. Ke-barat mencapai pesisir laut dari Pariaman ke Air Bangis. Luhak Lima Puluh Kota bergerak ke-arah timur mencapai Bangkinang, Kampar Kiri, Kampar Kanan dan Kuantan bahkan menyeberang kesebahagian Semenanjung Malaka yang disebut sekarang Negeri Sembilan. Luhak Tanah Datar bergerak kearah Tenggara sampai memasuki daerah Jambi bagian barat dan ke selatan terbentang sampai ke-Pesisir; mulai dari Padang sampai ke-Pesisir Selatan.¹⁸

Membedakan daerah baru dan daerah asal, yaitu: daerah baru disebut rantau dan daerah asal disebut alam atau darek. Setiap rantau dihubungkan kepada luhak tempat asal perkembangannya yaitu rantau luhak Agam, rantau luhak Tanah Datar, dan rantau Luhak Lima Puluh kota. Kumpulan dari tiga luhak dengan semua rantaunya itu membentuk suatu lingkungan yang luas, bernama Minangkabau dengan batas-batas sebagaimana yang akan penulis jabarkan dalam pembahasan berikutnya di bawah ini.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 128

¹⁸ *Ibid.*, h. 128

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perkembangan

Minangkabau selanjutnya, muncul tiga daerah di sekeliling gunung merapi yang disebut Luhak yaitu: Luhak Agam, Luhak Tanah Datar, Luhak Lima Puluh Kota. Penamaan ketiga luhak tersebut (Luhak berarti sumur) dengan nama-nama tersebut di atas mengambil dari tiga sumur besar yang terdapat di gunung merapi. Membedakan daerah baru dan daerah asal, yaitu: daerah baru disebut rantau dan daerah asal disebut alam atau darek. Setiap rantau dihubungkan kepada luhak tempat asal perkembangannya yaitu rantau luhak Agam, rantau luhak Tanah Datar, dan rantau Luhak Lima Puluh kota.

b. Batas dan Wilayah Kultural Minangkabau

Minangkabau merupakan suatu lingkungan adat yang terletak di provinsi Sumatera Barat. Minangkabau tidaklah persis sama dengan pengertian Sumatera Barat, karena kata Minangkabau lebih banyak mengandung makna sosial kultural, sedangkan kata Sumatera Barat lebih banyak mengandung makna geografis administratif. Oleh sebab demikian, dapat dipahami bahwa Minangkabau terletak dalam daerah geografis administratif Sumatera Barat dan juga menjangkau ke luar daerah Sumatera Barat yaitu ke sebagian barat daerah geografis administratif provinsi Riau dan ke sebagian barat daerah geografis administratif Jambi. Termasuk kedua bagian itu kedalam lingkungan sosial kultural Minangkabau dapat diketahui bahwa mereka secara sosial dan budaya pada umumnya sama dengan yang terdapat dalam masyarakat yang berada di Sumatera Barat.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, h. 129



Sehubungan dalam literatur tradisional Minangkabau yaitu *tambo* atau

kaba, dilukiskan batas lingkungan yang meliputi wilayah dan bagian-bagian yang disebutkan di atas, seperti *dari Riak yang berdebur, Schiliran Pasir nan Panjang* yaitu dari Bayang ke Sikilang Air Bangis yaitu perbatasan dengan Sumatera Utara. Timur sampai teratak Air Hitam (Inderagiri), Sialang Balantai Besi (batas dengan Pelalawan), Tenggara sampai dengan Sipasak Pisau Hanyut, Durian Ditekuk Raja, Tanjung Simaledu yang ketiganya adalah bagian barat provinsi Jambi. Selatan sampai dengan Gunung Patah Sembilan yaitu perbatasan Jambi. Barat sampai laut yang Sedidih yaitu Samudera Hindia.²⁰ Pengertian geografis, wilayah Minangkabau terbagi atas wilayah inti yang disebut *darek* dan wilayah perkembangannya yang disebut *rantau* dan *pesisir*.

1) *Darek*

Darek adalah dataran tinggi yang dkitari oleh tiga gunung; Gunung Merapi, Gunung Sago dan Gunung Singgalang. Masyarakat Minangkabau meyakini bahwa sejarah *etnis* mereka bermula dari pemukiman di lereng bagian selatan Gunung Merapi, sebuah Volcano pada gugusan Gunung Merapi.²¹

Daerah *darek* ini dibagi dalam tiga luhak: (1) Luhak Tanah Data sebagai luhak nan tuo, *buminyo nyaman, aienyo janiah ikannyo banyak*, (2) Luhak Agam sebagai luhak nan tengah, *buminyo angek, aienyo*

²⁰ *Ibid.*, h. 129

²¹ Batuah dan Madjoindo, *op. cit.*, h. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karuah, ikannyo lia, (3) dan Luhak Limo Pulau Koto sebagai luhak nan bungsu, *buminyo sajuak, aienyo janiah, ikannyo jinak*.²²

Pertama, Nagari-nagari yang termasuk kedalam luhak Tanah Data adalah: Pagaruyung, Sungai Tarab, Limo Kaum, Sungayang, Saruaso, Sumanik, Padang Gantiang, Batusangka, Batipuh 10 koto, Lintau Buo, Sumpur Kuduih, Duo Pulau Koto, Koto Nan Sambilan, Kubuang Tigobaleh, Koto Tujuh, Supayang, Alahan Panjang, Ranah Sungai Pagu.

Kedua, Nagari-nagari yang termasuk ke dalam luhak Agam adalah; Agam Tuo, Tujuh Lurah Salapan Koto, Maninjau, Lawang, Matua, Ampek Koto, Anam Koto, Bonjol, Kumpulan, Suliki.²³

Ketiga, Nagari-nagari yang termasuk ke dalam luhak Limo Pulau Koto adalah: luhak terdiri dari Buaiyan Sungai Balantik, Sarik Jambu Ijuak, Koto Tengah, Batuhampa, Durian Gadang, Limbukan, Padang Karambie, Sicincin, Aur Kuniang, Tiakar, Payobasuang, Bukik Limbuku, Batu Balang Payokumbuh, Koto Nan Gadang (dari Simalanggang sampai Taram); Ranah terdiri dari Gantiang, Koto Laweh, Sungai Rimbang, Tiakar, Balai Mansiro, Taeh Simalanggang, Piobang, Sungai Baringin, Gurun, Lubuk Batingkok, Tarantang, Selo Padang Laweh (Sajak dari Simalanggang sampai Tebing Tinggi, Mungkar); Lareh terdiri dari Gaduik, Tebing Tinggi, Sitanang, Muaro Lakin, Halaban, Ampalu, Surau,

²² Pada umumnya, penulis *tambo* memaknai term *luhak* sama dengan *luak* yang dalam bahasa Minangkabau berarti kurang. Ketika penduduk mencari pemukiman baru, penduduk ditempat asal menjadi luas artinya *menjadi berkurang*. Jika diambil dari bahasa Sangsakerta term ini merupakan derivasi dari suku kata *Iwa*, artinya luas atau lapang. A. A. Nafis, *op. cit.*, h. 48

²³ *Ibid.*, h. 48



Labuah Gurun (dari Taram taruih ka Pauh Tinggi, Luhak 50, taruih ka Kuok, Bangkinang, Salo, Aie Tirih dan Rumbio).²⁴

2) *Rantau*

Rantau yang merupakan wilayah kultural kedua orang Minangkabau adalah dataran rendah. Dimulai dari daerah pantai timur Sumatera. Ke-utara luhak Agam; Pasaman, Lubuk Sikaping dan Rao. Ke-selatan dan tenggara luhak Tanah Data; Solok Silayo, Muaro Paneh, Alahan Panjang, Muaro Labuah, Alam Surambi Sungai Pagu, Sawah lunto Sijunjung, sampai perbatasan Riau dan Jambi. Daerah ini disebut sebagai ikue rantau.²⁵

Kemudian rantau sepanjang iliran sungai sungai besar; Rokan, Siak, Tapung, Kampar, Kuantan/Indragiri dan Batang Hari. Daerah ini disebut Minangkabau Timur yang terdiri dari:

- a) Rantau 12 koto (sepanjang Batang Sangir); Nagari Cati nan Batigo (sepanjang Batang Hari sampai ke Batas Jambi), Siguntue (Sungai Dareh), Sitiuang, Koto Basa.
- b) Rantau Nan Kurang Aso Duo Puluah (rantau Kuantan)
- c) Rantau Bandaro nan 44 (sekitar Sungai Tapuang dengan Batang Kampar)
- d) Rantau Juduhan (rantau Y.D.Rajo Bungsu anak Rajo Pagaruyung; Koto Ubi, Koto Ilalang, Batu Tabaka)

²⁴ *Ibid.*, h. 48

²⁵ Labuah dan Madjoindo, *op. cit.*, h. 19



e) Negeri Sembilan.²⁶

3) *Pesisir*

Daerah sepanjang pantai barat Sumatera. Dari utara ke selatan; Meulaboh, Tapak Tuan, Singkil, Sibolga, Sikilang, Aie Bangih, Tiku, Pariaman, Padang, Bandar Sapuluah, terdiri dari; Air Haji, Balai Salasa, Sungai Tunu, Punggasan, Lakitan, Kambang, Ampiang Parak, Surantiah, Batang kapeh, Painan (Bungo Pasang), seterusnya Bayang Nan Tujuh, Indrapura, Kerinci, Muko-Muko, Bengkulu.²⁷

Apabila ditarik garis batas daerah Minangkabau asli dengan daerah rantanya menurut pandangan De Jong, akan terlihat bahwa batas-batas ini, sebagaimana juga disebutkan dalam batas-batas tradisional yang disebutkan terlebih dahulu, telah mencakup semua daerah tingkat dua yang terdapat di Sumatra Barat pada waktu ini yaitu: Agam, Tanah Datar, 50 Kota, Pasaman, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok dan Sawah Lunto, Sijunjung, berikut semua kota yang terdapat di dalamnya. Disamping itu juga terambil sebahagian kecil Provinsi Riau yaitu Kampar dan Inderagiri serta sebagian daerah Jambi yaitu Kerinci.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa batas dan wilayah kultural Minangkabau terbagi atas wilayah inti yang disebut *darek* dan wilayah perkembangannya yang disebut *rantau* dan *pesisir*. Minangkabau merupakan suatu lingkungan adat yang terletak di provinsi Sumatera Barat. Minangkabau tidaklah persis sama dengan pengertian Sumatera Barat, karena

²⁶ *Ibid.*, h. 19

²⁷ *Ibid.*, h. 20

²⁸ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 123



kata Minangkabau lebih banyak mengandung makna sosial kultural, sedangkan kata Sumatera Barat lebih banyak mengandung makna geografis administratif.

Agama Suku Minangkabau Pra Islam dan Islam

Berpijak kepada informasi *arkeologis* dan *etnologis*, sepertinya, para sarjana sepakat bahwa orang-orang Indonesia sudah bisa dikatakan masyarakat beradab sejak berabad-abad yang lalu. Hal itu dibuktikan dengan kemampuan mereka menanam padi dengan teknik-teknik yang maju untuk ukuran saat itu dan telah mengembangkan bentuk-bentuk organisasi sosial. Soal agama, mereka diyakini menganut *animisme*; mereka percaya bahwa benda-benda mati memiliki ruh, pohon-pohonan dan makhluk lain-nya hidup. Lebih dari itu, mereka juga menyembah ruh nenek moyang mereka. Orang-orang Indonesia kuno juga percaya bahwa ruh benda-benda itu, misalnya gunung, pohon atau nenek moyang mereka dapat mendatangkan rasa takut, menyebabkan penyakit bahkan kematian. Untuk menghormati ruh-ruh yang baik dan mengusir yang jahat, sejumlah ritual dilembagakan pada momen-momen penting tertentu dalam kehidupan mereka; kelahiran bayi, perkawinan dan kematian. Sisa-sisa peninggalan kuno tersebut dalam bentuk batu dan tempat peribadahan dapat ditemukan di Jawa Timur dan Sumatera.²⁹

Sekalipun bukti-bukti *arkeologis* budaya Hindu-Budha seperti Candi, sebagai indikasi agama nenek moyang orang Minangkabau pra-Islam, memang hampir tidak ditemukan di wilayah Minangkabau seperti yang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹ Awi Shihab, *The Muhammadiyah Movement and Its Controversy with Christian Missions in Indonesia*, Penerjemah: Ihsan Ali-Fauzy, *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Gerakan Penetrasi Kristen di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998), Cet. ke-I, h. 16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak ditemukan di Pulau Jawa, tetapi agama ini pernah eksis di wilayah ini. Hal ini diantaranya bisa dilihat dalam penggunaan term *sembahyang* untuk terminologis shalat. Selain itu, terdapatnya Pariangan sebagai salah satu nama wilayah di daerah ini merupakan indikasi yang tidak bisa diabaikan. Hinduisme-Budhisme tidak bisa disamakan dengan animisme-dinamisme, karena keduanya memiliki *orientasi* dan *konsepsi* ketuhanan yang berbeda. Pendapat beberapa kalangan bahwa seputar *animisme-dinamisme* bukanlah yang dimaksud Hinduisme-Budhisme.³⁰

Selain menganut agama Hindhu-Budha komunitas Minangkabau menurut kalangan pernah menganut kepercayaan *animisme-dinamisme* sebagai sistem kepercayaan mereka. Hal itu bisa ditemukan dalam catatan M.D. Mansoer, cs bahwa masyarakat Minangkabau kuno memiliki kepercayaan khusus terhadap ruh-ruh nenek moyang serta tempat-tempat yang dianggap keramat seperti gunung-gunung dan makam-makam nenek moyang mereka. Catatan Mansoer tersebut, juga diamini pemerhati sejarah Minang lain-nya, seperti M. Nasroen, ia berkeyakinan bahwa kepercayaan asli orang Minang adalah tidak mengenal sistem ukhrawi kecuali menganut kepercayaan *animisme-dinamisme*.³¹

Minangkabau dengan kebudayaannya telah ada sebelum datangnya Islam, bahkan juga telah ada sebelum Hindu dan Budha memasuki wilayah nusantara. Sebelum datang pengaruh dari luar, kebudayaan Minangkabau telah mencapai bentuknya yang terintegrasi dan kepribadian yang kokoh.

³⁰ *Ibid.*, h. 16

³¹ *Ibid.*, h. 17



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, kebudayaan luar yang datang tidak mudah memasukkan pengaruhnya. Penerimaan kebudayaan dari luar berjalan secara selektif dan diantaranya bertentangan dengan dasar falsafah adatnya tidak dapat bertahan di Minangkabau.³²

Kebudayaan luar yang mula-mula masuk ke Minangkabau ialah dari Hindu/Budha. Kalau diperhatikan lintasan sejarah Minangkabau, terlihat bahwa agama Hindu dan Budha masuk di Minangkabau melalui dua cara: *Pertama*, melalui cara non formal yaitu melalui jalan dagang dan *Kedua*, melalui jalan formal yaitu dengan jalan kekuasaan pihak yang memenangkan perang.³³

Tahap Pertama, melalui jalan dagang. Disamping letaknya yang menguntungkan bagi lalu lintas perdagangan, kedudukan Minangkabau sebelah timur sebagai pusat lada, menimbulkan banyak perhatian dari pedagang luar untuk memasukinya. Datang kesana pedagang dari bangsa dan kebudayaan yang berbeda. Mula-mula datang kesana adalah nahkoda pedagang yang datang dari Hindia, karena pedagang dari Hindia ini beragama Budha Hinayana, maka agama itulah yang mula-mula masuk dan berkembang di Minangkabau belahan timur. Pengaruh dan pengembangan agama Budha dalam tahapan ini diperkirakan berlangsung abad ke-IV M.³⁴

Tahap Kedua, penyiaran agama Budha di Minangkabau mulai berlaku pada waktu Raja Adityawarman memerintah di Minangkabau pada tahun 1347-1375 M. Ia adalah seorang pangeran dari Majapahit yang dilahirkan oleh

³² Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 128

³³ *Ibid.*, h. 128

³⁴ *Ibid.*, h. 129



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang Ibu asal Melayu yang bernama Dara Jingga. Hubungannya dengan keraton Majapahit ialah, karena raja Jayanegara yang menjadi raja kedua Majapahit adalah anak dari saudara ibunya yang bernama Dara Petak. Dara Petak dan Dara Jingga adalah dua orang putri raja Melayu yang dibawa pulang ke Jawa oleh pasukan Singosari dalam ekspedisi Pamalayu 1275 M. Sebagai orang dekat dengan Keraton ia di didik di Pura Majapahit, kemudian diangkat menjadi pembesar kerajaan dan pernah menerima kepercayaan menjadi utusan ke Tiongkok.³⁵

Sehubungan dalam suatu usaha perluasan Majapahit ke pusat Pulau Sumatera, Majapahit mengirimkan suatu ekspedisi ke Minangkabau. Dalam perang diplomasi, ekspedisi ini mengalami kekalahan. Dalam *Tambo* perang diplomasi ini dilambangkan dengan adu kerbau, atas kemenangan kerbau dari Minangkabau daerah itu kemudian dinamai Minangkabau.³⁶

Sebagai penebus kekalahan pertama itu, Majapahit mengirimkan ekspedisi kedua dibawah pimpinan putra asal Melayu yaitu Adityawarman. Kedatangan pasukan Adityawarman itu diterima oleh pimpinan Minangkabau waktu itu bukan dengan pertempuran, mengingat pasukan itu cukup besar, tetapi dengan siasat. Dt Katumanggungan dan Dt Perpatih Nan Sabatang menyerahkan alam Minangkabau dan mengangkatnya menjadi Yang Dipertuan. Datuk yang berdua itu mengambilnya menjadi *urang sumando* (ipar) dengan mengawinkannya dengan adik mereka yang bernama Putri Reno

³⁵ *Ibid.*, h. 129

³⁶ *Ibid.*, h. 129



Mandi. Dengan demikian maka Minangkabau menjadi daerah taklukan Majapahit.³⁷

Sebagai raja dibawah pengaruh Majapahit, ia diperintahkan untuk melebarkan kekuasaannya ke-pedalaman Sumatera dengan tujuan disamping merebut tempat perdagangan lada, juga untuk mengembangkan agama Budha dan membendung perkembangan agama Islam yang juga sudah mulai masuk ke daerah itu. Meskipun raja Adityawarman sudah berkuasa di Minangkabau, namun ia tetap *urang sumando* menurut pandangan orang Minangkabau sebagai *urang sumando* kekuasaan di rumah istrinya, hanya sebatas bendul pintu dan di luar tetap kekuasaan mamak rumah. Ini berarti bahwa Adityawarman ditempatkan pada tempat yang lebih terhormat sebagai Yang Dipertuan, tetapi kekuasaan praktis berada di tangan dua datuk, yaitu Dt. Perpatih sebagai perdana menteri dan Dt. Katumanggungan sebagai senopati. Pembagian wewenang seperti tersebut di atas sesuai dengan pepatah adat: “*kata raja kata melimpahkan, kata penghulu kata menyelesaikan*”.³⁸

Setelah berakhirnya kekuasaan Adityawarman di Minangkabau, maka tidak ada lagi yang melanjutkan kekuasaannya. Dapat dipastikan bahwa tidak lama sesudah Adityawarman, daerah tersebut telah ditinggalkan oleh pengajahnya. Dalam waktu yang terdapat antara pemerintahan Adityawarman dengan kedatangan Belanda, berlangsunglah masuknya agama Islam.

³⁷ *Ibid.*, h. 130

³⁸ *Ibid.*, h. 130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kebudayaan Hindhu/Budha lenyap dari Minangkabau tanpa meninggalkan pengaruh yang berarti atas adat.³⁹

Tidak ditemukan referensi yang memadai *pasca animisme* di Minangkabau, artinya apakah masyarakat Minangkabau memeluk agama lain selain Hindu-Budha. Para pemerhati sejarah Minangkabau seperti A.A. Navis berpendapat bahwa agama nenek moyang orang Minangkabau sebelum mereka mengkonversikan agama mereka kedalam Islam adalah Hindu-Budha.⁴⁰

Terlepas dari bentuk kepercayaan dan agama komunitas Minangkabau *pasca Animisme*, tulisan berikut ini berusaha untuk membatasi diri dengan hanya melakukan tinjauan historis terhadap era dan proses Islamisasi komunitas Minangkabau. Tinjauan ini amat penting dilakukan, setidaknya untuk melacak proses konversi terjadi di wilayah ini atau apa corak Islam yang pertama kali dikenal di Minangkabau. Tujuan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menelusuri figur dua tokoh legendaris adat, yaitu Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan, yang di klaim sebagai *The Founder* dasar-dasar utama adat Minangkabau apakah seorang penganut *animisme*, atau Hindu-Budha. Karena kedua tokoh ini dalam struktur adat Minangkabau memiliki tempat yang cukup strategis kalau tidak ingin dikatakan sakral. Hal ini terlihat dalam bentuk pengklasifikasian adat, dimana

³⁹ *Ibid.*, h. 130

⁴⁰ A. Akbar Navis, *op. cit.*, h. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“adat yang diadatkan”, yang merupakan hasil “produksi” kedua tokoh ini, adalah memiliki tempat yang amat strategis setelah hukum agama.⁴¹

Kebudayaan Hindu-Budha tidak bisa mempertahankan eksistensi-nya di wilayah ini setelah terjadinya penetrasi Islam dan kebudayaan Islam yang baru diperkenalkan bisa mengeleminasikan-nya. Hal ini disebabkan oleh sikap *eksklusivisme* Hindu-Budha. Sebahagian besar di era dominasinya, agama ini masih tetap berada dalam tataran *eksklusiv* milik para pendeta dan mereka yang berada di lingkungan istana, pengaruh agama ini secara signifikan hanya pada tingkat *suprastruktur* yang dipertahankan oleh kelompok penguasa. Mayoritas masyarakat tidak memahami dengan baik pemikiran *filosofis* dan teologis Hindu-Budha, *orientasi* mereka lebih besar terhadap aspek estetikanya ketimbang *spekulasi intelektual* dan *dimensi metafisik*-nya. Orang-orang Hindu, meskipun mereka telah berdomisili diberbagai kota masih tetap terisolasi dari masyarakat sekitarnya.⁴²

Setidaknya, ada lima faktor yang bisa dikategorisasikan sebagai *first factor* kenapa agama Hindu-Budha tidak bisa menanamkan pengaruh yang signifikan ke-dalam masyarakat Minangkabau, sehingga Islam sebagai agama baru dengan mudah menanamkan pengaruhnya sekaligus mengelimanisi agama ini dari sistem kepercayaan masyarakat Minang. **Pertama**, kedua agama itu dibawa dari Majapahit ke Minangkabau oleh para penyerbu, setidaknya, hal itu menimbulkan citra dan kesan yang kurang simpatik bagi masyarakat. **Kedua**, sekalipun Aditiawarman dapat menguasai wilayah ini,

⁴¹ *Ibid.*, h. 87

⁴² *Ibid.*, h. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi otoritas kekuasaannya lebih merupakan *simbolitas* saja, ia tidak memiliki kekuasaan yang *substantif*, sehingga ia tidak bisa bersentuhan dengan Masyarakat Minang yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil terutama Luhak Nan Tigo, yang merupakan wilayah kultural utama masyarakat Minangkabau. **Ketiga**, motivasi politik Aditiawarman sebagai penguasa lebih besar ketimbang motivasi agama, sehingga perhatian-nya terhadap *aktivitas konversi* agama tidak memadai kalau tidak ingin dikatakan tidak ada sama sekali, sehingga ia tidak menyiapkan da'i-da'i yang *profesional* ke-arah itu, berbeda dengan penguasa Aceh yang selalu membawa serta para da'i dalam setiap penguasaan wilayah baru. **Keempat**, keterikatan orang Minang terhadap perilaku adat lamanya cukup mendominasi segenap aktivitas kehidupan mereka, sehingga sulit untuk dimasuki oleh sistem baru yang tidak relevan dengan akar budaya sosial masyarakatnya. **Kelima**, sistem kasta yang tercermin dalam kedua agama tersebut cukup kontradiktif dengan akar budaya Minang yang lebih cenderung demokratis.⁴³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa agama suku Minangkabau kuno menurut sementara kalangan tidak mengenal sistem *ukhrawi* kecuali menganut kepercayaan *animisme-dinamisme* sebagai sistem kepercayaan mereka, bahwa masyarakat Minangkabau kuno memiliki kepercayaan khusus terhadap ruh-ruh nenek moyang serta tempat-tempat yang dianggap keramat seperti gunung-gunung dan makam-makam nenek moyang mereka.

⁴³ *Ibid.*, h. 88



Masuknya agama Hindu dan Budha ke-Minangkabau melalui dua cara;

Pertama, melalui cara non formal yaitu melalui jalan dagang, diantaranya pedagang dari Hindia yang beragama Budha Hinayana diperkirakan berlangsung abad ke-IV M. Kedua, melalui jalan formal yaitu dengan jalan kekuasaan pihak yang memenangkan perang. Penyiaran agama Budha di Minangkabau mulai berlaku pada waktu raja Aditiyawarman memerintah di Minangkabau pada tahun 1347-1375 M. Ia adalah seorang pangeran dari Majapahit yang dilahirkan oleh seorang ibu asal Melayu yang bernama Dara Jingga. Hubungannya dengan keraton Majapahit ialah, karena raja Jayanegara yang menjadi raja kedua Majapahit adalah anak dari saudara ibunya yang bernama Dara Petak. Dara Petak dan Dara Jingga adalah dua orang putri raja Melayu yang dibawa pulang ke-Jawa oleh pasukan Singosari dalam ekspedisi Pamalayu 1275 M.

Agama Islam pertama kali bersentuhan dengan komunitas Minangkabau masih merupakan sebuah misteri yang *debatable*. Para pemerhati sejarah Minangkabau belum secara *aklamasi* menentukan periodisasi kedatangan Islam ke wilayah ini. Korespondensi antara Khalifah Umar Abdul Aziz dengan Sri Maha Raja Srindrawarman yang masih terdapat di salah satu museum di Spanyol-Madrid menurut M.D. Mansoer, cs, mengindikasikan bahwa agama Islam telah bersentuhan dengan komunitas Minangkabau bahagian timur pada paruh pertama abad ke-7. Ia memaparkan bahwa khalifah Umayyah pertama berusaha untuk menguasai areal perdagangan rempah-rempah seperti lada dan lain-lain yang terdapat di wilayah Minangkabau Timur agar tidak terlalu tergantung kepada China

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

T'ang. Kedua imperium ini, Mu'awiyah dan China T'ang, berusaha keras untuk menguasai wilayah ini untuk *supply* rempah-rempah mereka. Untuk menindak lanjuti kebijakan politik ekonominya itu, Khalifah Umayyah mengirimkan suratnya kepada raja Sriwijaya yang berkedudukan di Sabak Jambi untuk memeluk agama Islam dan mengadakan hubungan dagang langsung dengan Damasyik. Politik ekonomi Mu'awwiyah ini di lanjutkan oleh cucunya Sulaiman Abdul Madjid (715-717 H). Ia memerintahkan armada lautnya yang berada di Teluk Persia, yang terdiri dari 35 kapal, untuk mengekspansi Muara Sabak untuk memonopoli perniagaan lada. Sri Maharaja Srindrawarman, pengganti Sri Maha Raja Lokitawarman, akhirnya masuk Islam, bahkan ia meminta di transfer guru agama untuk mengajarkan Islam.⁴⁴

Literatur tentang Minangkabau pada abad ke-16 tidak memadai, setidaknya masyarakat Minangkabau mengkonversikan agama mereka kedalam Islam sekitar abad tersebut, dan sungai pesisir barat dan timur merupakan kemungkinan jalur yang dilaluinya. Pelabuhan bagi perdagangan pesisir barat kaum muslim Arab dan India yang berasal dari Gujarat mempunyai peranan penting khusus dalam penyebaran agama Islam dalam komunitas Minangkabau. Tiku, pelabuhan utama bagi perdagangan saat itu di Islamisasikan menjelang dekade kedua abad ke-16. Para pejabat administrasi dan pelabuhan yang semuanya bergelar Muslim, dan para guru-guru Islam yang semua mengerti dengan baik ayat-ayat Alquran adalah di antara bukti-

⁴⁴ M.D. Mansoer, cs, *Sejarah Minangkabau*, (Jakarta: Bhatara, 1970), h. 44-45. Senada juga diutarakan N. Davis, meskipun ia mengakui bahwa format pengaruh Islam terhadap kerajaan Sriwijaya tidak begitu jelas pasca kebijakan politik ekonomi-relegious Mu'awiyah itu. Sepertinya, kerajaan Sriwijaya tetap penganut Hindu, hingga ia melakukan ekspansi agamanya ke pulau Jawa. Lihat Ali Akbar Navis, *op. cit.*, h. 24-25



bukti yang tersedia di pelabuhan. Pariaman dan Ulakan kemudian menyusul dalam hal konversi terutama pasca dominasi Aceh atas pantai barat. Tiku dan Pariaman, demikian Van Ronkel, merupakan jalur utama masuknya Islam ke wilayah pedalaman Minangkabau. Teori ini bisa diterima seandainya dikaitkan dengan *aporisme* adat yang cukup populer dalam komunitas harian Minangkabau bahwa “*Adat manurun dan syarak mandaki*”, artinya, Islam memasuki wilayah Minangkabau dari darek pesisir, sedangkan adat menurun dari Gunung Merapi yang diakui secara *mitologis* sebagai negeri asal nenek moyang orang Minangkabau.⁴⁵

Hamka lebih cenderung melihat abad ke-15 adalah kemungkinan besar komunitas pesisir timur Sumatera bersentuhan dengan Islam. Hal itu ditandai dengan perpindahan keluarga kerajaan di daerah Buo Sumpur Kudus serta keterlibatan-nya dalam perdagangan emas di Selat, menimbulkan hubungan dengan istana kerajaan Malaka yang telah masuk Islam pada abad ke-15.⁴⁶ Tesis Hamka tersebut, didukung oleh Isma'il Ja'qub bahwa, Sultan Malaka, Manshur Syah yang meninggal 1475 M, penguasa Kampar dan Indragiri di Riau. Implikasinya adalah merangsang para penguasa lain untuk melakukan konversi kedalam Islam, termasuk orang Minang.⁴⁷ Slamet Mulyana lebih memilih abad ke-16 sebagai periodisasi awal masyarakat Minangkabau mengkonversikan agamanya kedalam Islam, hal itu dilakukan oleh para

⁴⁵ Azyumardi Azra, *op. cit.*, h. 40

⁴⁶ Hamka, *Sejarah Islam di Sumatera*, (Medan: Pustaka Nasional, 1950), Edisi ke-II, h.11

⁴⁷ Isma'il Ya'qub, *Sejarah Islam di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1956), h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pedagang Islam yang berlayar dari Malaka menyusuri sungai Kampar dan Inderagiri.⁴⁸

Terlepas dari perdebatan yang cukup alot perihal awal *Islamisasi* di Minangkabau, abad ke 16 merupakan periode yang amat penting dalam sejarah Minangkabau, karena mencakup awal *instisionalisasi* Islam dalam struktur sosial Minangkabau. Menjelang paruh terakhir abad ke-17, proses Islamisasi itu berkembang dengan cepat, dan Islam telah menginjakkan kakinya dengan kokoh sepanjang pesisir Sumatera Barat.⁴⁹ Menjelang pertengahan abad ke-17, semua pusat perdagangan dan perkampungan, yang sebagian besar penduduknya adalah pedagang, telah masuk Islam. Sumpur Kudus cukup populer dengan Makkah-nya urang daerah Darek, dan wilayah-wilayah sentral dagang lain-nya, seperti Talawi dan Padang Ginting juga menjadi Muslim, demikian juga wilayah sentral Hindu-Budha seperti Saruso dan Pagaruyung mungkin melakukan konversi ketika bergabung kembali dengan keluarga kerajaan, setelah mereka kembali.⁵⁰

Meneliti literatur yang berkembang dan beberapa hasil pertemuan ilmiah yang berhubungan dengan Islam di Minangkabau dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masuk dan berkembangnya Islam di Minangkabau melalui tiga tahap yaitu: **Pertama**, melalui perdagangan yaitu dibawa oleh saudagar Islam yang berkunjung ke-Minangkabau dan menyebarkannya secara diam-diam dan tidak terencana. **Kedua**, melalui pengaruh dan kekuasaan Aceh di

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁸ Samet Mulyana, *Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara*, (Jakarta: Bathara, 1963), h. 261

⁴⁹ Azyumardi Azra, *op. cit.*, h. 43

⁵⁰ *Ibid.*, h. 44



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perisiran barat Minangkabau yang menyiarkan agama agak terencana. **Ketiga**, melalui penguasa Minangkabau sendiri yang menyiarkannya secara teratur dan terencana.⁵¹

Penyiaran agama Islam **tahap pertama**, yaitu melalui jalan dagang, dapat berlaku karena sifat keterbukaan suku bangsa Minangkabau serta memilih komoditi dagang yang diperlukan, mengundang datangnya saudagar-saudagar bangsa asing untuk memasuki dan mengembangkan pengaruhnya di Minangkabau. Pada abad ke VII M. Pedagang-pedagang yang berasal dari Persia, Arab dan Gujarat telah banyak mendatangi perdagangan lada di Minangkabau sebelah timur. Pada waktu itu pedagang-pedagang yang datang dari Persi, Arab maupun Gujarat telah memeluk Islam.⁵²

Sesuai dengan sifat seorang muslim yang merasa terpanggil untuk berdakwah dengan cara apapun, tidaklah mustahil pada masa-masa itu telah berlangsung penyiaran agama secara tidak resmi, baik melalui pergaulan maupun perkawinan. Penyiaran Islam melalui perdagangan ini dapat dipahami dari penggunaan kata *labai* untuk guru atau pengajar agama sampai waktu ini. kata tersebut berasal dari kata “*Illepai*” dari bahasa Tamil yang berarti saudagar. Hal ini memberi petunjuk bahwa mula-mula penyiarannya, yang mengajarkan dan menyiarkan agama itu adalah para saudagar yaitu pada masa

⁵¹ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h.133

⁵² Tentang masuknya Islam ke Melayu Sumatera melalui saudagar dan da'i secara perorangan sudah mulai pada masa pemerintahan daulat Umayyiah, seperti diungkapkan Syalabi dalam *Mausu'ah fi Tariki al Islami wa Hadarah Islamiyah II*, h. 112



ramainya perdagangan lada di Minangkabau timur yang diperkirakan berlaku pada abad ke-VII M atau awal abad ke VIII M.⁵³

Penyiaran agama Islam **tahap kedua**, yaitu berlaku pada saat pesisir barat Minangkabau berada dibawah pengaruh Aceh. Aceh adalah salah satu bagian pulau Sumatera yang lebih dahulu masuk Islam, karena letaknya dipintu terdepan yang lebuah dulu dapat kemungkinan untuk menerima pengaruh dari luar. Pada abad ke-XV, seluruh pesisir barat Minangkabau telah berada dibawah pengaruh politik dan ekonomi Aceh.⁵⁴ Sebagai umat yang berasal dari wilayah Indonesia yang lebih dahulu memeluk Islam, saudagar mubaligh Aceh giat menyiarkan Islam di daerah pesisir yang telah menjadi daerah pengaruh Aceh. Dapat disimpulkan bahwa pengislaman Minangkabau secara besar-besaran dan terencana terjadi setelah pesisir dibawah pengaruh Aceh.

Salah seorang putra Minangkabau asal Koto Panjang Pariaman bernama Burhanuddin, pergi ke Aceh untuk menuntut ilmu agama Islam dari Syekh Abdur Ra'uf. Sepulangnya dari Aceh ia mengajarkan agama Islam secara teratur dan mengambil tempat di Ulakan. Perguruan ini dikunjungi oleh orang-orang Minangkabau dari seluruh pelosok negeri. Melalui murid-murid syekh Burhanuddin ini Islam semakin merata berkembang sampai ke *Darek*. Dari kejadian ini muncul pepatah adat: "*Syara' mendaki adat menurun*" yang berarti bahwa agama Islam mula-mula berkembang di Pesisir kemudian meluas ke-*Darek*. Karena *Darek* mempunyai tempat yang lebih

⁵³ M.D. Mansoer, cs, *op. cit.*, h. 134. Dapat pula dilihat dalam kesimpulan Hamka, *op. cit.*, h.

49 dan 52

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 134



ketinggian letaknya dari pesisir, maka diibaratkan dengan kata “*syara’ mendaki*”. Adat berasal dari *Darek* dan berembang ke pesisir, hingga dikatakan “adat menurun”.⁵⁵

Dibagian lain yaitu melauai pesisir timur berkembang pula ajaran Islam dan meluas sampai ke-*Darek*. Hal ini dapat terjadi karena adanya hubungan antara alam Minangkabau dan Malaka. Sebagai tanah asal dengan rantaunya, berlangsung saling kunjungan antara Minangkabau dengan Malaka. Dalam abad ke-XIV M. Islam sudah merata berkembang di Malaka. Seseorang yang berasal dari Siak (Minangkabau Timur) bernama Syekh Labai Panjang Janggut, setelah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama Islam di Malaka, pulang ke Siak dan mengajarkan agama Islam disana. Karena kepintarannya menyiarkan agama, dalam waktu yang cepat banyak orang yang mengikuti ajarannya.⁵⁶

Kemudian ia bersama murid-muridnya masuk kebagian dalam Minangkabau untuk menyiarkan agama. Dalam waktu yang cepat banyak pengikut-pengikutnya, oleh karena guru itu berasal dari Siak. Orang yang telah dapat pengetahuan agama Islam itu dikatakan telah terpengaruh oleh orang Siak. Selanjutnya orang yang mempunyai pengetahuan agama dan mengajarkannya disebut “Orang siak”. Sampai saat sekarang ini kata “urang siak” dipergunakan sebagai istilah untuk orang yang mempunyai ilmu agama

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 135

⁵⁶ *Ibid.*, h. 135



Islam. Hal ini menunjukkan adanya penyebaran agama Islam melalui arah Timur.⁵⁷

Perkembangan dan penyiaran agama Islam **tahap tiga** yaitu, berlaku pada waktu kekuasaan kerajaan Islam di Pagaruyung. Islam lebih dahulu masuk dan berkembang di daerah pesisir yang merupakan daerah *Rantau* Minangkabau. Dari daerah pesisir agama Islam mendaki dan berkembang di *Luhak* Minangkabau atau *Darek*. Pusat kerajaan yaitu Pagaruyung walaupun raja masih beragama Budha, tetapi sejak awal abad ke-XV M, sebagian daerah Minangkabau telah memeluk agama Islam.⁵⁸

Setelah raja Anggawarman Mahadewa memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Alif, maka secara resmi Islam telah masuk di istana Pagaruyung. Dengan berkuasanya Islam di istana raja, besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan Islam di Minangkabau dan semenjak itu seluruh rakyat Minangkabau resmi memeluk agama Islam.⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa masuk dan berkembangnya Islam di Minangkabau melalui tiga tahap; **Pertama**, melalui perdagangan yaitu dibawa oleh saudagar Islam dari Persia, Arab dan Gujarat pada abad ke-VII M atau awal abad ke-VIII M yang mendatangi perdagangan lama di Minangkabau sebelah timur dan penyebaran Islam secara diam-diam dan tidak terencana. Penyiaran agama Islam melalui perdagangan ini dapat dipahami dari penggunaan kata *labai* untuk guru atau pengajar agama sampai

⁵⁷ *Ibid.*, h. 135

⁵⁸ *Ibid.*, h. 136

⁵⁹ *Ibid.*, h. 136



sekarang. Kata tersebut berasal dari kata “*illepai*” dari bahasa Tamil yang berarti saudagar.

Kedua, melalui pengaruh dan kekuasaan Aceh di pesisir barat Minangkabau yang menyiarkan agama agak terencana pada abad ke-XV M, seluruh pesisir barat Minangkabau telah berada di bawah pengaruh politik dan ekonomi Aceh. Salah seorang putra Minangkabau asal Koto Panjang Pariaman bernama Burhanuddin, pergi ke-Aceh untuk menuntut ilmu agama Islam dari Syekh Abdur Ra’uf. Sepulangnya dari Aceh ia mengajarkan agama Islam secara teratur dan mengambil tempat di Ulakan. Perguruan ini dikunjungi oleh orang-orang Minangkabau dari seluruh pelosok negeri. Melalui murid-murid Syekh Burhanuddin Islam semakin merata berkembang sampai ke-*Darek*. Berdasarkan kejadian ini muncul pepatah adat: “*syara’ mandaki adat manurun*” yang berarti bahwa agama Islam mula-mula berkembang di Pesisir kemudian meluas ke-*Darek*.

Melalui pesisir timur berkembang pula ajaran Islam dan meluas sampai ke-*Darek*. Hal ini terjadi karena adanya hubungan antara alam Minangkabau dan Malaka. Sebagai tanah asal dengan rantaunya, berlangsung saling kunjungan antara Minangkabau dengan Malaka, pada abad ke-XIV M Islam sudah merata berkembang di Malaka. Seorang yang berasal dari Siak (Minangkabau Timur) bernama Syekh Labai Panjang Janggut, setelah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama Islam di Malaka, pulang ke Siak dan mengajarkan agama Islam disana. Kemudian ia bersama murid-muridnya masuk kebagian dalam Minangkabau untuk penyiaran agama Islam, karena guru berasal dari Siak, bagi orang yang telah dapat pengetahuan agama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dikatakan telah terpengaruh oleh orang Siak. Selanjutnya orang yang mempunyai pengetahuan agama dan mengajarkannya disebut “orang siak” sampai saat sekarang.

Ketiga, melalui penguasa Minangkabau sendiri yang menyiarkannya secara teratur dan terencana. Sejak awal abad ke-XV M, sebagian daerah Minangkabau telah memeluk agama Islam, sedangkan pusat kerajaan Pagaruyung rajanya masih beragama Budha. Setelah raja Anggawarman Mahadewa memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Alif, secara resmi Islam telah masuk ke-istana Pagaruyun. Kekuasaan kerajaan Islam di Pagaruyung, besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan Islam di Minangkabau dan semenjak itu seluruh rakyat Minangkabau resmi memeluk agama Islam.

d. Budaya, Adat, Tingkatan Adat, Undang-Undang, dan Hukum Adat Minangkabau

Budaya Minangkabau merupakan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan berikut daerah pantauan Minangkabau. Budaya ini merupakan salah satu dari dua kebudayaan besar di Nusantara yang sangat menonjol dan berpengaruh. Budaya ini memiliki sifat *egaliter* (bersifat sama/ sederajat), *demokratis* (mengutamakan persamaan hak, kewajiban dan perlakuan sama), dan *sintetik* (menyatukan dua atau lebih bagian menjadi satu kesatuan, baik melalui desain atau proses alami), yang menjadi anti-tesis bagi kebudayaan besar lainnya, yakni budaya Jawa yang bersifat *feodal* (dikuasi oleh kalangan bangsawan) dan *sinkretik* (perpaduan dari beberapa paham atau aliran agama atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepercayaan).⁶⁰ Berbeda dengan kebanyakan budaya yang berkembang di dunia yang menganut sistem *patrilineal*, budaya Minangkabau justru menganut sistem *matrilineal*⁶¹ baik dalam hal pernikahan, persukuan, warisan, gelar adat dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa budaya Minangkabau memiliki sifat *egaliter*, *demokratis*, dan *sintetik*, yang menjadi anti-tesis bagi kebudayaan besar lainnya. Budaya Minangkabau menganut sistem *matrilineal*, baik dalam hal pernikahan, persukuan, warisan, gelar adat dan sebagainya.

Berdasarkan historis, budaya Minangkabau berasal dari *Luhak Nan Tigo*, yang kemudian menyebar ke wilayah rantau di sisi barat, timur, utara dan selatan dari *Luhak Nan Tigo*.⁶² Saat ini wilayah budaya Minangkabau meliputi Sumatera Barat, bagian barat Riau (Kampar, Kuantan Singingi, Rokan Hulu), pesisir barat Sumatra Utara (Natal, Sorkam, Sibolga, dan Batas), bagian barat Jambi (Kerinci, Bungo), bagian utara Bengkulu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁰ <http://melayuonline.com/ind/news/read/11500>. Diakses pada Rabu, 10 Oktober 2018, pukul 03:45 WIB.

⁶¹ *Matrilineal* berasal dari kata *matri* artinya (ibu) dan *lineal* (garis). Sistem *matrilineal* adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu alinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-laki atau perempuan dalam keluarga merupakan bagian garis keturunan/klan yang dibawa oleh darah ibu mereka. Ayah dalam keluarga inti tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam sukunya sebagaimana yang berlaku dalam sistem *patrilineal* yang dianut oleh mayoritas suku lainnya di Indonesia. Dengan kata lain seorang anak yang terlahir dengan latar belakang orang tua Minangkabau akan mengikuti suku ibunya. Asal-usul sistem *matrilineal* sampai saat ini belum dapat dijelaskan dengan bukti *empiris* dan hanya dapat dijawab oleh cerita-cerita mitos, asal-usul mengapa suku Minangkabau memegang sistem *matrilineal* menjadi menarik untuk diketahui, karena tidak banyak suku di Indonesia, bahkan di dunia yang mempraktikkan sistem ini. Sistem *matrilineal*, telah mengakar dalam kebudayaan Minangkabau sejak lama dan hal ini termasuk faktor dominan yang membentuk masyarakat Sumatera Barat, hingga sekarang.

⁶² Guyoshi Kato, *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2005), h. 21



(Mukomuko), bagian barat daya Aceh (Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tenggara).⁶³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa budaya Minangkabau berasal dari *Luhak Nan Tigo* yaitu Luhak Tanah Data sebagai Luhak nan tuo, Luhak Agam sebagai Luhak nan tengah, dan Luhak Limo Puluah Koto sebagai Luhak nan bungsu. Kemudian menyebar ke wilayah rantau di sisi barat, timur, utara dan selatan dari *Luhak Nan Tigo* maupun Pesisir.

Budaya Minangkabau pada mulanya bercorakkan budaya *animisme* dan Hindu-Budha. Kemudian sejak kedatangan para reformis Islam dari Timur Tengah pada akhir abad ke-18 (rujukan), adat dan budaya Minangkabau yang tidak sesuai dengan hukum Islam dihapuskan. Para ulama yang dipelopori oleh Haji Piobang, Haji Miskin, dan Haji Sumanik, mendesak Kaum Adat untuk mengubah pandangan budaya Minang yang sebelumnya banyak berkiblat kepada budaya *animisme-dinamisme* dan Hindu-Budha, untuk berkiblat kepada syariat Islam. Budaya menyabung ayam, mengadu kerbau, berjudi, minum tuak, diharamkan dalam pesta-pesta adat masyarakat Minang.⁶⁴

Reformasi budaya di Minangkabau terjadi setelah Perang Padri yang berakhir pada tahun 1837 M. Hal ini ditandai dengan adanya perjanjian di Bukit Marapalam antara alim ulama, tokoh adat, dan *cadiak pandai* (cerdik pandai). Mereka bersepakat untuk mendasarkan adat budaya Minang pada

⁶³ *Ibid.*, h. 21

⁶⁴ *Ibid.*, h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat Islam. Kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah adagium yang berbunyi: *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Syarak mangato adat mamakai*. (Adat bersendikan kepada syariat, syariat bersendikan kepada Alquran). Sejak reformasi budaya dipertengahan abad ke-19, pola pendidikan dan pengembangan manusia di Minangkabau berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Sehingga sejak itu, setiap kampung atau jorong di Minangkabau memiliki masjid, selain surau yang ada di tiap-tiap lingkungan keluarga. Pemuda Minangkabau yang beranjak dewasa, diwajibkan untuk tidur di surau. Di surau, selain belajar mengaji, mereka juga ditempa latihan fisik berupa ilmu bela diri pencak silat.⁶⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa budaya Minangkabau pada mulanya bercorakkan budaya *animisme-dinamisme* dan Hindu-Budha. Kemudian sejak kedatangan para reformis Islam dari Timur Tengah pada akhir abad ke-18 (rujukan), adat dan budaya Minangkabau yang tidak sesuai dengan hukum Islam dihapuskan. Para ulama yang dipelopori oleh Haji Piobang, Haji Miskin, dan Haji Sumanik, mendesak Kaum Adat untuk mengubah pandangan budaya Minangkabau tersebut. Reformasi budaya di Minangkabau terjadi setelah Perang Padri yang berakhir pada tahun 1837 M. Hal ini ditandai dengan adanya perjanjian di Bukit Marapalam antara alim ulama, tokoh adat, dan *cadiak pandai* (cerdik pandai). Mereka bersepakat untuk mendasarkan adat budaya Minang pada syariat Islam. Kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah adagium yang berbunyi: *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Syarak mangato adat mamakai*.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 22



Adat⁶⁶ merupakan salah satu kata yang rumit untuk didefinisikan

dalam bentuk yang *finish* dan *kongkrit*. Kesulitan dalam memberikan definisi tersebut, menurut Abdullah Siddik yang dikutip oleh Haron Daud adalah karena penggunaan kata adat yang meluas dalam situasi dan kondisi yang tak terbatas, artinya kemungkinan pemberian definisi yang beragam dari masing-masing individu dan perubahan makna dari individu itu sendiri akan tetap ada sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman. Di sisi lain faktor alam suatu komunitas hidup dan berkembang sangat mempengaruhi pola pikir dan falsafah hidup mereka. Dalam pengertian harian sering diartikan dengan cara yang sudah menjadi kebiasaan.⁶⁷

Kebenaran tentang teori ini, pada dasarnya dapat dilihat dari perbedaan asal kemunculan kata adat itu sendiri yang berujung kepada perbedaan definisi dan maknanya. Ketika adat didefinisikan dari pemahaman bahwa kata “*adat*” berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “*A*” yang artinya “*Tidak*” dan “*Dat*” yang berarti “*Benda atau Materi*”, maka dalam pengertian yang sederhana adat pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang tidak bersifat kebendaan bersifat atau non materi yang melingkupi kehidupan manusia. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa ketika kehidupan manusia telah mencapai kesempurnaan materi karena kekayaan alam yang melimpah, sampailah manusia pada suatu titik jenuh dimana kekayaan materi tidak

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁶ Adat suatu masyarakat bisa jadi berbeda dengan adat masyarakat lain, dan ketika terjadi interaksi antara suatu masyarakat adat dengan masyarakat adat lain, maka akan terjadi tarik menarik dan saling mempengaruhi, maka di sanalah terjadi perubahan-perubahan struktur adat yang lemah mempertahankan adat mereka dari pengaruh kelompok masyarakat adat yang lebih kuat, terlepas dari benar atau salah adat yang berpengaruh tersebut, tergantung kepada selektivitas masyarakat adat yang menerima perubahan adat itu sendiri.

⁶⁷ Haron Daud, *Sejarah Melayu: Satu kajian dari pada Aspek Pensejarahan Budaya*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian dan Pendidikan Malaysia, 1993), Cet ke- II, h. 146



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu memenuhi tuntutan rohani manusia, sehingga manusia merasakan hidupnya hampa dan penuh kegersangan tanpa makna dan arti. Kondisi ini membawa pemikiran kearah perenungan akan pentingnya adat yang berarti sesuatu yang jauh lebih berharga dan berarti dari materi yang selama ini melingkupi dan menutupi mata hati mereka, yaitu sesuatu yang berisi nilai-nilai rohani dan budi pekerti yang luhur.⁶⁸

Sedangkan di sisi lain, ketika adat didefinisikan dari pemahaman bahwa kata adat berasal dari bahasa Arab yaitu *عادة*, yang mengandung arti *إعادة* (perulangan). Maksud dari hal ini adalah sesuatu dikatakan adat apabila telah dilakukan berulang-ulang tanpa adanya penilaian baik atau buruk perbuatan tersebut, menurut Muhammad Abu Zahrah adalah kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.⁶⁹ Sedangkan menurut Idrus Hakimi adat diartikan dengan kebiasaan atau kelaziman yang dilakukan oleh pribadi atau kelompok manusia secara refleks dan sadar. Hal ini berarti adat lebih diidentikkan dengan sesuatu yang lebih kongkrit dan nyata atau kenampakan dari wujud abstrak dalam bentuk lahiriah.⁷⁰

Koentjaraningrat berpendapat bahwa adat adalah wujud ideal dari kebudayaan manusia, yang secara lengkap wujud itu dapat disebut dengan “*adat tata kelakuan*”. Adat dalam pengertian ini, pada dasarnya dapat dibagi dalam empat tingkatan yaitu:

⁶⁸ Rasyid Manggis, *Minangkabau: Sejarah Ringkas dan Adatnya*, (Padang: tp, 1970), h. 85

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet ke-I, Jilid 2, h. 364

⁷⁰ Idrus Hakimi, *Makalah: Pokok-pokok Pengetahuan Adat Minangkabau Basandi Syarak*, Disampaikan pada Halal Bi Halal di Masjid Nurul Syukur Indarung, tt, h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Tingkatan Nilai-Budaya, tingkat ini merupakan tingkatan yang paling abstrak, yang berisi ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi ini biasanya luas, kabur dan tidak rasional, yang biasanya berakar dari bagian terdalam dari emosional manusia. Hal yang paling bernilai adalah manusia suka bekerjasama dengan landasan solidaritas yang tinggi, hal ini berarti bahwa manusia adalah makhluk yang hidup dengan kehilangan sifat persaingan antara mereka. Nilai *individualisme* yang begitu mengakar di Barat, hal yang bernilai tinggi adalah apabila manusia itu dapat berhasil dengan usahanya sendiri. Hal ini pun sebenarnya tidak rasional, karena tidak seorangpun yang mampu berbuat banyak tanpa adanya usaha atau bantuan orang lain.
- 2) Tingkat Norma-Norma, tingkat ini merupakan nilai-nilai budaya yang sudah terikat dengan peranan-peranan manusia dalam masyarakat, yang seringkali berubah sesuai dengan konteks waktu dan tempat dimana manusia berada.
- 3) Tingkat Hukum, baik hukum adat atau hukum tertulis yang sudah jelas mengenai bermacam-macam sektor yang sudah terang batas-batas ruang lingkungannya.
- 4) Tingkat Aturan Khusus, yang mengatur aktivitas-aktivitas yang sudah jelas dan terbatas ruang lingkungannya dalam masyarakat. Aturan ini sangat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konkrit dan biasanya terkait dengan dalam sistem hukum. Misalnya peraturan lalu lintas, dan aturan sopan santun.⁷¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa adat adalah segala sesuatu yang tidak bersifat kebendaan atau non materi yang melingkupi kehidupan manusia, suatu kebiasaan atau kelaziman yang dilakukan oleh pribadi atau kelompok manusia secara refleksi dan sadar yang dilakukan berulang-ulang. Adat dapat dibagi dalam empat tingkatan yaitu: tingkatan nilai budaya, tingkat norma-norma, tingkat hukum, dan tingkat aturan khusus.

Masyarakat Minangkabau⁷² pra Islam, hidup di dalam aturan dan tuntunan nilai-nilai ideologis-normatif yang mentradisi dalam kehidupan sehari-hari serta diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Aturan-aturan dan nilai-nilai *ideologis normatif* tersebut dikenal dengan istilah adat.⁷³ Hal ini dapat dilihat dari ungkapan pepatah Minang yang

⁷¹ Kentjaringaninggrat, *Bunga Rampai: Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), Cet. ke- XIV, h. 10-12

⁷² Minangkabau lebih mengacu pada kesatuan ideologi saja, bukan menunjuk pada kesatuan daerah administrasi dari suatu masyarakat, karena masyarakat Minangkabau lebih banyak melukiskan kondisi dan situasi daerahnya lewat sastra lisan. Jadi, sulit menjelaskan batas daerah etnis Minangkabau secara ilmiah, bahkan apabila batas-batas tersebut dikaji secara *linguistik* bahwa batas-batas daerah tersebut sama dengan "Antah barantah" (A. A. Nafis, *Alam Takambang Jadi Guru*, (Jakarta: Grafiti Press, 1984) dan merupakan sebutan untuk sebuah kelompok masyarakat yang mendiami sebagian besar daerah Provinsi Sumatera Barat, yang meliputi kawasan seluas 18.000 meter persegi, yang memanjang dari utara ke selatan di antara Samudera Indonesia dan Gugusan Bukit Barisan, kecuali Pulau-pulau di sebelah barat pantai Sumatera Barat atau Kepulauan Mentawai. Tsuyoshi Kato, *Nasab Ibu dan Merantau: Tradisi Minangkabau yang Berketerusan di Indonesia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989), h. 5

⁷³ Adat adalah wujud ideal dari kebudayaan manusia, yang terdiri dari nilai-nilai ideologi budaya, Norma, Hukum, dan aturan-aturan yang berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Adat terdiri dari empat tingkatan yaitu: (1) *Adat Sabana Adat*, berupa Aturan dan falsafah kehidupan, yang sifatnya turun temurun, (2) *Adat Nan Diadatkan*, berupa Peraturan setempat yang muncul dari hasil musyawarah dan kebiasaan yang berlaku umum di tempat itu (3) *Adat Nan Teradatkan*, berupa kebiasaan pribadi atau kelompok dalam masyarakat, yang boleh ditambah atau dikurangi, bahkan boleh ditinggalkan, selama tidak terjadi kontradiksi dengan landasan berfikir masyarakat Minang yaitu "*Aluo-jo patuik, Raso-jo Parseso, Anggo-tanggo, dan Musyawarah*." (4) *Adat Istiadat*, berupa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbunyi “*Iduik di lingkuang adaik, mati di lingkuang tanah*. Pepatah ini memberi arti bahwa adat bagi masyarakat Minangkabau menempati posisi yang *fundamental* (sesuatu yang mendasar, asasi, sangat penting, atau merupakan suatu prinsip, dan hal pokok yang dijadikan pedoman atau dasar di dalam hal-hal tertentu), sekaligus merupakan landasan serta titik tolak dari seluruh aktivitas hidup dan kehidupan mereka.

Adapun di sisi lain penyelewengan serta pelanggaran terhadap yang telah digariskan oleh adat akan berimplikasi kepada penurunan martabat kemanusiaan dan pelakunya akan dijatuhi sanksi secara adat yang terkenal dengan ungkapan “*ka ateh indak bapucuak, ka bawah indak baurek, di tengah-tengah digiriak kumbang*” (ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berurat, di tengah-tengah dilobangi kumbang).⁷⁴ Sanksi adat secara umum lebih bersifat penjara batin seperti tidak diikutsertakan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, musyawarah dan lain-lain.

Adat itu sendiri bersumber dari hasil pemikiran dan perenungan yang mendalam dari nenek moyang orang Minangkabau terhadap berbagai sunatullah yang berlaku dan berbagai fenomena yang terjadi pada alam semesta, bagi mereka hal-hal tersebut menyimpan hikmah dan mengandung berbagai pesan-pesan tersirat, yang dapat dijadikan *uswah* dan *i'tibar* dalam menjalani hidup dan kehidupan di muka bumi ini, dalam falsafah adat disebut

aneka kelainan dalam suatu tempat atau Nagari yang bersifat mengikuti pasang naik dan pasang surut kondisi dan situasi serta perkembangan pemikiran masyarakat tersebut. M. S. Amir, *Adat Minangkabau, Pola dan tujuan Hidup Orang Minangkabau*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Jaya, 2000), h. 4. Senada dengan hal di atas, Idrus Hakimi, Dt. Rajo Pangulu, mengatakan bahwa kalimat adat adalah sesuatu yang tidak bernilai benda, tetapi bernilai kejiwaan dan budi pekerti yang luhur (Idrus Hakimi, Dt. Rajo Pangulu, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Minangkabau Basandi Syarak*, ([tt]: [tp], 2006), h. 1.

⁷⁴ Us. Dt. Parpatih, *Baringin Bonsai, Krisis Kepemimpinan Ninik Mamak di Gerbang Era Globalisasi* (Padang: Tanama Record, 1982), Side A



dengan ungkapan “*Alam takambang jadi guru*”.⁷⁵

Masyarakat Minangkabau yang adatnya dicetuskan oleh Dt. Katumanggungan dan Dt. Parpatih Nan Sabatang tidak menolak agama-agama besar dunia. Sebelum Islam datang, Hindu dan Budha pernah berkembang dan menjadi pandangan hidup dan budaya masyarakat. Diterimanya agama Hindu dan Budha, karena prinsip sumber daya yang dimiliki dan akan diberdayakan tidak demikian kontradiksi dengan sumber daya manusia menurut adat Minangkabau. *Raso pareso* adalah daya *spiritual* dan Hindu-Budha mementingkan daya dan alam *spiritual*. Sopan santun dan prilaku baik terhadap orang lain juga sama-sama mendapat perhatian baik dari Budha-Hindu maupun adat Minangkabau.⁷⁶

Begitu juga dengan Islam, ketika dia masuk ke Minangkabau⁷⁷ dengan membawa udara kehidupan baru yang bertujuan untuk merubah, memperbaiki serta penyempurna dari apa yang telah ada. Masyarakat Minangkabau menerimanya dengan tangan terbuka, dan memberikan respon positif,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁵ Irus Hakimy, Dt. Rajo Pangulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung: V. Remaja Karya, 1984), h. 2

⁷⁶ Bustanuddin Agus, *Islam dan Budaya Minang: Suatu kebutuhan dalam Menatap Masa Depan*, ([tp], 2005), h. 1

⁷⁷ Mengenai Islam masuk ke Minangkabau, berbagai pendapat sulit untuk ditelusuri kebenarannya. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa Islam telah masuk pada abad ke-12, ada yang berpendapat pada abad ke-14, bahkan ada yang menyimpulkan dengan berpegang pada almanak Tiongkok, yang menyebutkan bahwa sudah ditemukan satu etnis masyarakat Arab di Sumatra bagian Barat, pada tahun 674 M, artinya Islam telah masuk ke-daerah ini sejak tahun 674 atau abad pertama Hijriah atau abad ke-7 M. Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat, Lintasan Historis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 111. Tetapi M. Justra dalam bukunya, *Minangkabau, Overzicht van Land, Geschiede En Volks*, sebagaimana yang dikutip oleh Duski Samad, mengatakan bahwa Islam tidak berlaku di Minangkabau sebelum tahun 1550 M., karena keputusan orang-orang Minangkabau yang menghadap Albuquerque di Malaka pada tahun 1555 M., belum beragama, begitu juga Rue De Ariro, seorang kapitan dari Malaka menyebutkan bahwa tahun 1554 M., orang-orang Minangkabau belum beragama. Dari pendapat berbagai ahli sejarah tentang kapan Islam masuk yang lebih bisa diterima oleh banyak pihak adalah Islam baru dikenal oleh masyarakat Minangkabau dalam arti sebuah agama diperkirakan pada tahun 1600 atau abad ke-17 M. Duski Samad, *Syekh Burhanuddin dan Islamisasi Minangkabau: Syarak Mandaki, Adat Manurun*, (Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2002), h. 10



kendatipun ada tradisi dan kepercayaan mereka yang tidak sesuai dan bertentangan dengan syariat Islam, hal ini tidaklah sampai menimbulkan *kontradiksi* yang berarti dan menyulut terjadinya konflik serta perpecahan dalam masyarakat, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Islam tidak merombak semua nilai, pandangan dan prinsip hidup masyarakat. Prinsip-prinsip dan pandangan hidup yang luhur diperkokoh dan disempurnakan. Falsafah hidup “*alam takambang jadi guru*”, merupakan landasan utama bagi masyarakat Minangkabau diperkuat oleh ajaran Islam sebagai bagian dari metode untuk mengenal Allah sebagai Zat yang menciptakannya, dalam Islam dikenal dengan istilah *ayat kauniah*.⁷⁸ Ini dapat ditemukan dalam firman Allah surat *Ali Imran* ayat 191 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (ال عمران: ١٩١)

Sesungguhnya dalam penciptaan Langit dan Bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda (atas kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, duduk dan waktu berbaring; dan mereka memikirkan tentang kajadian Langit dan Bumi. (Sambil berkata): Ya Tuhan kami, bukanlah Engkau jadikan ini dengan percuma (sia-sia) Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksaan api neraka. (QS. *Ali Imran*: 191).⁷⁹

- 2) Penggunaan Metode-metode dakwah yang tidak menggunakan kekerasan tetapi dengan *bil Hikmah, al-Maui'zah, al-Hasanah dan wajadilhum bi al Lati Hiya Ahsan*.⁸⁰ Sebagaimana firman Allah:

⁷⁸ Eistanuddin Agus, *op. cit.*, h.3

⁷⁹ Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al Karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1988), Cet. ke-XXVII, h. 11-102

⁸⁰ Asep Muhyidin dan Agus Ahmad Safei, *Metode Pengembangan Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.78-82



ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) ke jalan (agama) Tuhanmu, dengan kebijaksanaan, dan pengajaran yang baik, dan berbantahlah (berdialo) dengan mereka dengan jalan yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang sesat dari jalan-Nya dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS. *an-Nahl*: 125).⁸¹

- 3) Masyarakat Minangkabau masih konsisten dalam berpegang kepada konsep pemikiran “*sa-adat salimbago, tuah sakato-cilako kaji basilang*”, sehingga sifat saling menghormati dan saling pengertian masih terpelihara di tengah-tengah prinsip dan keyakinan yang berbeda.⁸²

Sedangkan di sisi lain, hal ini menimbulkan implikasi yang berbeda di kalangan masyarakat Minangkabau. *Pertama*, Metode dakwah yang *persuasive* edukatif, yang diterapkan dapat memelihara keutuhan dan mencegah terjadinya konflik yang membawa kepada perpecahan, *Kedua*, Implementasi dari metode ini bagi sebagian golongan masyarakat Minangkabau terkesan sangat lambat, sehingga melahirkan gagasan yang bersifat *revolusioner* dan *radikal* dalam Islamisasi Minangkabau di berbagai aspek kehidupannya, yang realisasi dari hal ini, pada akhirnya memunculkan konflik dan pertentangan yang tajam antara dua golongan yang berbeda, dan berlangsung hampir 20 tahun (1803-1820),⁸³ dan berakhir dengan suatu

⁸¹ Mahmud Yunus, *op. cit.*, h. 399

⁸² Ampera Salim, Zulkifli, *Minangkabau dalam Catatan Sejarah yang Tercecer*, (Padang: Yayasan Cipta Budaya Indonesia, 2004), h. 29

⁸³ Gerakan ini dipelopori oleh tiga orang Haji yaitu: haji Miskin, haji Sumanik dan haji Piobang, yang memulai usahanya dengan memperkenalkan ajaran-ajaran Islam mazhab Hambali yang mereka katakan suci dan murni. Mereka mendekati masa bukan hanya di Mimbar, tapi langsung turun kelapangan dengan semboyan “*Gerakan Pemikiran Islam dengan memerangi Syirik, Kurafat dan Bid’ah sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan*”. Propaganda ini mendapat simpati dari berbagai pihak, termasuk ulama-ulama muda seperti Tuanku Nan Rencih di Agam, Tuanku Mansiangan di Tanah Datar, Saidi Muning dari Pasaman, dan beberapa Penghulu dan Ninik Mamak yang



musyawarah yang dilaksanakan di Bukit Marapalam dengan sebuah kesepakatan yang berbunyi:

“Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang” Atas Qudrat dan Iradat Allah Swt, telah dipertemukan di tempat ini hamba-hamba Allah untuk memperkatakan adat dan syarak, yang akan menjadi pegangan anak kemenakan, hidup yang akan dipakai, mati yang akan ditopang, bahwa adat dan syarak akan dikukuhkan menjadi pegangan di alam Minangkabau, dengan ini kami sambil menyerahkan kepada Allah Swt sambil mengikut kata Muhammad Saw. Penghulu kaganti Nabi, Rajo kaganti Allah, kami mengikrarkan bahwa: Adaik basandi kapado syarak, Syarak basandi kapado kitabullah, syarak mangato adaik mamakai. Sagalo undang adaik dan kelengkapannya dalam alam Minangkabau Luhak dan Rantau, Kampuang dan Nagari disesuaikan dengan tuntunan adaik dan syarak, ikrar dan kesepakatan ini disampaikan oleh sagalo ulama dan penghulu kepada rakyat di alam Minangkabau. Atas nama Syarak Syekh Burhanuddin Ulakan, Atas nama Adat Basa Ampek Balai, Disetujui oleh Rajo alam yang dipertuakan di Pagaruyung.”⁸⁴

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, seperti Penghulu Datuk Bendara di Alahan Panjang, Tuanku Imam bonjol, Tuanku Kubu Sanang, Tuanku Lubuk Alung dan lain-lain. Kemudian Tuanku Nan Renceh bekerja sama dengan Haji Miskin membentuk suatu organisasi yang akan mengkoordinir gerakan mereka dengan nama Dewan Harimau Nan Salapan yang dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh dari Luhak, kemudian menjadi pimpinan Harimau Nan Salapan, terdiri dari Tuanku Kubu Sanang, Tuanku Ladang Laweh dari Banuhampu, Tuanku Padang Lua, Tuanku Berapi dari Canduang, Tuanku Galuang dari Sungai Puar, Tuanku Lubua Aua dari Canduang dan Tuanku Biaro dan Tuanku Kapau. Burhanuddin Daya, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1990), h. 50-52
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungnya, seperti Penghulu Datuk Bendara di Alahan Panjang, Tuanku Imam bonjol, Tuanku Kubu Sanang, Tuanku Lubuk Alung dan lain-lain. Kemudian Tuanku Nan Renceh bekerja sama dengan Haji Miskin membentuk suatu organisasi yang akan mengkoordinir gerakan mereka dengan nama Dewan Harimau Nan Salapan yang dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh dari Luhak, kemudian menjadi pimpinan Harimau Nan Salapan, terdiri dari Tuanku Kubu Sanang, Tuanku Ladang Laweh dari Banuhampu, Tuanku Padang Lua, Tuanku Berapi dari Canduang, Tuanku Galuang dari Sungai Puar, Tuanku Lubua Aua dari Canduang dan Tuanku Biaro dan Tuanku Kapau. Burhanuddin Daya, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1990), h. 50-52

⁸⁴ Sumpah Sati Bukik Marapalam di Puncak Pato, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Utara, Kabupaten Tanah Datar yang melahirkan filosofi ABS-SBK. Secara metodologi ilmu sejarah konvensional memang belum ditemukan dokumen yang menyatakan peristiwa ini benar-benar terjadi, tapi peristiwa ini benar-benar ada karena ada metodologi sejarah alternatif yang menyebutkan bukan sejarah sebagai teks, tetapi sejarah sebagai fakta sosial. Telah terbukti ada sintesis adat dan Islam dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, tumbuh, berkembang, dipakai dan mengakar sebagai identitas masyarakat Minangkabau. Bukit Marapalam terletak antara desa Sungayang dengan Batu Bulek, yang terjadi pertama kali pada bulan syafar 1650 M (*ikhtilaf*), bahwa Syekh Burhanuddin bersama temannya yang berempat (Tuanku Bayang (Buyung Mudo) dari Bayang, Tuanku Kubung Tigo Balch Solok, Tuanku batu Hampar 50 Kota, dan Tuanku Padang Gantiang Batu Sangkar) dengan didampingi oleh Rajo Rantau Nan Sebelas yaitu: Amai Said, Rajo Dihulu, Rajo Mangkuto, Rajo Sulacman, Panduko Magek, Tan Basa, Majo Basa, Malako, Malakewi, Rangkayo Batuah, Rajo Sampono berangkat menemui Basa Ampek Balai (yaitu: Bendahara di Sungai Tarab, yang memegang adat dan pusaka, sekaligus berfungsi sebagai perdana menteri kerajaan Pagaruyung., Datuk Indomo di Saruaso yang memiliki kewenangan pertahanan dan keamanan kerajaan., Tuan Qadi di Padang Gantiang penanggung jawab utama bidang keagamaan dan Makhudum di Sumanik sebagai bendaharawan dan menteri keuangan nagari., selain itu Tuan Gadang di Batipuh sebagai panglima tertinggi Pagaruyung) atas inisiatif dari Tuanku Padang Gantiang, dan kemudian mereka melangsungkan pertemuan di puncak pato (*berasal dari Fatwa atau Petuah*) dengan dihadiri oleh Basa Ampek Balai dan Penghulu-penghulu terkemuka di Luhak Nan Tigo, dan menghasilkan suatu perjanjian yang kemudian dikenal dengan “*Piagam Bukit Marapalam*”. Di pihak lain, Penulis sejarah Minangkabau ada yang menempatkan bahwa perjanjian Bukit Marapalam sebagai puncak interaksi



Konsep Piagam Bukit Marapalam, yang ber-intikan “*Adat basandi*

Syarak, Syarak basandi Kitabullah” berimplikasi kepada adanya *akulturasi* (penggabungan) antara ajaran Islam dengan yang ditetapkan oleh adat dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Minangkabau. Adat Minangkabau merupakan peraturan dan undang-undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di Ranah Minang atau Sumatra Barat dalam batas tertentu. Adat Minangkabau juga dipakai dan berlaku bagi masyarakat Minang yang berada di perantauan di luar wilayah Minangkabau.⁸⁵ Adat juga dapat dipahami sebagai landasan bagi kekuasaan para Rajo atau Penghulu (pemimpin masyarakat adat), dan dipakai dalam menjalankan kepemimpinan masyarakat adat sehari-hari. Semua peraturan hukum dan perundang-undangan disebut adat, dan landasannya adalah tradisi yang diwarisi secara turun-temurun serta syariat Islam yang sudah dianut oleh masyarakat Minangkabau.

Aturan adat dibangun berlandaskan pada tiga ketetapan utama adat Minangkabau. Dua ketetapan pertama ditetapkan oleh Dt. Perpatih Nan Sabatang dan Dt. Katumanggungan, yaitu: *Pertama, Ulayat Adat Milik Bersama*, artinya tidak ada kepemilikan individu terhadap ulayat adat Minangkabau. Untuk pengaturan pemanfaatannya ditetapkan *Ninieck Mamak* sebagai pembuat kebijakan. *Kedua, Penurunan Ulayat Adat pada Perempuan Garis Ibu*. Kaum perempuan diamanahkan sebagai pemegang ulayat adat dan diturunkan kepada anak perempuannya sebagai pemegang *estafet* ulayat adat.

dan sintesis akhir dari konflik cultural yang terjadi pada abad ke-19 M., yakni setelah berakhirnya perang Padri. Duski Samad, *op. cit.*, h. 80-82

⁸⁵ Darwis Thaib glr. Dt. Sidi Bandaro, *Seluk Beluk Adat Minangkabau*, (Jakarta: N.V. Nusantara Bukittinggi, 2000), h. 71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perempuan pemegang ulayat adat tersebut dikenal dengan istilah *Bundo Kandung*. Ketiga, Islam Agama Masyarakat Adat Minangkabau. Akibat ketetapan ketiga tersebut di masyarakat adat lahir satu lagi kutup kepemimpinan masyarakat yang bertugas menjaga dan membimbing masyarakat dalam segi agama Islam yaitu *Alim Ulama*. Ketetapan ketiga Masyarakat Adat Minangkabau ditetapkan di puncak Pato Bukik Marapalam. Kesepakatan pemimpin adat dengan pemimpin agama Islam, kaum ulama menyepakati penambahan satu ketetapan adat untuk melengkapi dua ketetapan adat yang sudah ada sebelumnya.⁸⁶

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa aturan adat dibangun berlandaskan pada tiga ketetapan utama adat Minangkabau. Dua ketetapan pertama ditetapkan oleh Dt. Perpatih Nan Sabatang dan Dt. Katumanggungan, yaitu: **Pertama**, ulayat adat milik bersama. **Kedua**, penurunan ulayat adat pada perempuan garis ibu. **Ketiga**, Islam Agama Masyarakat Adat Minangkabau. Tiga ketetapan adat tersebut dikenal dengan "*Tali Tigo Sapilin*" adat Minangkabau, yang mengikat masyarakat adat sebagai satu kesatuan masyarakat adat Minangkabau.

Dengan demikian, dianggap sempurna adat Minangkabau, dua ketetapan adat yang tumbuh dari tanah, disempurnakan dengan satu ketetapan yang datang dari langit, kesempurnaan ini dikenal dengan "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" (ABS-SBK). Kepemimpinan masyarakat adat mengerucut pada tiga majelis musyawarah yang memiliki peran masing-masing di masyarakat adat. Kelembagaan kepemimpinan itu

⁸⁶ *Ibid.*, h. 72



dikenal dengan "*Tungku Tigo Sajarangan*" (TTS). Komponen "*Tungku Tigo Sajarangan*" (TTS) adalah sebagai berikut:

- 1) Majelis Musyawarah Alim Ulama, majelis yang bertugas sebagai pengontrol/penilai/pengarah mewakili peran Tuhan (Nan Bana) terhadap kesesuaian kebijakan-kebijakan yang dibuat dengan ajaran agama Islam sebagai agama masyarakat adat. Majelis ini juga bertanggungjawab menjaga pelaksanaan ajaran Islam di masyarakat adat Minangkabau.
- 2) Majelis Musyawarah *Ninik Mamak*, majelis pembuat kebijakan, baik untuk pemanfaatan ulayat adat, maupun untuk kebijakan-kebijakan lainnya yang akan diberlakukan di masyarakat adat.
- 3) Majelis Musyawarah *Bundo Kanduang*, majelis pemegang ulayat adat Minangkabau dan harta-harta bersama lainnya serta penanggungjawab pendidikan generasi penerus masyarakat adat.⁸⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kepemimpinan masyarakat adat mengerucut pada tiga majelis musyawarah yang memiliki peran masing-masing di masyarakat adat. Kelembagaan kepemimpinan itu dikenal dengan "*Tungku Tigo Sajarangan*" (TTS). Komponen "*Tungku Tigo Sajarangan*" (TTS) yaitu: Majelis musyawarah alim ulama, majelis musyawarah *ninik mamak*, dan majelis musyawarah *bundo kanduang*.

Lembaga adat "*Tungku Tigo Sajarangan*" (TTS) tersebut ada pada tiga tingkatan komunitas yang memiliki ulayat adat, seperti "*Komunitas Nagari*" Pemilik "*Ulayat Adat Nagari*", "*Komunitas Suku*" pemilik "*Ulayat Adat Suku*" dan "*Komunitas Kaum*" pemilik "*Ulayat Adat Kaum*". Pimpinan

⁸⁷ *Ibid.*, h. 73



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertinggi dari masing-masing komunitas tersebut adalah *Penghulu*, yaitu pemimpin yang di pilih dari kaum *Ninik Mamak* sebagai pemimpin komunitas Kaum, suku atau Nagari.⁸⁸

Struktur masyarakat yang terbentuk oleh penerapan ketetapan adat tersebut terbangunlah sebuah masyarakat adat yang dipimpin yang melahirkan *adagium* adat tentang konsep kepemimpinan adalah: "*Kamanakan Barajo Ka Mamak, Mamak Barajo Ka Panghulu, Panghulu Barajo Ka Mufakat, Mufakat Barajo Ka Nan Bana, Nan Bana berdiri sendirioyo*". Seorang Rajo atau Penghulu memegang kekuasaan karena keturunan, dan kekuasaan itu menjadi sah, karena didukung oleh para ulama yang memegang otoritas agama dalam masyarakat sebagai implementasi *adagium Adat basandi syarak; Syarak basandi Kitabullah*.⁸⁹

Masyarakat adat Minangkabau telah mengalami tiga periode besar kekuasaan yang meliputinya, yaitu: Kerajaan Pagaruyung Abad ke-14, Pemerintahan Kolonial Belanda abad ke-17 dan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1945, sampai saat ini. Kerajaan Pagaruyung adalah kerajaan yang didirikan oleh Aditiawarman, keluarga raja Majapahit.⁹⁰

Pada masa kolonialis Eropa, wilayah hukum Adat dibatasi hanya pada pengaturan jabatan penghulu, kekuasaan atas tanah ulayat, peraturan waris, perkawinan, dan adat istiadat saja. Kekuasaan hukum, keamanan dan teritorial diambil alih oleh pemerintah kolonial. Keadaan ini berlanjut sampai

⁸⁸ *Ibid.*, h. 74

⁸⁹ *Ibid.*, h. 75

⁹⁰ *Ibid.*, h. 75



pada zaman kemerdekaan. Pada masa era orde baru pemerintahan Indonesia pemerintah menerapkan UU No. 5 Tahun 1979, nagari-nagari di Minangkabau dipecah-pecah menjadi beberapa desa sebagai pemerintahan terendah. Akibat dari penerapan tersebut terjadi pergeseran cara pandang terhadap *ulayat adat*. Kepemilikan bersama *ulayat adat* dieliminir dengan ketentuan peraturan pemerintah menjadi milik *Ninik Mamak Kapalo Warih* untuk *Ulayat Kaum*, *Pangulu Suku* untuk *Ulayat Suku* dan *Pangulu-pangulu Nagari* untuk *Ulayat Nagari*.⁹¹

Setelah berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah tahun 1999 dan gerakan *Kembali ka Nagari*, Adat Minang mendapat tempat yang lebih baik dan Nagari dijadikan sebagai salah satu pemerintahan terendah di Negara Indonesia. Upaya kembali untuk menegaskan adat Minangkabau di nagari mengalami stagnasi, akibat kepemilikan ulayat adat tidak kembali dijadikan sebagai milik bersama.⁹²

Menurut M. Rasyid Manggis, pada dasarnya adat Minangkabau hanya satu yaitu adat tunggal yang berintikan pada ajaran budi yang menuntut manusia untuk hidup bermoral dalam setiap tingkah laku dan perbuatannya.⁹³ Sedangkan dalam perkembangan selanjutnya, adat Minangkabau diklasifikasikan dalam dua tingkatan dengan sifat yang berbeda yaitu:

⁹¹ *Ibid.*, h. 76

⁹² *Ibid.*, h. 77

⁹³ M. Rasyid Manggis, *Limpapch: Adat Minangkabau*, (Bukittinggi: Perc. Unit II Bukittinggi, 1975), Cet. ke-II, h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1) *Adat Nan Babuhua Mati*

Adat nan babuhua mati merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang melandasi setiap peraturan atau perundang-undangan yang akan disusun dan diterapkan bagi seluruh masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu *Adat Nan Babuhua Mati* bersifat mutlak dan tak boleh dirobah dari apa yang telah ditetapkan. Hal ini dinyatakan dalam *petatah* yang berbunyi “*Adat nan lakang dek paneh – indak lapuak dek ujan, diasak indak ka layua, dibucuik indak mati*”. *Adat nan babuhua mati* terbagi atas dua bagian yaitu:

- a) *Adat Nan Sabana Adat*, yaitu ketetapan dan ketentuan Allah yang tertuang dalam Alquran yang disebut dengan ayat *qauliah*, hadits dan Sunnah Rasulullah dan alam semesta yang disebut dengan ayat *Kauniah*.
- b) *Adat Nan Diadatkan*, yaitu peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di seluruh Minangkabau sebagaimana yang telah digariskan oleh Dt. Parpatiah Nan Sabatang dan Dt. Katumanggungan. Dalam *petatah* adat disebutkan “*dek lamo alam baputa, urang batambah kambang juo, kamanakan manjadi banyak, mangko dibuek sawah jo ladang, dibuek adaik - dikarang undang - disusun tangkai ciek-ciek - dipaku katiang panjang – makanan urang tigo luak. Manolah luak nan tigo? Nan tuo, Luak Tanah Data, nan tangah Luak Agam, nan bunsu*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Luak Limo Puluah, taruih ka Rantau jo Pasisia, Alam Surambi Sungai Pagu.”⁹⁴

2) *Adat Nan Babuhua Sentak*

Adat Nan Babuhua Sentak merupakan ketentuan tambahan sebagai penjabaran dari *adat nan babuhua mati*, yang disusun dan diundangkan sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat dari masing-masing nagari. Oleh karena itu, *adat nan babuhua sentak* bersifat *relatif* dan *fleksibel* dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hal ini dinyatakan oleh pepatah adat yang berbunyi “*adaik sapanjang jalan, cupak sapanjang batuang*”. *Adat Nan Babuhua Sentak* terbagi atas dua bagian yaitu:

- a) *Adat Nan Teradat*, yaitu peraturan yang dibuat dengan musyawarah untuk mufakat dari masing-masing nagari berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat dengan ketentuan tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan aturan dasar yang terdapat dalam *Adat Nan Sabana Adat* dan *Adat Nan Diadatkan*. Umpamanya adalah cara pelaksanaan *baralek* atau pesta perkawinan.
- b) *Adat Istiadat*, yaitu peraturan yang berhubungan dengan kesenangan dan permainan anak nagari. Umpamanya adalah randai, saluang, rabab dan lain-lain.⁹⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa adat Minangkabau di klasifikasikan dalam dua tingkatan dengan sifat yang berbeda yaitu:

⁹⁴ *Ibid.*, h. 34

⁹⁵ *Ibid.*, h. 34





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, *Adat Nan Babuhua Mati* bersifat mutlak dan tidak boleh dirobah dari yang telah ditetapkan. *Adat Nan Babuhua Mati* terbagi atas dua yaitu: a. *Adat Nan Sabana Adat* yaitu, ketetapan dan ketentuan Allah yang tertuang dalam Alquran disebut dengan ayat *qauliyah*. Hadis dan Sunnah Rasulullah dan alam semesta yang disebut dengan ayat *kauniyah*, b. *Adat Nan Diadatkan* yaitu, peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di seluruh Minangkabau sebagaimana yang telah digariskan oleh Dt. Parpatiah Nan Sabatang dan Dt. Katumanggungan.

Kedua, *Adat Nan Babuhua Sentak* bersifat *relatif* dan *fleksibel* dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kemajuan zaman. *Adat Nan Babuhua Sentak* terbagi atas dua yaitu: a. *Adat Nan Sabana Adat* yaitu, peraturan yang dibuat dengan musyawarah untuk mufakat dari masing-masing nagari berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat. Umpamanya adalah cara pelaksanaan *baralek* atau pesta perkawinan, b. *Adat Istiadat*, yaitu peraturan yang berhubungan dengan kesenangan dan permainan anak nagari. Umpamanya adalah randai, saluang, rabab dan lain-lain.

Adapun di dalam tambo adat Minangkabau dinyatakan dalam *petatah* yang berbunyi “*Sawah gadang satampang baniah, makanan urang tigo luhak, nan sa adaik salimbago, saundang sapusako*”. *Petatah* ini memberi pengertian bahwa masyarakat Minangkabau hidup dalam satu tuntunan dan aturan dasar yang sama, yang bersumber dari falsafah “*alam takambang jadi guru*”, yang



kemudian diintegrasikan dengan syariat Islam, yang lebih dikenal dengan “adat basandi syarak, syarak basandi kitab Allah”.⁹⁶

Undang-undang adat Minangkabau, dibentuk dan dirancang oleh Dt. Papatiah Nan Sabatang dan Dt. Katumanggungan pada awal abad ke- 13 M., dan tetap dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur hubungan nagari dengan nagari, luhak dengan luhak, alam dengan rantau. Undang-undang adat berfungsi sebagai pengatur keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dalam nagari. Di sisi lain undang-undang adat juga mengatur fungsi “*Urang Nan Ampek Jinih*” dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, mengatur hubungan *mamak* dengan *kemenakan* dan antar sesama mereka.⁹⁷ Undang-undang tersebut dibentuk di atas dua sendi atau landasan pokok yaitu:

1) *Cupak Nan Duo*

Cupak adalah ukuran isi yang terbuat dari *betung* (bambu), dalam *petatah* disebut dengan “*cupak tauladan batuang*”, secara *logat* berarti bahwa *betung* (bambu) biasanya digunakan harus sesuai dengan suatu ukuran isi tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan musyawarah. Hasil dari musyawarah ini disebut dengan *Cupak Usali*.⁹⁸ *Cupak Nan Duo* terbagi atas dua yaitu:

a) *Cupak Usali* yaitu, ukuran standar yang telah ditetapkan dan tidak boleh dirobah karena sebagai pedoman dasar bagi masyarakat

⁹⁶ *Ibid.*, h. 36

⁹⁷ M. Rasyid Manggis, *Minangkabau: Sejarah Ringkas dan Adatnya*, op. cit., h. 99

⁹⁸ atau ukuran cupak usali adalah 12 tahlil. 1 tahlil mempunyai berat 16 emas, 1 emas 2 ½ gram; 12 tahlil adalah 12 x 16 x 2 ½ gram = 480 gram. Jadi 1 cupak sama dengan 1 pond ukuran cara Barat. Ukuran isi yang lebih besar disebut gantang, 1 gantang mempunyai isi 4 cupak. *Ibid.*, h. 101



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Minangkabau dalam menentukan ukuran-ukuran yang lainnya. *Cupak Usali* yaitu ketentuan-ketentuan Allah yang tertera dalam Alquran dan alam semesta serta hadis dan sunnah Rasulullah. Dalam *petatah* adat *Cupak Usali* dinyatakan dengan “*Gantang nan papek, bungka nan piawai, nan batiru batuladan, nan balukih balimbago*”.

- b) *Cupak Buatan* yaitu, ukuran yang dibentuk oleh *urang nan ampek jinih* yang dalam *petatah* disebut dengan “*urang nan tanduak ditanam, darah bakacau, dagiang dilapah, dilicak pinang, ditapuang batu*” dari masing-masing nagari berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat setempat dengan landasan musyawarah untuk mufakat.⁹⁹

2) *Kato Nan Ampek*

*Kato*¹⁰⁰ *Nan Ampek* merupakan pepatah adat yang dijadikan pedoman dan ukuran dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, seperti bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan keamanan.

a) *Kato Pusako*

Kato Pusako merupakan *kato* yang diciptakan oleh Dt. Parpatiah Nan Sabatang dan Dt. Katumanggungan, pada hakikatnya terletak dalam “*Bakato sapatah sadang*” artinya “*Biang katambuak, gantiang kaputuih, nan kareh indak tatakiak, kok lunak indak tasudu, kato bana manahan uji, hukum adia manahan bandiang jadi pidoman*”

⁹⁹ *Ibid.*, h. 101

¹⁰⁰ *Kato* dalam bahasa Minang diartikan dengan seluruh ucapan yang berisi nasehat, ajaran atau perbandingan hukum, biasanya *kato nan ampek* selau bersifat kiasan atau perumpamaan, dapat ditafsirkan sesuai dengan kondisi dan situasi yang melingkupinya. Gouzali Saydam, *Kamus Lengkap Bahasa Minang: Minang-Indonesia, Bagian Pertama*, (Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), 2004), Cet ke-I, h. 185



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dek urang banyak”. Adapun yang termasuk kato pusako diantaranya adalah:

“*Kato rajo kato malimpah
Kato panghulu kato manyalasai
Kato malin kato hakikat
Kato manti kato panghubung
Kato dubalang kato mandareh
Kato parampuan kato marandah
Kato rang banyak kato bagalau
Mamaek manuju barih
Tantang bana lubang katabuak
Malantiang manuju tangkai
Tantang bana buah karareh
Manabang manuju pangka
Tantang bana ruch karabah*”¹⁰¹

b) *Kato Mufakat*

Kato Mufakat merupakan landasan demokrasi di Minangkabau yang telah menjadi adat nan diadatkan sejak dahulu kala dalam setiap kebijakan atau dalam mencari solusi dari setiap persoalan yang dihadapi. Dalam pepatah dinyatakan:

“*Duduak surang basampik-sampik
Duduak basamo balapang-lapang
Kato surang dibulati
Kato basamo dipaiyokan
Lamak siriah lega carano
Lamak bunyi lega kato
Nan rajo kato mufakat
Nan bana kato baiyo*”¹⁰²

c) *Kato Dahulu Batapati*

Kato Dahulu Batapati mengandung makna bahwa setiap hasil kesepakatan yang berdasarkan musyawarah, harus tetap dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, sebagaimana yang

¹⁰¹ M. Rasyid Manggis, *op. cit.*, h. 103

¹⁰² Agus Hakimi, *op. cit.*, h. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinyatakan oleh *petatah* adat “*janji harus dipacik arek, ikrar nan wajib dimulihkan*”. Apabila tidak dapat dilaksanakan pada waktu telah disepakati karena ada sesuatu yang tidak memungkinkan akan hal itu, dilakukan pengunduran waktu yang tepat sehingga apa yang telah direncanakan dapat terwujud sesuai dengan harapan. Hal ini dinyatakan dalam *pepatah* yang berbunyi:

“*Suri tagantuang nan batanun,
Cupak tatagak nan baisi,
Aia taganang nan basaua,
Kayu batakua nan barabahkan,
Buatan nan tatap ditaguhi*”.¹⁰³

d) *Kato Kudian Kato Bacari*

Dengan landasan “*janji harus dipacik arek, ikrar wajib dimulihkan*”, pengingkaran terhadap hasil musyawarah merupakan sesuatu yang amat dicela oleh adat dan syarak. Pembatalan hasil kesepakatan awal yang didasarkan atas pertimbangan manfaat yang lebih besar dengan dibatalkan daripada dilaksanakan, hal itu tidaklah dianggap sebagai suatu yang tercela. Hal ini dinyatakan dalam pepatah adat yang berbunyi:

“*Dek pikia palito hati,
Dek ranuang saribu aka
Pangana nan indak sakali tumbuah
Mangko dibaliak-baliak bak mamanggang
Diulang-ulang bak manyapuah
Buliah bakisa tampek duduak, asa di lapiak nan sahalai
Buliah baraliah tampek takag asa di tanah nan sabingkah*”.¹⁰⁴

¹⁰³ *Ibid.*, h. 15

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 16



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yus Dt. Parpatiah, dalam ceramah adat yang berjudul “*Baringin*

Bonsai: Krisis Kepemimpinan di Minangkabau” mengatakan bahwa *Kato Nan Ampek* merupakan suatu istilah dari suatu aturan yang dapat diposisikan dalam tiga bentuk:

- a) Dalam proses penentuan kebijakan atau hukum. *Kato nan ampek* dalam hal ini adalah “*kato pusako, kato mufakat, kato dahulu batapati dan kato kudian kato bacari*”.
- b) Dalam penentuan atau pengukuhan hasil musyawarah atau keputusan. *Kato Nan Ampek* dalam hal ini adalah “*kato iyo kato baturuik, kato indak kato mati, kato antah kato tatagun, kato shubhat kato mambunuah*”.
- c) Dalam tata pergaulan sehari-hari. *Kato Nan Ampek* dalam hal ini adalah “*kato mandata, kato malereng, kato mendaki dan kato manurun*”.¹⁰⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Undang-undang adat Minangkabau, dibentuk dan dirancang oleh Dt. Parpatiah Nan Sabatang dan Dt. Katumanggungan pada awal abad ke-13 M., dan tetap dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur hubungan nagari dengan nagari, luhak dengan luhak, alam dengan rantau. Undang-undang tersebut dibentuk di atas dua sendi atau landasan pokok yaitu: **Pertama**, *Cupak Nan Duo* yaitu, suatu ukuran isi tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan musyawarah. *Cupak Nan Duo* dibagi dua bentuk yaitu: a. *Cupak Usali* yaitu, ukuran standar yang

¹⁰⁵ Yus. Dt. Parpatih, *Baringin Bonsai, Krisis Kepemimpinan Ninik Mamak di Gerbang Era Globalisasi* (Padang: Tanama Rekor, 1982), Side A



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah ditetapkan dan tidak boleh diroboh, karena *Cupak Usali* ketentuan-ketentuan Allah yang tertera dalam Alquran dan alam semesta serta hadis dan sunnah, b. *Cupak Buatan* yaitu, ukuran yang dibentuk oleh “urang nan ampek jirih” dari masing-masing nagari berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat setempat dengan landasan musyawarah untuk mufakat.

Kedua, *Kato Nan Ampek* yaitu, merupakan pepatah adat yang dijadikan pedoman dan ukuran dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, seperti bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan keamanan. *Kato Nan Ampek* dibagi empat bentuk yaitu: a. *Kato Pusako* yaitu, *kato* yang diciptakan oleh Dt. Parpatiah Nan Sabatang dan Dt. Katumanggungan, pada hakikatnya terletak dalam “*Bakato sapatah sadang*”, b. *Kato Mufakat* yaitu, merupakan landasan demokrasi di Minangkabau yang telah menjadi adat nan diadatkan sejak dahulu kala dalam setiap kebijakan atau dalam mencari solusi dari setiap persoalan yang dihadapi, c. *Kato Dahulu Batapati* yaitu, mengandung makna bahwa setiap hasil kesepakatan yang berdasarkan musyawarah, harus tetap dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, d. *Kato Kudian Kato Bacari* yaitu, pembatalan hasil kesepakatan awal yang didasarkan atas pertimbangan manfaat yang lebih besar dengan dibatalkan daripada dilaksanakan, hal itu tidaklah dianggap sebagai suatu yang tercela.

Undang-undang adat Minangkabau yang dibentuk di atas dua sendi yaitu *Cupak Nan Duo* dan *Kato Nan Ampek*, terbagi dalam empat bentuk *ikhtisar* adat Minang, sering disebut *Undang Nan Empat*, sebagaimana dipahami dan hidup dalam masyarakat Minangkabau. Adat Minangkabau



sebagai peraturan dapat diringkas dalam sistematika yang disebut *Undang Nan Empat*¹⁰⁶ yaitu:

1) Undang-Undang dalam Nagari

Undang-undang dalam nagari berfungsi untuk mengatur ketertiban antara sesama isi nagari dalam segala aspek kehidupannya dalam mewujudkan suasana yang penuh ketentraman dan kedamaian. Undang-undang ini terbagi atas dua bentuk yaitu suruhan dan larangan. Pelanggaran terhadap undang-undang tersebut akan dikenakan hukuman adat yaitu hukuman budi. Dalam *pepatah* dinyatakan dengan “*nan sakik kato, nan malu tampak*”. Bunyi undang-undang ini adalah sebagai berikut:

*Barek samo dipikul, ringan samo dijinjing
Saciok bak ayam, sadancıang bak basi,
Sakik basilau, mati bajanguak
Salah batimbang, hutang babayie.*¹⁰⁷

2) Undang-Undang Nagari

Undang-undang nagari adalah seperangkat aturan yang berhubungan dengan struktur suatu nagari, seperti kata *petatah* “*Nagari ba*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁶ lihat St. Mahmud dan A. Manan Rajo Pangulu, *Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah*, (Medan: Pustaka Indonesia, 1987), Cetakan ke-IV

¹⁰⁷ Undang-undang dalam Nagari mengatur tata hubungan warga masyarakat dalam sebuah nagari. Sistem yang dipakai adalah tipikal masyarakat komunal, dengan ciri-ciri: **Pertama**, setiap orang secara alami langsung menjadi warga Nagari. **Kedua**, demokrasi langsung, karena para Penghulu sangat dekat dengan masyarakatnya, musyawarah dan mufakat dilaksanakan tanpa diwakilkan. **Ketiga**, gotong royong. Kebersamaan dalam menghadapi segala masalah dalam Nagari. **Keempat**, *social safety net*, semua warga Nagari, dapat mengandalkan bahwa dirinya akan dibantu secara bersama-sama oleh masyarakat jika dia mengalami kesusahan yang mendesak. Schubungan untuk menjaga hubungan yang harmonis dan saling tolong menolong antar semua warga, anggota masyarakat Nagari selalu berusaha berkomunikasi dengan semua orang dengan bahasa yang tidak langsung, disebut *baso-basi*. Selain itu, pada *rites of passage* seperti kelahiran, khitanan, perkawinan, dan kematian selalu diadakan acara adat dengan format yang khusus dan baku, tetapi dapat sedikit berbeda antara satu Nagari dengan Nagari lainnya, sesuai dengan prinsip “*adat selingkar Nagari*”. Termasuk dalam undang-undang dalam Nagari adalah adat-istiadat yang menyangkut hiburan dan rekreasi, seperti *randai*, pertandingan layang-layang dan buru babi.



ampek suku, suku ba buah paruik, kampuang batuo, rumah batunganai”.

Bunyi undang-undang ini adalah sebagai berikut:

*Nagari bakaampek suku
Dalam suku babuah paruik
Basawah baladang
Babalai bamusajik
Balabuah batapian.*¹⁰⁸

3) Undang-Undang Luhak dan Rantau

Pada awalnya daerah Minangkabau adalah daerah tiga *Luhak*, sedangkan daerah *Rantau* dan *Pasisia* menjadi wilayah Minangkabau setelah terjadinya *transmigrasi* lokal dari *Darek*, yang dalam *petatah* adat disebut “*gadang nan bakabuangan, panjang nan bakaratan, leba nan basibiran*”. *Transmigrasi* lokal dari *Darek tigo Luhak* ke-daerah *Rantau* dan *Pesisir* menuntut adanya undang-undang yang mengatur hubungan antara *Luhak* dan *Rantau* serta tugas dan kewajiban *panghulu* dan *rajo* di daerah mereka masing-masing. Bunyi undang-undang ini adalah sebagai berikut:

*Luhak bapangulu
Rantau barajo
Bajalan samo indak tasundak
Malenggang samo indak tapampeh.*¹⁰⁹

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁸ Undang-undang Nagari berisi aturan dasar dan syarat-syarat berdirinya sebuah Nagari, yaitu: syarat-syarat yang menunjukkan kemampuan penduduk beberapa kampung untuk mendirikan suatu susunan masyarakat yang lebih teratur. Syarat-syarat ini meliputi kemampuan ekonomi, prasarana dan jumlah penduduk atau suku. Disyaratkan paling kurang ada empat suku yang akan bergabung dalam Nagari dan masing-masing suku itu harus cukup besar, dikatakan terdiri dari beberapa *paruik* atau kelompok yang satu keturunan dari seorang nenek. Para Penghulu keempat suku itu secara kolektif menjadi Pimpinan Nagari. Perkawinan hanya berlaku secara *eksogami*, yaitu antara warga suku yang berlainan. Harta benda tidak bergerak seperti sawah ladang dan rumah dimiliki secara bersama-sama oleh kaum perempuan dalam suatu suku, dan menjadi pusaka yang dimiliki secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu. Laki-laki mengawasi dan mendayagunakan harta benda. Semua warga suku dapat mengambil manfaat dari harta benda. Selain prasarana ekonomi seperti sawah dan ladang, jalan dan jembatan, serta sarana kebersihan, Nagari juga harus mampu mendirikan sebuah Masjid untuk tempat ibadah dan sebuah Balaiung tempat para Penghulu bersidang.



4) Undang-Undang Nan Duo Puluah

Undang-Undang Nan Duo Puluah merupakan undang-undang hukum dan undang-undang penyelesaian hukum yang disusun oleh Dt. Parpatiah Nan sabatang dan Dt. Katumanggungan sebagai alat pemeriksa dan penghukum dari tiap-tiap kesalahan atau kejahatan yang dilakukan masyarakat nagari baik yang bersifat *individual* ataupun secara kelompok.¹¹⁰

Undang-Undang Nan Duo Puluah adalah dua puluh pasal yang dipakai oleh para Penghulu dalam mengadili dan memutus perkara kejahatan yang terjadi dalam Nagari. Delapan pasal yang pertama merinci nama-nama tindak kejahatan.¹¹¹ Sedangkan dua belas pasal berikutnya berisi nama-nama tuduhan¹¹² dan dugaan tindak kejahatan.¹¹³

Undang-Undang Nan Duo Puluah terbagi atas dua bagian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu:

- a) *Undang-Undang Nan Salapan*, yaitu undang-undang yang menyebutkan jenis-jenis kejahatan atau kesalahan yang dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁹ Masyarakat Minangkabau meyakini adanya kesatuan *genealogis*, semua Nagari-nagari dalam wilayah Minangkabau dan juga kesatuan *genealogis* penduduknya, karena itu Adat Minang sebagai produk budaya adalah satu kesatuan juga. Nenek moyang orang Minangkabau diyakini *turun* dari puncak gunung merapi, dan Nagari tertua di Minangkabau adalah nagari Pariangan di Kabupaten Tanah Datar sekarang. Orang-orang yang satu keturunan menurut garis keturunan Ibu berkelompok membentuk sebuah suku, dan dipimpin oleh seorang laki-laki yang disebut Penghulu. Aturan ini berlaku di wilayah Minangkabau yang lebih dahulu berkembang, yaitu di Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Limapuluh Koto. Dalam perkembangannya, di daerah Rantau, meskipun terdapat juga suku-suku dan Penghulu, tiap-tiap Rantau dipimpin oleh seorang Raja yang biasanya berasal dari daerah Luhak juga, atau mendapat mandat dari Raja Pagaruyung.

¹¹⁰ Idrus Hakimi, *op. cit.*, h. 20

¹¹¹ *Salah nan Salapan* yaitu: **Pertama**, *dago-dagi*, perbuatan yang menimbulkan kekacauan umum. **Kedua**, *sumbang-salah*, perbuatan tidak senonoh. **Ketiga**, *samun-sakar*, perampokan. **Keempat**, *maling-curi*, pencurian. **Kelima**, *tikam-bunuh*, penyerangan dan pembunuhan. **Keenam**, *lacung-kicuh*, penipuan. **Ketujuh**, *upch-racun*, pemberian bahan yang mengandung racun untuk membunuh atau menyebabkan sakit. **Kedelapan**, *siar-bakar*, pembakaran rumah atau bangunan dengan sengaja.

¹¹² *Tuduh nan Enam* berisi nama-nama tuduhan

¹¹³ *Cemo nan Enam* berisi nama-nama kecurigaan atau dugaan tindak kejahatan. Kejahatan yang dituduhkan atau diduga dilakukan hanya dapat dihukum jika terbukti secara meyakinkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara pribadi atau berkelompok. *Undang-Undang Nan Salapan* tersebut adalah (a). *Tikam-Bunuah*, tikam yaitu menusuk atau melukai orang lain dengan senjata tajam dan bunuah yaitu menghilangkan jiwa orang lain. (b). *Upeh-Racun*, upeh yaitu makanan yang telah diberi ramuan beracun dan racun yaitu ramuan yang dapat merusak dan menghilangkan jiwa seorang. (c). *Samun-Saka*, samun yaitu mengambil barang orang lain secara paksa ditempat yang sunyi dan saka yaitu merampas harta orang lain dengan membunuh pemiliknya. (d). *Sia-Baka*, sia yaitu menyalakan api di suatu tempat dan baka yaitu menghabiskan sesuatu dengan api. (e). *Maliang-Curi*, maliang yaitu mengambil barang orang tanpa setahu pemiliknya pada waktu malam hari dan curi, dilakukan pada siang hari. (f). *Dago-Dagi*, dago yaitu kesalahan yang dilakukan kemenakan terhadap mamaknya dan dagi yaitu kesalah yang diperbuat mamak terhadap kemenakannya. (g). *Umbua-Umbi*, umbuak yaitu menipu atau merusak harga diri orang lain dengan tutur bahasa yang lembut dan sopan dan umbi yaitu dengan cara yang kasar atau dengan ancaman. (h). *Sumbang-Salah*, sumbang yaitu pekerjaan atau tingkah laku yang janggal atau diluar yang biasanya dan salah adalah sesuatu yang dipandang telah keluar dari ketentan yang berlaku.¹¹⁴

- b) *Undang-Undang Nan Duo Baleh*, yaitu undang-undang yang memuat *tuduah* dan *cemo* terhadap orang yang dianggap sebagai pelaku kejahatan.

¹¹⁴ Bouzali Saydam, *op. cit.*, h. 411



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tuduah terdiri dari enam pasal yaitu: (a). *Tatumbang-Taciak*, *tatumbang* yaitu, tuduhan yang tidak dapat diingkari oleh orang yang dituduh dan *taciak* yaitu, tuduhan yang tidak yang diingkari oleh yang orang yang dituduh. (b). *Tatando-Tabukti*, *tatando* yaitu, ditemukan milik terdakwa ditempat kejadian peristiwa dan *tabukti* yaitu, ditemukan barang milik korban di tangan terdakwa. (c). *Tacancang-Tarageh*, *tacancang* yaitu, ditemukan bekas-bekas milik atau senjata terdakwa di tubuh korban dan *tarageh* yaitu, ditemukannya bekas senjata atau perlawanan korban ditubuh terdakwa. (d). *Taikek-Takabek*, *taiekek* yaitu, terdakwa tertangkap saat melakukan kejahatan dan *takabek* yaitu terdakwa ditangkap ditempat kejadian. (e). *Talala-Takaja*, *talala* yaitu, terdakwa dapat ditangkap ditempat persembunyiannya dan *takaja* yaitu, terdakwa dapat ditangkap setelah menjadi buronan. (f). *Tahambek-Tapukua*, *tahambek* yaitu, terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengepungan dan *tapukua* yaitu, terdakwa ditangkap setelah melalui jalan kekerasan.¹¹⁵

Cemo adalah dugaan kuat terhadap seseorang sebagai pelaku kejahatan atau kesalahan yang dalam *undang-undang nan duo baleh* terdiri dari enam pasal yaitu: (a). *Basuriah bak sipasin-bajajak nan bak bakiak* yang maksudnya adalah ditemukan bekas-bekas atau jejak-jejak yang apabila ditelusuri lebih jauh akan mengantarkan kepada hasil sebagaimana yang diharapkan. (b). *Anggang lalu-Ata jatuah*, maksudnya adalah ditemukannya seseorang ditempat kejadian

¹¹⁵ Ibid., h. 398



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Undang-undang adat Minangkabau yang dibentuk di atas dua sendi yaitu *Cupak Nan Duo* dan *Kato Nan Ampek*, terbagi dalam empat bentuk *ikhtisar* adat Minangkabau, sering disebut dengan *Undang Nan Empat* yaitu: **Pertama**, Undang-Undang dalam Nagari yaitu, berfungsi untuk mengatur ketertiban antara sesama isi nagari dalam segala aspek kehidupannya dalam mewujudkan suasana yang penuh ketentraman dan kedamaian. Undang-undang ini terbagi atas dua bentuk yaitu suruhan dan larangan. Pelanggaran terhadap undang-undang tersebut akan dikenakan hukuman adat yaitu hukuman budi, **Kedua**, Undang-Undang Nagari yaitu, seperangkat aturan yang berhubungan dengan struktur suatu nagari, **Ketiga**, Undang-Undang Luhak dan Rantau yaitu, *Transmigrasi* lokal dari *Darek tigo Luhak* ke-daerah *Rantau* dan *Pesisir* menuntut adanya

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 71



undang-undang yang mengatur hubungan antara *Luhak* dan *Rantau* serta tugas dan kewajiban *panghulu* dan *rajo* di daerah mereka masing-masing.

Keempat, Undang-Undang Nan Duo Puluah yaitu *Undang-Undang Nan Duo Puluah* merupakan undang-undang hukum dan undang-undang penyelesaian hukum yang disusun oleh Dt. Parpatiah Nan sabatang dan Dt. Katumanggungan sebagai alat pemeriksa dan penghukum dari tiap-tiap kesalahan atau kejahatan yang dilakukan masyarakat nagari baik yang bersifat *individual* ataupun secara kelompok. *Undang-Undang Nan Duo Puluah* terbagi atas dua bagian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu: a. *Undang-Undang Nan Salapan*, yaitu undang-undang yang menyebutkan jenis-jenis kejahatan atau kesalahan yang dilakukan secara pribadi atau berkelompok, b. *Undang-Undang Nan Duo Baleh*, yaitu undang-undang yang memuat *tuduh* dan *ceso* terhadap orang yang dianggap sebagai pelaku kejahatan.

Hukum adat adalah suatu kepastian yang dihasilkan oleh kaidah-kaidah nyata yang terwujud atas kesadaran akan pentingnya suatu keteraturan hidup bermasyarakat, memiliki kekuatan mengikat, mengatur tata kehidupan masa kini dan masa mendatang, menetapkan secara tegas tentang hak dan kewajiban dari masing-masing warga masyarakat yang diiringi dengan sanksi apabila terjadi suatu pelanggaran.¹¹⁷

Senada dengan hal di atas, dapat diketahui bahwa hukum memiliki fungsi tertentu, yang menurut Wiliam A. Haviland adalah sebagai berikut:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet ke-V, h. 74



1) Hukum menegaskan hubungan antara anggota masyarakat dengan menentukan perilaku yang layak dalam keadaan tertentu, sehingga masing-masing anggota masyarakat mengetahui dengan pasti tentang hak dan kewajiban mereka.

2) Hukum membagi wewenang untuk menggunakan paksaan dalam melakukan sanksi hukum.

3) Hukum menegaskan hubungan-hubungan sosial dan menjamin adanya *fleksibilitas* dalam berbagai situasi dan kondisi tertentu.¹¹⁸

Hukum adat bersifat fleksibel dan dinamis terhadap pola perkembangan masyarakat, sehingga mampu bertahan dalam mengatur kehidupan manusia, sebagaimana yang ditegaskan oleh Hazairin dalam kongres Adat pada pertengahan Bulan Maret 1957 M di Bukittinggi, seperti yang dikutip oleh Rasyid Manggis, “*sekiranya negara runtuh, masyarakat hukum adat tidak akan runtuh, melainkan akan tetap mempunyai fungsi yang kuat dalam masyarakat*”.¹¹⁹

Sanksi hukum dalam adat Minangkabau tidak mengenal sistem hukuman fisik seperti yang terdapat dalam sistem hukum yang lain, tetapi lebih menitikberatkan pada hukuman non fisik atau lebih dikenal dengan hukuman budi. Menyelesaikan berbagai persoalan atau menetapkan suatu keputusan hukum, menurut Idrus Hakimi terdapat empat macam cara yaitu:

1) *Hukum Ilmu* adalah suatu metode penyelesaian dan penetapan hukum berdasarkan ilmu, kebijaksanaan atau ketetapan yang berlaku sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹⁸ William A. Haviland, *Antropologi*: Penj. R.G. Sockadijo. Judul Asli *Anthropology* 4th Edition, (Jakarta: Erlangga, 1988), *Edisi ke-IV*, Jilid II, h. 180

¹¹⁹ Rasyid Manggis, *op. cit.*, h. 111



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kaidah “*Mungkin jo patuik*”. Hukum ilmu biasanya diterapkan terhadap suatu perkara yang telah difahami dan diketahui duduk persoalannya oleh hakim secara lengkap dan sempurna.

- 2) *Hukum Kurenah*, suatu metode penyelesaian dan penetapan hukum terhadap kasus pidana atau perdata adat berdasarkan pengamatan dan analisis hukum terhadap tingkah laku atau kurenah seseorang yang diduga sebagai pelaku kejahatan. Metode ini biasanya diterapkan terhadap suatu kasus yang tidak ditemui bukti yang kuat dengan keterangan saksi yang lemah.
- 3) *Hukum Bainah*. Bainah berasal dari bahasa Arab, yang dalam hukum Minangkabau pra Islam disebut dengan “Hukum Sumpah”. Metode ini biasanya diterapkan untuk menyelesaikan suatu kasus perkara yang tidak ditemukan bukti dan keterangan yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam mengungkap kasus tersebut.
- 4) *Hukum Perdamaian*, yaitu suatu metode hukum yang biasanya diterapkan terhadap kasus perdata atau pidana adat yang terjadi antara orang sesama anggota keluarga atau seketurunan. Metode ini dalam *petatah* adat dinyatakan dengan “*Hukum Palu-Palu Ula dalam Baniah*”.¹²⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa menyelesaikan berbagai persoalan atau menetapkan suatu keputusan hukum terdapat empat macam cara yaitu: hukum ilmu, hukum *kurenah*, hukum *bainah*, dan hukum perdamaian.

¹²⁰ Arus Hakimi, *op. cit.*, h. 17-18



c. Sejarah Hukum Keluarga *Matrilineal* Minangkabau

Sejarah hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau secara turun temurun berdasarkan cerita para tokoh di Minangkabau. Masa abad kemudian berganti, pemimpin silih berganti tapi tetap dengan gelar Datuk Katumanggungan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang. Hingga datang masanya kejayaan Majapahit, kerajaan besar di daerah Jawa. Dengan panglimanya Adityawarman, kerajaan itu bersiap menyerang dan menguasai Minangkabau. Minangkabau adalah kerajaan yang dikenal sebagai nagari tanpa polisi. Kerajaan yang tak pernah menyiapkan angkatan perang, karena mengutamakan kedamaian bahkan untuk daerah rantau.¹²¹

Kerajaan Minangkabau memang kerajaan yang tidak menyukai peperangan dan lebih menyukai cara-cara damai, Datuk Katumanggungan berupaya keras mencari cara agar peperangan benar-benar terhindar dan tidak terjadi di bumi Minangkabau, hingga akhirnya Datuk Katumanggungan bersiasat pada saat panglima Adityawarman sampai di bumi Minangkabau, Minangkabau tidak akan disambut dengan pasukan dan peperangan, melainkan disambut dengan keramahtamahan dan akan dipinang untuk dijodohkan dengan adik kandungnya yang bernama putri Jamilah (dalam literatur lain namanya Putri Reno Mandi).¹²²

Akhirnya sampailah panglima perang Majapahit Adityawarman di daerah Minangkabau. Adityawarman yang datang dari Jawa merasa kaget dengan penyambutan yang dilakukan oleh tentara Minangkabau. Dirinya

¹²¹ <http://rianpunyablog.blogspot.com/2011/01/sejarah-sistem-matrilineal-minangkabau.html>.

¹²² Diakses pada Rabu, 10 Oktober 2018, pukul 05:45 WIB, h. 1

¹²² *Ibid.*, h. 1



merasa heran karena Datuk Katumenggungan justru menyambutnya dengan penuh keramahan, rasa persaudaraan, dan bukannya menyambut dengan bala tentara perang. Utusan dari istana Pagaruyung datang menemuinya dan mengatakan niatnya untuk meminang panglima Adityawarman untuk diikahkan dengan sang putri dari kerajaan yaitu putri Jamilah yang merupakan adik dari Datuk Katumenggungan. Dan tidak hanya itu demi menghindari perang yang dampaknya akan menyengsarakan rakyat, panglima Adityawarman akan diangkat menjadi raja di Minangkabau apabila bersedia menikah dengan Putri Jamilah. Tentu saja hal itu membuat sang panglima Adityawarman terkejut dan langsung menerima tawaran itu.¹²³

Melihat gelagat bahwa panglima Adityawarman akan menerima tawaran itu, sang Datuk berusaha mencari cara agar keturunan Putri Jamilah nantinya tetap menjadi orang Minangkabau dan agar semua orang tahu bahwa keturunan Putri Jamilah mendapatkan warisan dari kerajaan Minangkabau, bukannya mendapatkan warisan dari kekuasaan Adityawarman, akhirnya ditetapkanlah adat *Batali Bacambua* yang langsung merubah struktur masyarakat Minangkabau.

*Nan dikatoka adat nan batali cambua, iyolah hubungan mamak dengan bapak, dalam susunan rumah tanggo, sarato dalam korong kampuang. Dek Datuak Parpatiah nan Sabatang, didirikan duo kakuasaan, balaku diateh rumah tanggo, iyolah tungganai jo rajonyo, nan korong kampuang barajo mamak, rumah tango barajo kali, di rumah gadang batungganai. Dicambua tali malakek.*¹²⁴

¹²³ *Ibid.*, h. 2

¹²⁴ Adat *batali bacambua* mengatur hubungan antara bapak dan mamak. Intinya di dalam rumah tangga terdapat dua kekuasaan, pertama kekuasaan bapak, kedua kekuasaan Mamak, yaitu saudara laki-laki dari pihak ibu. Pemikiran itu dibawa Datuk Parpatiah Nan Sabatang pada musyawarah dengan cerdas pandai di balairung sari. Menyadari penting perubahan mufakat didapatkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak saat itu susunan aturan masyarakat berubah. Dahulu bapak mewariskan kepada anak, sekarang harus kepada kemenakan. Dahulu suku didapat dari bapak, sekarang dari ibu. Ini tidak lebih dari kecerdikan Datuak Papatiah Nan Sabatang dan Datuk Katumenggungan. Dengan datangnya Adityawarman, ia tetap menginginkan agar kekuasaan tetap berasal dari Datuak Katumenggungan. Dengan waris turun dari mamak, bukan dari bapak inti, nantinya akan memposisikan Adityawarman tidak lebih dari raja *transisi* bukan raja sebenarnya dari alam Minangkabau. Sebab Datuak Katumenggungan yang menyerahkan kekuasaan padanya, dengan sistem adat yang baru, terkesan hanya menitip kekuasaan, hingga datang masanya nanti kemenakannya akan lahir dari perkawinan Puteri Jamilah, adiknya dengan Adityawarman.¹²⁵

Cerita tersebut yang secara turun temurun dipercaya oleh masyarakat Minangkabau¹²⁶ sebagai cikal bakal dari gerakan *matrilineal* yang masih dijalani oleh masyarakat Minangkabau, sekarang garis keturunan dan warisan ditetapkan berdasarkan garis keturunan ibu, dan hak perwalian secara adat dari seorang anak bukan terdapat pada ayah kandungnya atau ayah biologisnya, melainkan ada pada *mamak* atau saudara laki-laki ibu yang dalam bahasa Minangkabau disebut *mamak*.

¹²⁵ *Ibid.*, h. 2

¹²⁶ Penulis tidak tahu pasti apakah ini bisa dijadikan sebagai patokan utama untuk mengetahui mengapa sistem kekerabatan ini lahir. Sebab cerita ini diambil dari novel berjudul "Negara Kelima" karya ES Go. Dalam salah satu bab novel tersebut ada cerita tentang sejarah munculnya sistem kekerabatan *matrilineal* di Minangkabau. Kurang lebih ceritanya seperti di atas. Namun, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa sistem kekerabatan ini telah lahir sebelum kedatangan Adityawarman, dan semenjak kedatangan Adityawarman sistem ini *vacum* selama kurang lebih 70 tahun.



Sistem Adat Minangkabau

Semenjak zaman Kerajaan Pagaruyung, ada tiga sistem adat yang dianut oleh suku Minangkabau yaitu:

1) *Sistem Kelarasan Koto Piliang*

Sistem adat ini merupakan gagasan adat yang digariskan oleh Datuk Katumanggungan. Ciri yang menonjol dari adat *Koto Piliang* adalah *otokrasi* atau kepemimpinan menurut garis keturunan yang sudah ditetapkan seperti penurunan rajo, penurunan tersebut tetap berlandaskan pada garis ibu. *Sako* diturunkan dari mamak ke kamanakan (anak saudara perempuan pemegang pusako). Pusako diturunkan dari ibu ke anak perempuannya. Sistem adat *Koto Piliang* banyak dianut oleh suku Minang di daerah Tanah Datar dan sekitarnya. Ciri-ciri rumah *gadang*-nya adalah berlantai dengan ketinggian bertingkat-tingkat.¹²⁷

2) *Sistem Kelarasan Bodi Caniago*

Sistem adat ini merupakan gagasan adat yang digariskan oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang. Sistem adatnya merupakan *antitesis* terhadap sistem adat *Koto Piliang* dengan menganut paham *demokrasi*. Penurunan *Sako* dan *Pusako* tetap berlandaskan pada garis ibu, tetapi pilihan pemegang penurunan tidak terpaku pada satu keturunan. Pilihan lebih diprioritaskan kepada yang memiliki kemampuan kepemimpinan, baik sebagai *ninik mamak* penurunan *Sako*, maupun kaum *Bundo Kandung* untuk penurunan *Pusako*. Sistem adat ini banyak dianut oleh

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹²⁷ Darwis Thaib glr. Dt. Sidi Bandaro, *op. cit.*, h. 123



suku Minang di daerah Lima Puluh Kota. Cirinya tampak pada lantai rumah gadang yang rata.¹²⁸

3) *Sistem Klarasan Panjang*

Sistem ini digagas oleh adik laki-laki dari dua tokoh di atas, yang bernama Mambang Sutan Datuk Suri Dirajo nan Bamego-mego. Dalam adatnya *dipantangkang* (dilarang) pernikahan dalam nagari yang sama. Sistem ini banyak dianut oleh luhak Agam dan sekitarnya. Dewasa ini semua sistem adat tersebut, sudah diterapkan secara bersamaan dan tidak *dikotomis*.¹²⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa semenjak zaman Kerajaan Pagaruyung, ada tiga sistem adat yang dianut oleh suku Minangkabau yaitu: *Sistem klarasan koto piliang, sistem klarasan bodi caniago, dan sistem klarasan panjang*.

Pola pewarisan *Sako* (kepemimpinan Adat) dan *Pusako* (Ulayat Adat), suku Minang menganut pola *matrilineal* sebagai akibat dari Ketetapan adat yang kedua (Penurunan Ulayat Adat pada Perempuan garis ibu). Setiap anak-anak yang lahir dari perempuan pemegang ulayat adat suku adalah satu suku atau satu marga. Merekalah yang memiliki hak untuk memanfaatkan harta bersama milik Suku. Harta Milik bersama tersebut disebut "*harta pusaka tinggi*" harta yang tidak boleh dibagi dan dijual, tapi boleh dimanfaatkan. Harta tersebut menjadi harta abadi milik Suku atau Kaum yang berfungsi sebagai "*social safety net*" anggota komunitas suku/kaum. Sementara harta

¹²⁸ *Ibid.*, h. 124

¹²⁹ *Ibid.*, h. 125



yang diperoleh oleh individu/keluarga disebut "*harta pusaka rendah*". Harta pusaka rendah diwariskan menurut hukum Islam.¹³⁰

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan¹³¹ *matrilineal*. Secara singkat, sistem *matrilineal* diartikan sebagai susunan kekerabatan garis keturunan ditentukan berdasarkan garis ibu.¹³² Kebudayaan Minangkabau dianggap sebagai suatu masyarakat dengan sistem kekeluargaan yang ganjil di antara suku-suku bangsa yang lebih dahulu maju di Indonesia, yaitu menurut sistem kekeluargaan yang *matrilineal*. Inilah yang biasanya dianggap sebagai salah satu unsur yang memberi *identitas* kepada kebudayaan Minangkabau; terutama dipopulerkan oleh roman-roman Balai Pustaka pada periode pertama dari abad ke-20.¹³³

Prinsip kekerabatan masyarakat Minangkabau adalah *matrilineal descen* yang mengatur hubungan kekerabatan melalui garis ibu. Dengan prinsip ini, seorang anak akan mengambil suku ibunya. Garis turunan ini juga mempunyai arti pada penerusan harta warisan, seorang anak akan memperoleh warisan menurut garis ibu. Warisan yang dimaksud adalah

¹³⁰ *Ibid.*, h. 126

¹³¹ Kekerabatan di Minangkabau terdiri dari dua bentuk yaitu: **Pertama**, kekerabatan dalam suku, terjadi karena sistem *matrilineal* yang dianut orang Minangkabau. Contoh: ibu-anak, *mamak-kamanakan*, dsb. **Kedua**, kekerabatan luar suku, terjadi karena adanya perkawinan. Contoh: *sumando-pasumandan*, *minantu-mintuo*, *induk bako-anak pisang*, dsb.

¹³² Anonimus, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 1984), h. 2173. Garis ibu yaitu istilah untuk menyebutkan sistem kekerabatan yang mengacu pada garis keturunan ibu. Sistem kekerabatan di Minangkabau tentunya merupakan penjabaran ajaran syarak *hablumminannas* (hubungan antar manusia), merupakan formulasi untuk menyikapi fitrah Allah yang menjadikan manusia berkelompok-kelompok dan berbangsa-bangsa. Penyempurnaan penyikapan atas fitrah dan sekaligus implementasi dari ajaran syarak, selain hubungan-hubungan yang wajib dijaga menurut ajaran Islam, nenek moyang orang Minangkabau menyempurnakan kekerabatan dengan merefleksikan hubungan menurut garis keturunan ibu sebagai berikut: Hubungan antara ibu dan anak, bapak dan anak, hubungan kekerabatan *mamak jo kamanakan*, hubungan kekerabatan *suku jo sako*, hubungan kekerabatan *induk bako jo anak pisang*, hubungan kekerabatan *sumando jo pasumandan*, dll.

¹³³ Hajizar, *Studi Tekstual dan Musikologis Kesenian Tradisional Minangkabau Sijombang: Kaba Anggun Nan Tungga Magek Jabang*, (Padang: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia, 1988), h.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa harta peninggalan yang sudah turun-temurun menurut garis ibu. Secara lebih luas, harta warisan (*pusaka*) dapat dikelompokkan dua macam, yaitu *pusaka tinggi* dan *pusaka rendah*. *Pusaka tinggi* adalah harta yang diwarisi dari ibu secara turun-temurun; sedangkan *pusaka rendah* adalah warisan dari hasil usaha ibu dan bapak selama mereka terikat perkawinan.¹³⁴

Konsekwensi dari sistem pewarisan *pusaka tinggi*, setiap warisan akan jatuh pada anak perempuan; anak laki-laki tidak mempunyai hak memiliki, hanya hak mengusahakan; sedangkan anak perempuan mempunyai hak memiliki sampai diwariskan pula kepada anaknya. Seorang laki-laki hanya boleh mengambil sebagian dari hasil harta warisan sesuai dengan usahanya, sama sekali tidak dapat mewariskan kepada anaknya. Apabila ia meninggal, harta itu akan kembali kepada ibunya atau kepada adik perempuan dan kemenakan-nya.¹³⁵

Sehubungan dalam sistem kekerabatan *matrilineal*, satu *rumah gadang* dihuni oleh satu keluarga. Rumah ini berfungsi untuk kegiatan-kegiatan adat dan tempat tinggal. Keluarga yang mendiami rumah gadang adalah orang-orang yang seketurunan yang dinamakan *saparuik* (dari satu perut) atau setali darah menurut garis keturunan ibu. Ibu, anak laki-laki dan anak perempuan dari ibu, saudara laki-laki ibu, saudara perempuan ibu serta anak-anaknya, atau cucu-cucu ibu dari anak perempuannya disebut *saparuik*, karena semua mengikuti ibunya. Sedangkan ayah (suami ibu) tidak termasuk keluarga di

¹³⁴ Umar Yunus, *Kebudayaan Minangkabau dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002), h. 39

¹³⁵ *Ibid.*, h. 40



rumah gadang istrinya, akan tetapi menjadi anggota keluarga dari *paruik* rumah gadang tempat ia dilahirkan (ibunya).¹³⁶

Matrilineal merupakan salah satu aspek utama dalam mendefinisikan *identitas* masyarakat Minang. Adat dan budaya mereka menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu yang dikenal dengan *Samande* (se-ibu), sedangkan ayah mereka disebut oleh masyarakat dengan nama *Sumando* (ipar) dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga. Kaum perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa, dijuluki dengan *Bundo Kandung*, memainkan peranan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum lelaki dalam posisi mereka sebagai *mamak* (paman atau saudara dari pihak ibu), dan penghulu (kepala suku). Pengaruh yang besar tersebut menjadikan perempuan Minang disimbolkan sebagai *Limpapeh Rumah Nan Gadang* (pilar utama rumah).¹³⁷ Kekuasaan sangat dipengaruhi oleh penguasaan terhadap aset ekonomi, kaum lelaki dari keluarga pihak perempuan tersebut masih tetap memegang *otoritas* atau memiliki *legitimasi* kekuasaan pada *komunitas*-nya.

Tambo Alam Minangkabau digunakan sebagai dasar dalam menjelaskan mengenai asal-usul nenek moyang, pengelompokan anggota masyarakat, asal-usul nagari, dan termasuk di dalamnya adalah tata laku anggota masyarakat mempunyai budayanya, dalam hal ini masyarakat Minangkabau. Pola tingkah laku seseorang dalam keluarga, kerabat, kerabat

¹³⁶ Hajizar, *op. cit.*, h. 46-47

¹³⁷ Anita Julita, *Wanita dan Rumah Tangga di Indonesia: Pengertian Budaya dan Praktek Sosial*, (Jakarta: Jaya Nusa, 2000), h. 54



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luas, dan masyarakat diatur dalam Tambo Alam Minangkabau melalui sistem *matrilineal*.¹³⁸

Tambo Alam Minangkabau diatur adat sopan santun dalam berbicara yang disebut dengan kata-kata melereng, termasuk ke dalam *tradisi* dan *ekspresi* lisan. Kata-kata melereng disampaikan melalui kata-kata kiasan seperti *mamang*, *bidal*, *pantun*, *pepatah*, *petitih*, dan lain-lain. Kata *melereng* akan lebih mengena sasaran dari pada kata-kata yang disampaikan dengan kalimat biasa, karena bagi orang Minang, berkata-kata dengan kiasan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari.¹³⁹ Sejalan dengan itu, Datuak Sanggoeno Diradjo menjelaskan bahwa orang Minang diajarkan oleh adatnya supaya arif dan bijaksana dalam menafsirkan kemana maksud perkataan seorang. Sikap arif dan bijaksana yang dikaitkan dengan sistem *matrilineal* ini ada dalam *Tambo Alam Minangkabau*, bunyinya sebagai berikut:

Arih dikilek kato aying (Arif dengan kilat kata aying) *Alun bakilek alah bakalam* (Belum berkilat sudah masuk ke dalam tubuh), *Bulan lah ganok tigo paluah* (Bulan sudah tanggal tiga puluh), *Takilek ikan dalam aiya* (Terkilat ikan dalam air), *Ikan takilek jalo tibo* (Ikan terkilat jala tiba), *Lah tantu jantan batinonyo* (Sudah tentu jantan betinanya).¹⁴⁰

Sifat-sifat tenggang rasa merupakan bagian dari sifat yang terpuji dalam hidup bermasyarakat, tujuannya agar dalam setiap tindakan selalu menjaga perasaan orang lain, seperti yang dikatakan oleh adat Minangkabau:

Gadang jan malendo (Besar jangan melenda), *Panjang jan malindih* (Panjang jangan menindas), *Cadiak jan manjua kawan* (Cerdik jangan menjual kawan), *Nan tuo dihormati* (Yang tua dihormati), *Nan ketek*

¹³⁸ t. Sanggoeno Diradjo Ibrahim, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009), h. 332-333

¹³⁹ *Ibid.*, h. 334-335

¹⁴⁰ *Ibid.*, h. 336-337



disayangi (Yang kecil disayangi), *Sama gadang baok bakawan* (Sama besar bawa berkawan).¹⁴¹

Penuturan adat di atas, lekat kaitannya dengan posisi *Bundo Kanduang* pada masyarakat Minangkabau yang menganut sistem *matrilineal*. Mengacu kepada Datuak Sanggoeno Diradjo, masyarakat Minangkabau memiliki beberapa pengertian mengenai *Bundo Kanduang*, diantaranya:

- 1) *Bundo Kanduang* adalah seorang raja atau ratu dari kerajaan Minangkabau pada salah satu periode pemerintahan di masa lampau
- 2) *Bundo Kanduang* adalah sebutan kepada kelompok perempuan yang berpakaian adat Minangkabau sebagai pendamping kelompok *ninik mamak* dalam acara-acara *seremonial* yang diadakan oleh pemerintah
- 3) *Bundo Kanduang* adalah salah satu unit lembaga kerapatan adat di Minangkabau yang mungkin terdapat pada semua tingkat lembaga kerapatan adat itu, mulai dari tingkat nagari sampai tingkat alam Minangkabau.
- 4) *Bundo Kanduang* adalah seorang (perempuan) pemimpin non-formal untuk seluruh perempuan beserta anak-cucu yang ada dalam kaumnya.¹⁴²

Kedudukan *Bundo Kanduang* dalam masyarakat dimaknai sebagai perempuan yang diberi kehormatan dan keutamaan menurut adat. *Bundo Kanduang* sebagai penerima ketentuan keturunan menurut garis ibu, penerima ketentuan rumah tempat tinggal diberikan kepada perempuan, penerima ketentuan bahwa harta dan sumber ekonomi diutamakan untuk perempuan, penerima ketentuan bahwa yang menyimpan hasil usaha perekonomian adalah

¹⁴¹ *Ibid.*, h. 338

¹⁴² *Ibid.*, h. 345-347



juga perempuan, serta pemegang hak suara istimewa dalam bermusyawarah.

Ketentuan ini dapat dicermati dalam *petatah petitih* yang berbunyi sebagai berikut:

Bundo Kanduang dalam kaum (Bunda Kandung dalam kaum), *Lalimpeh rumah nan gadang* (Tiang utama (pemimpin) di rumah gadang), *Amban puruak pagangan kunci* (Pemegang kunci simpanan khusus), *Pusek jalo kumpulan tali* (Pusat jala kumpulan tali), *Ka pai tampek batanyo* (Akan pergi tempat bertanya), *Kok pulang tampek babarito* (Jika pulang tempat berita), *Sumarak dalam nagari* (Tampak semarak dalam nagari), *Hiasan dalam kampuang* (Menjadi hiasan dalam kampung), *Nan gadang basa batuah* (Yang agung besar bertuah), *Kok induik tampek baniat* (Ketika hidup tempat berniat), *Kok mati tampek banazar* (Setelah mati tempat bernazar), *Ka unduang-unduang ka Madinah* (Kain pelindung ke Madinah), *Ka payuang panji ka sarugo* (Jadi payung panji untuk ke surga).¹⁴³

Adat Minang dalam *Tambo Alam Minangkabau* diterapkan melalui *Adat nan sabana adat*, maksudnya sesuatu yang seharusnya (dikerjakan), *menurut alur, patut*, dan seharusnya menurut tempat dan masa, agama dan perikemanusiaan, serta menjadi aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku Minang yang berlaku turun-temurun. Termasuk dalam adat ini adalah silsilah keturunan menurut garis ibu '*matrilineal*', pernikahan dengan pihak luar persukuan, dan suami tinggal dalam lingkungan kerabat istehi (*eksogami-matrilocal*), serta harta *pusaka tinggi* yang secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu dan menjadi milik bersama *sajurai* yang tidak boleh diperjualbelikan.¹⁴⁴

Sistem *matrilineal* merupakan sebuah sistem yang dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau sampai sekarang ini. Di Minangkabau terkenal dengan garis keturunan *matrilineal*. Biasanya wanita-wanitanya yang

¹⁴³ *Ibid.*, h. 348-373

¹⁴⁴ *Ibid.*, h. 375



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki rumah dan sawah. Rumahtangga-rumahtangga dikelompokkan menjadi *clan* yang didasarkan pada garis keturunan wanita. Setiap anak wanita mendapat warisan dari ibunya dengan memperoleh bagian yang sama besarnya dari sawah milik ibunya. Tanah tidak dapat dijual kecuali dengan syarat yang ketat dan dalam situasi khusus dan hanya dengan persetujuan dari kepala suku. Ketegasan adat Minang dengan konsepsi *matrilineal* terlihat jelas melalui kedudukan dan hak yang jelas terhadap harta, yang terbagi menjadi *pusako*, *harta pusako tinggi*, dan *harta pusako rendah*. *Pusako* adalah milik kaum secara turun-temurun menurut sistem *matrilineal*, berbentuk *material*, seperti sawah, ladang rumah gadang, dan lain-lainnya. *Pusako tinggi* adalah harta pusaka kaum yang diwariskan secara turun-temurun berdasarkan garis ibu.¹⁴⁵

Pusaka tinggi lainnya boleh digadaikan bila dalam keadaan sangat mendesak, yaitu untuk tiga hal saja: **Pertama**, *gadiah gadang indak balaki* (perempuan dewasa yang belum bersuami karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pernikahan); **Kedua**, *maik tabujua tanggah rumah* (meninggalnya salah satu anggota keluarga yang tidak memiliki biaya untuk penyelenggaraan jenazahnya); **Ketiga**, rumah gadang katirisan (rumah adat atau rumah tempat tinggal keluarga besar yang sudah bocor yang tidak memiliki biaya untuk memperbaikinya). Sementara *pusako rendah* adalah harta pusaka yang didapat selama perkawinan antara suami dan istri. Pusaka ini disebut juga dengan harta bawaan, artinya modal dasarnya berasal dari

¹⁴⁵ *Ibid.*, h. 378



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing kaum. *Pusako rendah* diwariskan kepada anak, istri dan saudara laki-laki berdasarkan hukum *faraidh* atau hukum Islam.¹⁴⁶

Kebudayaan *matrilineal* ini pula kemudian masyarakat Minangkabau memiliki satu kebudayaan lainnya, yaitu merantau.¹⁴⁷ Terkadang ada yang menyalahartikan merantau dengan *migrasi*. Merantau dianggap sama saja dengan *migrasi*. Dalam kebudayaan Minangkabau, terdapat perbedaan antara merantau dan bermigrasi. *Migrasi* dari segi sosial-ekonomi berarti perpindahan orang atau golongan bangsa secara besar-besaran menuju daerah-daerah baru. Penyebabnya bermacam-macam, yakni karena kepadatan penduduk, bencana alam dan perubahan ilmiah, tekanan ekonomi, politik, atau keagamaan.¹⁴⁸ Rantau, secara bahasa berarti daerah pesisir. Kato mendefinisikan kata kerja rantau yakni meninggalkan kampung halaman. Merantau berarti pergi ke daerah rantau atau ke daerah pesisir, meninggalkan kampung halaman.¹⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *karakteristik* dari sistem kekerabatan *matrilineal* dalam kebudayaan Minangkabau dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

¹⁴⁶ *Ibid.*, h. 379

¹⁴⁷ Kebudayaan merantau menjadi mengakar kuat dalam kebudayaan Minangkabau. Apabila pada masa awal abad ke-20 kegiatan merantau masyarakat Minangkabau masih berbentuk upaya mencari kekayaan untuk kemudian kembali lagi ke tanah halamannya, hal tersebut mengalami perubahan dengan semakin besarnya pengaruh kolonialisme Belanda dan Jepang yang mengakibatkan mereka yang merantau belum tentu berniat untuk kembali lagi ke kampungnya. Laki-laki pergi merantau untuk bekerja dengan membawa istri dan anak-anaknya. Orang-orang yang mencari ilmu dan berkuliah telah terpicat dengan daerah rantainya. Kampung halaman hanya dikunjungi di saat-saat tertentu. Kampung halaman tidak menjanjikan apapun, setidaknya secara ekonomi dan pendidikan. Dan pola merantau yang lebih didasarkan oleh alasan ekonomi lebih menjadi alasan utama dari merantainya masyarakat Minang dibandingkan alasan awal yaitu dengan tujuan untuk mengembangkan kampung (*nagari*).

¹⁴⁸ Anonimus, *op. cit.*, h. 2241

¹⁴⁹ Suyoshi Kato, *op. cit.*, h. 4



1) Keturunan diurutkan berdasarkan garis darah ibu, seorang Minangkabau akan masuk ke dalam suku dimana ibunya berasal.

2) Suku terbentuk menurut garis ibu. Seorang laki-laki di Minangkabau tidak bisa mewariskan sukunya kepada anaknya. Jadi, jika tidak ada anak perempuan dalam satu suku, maka dapat dikatakan bahwa suku itu telah punah.

3) Tiap orang diharuskan menikah dengan orang luar sukunya (atau dikenal sebagai sistem *eksogami*). Menurut aturan adat Minangkabau seseorang tidak dapat menikah dengan seseorang yang berasal dari suku yang sama. Apabila hal itu terjadi, maka ia dapat dikenakan hukum adat, seperti dikucilkan dalam pergaulan.

4) Meskipun perempuan memegang seluruh kekayaan keluarga, pihak yang sebenarnya berkuasa dalam penentuan keputusan hal dalam keseharian dan lingkungan adalah saudara laki-laki tertua dalam keluarga tersebut, yang disebut sebagai *mamak*. Adapun yang menjalankan kekuasaan di Minangkabau adalah laki-laki, sedangkan kaum perempuan di Minangkabau diposisikan sebagai pengikat, pemelihara, dan penyimpan harta pusaka.

5) Perkawinan bersifat *matrilokal*, yaitu suami mengunjungi rumah istrinya.

6) Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh *mamak* kepada kemenakannya dan dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.¹⁵⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵⁰ Sistem kekeluargaan di Minangkabau, terutama daerah yang berada di daerah pegunungan, laki-laki pada dasarnya tidak memiliki harta dan diharuskan menikah dengan perempuan dari suku selain suku asalnya



Hubungan Kekerabatan, Bentuk Perkawinan Menurut Syarak dan Adat, dan Tradisi Perkawinan Minangkabau

Hubungan kekerabatan, bentuk perkawinan menurut syarak dan adat, dan tradisi perkawinan Minangkabau, untuk lebih jelas dan terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Hubungan Kekerabatan Minangkabau

Garis keturunan dalam masyarakat Minangkabau diperhitungkan menurut garis *matrilineal*. Seseorang termasuk keluarga ibunya dan bukan keluarga ayahnya. Seorang ayah berada di luar keluarga anak dan istrinya. Seorang ayah dalam keluarga Minangkabau termasuk keluarga lain dari keluarga istri dan anaknya, sama halnya dengan seorang anak dari seorang laki-laki akan termasuk keluarga lain dari ayahnya. Karena itu, keluarga *batih* tidak merupakan kesatuan yang *mutlak*, meskipun tidak dapat dibantah bahwa keluarga *batih* memegang peranan penting juga dalam pendidikan dan masa depan anak-anak mereka, dan tidak hanya berfungsi untuk pengembangan keturunan.¹⁵¹

Kesatuan keluarga yang terkecil atas dasar prinsip terurai di atas adalah *Paruik* (perut). Dalam sebagian masyarakat Minangkabau, ada kesatuan *Kampung* (kampung) yang memisahkan *paruik* dengan suku sebagai kesatuan kekerabatan. Dari ketiga macam kesatuan kekerabatan ini, *paruik* yang betul-betul dapat dikatakan sebagai kesatuan yang benar-benar bersifat *genealogis*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵¹ Soentjaringrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, 2004), Cet. ke-20, h. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepentingan suatu keluarga diurus oleh seorang laki-laki dewasa dalam keluarga yang bertindak sebagai *niniak mamak*. Istilah *mamak* berarti saudara laki-laki ibu. Tanggungjawab untuk memperhatikan kepentingan sebuah keluarga memang terletak pada pundak seorang atau beberapa orang *mamak*. Hal itu tidak berarti bahwa generasi yang lebih tua dari mereka dibebaskan dari kewajiban. Untuk memasukkan mereka digunakan kata *niniak mamak* yang kadang kala dipendekkan menjadi *mamak*.¹⁵²

Suku dalam kekerabatan Minangkabau menyerupai suatu *klan matrilineal* dan jodoh harus dipilih di luar suku. Di beberapa daerah, seorang hanya terlarang kawin dalam kampungnya sendiri, sedangkan di daerah-daerah lain orang harus kawin di luar sukunya sendiri. Secara historis mungkin dapat dikatakan bahwa dulu seorang selalu harus kawin keluar dari sukunya sendiri.

Pada masa dulu ada adat bahwa orang sedapat mungkin kawin dengan anak perempuan *mamak*-nya, atau gadis-gadis yang dapat digolongkan demikian, tetapi karena berbagai keadaan, timbul beberapa bentuk lain misalnya kawin dengan kemenakan (anak saudara perempuan) perempuan ayahnya. Orang juga boleh kawin dengan saudara perempuan suami saudara perempuannya sendiri (*bride exchange*). Dalam zaman sekarang pola-pola ini juga mulai hilang, bahkan dengan pengaruh dunia

¹⁵² *Ibid.*, h. 255



modern perkawinan *endogami* lokal tidak lagi dipertahankan sebagaimana semula, menyebabkan pemilihan makin meluas.¹⁵³

Perkawinan dengan anak *mamak* dapat diperkirakan sebagai pola yang lebih asli, karena kesamaan istilah yang digunakan untuk memanggil dan menyebut istri *mamak* dan ibu istri. Seorang istri *mamak* akan di panggil dengan sebutan *Mintuo* (mertua), walaupun ia tidak mengawini anak perempuannya. Perkawinan dengan anak *mamak* adalah sesuatu hal yang termudah dapat dijalankan, karena *mamak* dapat menjadi pembuka jalan bagi rundingan-rundingan perkawinan lebih lanjut.¹⁵⁴ Di dalam adat Minangkabau dikenal empat macam bentuk hubungan kekerabatan antara seseorang anggota masyarakat dengan anggota lainnya. Empat bentuk hubungan itu adalah:

a) Hubungan kerabat *mamak kemenakan*

Hubungan kerabat *mamak kemenakan* yaitu hubungan antara seseorang laki-laki dengan anak dari saudara perempuannya di satu pihak dan hubungan laki-laki atau perempuan dengan saudara laki-laki dari ibunya di lain pihak. Dalam bentuk **pertama**, laki-laki itu adalah *mamak* dan anak saudara perempuannya disebut *kemenakan*. Arus hubungan disini bersifat melereng ke-bawah. Dalam bentuk **kedua**, seseorang itu baik laki-laki maupun perempuan adalah kemenakan,

¹⁵³ *Ibid.*, h. 256

¹⁵⁴ *Ibid.*, h. 257

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan saudara laki-laki dari ibunya itu disebut *mamak*. Arus hubungan disini adalah melereng ke-atas.¹⁵⁵

Mamak sebagai figur sentral dalam rumah gadang berfungsi sebagai pemelihara kekompakan anggota rumah gadang ke-dalam, dan memelihara martabat rumah gadang ke-luar lingkungan. Dalam hubungan dengan harta pusaka, *mamak* berfungsi sebagai penjaga, pengembang dan penambah jumlah harta pusaka yang diterima dari nenek moyang. Dalam hubungan dengan kemenakan, *mamak* berfungsi sebagai pembimbing dan pemelihara kemenakan-nya.¹⁵⁶

Adapun terhadap anak kemenakan perempuan, bimbingan *mamak* meliputi persiapan untuk menyambut warisan dan untuk melanjutkan garis keturunan. Terhadap laki-laki, bimbingan itu meliputi kemampuan untuk memelihara harta pusaka serta mempersiapkan laki-laki untuk dapat mewarisi fungsi *mamak* untuk menjadi pemimpin dalam lingkungannya, baik dalam lingkungan rumah, *paruik* maupun *suku*.¹⁵⁷

b) Hubungan kerabat *suku sako*

Hubungan *kerabat suku sako* yaitu hubungan seseorang dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat adat yang terikat oleh keturunan *matrilineal*, hubungan *suku sako* merupakan hubungan yang menonjolkan sifat *genealogis*. Hubungan kekerabatan disini berlaku

¹⁵⁵ Muhammad Hasbi, *Tali Kerabat pada Kekerabatan Orang Minangkabau*, (Bukittinggi: Internasional Seminar On Minangkabau, 1980), h. 51

¹⁵⁶ *Ibid.*, h. 52

¹⁵⁷ Asrif Aliumar dan Faisal Hamdan, *Hukum Adat dan Lembaga Hukum Adat Dacrah Sumatera Barat*, (Padang: BPHN-Univ Andalas, 1978), h. 40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam beberapa lingkungan. Mulai dari **lingkungan yang lebih sempit** yang disebut dengan rumah *gadang*, yaitu hubungan antara seseorang dengan orang lain yang sama-sama mendiami atau berasal dari rumah *gadang* yang sama. **Lingkungan tengah** adalah kesatuan sekampung, yaitu kesatuan dari orang-orang yang sudah berbeda rumah *gadang*-nya, tetapi kalau ditelusuri ke-atas ternyata nenek asal dari setiap rumah gadang pernah tinggal dalam satu rumah dahulunya.¹⁵⁸

Lingkungan kesatuan yang lebih luas yaitu *sasuku* yang berarti keseluruhan anggota terikat oleh hubungan yang bersifat *genealogis* atas dasar *matrilineal* yang bertali kepada nenek asal yang mula-mula datang “*Mencancang malateh*” di tempat itu. Hubungan seseorang dengan lainnya mungkin tidak lagi serumah dan juga tidak lagi sekampung, tidak lagi “*seharta sepusaka* atau *segolok segadai* atau *sependam sepekuburan*”. Walaupun demikian mereka masih terikat oleh ikatan moral yaitu *semalu*.¹⁵⁹

c) Hubungan kerabat *induk bako anak pisang*

Hubungan kerabat *induk bako anak pisang* yaitu hubungan antara seseorang perempuan dengan anak-anak saudara laki-lakinya di satu pihak, atau hubungan antara seseorang laki-laki atau perempuan dengan saudara perempuan dari ayahnya. Dalam **bentuk pertama** perempuan itu disebut induk bako bagi anak-anak saudara laki-lakinya. Dalam **bentuk kedua** laki-laki atau perempuan itu adalah anak

¹⁵⁸ *Ibid.*, h. 41¹⁵⁹ *Ibid.*, h. 42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pisang bagi perempuan saudara ayahnya itu. Dalam bentuk hubungan ini, seseorang perempuan mempunyai dua arus hubungan yang berlainan arah yaitu ke-atas ia adalah anak pisang bagi saudara perempuan ayahnya dan ke-bawah ia adalah induk bako bagi anak-anak saudaranya yang laki-laki. Bagi seorang laki-laki hanya ada satu arus hubungan yaitu ia adalah anak pisang bagi saudara perempuan ayahnya, tetapi ia tidak akan pernah menjadi induk bako bagi anak saudaranya yang laki-laki. Penggunaan kata *induk* dalam hubungan ini menunjukkan peranan seseorang perempuan. Bentuk hubungan *mamak kemenakan*, maka dalam bentuk hubungan ini, garis arus hubungan adalah *melereng*. Perbedaannya terletak pada fungsi yang dijalankan. Hubungan *mamak kemenakan* menjalankan fungsi laki-laki, sedangkan hubungan *bako anak pisang* menjalankan fungsi perempuan.¹⁶⁰

d) Hubungan kerabat *sumando pesumandan*

Hubungan kerabat *sumando pesumandan* terjadi disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan oleh salah seorang anggota dalam rumah gadang. Perkawinan menurut adat Minangkabau berlaku secara *eksogami*, hubungan kerabat *sumando pesumandan* ini pada hakikatnya adalah hubungan antara dua rumah gadang atau antara dua suku. Hubungan ini bersifat mendatar.¹⁶¹ Hubungan kerabat *sumando pesumandan* dapat digambarkan sebagai berikut:

¹⁶⁰ *Ibid.*, h. 42-43

¹⁶¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, *op. cit.*, h. 203



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) Antara seorang suami dengan orang di rumah istrinya. Dalam bentuk ini suami oleh orang rumah istrinya disebut orang *sumando*. Di lain pihak saudara laki-laki dari istri, oleh suami disebut *bisan*-nya dan saudara perempuan istri disebut *ipar*, begitu pula saudara laki-lakinya.

(2) Antara seorang istri dengan orang di rumah suaminya. Istri oleh pihak rumah gadang suami disebut *sumandan*. Di pihak saudara perempuan dari suami oleh istri disebut *ipar*, begitu pula saudara laki-lakinya.

(3) Antara keluarga pihak istri dengan keluarga pihak suami. Hubungan timbal balik sesamanya disebut *bisan*.

(4) Seorang ayah atau ibu, suami dari anak perempuannya atau istri dari anak laki-lakinya disebut menantu sepanjang *syara'*. Seorang *mamak* dan istrinya, suami dari *kemenakan* perempuannya atau istri dari *kemenakan* laki-lakinya disebut *menantu* secara adat.¹⁶²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hubungan kekerabatan Minangkabau yaitu: hubungan kerabat *mamak kemenakan*, hubungan kerabat *suku sako*, hubungan kerabat *induk bako anak pisang*, dan hubungan kerabat *sumanda pesumandan*.

2) Tradisi Perkawinan Minangkabau

Seorang anak yang telah dewasa (baik laki-laki maupun perempuan) yang akan berumah tangga, masyarakat Minangkabau menempatkan perkawinan menjadi urusan keluarga dan kerabat. Dimulai

¹⁶² *Ibid.*, h. 204



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari mencari jodoh, membuat persetujuan, pertunangan, sampai pelaksanaan perkawinan, termasuk segala urusan akibat perkawinan. Perkawinan dalam adat bukanlah masalah sepasang *insân* yang akan membentuk rumah tangganya saja. Falsafah Minangkabau menjadikan kaum (suku) hidup bersama-sama, rumah tangga menjadi urusan bersama, masalah pribadi suami isteri tidak bisa dilepaskan dari masalah bersama.¹⁶³

Adat memandang perkawinan sebagai ikatan hubungan antara dua keluarga besar, baik dari keluarga laki-laki maupun perempuan. Ungkapan yang sering dikemukakan tentang perkawinan bahwa yang menikah memang sepasang penganten (*anak daro* dan *marapulai*),¹⁶⁴ tetapi yang kawin merupakan dua keluarga besar. Nikâh yang dimaksud dalam pengertian agama yakni *ijâb* dan *qabûl* antara wali mempelai perempuan dengan penganten laki-laki, kawin dalam pengertian sosial budaya yaitu hubungan kekerabatan antara dua keluarga besar.¹⁶⁵

a) Mencari Jodoh (Penjajakan atau *Maresek*)

Sebelum perkawinan dilaksanakan, pihak keluarga perempuan terutama *mamak* (saudara laki-laki ibu) biasanya telah menempuh berbagai cara dan berupaya untuk mendapatkan calon menantu. *Mamak* biasanya malu apabila kemenakannya (anak perempuan dari saudara perempuannya) yang menurut adat sudah seharusnya untuk

¹⁶³ Ali Akbar Navis, *op. cit.*, h. 217

¹⁶⁴ Pengantin perempuan dalam bahasa Minang disebut dengan *anak daro*, sedangkan pengantin laki-laki disebut dengan *marapulai*.

¹⁶⁵ Hayati Nizar, *Bundo Kandung dalam Kajian Islâm dan Budaya*, (Padang: Gunatama, 2004), Cet. ke-1, h. 102



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkeluarga, belum mendapatkan jodoh. Ia malu bila kemenakannya dikatakan “*gadih gadang alun balaki*” (gadis besar belum bersuami). Bahkan menurut adat dibolehkan menggadai harta pusaka tinggi ketika ada “*gadih gadang alun balaki*”. Mencari calon suami untuk kemenakan perempuan diibaratkan mencari *junjungan* untuk bersandar dan “bergantung”. Senada dengan “*alam takambang jadi guru*”, ibarat tanaman kacang yang butuh junjungan untuk membelitkan dirinya.¹⁶⁶

Mamak pada hari yang “baik” dan keadaannya memungkinkan mengajak ayah dari kemenakannya (*sumando*) berunding, apakah sudah terlintas dalam pikirannya seorang laki-laki yang pantas untuk menjadi menantunya. Tujuannya pembicaraan itu supaya *mamak* dengan *sumando* bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu. Setelah itu baru dibawa kepada keluarga besar untuk dimusyawarahkan, dalam hal ini orang *sumando* juga mengajukan calon. Setelah diperoleh kesepakatan, langkah selanjutnya ditetapkan siapa yang akan menjajaki keluarga laki-laki yang diharapkan menjadi calon *junjungan* kemenakannya.¹⁶⁷

Kegiatan penjajakan berawal dari mendengar, melihat dan menanyakan siapa yang akan diminta itu kepada keluarganya. Menanyakan apakah sudah ada niat untuk berkeluarga (berumahtangga) atau belum. Rangkaian kegiatan ini dikenal dengan

¹⁶⁶ Misnal Munir, “Sistem Kekerabatan dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Strauss”, *Jurnal Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, Vol. 25, No. 1 (Februari, 2015), 19

¹⁶⁷ *Ibid.*, h. 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai macam istilah. Ada yang menyebutnya dengan *maresek*¹⁶⁸, *marisiak*, atau nama lain sesuai dialek nagari atau jorong masing-masing yang bermakna sama yaitu penjajakan pertama. Sedangkan bagi keluarga calon yang dituju disebut dengan *orang yang datang*. Keluarga laki-laki yang dituju menyampaikan kepada anak laki-laki yang dimaksud bahwa pihak keluarga perempuan itu meminta untuk menjadi menantunya. Apabila tidak diterima oleh si calon (anak laki-laki) tersebut, jawaban yang diberikan harus dengan yang baik, seperti melanjutkan kuliah, mencari pekerjaan lebih dahulu, atau jawaban lain yang tidak menyakitkan.¹⁶⁹

Kemudian siapakah yang memulai penjajakan ini, apakah hanya khusus untuk keluarga perempuan atau boleh keluarga laki-laki. Dalam hal ini, baik keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki sama peluangnya untuk di-*resek*. Tetapi sesuai dengan adat Minang, biasanya keluarga perempuan yang mendatangi keluarga laki-laki. Apabila keluarga laki-laki menunjukkan respon yang baik, keluarga perempuan segera menindaklanjuti ke-arrah selanjutnya disebut *pinang meminang*.¹⁷⁰

¹⁶⁸ *Maresek* adalah langkah pertama dari proses pra-nikah di Minangkabau; anggota keluarga calon pengantin wanita akan melamar calon mempelai pria, yang akhirnya akan menciptakan kesepakatan bersama. Perencanaan dan pelaksanaan pernikahan umumnya melibatkan sejumlah besar anggota keluarga, terutama dari sisi mempelai wanita. Ini merupakan adat bagi wanita di Minangkabau dan keluarganya untuk terlibat dalam sebagian besar rencana pernikahan, termasuk dalam lamaran pernikahan, sesuai dengan budaya Minangkabau yang *matrilineal*. Ayah dari pengantin wanita tidak terlalu memiliki andil dalam prosesi lamaran pernikahan, karena keputusan merupakan hak *prerogatif* dari keluarga ibu mempelai wanita. Keluarga ibu mempelai wanita melakukan *negosiasi* dengan keluarga pengantin pria dan memutuskan persyaratan untuk pernikahan.

¹⁶⁹ *Ibid.*, h. 21

¹⁷⁰ *Ibid.*, h. 22



b) Peminangan

Peminangan¹⁷¹ menurut adat bahwa salah satu pihak datang ke rumah pihak lainnya untuk membuat kesepakatan tentang pelaksanaan perkawinan. Kedatangan itu membawa tanda ikatan yang jenisnya diserahkan kepada kebiasaan yang berlaku pada masyarakat di suatu nagari. Masing-masing pihak menyediakan tanda yang dipertukarkan pada saat itu. Peristiwa tersebut juga dikenal dengan istilah “*batimbang tando, batuka cincin*”, atau bertunangan.¹⁷²

Pada saat peminangan ini, pihak yang datang tidak hanya membawa tanda ikatan, tetapi juga membawa berbagai jenis makanan. Di sini *bundo kanduang* mempunyai peranan yang menentukan, ia merancang jenis tanda yang akan ditukarkan, jenis makanan yang dibawa, siapa yang diundang untuk datang dan membawanya, serta para perempuan pulalah yang akan membawanya. Sekalipun laki-laki bertindak sebagai juru bicara untuk membuat kesepakatan di depan keluarga yang hadir, keputusannya terletak di tangan perempuan. Juru bicara itu meminta waktu untuk menanyakan kepastian jadwal pelaksanaan perkawinan kepada perempuan, yang disebut dengan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷¹ Pinang meminang lazimnya diprakarsai kerabat pihak perempuan. Bila seorang gadis dipandang telah tiba masanya untuk berumah tangga, mulailah kerabatnya *menyalangkan mata*, yang artinya melihat-lihat atau mendengar-dengar jejak mana yang telah pantas pula untuk beristeri dan yang kira-kira cocok bagi anak gadis mereka. Bila yang dicari telah ditemukan, berundinglah para kerabat untuk memperbincangkan keadaan calon yang diincar itu. Bila rundingan itu lancar, barulah ditugasi seseorang untuk melakukan penyelidikan, apa pihak laki-laki mau menerima pinangan mereka. Jika hasil penyelidikan itu memberi *angin*, barulah dikirim utusan untuk melakukan pinangan. Namun, sebelum pinangan resmi disampaikan, beberapa penghubung telah pergi bolak-balik ke rumah pihak laki-laki untuk merundingkan waktu dan cara peminangan yang akan dipakai. Ali Akbar Navis, *op. cit.*, h. 233

¹⁷² Hayati Nizar, *Bundo Kanduang...op. cit.*, h. 102



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baretong (berhitung). Nagari-nagari yang memiliki tradisi yang kuat, apabila ada yang kurang lengkap membawa makanan ketika acara tersebut, seperti *pisang gadang* (pisang besar), acara peminangan ini bisa diundur oleh *ninik mamak* atau bahkan dibatalkan, karena tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan ketentuan adat.¹⁷³

Sehubungan dalam acara *batimbang tando* juga dibicarakan masalah-masalah adat yang akan dipenuhi oleh kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak memiliki latar belakang adat yang sama, kesepakatan lebih mudah didapat, karena masing-masing memahami adat yang sudah ada dan bersedia memenuhinya. Adakalanya masalah muncul ketika kedua belah pihak memiliki adat yang berbeda dan masing-masing menginginkan adat mereka dipenuhi. Misalnya, antara daerah *luhak*¹⁷⁴ dan *rantau* memiliki adat yang berbeda dalam masalah uang jemputan, biasanya masyarakat di daerah *rantau* Minang seperti Pariaman mengadakan uang jemputan untuk pengantin laki-laki, sementara dalam masyarakat daerah *luhak* tidak diadatkan.¹⁷⁵ Sebaliknya pada masyarakat daerah *luhak*, umumnya pihak laki-laki menyediakan pemberian kepada pihak perempuan. Seandainya terjadi perbedaan antara kedua belah pihak, biasanya perempuan bertindak secara bijaksana untuk mencari cara penyelesaiannya.

¹⁷³ *Ibid.*, h. 103

¹⁷⁴ *luhak* merupakan kumpulan beberapa nagari, nagari disusun dengan taratak menjadi dusun, susunan dusun menjadi koto, koto dikembangkan menjadi nagari/desa. Sri Natin, "Perubahan Sosial Kedudukan dan Peran Mamak Terhadap Anak dan Kemenakan di Ranah Minang", *Mimbar Hukum*, Volume 20, Nomor 2, (Juni, 2008), h. 336

¹⁷⁵ Iskandar Kemal, *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya Tinjauan Tentang Kerapatan Adat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 8

Sedikit berbeda ketika seorang perempuan Minang mendapatkan calon suami dari suku atau etnis lain seperti etnis Jawa. Mereka sebelumnya sudah berkenalan dan merencanakan ke jenjang pernikahan, acara *maresek* atau meminang dilakukan sesuai dengan kesepakatan mereka bersama. Mereka mengambil jalan tengah bahwa tidak hanya memenuhi ketentuan menurut salah satu adat saja termasuk dalam pelaksanaan pesta perkawinan.¹⁷⁶

c) Pelaksanaan Pesta Perkawinan

Adapun dalam pelaksanaan pesta perkawinan, peranan ibu-ibu sebagai *bundo kanduang* pada hakikatnya berimbang dengan peran laki-laki sebagai *mamak*. Biasanya *mamak* mengurus administrasi perkawinan seperti memberikan izin, sementara perempuan mempersiapkan segala sesuatu yang bersifat *domestik* misalnya, makanan, perlengkapan pesta, dan lain-lain. Menentukan orang-orang yang akan diundang, biasanya laki-laki dan perempuan duduk bersama dan menginventarisir nama-nama mereka, bahkan peran perempuan lebih dominan. Ia memberikan pengarahan kepada orang-orang yang ditugaskan untuk mengundang tamu yang diharapkan kehadirannya ketika pesta dengan arahan yang rinci, sampai kepada kalimat yang akan disampaikan oleh petugas yang melakukan pemanggilan tersebut, terutama kepada petugas yang masih muda dan belum berpengalaman dalam hal itu.¹⁷⁷



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷⁶ *Ibid.*, h. 9

¹⁷⁷ *Ibid.*, h. 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara peranan *bako* (keluarga ayah) dalam pelaksanaan pesta biasanya sebagian ikut membantu memikul biaya pesta perkawinan sesuai dengan kemampuan mereka yang dilakukan sebelum akad nikah. Mereka juga datang membawa perlengkapan seperti sirih lengkap, singgang ayam, dan seperangkat busana bahkan ada yang memberikan perhiasan emas untuk mempelai perempuan.¹⁷⁸

d) Setelah Perkawinan Dilaksanakan

Setelah perkawinan dilaksanakan, dampak langsung dari perkawinan tersebut antara lain dapat mengangkat harga diri dan status mereka dalam keluarga dan masyarakat. Seseorang akan mendapat tempat dalam masyarakat, diakui keberadaannya, dan diikutsertakan dalam musyawarah (*dapek dilawan baiyo*) dan dapat dibebani tugas tertentu secara adat termasuk berhak diberi gelar kebangsawanan (datuk atau penghulu) jika ia telah mencapai status *alah gadang* (sudah besar). Status *alah gadang* diperoleh bila seseorang telah kawin. Sebagai analogi konsep adat tersebut, apabila seseorang belum kawin meskipun umurnya sudah tua, tetapi ia masih tetap dikategorikan pada anak-anak dan anak-anak tidak dapat dibebani tugas sosial secara adat.¹⁷⁹

¹⁷⁸ *Ibid.*, h. 11

¹⁷⁹ Gusril Kenedi, "Model Konseling Pranikah Berorientasi Pengembangan Konsep Diri (Studi Kasus Tentang Persiapan Pernikahan Mahasiswa Etnis Minangkabau di IAIN Imam Bonjol Padang)", (Disertasi Doktor, Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2005), h. 59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah akad nikâh dilaksanakan¹⁸⁰, baik di masjîd, mushallâ atau di Kantor Urusan Agama setempat yang terdekat dengan tempat tinggal mempelai perempuan, maka pengantin laki-laki (dalam adat Minang disebut *marapulai*) biasanya pulang kembali ke-rumah orang tuanya bersama rombongannya. Ia belum boleh langsung pergi dan menetap di rumah isterinya sebelum *dijapuik*. Istilah “*manjapuik marapulai*” muncul ketika keluarga pengantin perempuan mendatangi keluarga pengantin laki-laki untuk membawa *marapulai* ke rumah *anak daro* (pengantin perempuan) yang pada umumnya dilakukan pada malam hari. Meskipun *marapulai* bukan orang Minang, menurut kebiasaannya tetap dilakukan acara *manjapuik marapulai* dengan cara pengantin laki-laki setelah akad nikâh diantar pergi ke-rumah salah seorang *bako* (keluarga ayah pengantin perempuan) atau ke-rumah salah seorang *mamak*, lalu pengantin laki-laki tersebut dijemput secara adat Minang ke sana, bedanya kalau *marapulai* orang luar Minang, penjemputan *marapulai* biasanya dilakukan di siang hari.¹⁸¹

¹⁸⁰ Setelah menikah, kedua mempelai tidak tinggal di rumah mempelai pria, tetapi tinggal di rumah ibu mempelai wanita. Sang suami pindah ke rumah istrinya dengan membawa segala harta miliknya. Sesuai adat masyarakat, dia boleh tinggal bersama adik perempuannya bahkan setelah menikah dan mengunjungi rumah istrinya hanya pada malam hari. Karena wanita mengontrol setiap aspek kehidupan keluarga di kalangan masyarakat Minangkabau, seorang pria lebih memilih untuk pergi ke luar negara atau ke luar desa atau kota untuk mencari peluang yang lebih besar demi kemajuan pribadi. Jika mereka tinggal di rumah, mereka dipandang rendah sebagai pria yang lemah, menurut, dan kurang agresif. Dengan perubahan zaman dan *modernisasi*, para pria di Minangkabau punya lebih banyak kesempatan di luar rumah mereka, dan banyak pria lebih memilih untuk pergi merantau. Hal ini juga dipraktikkan setelah seorang pria menikah; mereka keluar dari rumah ibu mereka dan secara simbolis mengunjungi rumah ibu mereka untuk menghormati adat *matriarkal* dalam masyarakat mereka. Secara budaya, orang Minangkabau mempertahankan sistem *matrilineal*, bahwa wanita memiliki hak yang lebih besar daripada pria dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta pusaka atau warisan, keluarga, dan pengasuhan anak. Harta warisan hanya dibagikan kepada saudara/anak perempuan.

¹⁸¹ *Ibid.*, h. 60

Proses menjemput *marapulai* ini ada acara *panitahan* atau *pasambahan*, biasanya diawali oleh utusan dari keluarga mempelai perempuan yang ingin menjemput mempelai pria tersebut. Mempelai pria dalam hal ini diwakili oleh *mamak* dan keluarga besarnya untuk menyambut utusan tersebut dan mempersilahkan dibawa kepada mempelai perempuan. Utusan yang datang *manjapuik marapulai* biasanya terdiri dari *mamak* keluarga perempuan beserta orang *sumando* (laki-laki yang sudah lebih duluan menikah dengan salah seorang perempuan keluarga isteri). Orang *sumando* membawa bingkisan adat sebagai penjemput *marapulai* yang merupakan lambang pesan dan amanat dari keluarga penjemput. Adapun pesan yang disampaikan oleh keluarga melalui bingkisan adat tersebut bahwa pihak keluarga mempelai perempuan telah menyambut kedatangan pengantin laki-laki (yang akan menjadi *sumando* pula di keluarga isterinya) tersebut dengan hati yang tulus dan suci, sekaligus sebagai wujud penghargaan dari keluarga mempelai perempuan terhadap orang *sumando* baru mereka.¹⁸²

Adat *manjapuik marapulai* ini bisa berbeda antara satu daerah dengan lainnya, karena ada daerah mempunyai tradisi *bajapuik* yang mensyaratkan adanya uang *japuik*. Uang *japuik* berupa pemberian dari keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki yang diberikan pada saat acara. Semakin tinggi posisi, pendidikan dan jabatan mempelai laki-laki, semakin banyak uang jemputannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸² *Ibid.*, h. 61

Ketika tidak sesuai dan terjadi perbedaan pendapat dengan uang jempukan ini, sebagian perkawinan yang sudah direncanakan bisa dibatalkan, tetapi sebagian mencari solusi lain supaya perkawinan bisa dilangsungkan. Solusi lain dimaksud ketika calon mempelai perempuan tidak mampu untuk memenuhi *uang japuik* tersebut, sementara calon mempelai laki-laki ingin juga melangsungkan perkawinan, keluarga calon mempelai laki-laki memberikan uang yang nantinya digunakan untuk memenuhi ketentuan adat dalam menjemput *marapulai* tersebut.¹⁸³

Marapulai setelah dijemput, ia tinggal di rumah isterinya. Hal ini biasanya bagi pasangan yang baru melangsungkan pernikahan, mereka yang akan menempati kamar paling depan (kamar utama) dari rumah isterinya apabila isterinya banyak memiliki saudara perempuan seperti adik perempuan misalnya, ketika adik perempuan tersebut baru menikah pula, yang baru menikah tersebut akan menempati kamar utama, jika pasangan suami isteri yang sudah lama menikah akan menempati kamar berikutnya yang bukan kamar utama, begitu seterusnya. Pengecualian terjadi ketika anak perempuan hanya satu-satunya di rumah tersebut, *marapulai* atau suami dengan isterinya tetap menempati kamar utama sampai ada anak-anak perempuan mereka yang menikah.¹⁸⁴



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸³ *Ibid.*, h. 62

¹⁸⁴ *Ibid.*, h. 63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menetapnya suami di rumah isteri atau di lingkungan kekerabatan isterinya disebut dengan sistem *matrilocal*. Status pesukuan suami tidak berubah menjadi status pesukuan isterinya. Ia dalam lingkungan kekerabatan isterinya dianggap sebagai tamu terhormat dan dianggap juga sebagai pendatang. Sebagai pendatang, kedudukannya sering digambarkan secara dramatis bagaikan “*abu di atas tunggul*”, (angin kencang abu melayang) dalam arti sangat lemah dan mudah disingkirkan.¹⁸⁵ Dapat juga diartikan bahwa suami harus berhati-hati dalam menempatkan dirinya di lingkungan kerabat isterinya.¹⁸⁶

Sebagai orang *sumando* di dalam keluarga isterinya, suami juga tidak mempunyai kekuasaan apa-apa, seperti dikatakan “*se dalam-dalam upaya, sahinggo dado itiak, saelok elok urang sumando sahinggo pintu biliak*” (sedalam-dalam upaya, sehingga dada itik, sebaik-baik orang semenda sehingga pintu kamar).¹⁸⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tradisi perkawinan Minangkabau yaitu: mencari jodoh (penjajakan atau *maresek*), peminangan, pelaksanaan pesta perkawinan, dan setelah perkawinan dilaksanakan.

¹⁸⁵ Nainal Arifin, “Bundo Kandung: (hanya) Pemimpin di Rumah (Gadang)”, *Antropologi Indonesia*, volume 34, Nomor 2, (July, 2013), h. 125

¹⁸⁶ Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011), h. 13

¹⁸⁷ Tri Natin, *Perubahan Sosial...op. cit*, h. 334



2. Maqāshid Syarī'ah

a. Pengertian Maqāshid Syarī'ah

Ditinjau dari sisi etimologi *maqāshid syarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāshid* dan *syarī'ah*. *Maqāshid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqshad* yang berasal dari suku kata *qashada-yaqshidu-qashdan/maqshad*¹⁸⁸ yang berarti *ityan al-syai'* (mendatangkan sesuatu), *tawajjuh* (mengarah), *istiqāmah al-tharīq* (jalan yang lurus), *al-adlu* atau *al-tawassuth* (seimbang).¹⁸⁹

Dalam penerjemahan sederhana, kata *al-qashd* dan *al-maqshad* diartikan dengan maksud dan tujuan.¹⁹⁰ Sedangkan kata *syarī'ah* berakar dari kata kerja *syara'a* lazimnya diterjemahkan dengan syariat, sunnah, hukum, dan peraturan.¹⁹¹ Kata *syarī'ah* secara bahasa berarti *al-din* (agama) dan *al-thariqah* (jalan), dalam bahasa Arab biasa diartikan dengan jalan menuju sumber air. Menurut Ibnu Taimiyah secara istilah *syarī'ah* berarti segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, baik berupa akidah maupun amaliah.¹⁹²

Pengertian *maqāshid syarī'ah* secara terminologi diberikan beragam oleh para ulama. Muhammad Thāhir bin 'Asyūr (W. 1393 H) mengatakan bahwa *maqāshid tasyrī'* *'ammah* adalah makna-makna hukum yang disyaratkan oleh *syara'* di setiap kondisi penetapan hukum atau pada

¹⁸⁸ Ahmad Ridha, *Mu'jam Matn al-Lughah*, (Beirut: Dār Maktabah al-Hayah, 1960), Juz 4, h. 76

¹⁸⁹ Khalil bin Ahmad al-Farāhidī, *Kitāb al-Ain*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003) Juz 5, h. 54. Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dār Ihya' al-Turāts al-'Arabiyyah, 1992), Juz 3, h. 353

¹⁹⁰ Ahmad Warson Munawir, dkk., *Kamus Al-Munawir; Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1124. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 1990), h. 243

¹⁹¹ Ahmad Warson Munawir, dkk., *op. cit.*, h. 711. Lihat juga Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 36. Abdur Rahman I. Doi, *Syarī'ah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 1

¹⁹² Abd al-Rahman bin Abd al-Qāsim, *Majmū' al-Fatāwa Syaikh al-Islām Ahmad Ibn Taimiyah*, (Madinah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd Li Thibā'at al-Syarif, 2004), Juz 19, h. 306



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya dengan tidak mengkhususkan perhatiannya pada bentuk khusus.¹⁹³

‘Allāl al-Fāsi (W. 1974 M) mengatakan bahwa *maqāshid syarī’ah* adalah tujuan akhir dan rahasia yang ditetapkan oleh *syara’* pada setiap hukum.¹⁹⁴

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *maqāshid syarī’ah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang terdapat di setiap hukum.¹⁹⁵ Ahmad Raysūni mengatakan bahwa *maqāshid syarī’ah* adalah tujuan akhir yang ditetapkan *syara’* untuk kemaslahatan manusia.¹⁹⁶ Naruddin bin Muchtar al-Khādimi mengatakan bahwa *maqāshid syarī’ah* adalah makna-makna yang termuat dalam hukum, baik berupa hikmah-hikmah yang bersifat *juz’i* ataupun *kully* yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama yaitu kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.¹⁹⁷

Definisi-definisi di atas, terlihat bahwa *maqāshid syarī’ah* mempunyai pengertian, orientasi dan tujuan yang sama, walaupun dengan bahasa yang berbeda yaitu *tahqīq al-maslahah li al-nās* (mewujudkan kemaslahatan manusia) dengan *jalb al-manfa’ah* (mengambil manfaat) dan *daf’ al-mafsadah* (menghindari kerusakan).

Menurut al-Ghazālī (W. 505 H) *mashlahah* pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, *mashlahah* ialah memelihara tujuan *syara’*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan

¹⁹³ Muhammad Thāhit Ibn Asyūr, *Maqāshid al-Syarī’ah al-Islāmiyah*, (Beirut: Dār al-Basha’ir al-Intajiyah, 1988), h. 171

¹⁹⁴ ‘Allāl al-Fāsi, *Maqāshid al-Syarī’ah wa Mākārimuhu*, (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmy, 1993), h. 7

¹⁹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmy*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), Juz 2, h. 1017

¹⁹⁶ Al-Raysūni, *Nazhariyyat al-Maqāshid ‘inda Al-Imām Asy-Syāthibi*, (Beirut: Al-Muassasah Al-Jami’iyah Li Al-Dirāsāt wa Al-Nasyr wa Al-Tauzī’, 1995), h.19

¹⁹⁷ Nur al-Dīn bin Mukhtār al-Khādimi (al-Khādimi), *al-Ijtihād al-Maqāshidy*, (Qatar: Wizārāt al-Awqāf wa Syuun al-Diniyyah, 1998), h. 52



harta mereka. Setiap upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut *maslahat*, dan Setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut *maslahat*.¹⁹⁸

Mashlahah yang dimaksud adalah kemaslahatan yang sepenuhnya diinginkan *Syāri'*. Oleh karena itu, aturannya didasarkan pada perintah dan batasan-batasan yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya; sama sekali tidak merujuk pada syahwat manusia. Oleh karena itu, bisa jadi aturan yang ditetapkan *syara'* terasa sangat memberatkan manusia, bertentangan dengan kebiasaan mereka atau di luar batas kondisi sosial mereka.¹⁹⁹

Tidak semua persoalan disebutkan secara detail dan rinci dalam Alquran dan Sunnah. Sebagian besar persoalan seperti "diserahkan" kepada manusia untuk memilih dan menentukan yang terbaik (*mashlahah*) bagi mereka. Sehubungan dengan pengakuan atau penyebutan *syara'* terhadapnya, *maslahah* itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian besar, yaitu: *Pertama*, kemaslahatan yang secara jelas diakui sebagai *maslahah* oleh *syara'* (*mashlahah mu'tabarah*). Terhadap kemaslahatan seperti ini, tak ada beda pendapat bahwa ia harus diakui sebagai *maslahat* dan harus diikuti. *Kedua*, sesuatu yang secara jelas disebutkan bukan sebagai *maslahah* oleh *syara'* (*mashlahah mulghah*). Kemaslahatan seperti ini juga tidak diperdebatkan bahwa ia harus ditinggalkan. *Ketiga*, suatu keadaan yang secara tegas tidak

¹⁹⁸ Al-Ghazālī, *al-Mustashfā min ilm Ushūl*, (Beirūt: Al-Risālah, 1997), h. 416

¹⁹⁹ Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmī al-Syāthibī al-Gharnāthī (W. 790 H), *al- Al-Muwāfaqat*, Pen-tahqīq: Abu 'Ubaydah Masyhur bin Hasan al-Salman, (Al-'Aqrabiyah: Dār Ibn Affan, 1997), Juz 2, h. 172



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut, akan tetapi juga tidak dibatalkan, sebagai kemaslahatan dalam nash (*mashlahah mursalah*).²⁰⁰

Dasar Hukum *Maqāshid Syari'ah*

Kemaslahatan ideal yang hendak dicapai *syara'*, seperti telah disebutkan adalah kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Namun demikian, dari sisi prioritas, tujuan pensyariaan Islam paling utama dan mendapat perhatian paling besar adalah kemaslahatan *ukhrawī*, yaitu masuk surga dan selamat dari neraka. Sangat banyak ayat Alquran yang menegaskan hal ini, dalam berbagai ayat Allah menegaskan bahwa kehidupan dunia ini hanya permainan, senda gurau, hiasan dan cobaan buat manusia.²⁰¹

Sebaliknya, kehidupan yang hakiki dan patut diidamkan adalah kehidupan (sukses dan bahagia) di akhirat, salah satunya disebutkan surat *al-'Ankāūt* [29] ayat 64 sebagai berikut:

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (العنكبوت: ٦٤)

Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.²⁰²

Kesuksesan hidup di akhirat tersebut bukanlah sesuatu yang “gratis” atau “murah”. Ia harus diimbali (*tijārah*) dengan pengorbanan fisik, mental,

²⁰⁰ Muhammad bin 'Umar bin al-Husayn al-Rāziy (al-Rāziy), *al-Mahshūl*, (Riyād: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ūd al-Islamiyyah, 1400 H), Juz 6, h. 219-220

²⁰¹ Salah satunya terdapat pada surat *al-Kahf* [18] ayat 7: “Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya”.

²⁰² Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Firdaus*, (Jakarta: Pustaka Al-Fadhilat, 2012), h. 63



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta dan (kalau perlu) dengan nyawa.²⁰³ Hal itu tidak hanya diminta kepada umat Islam, para rasulpun juga dijanjikan kebaikan dan kesuksesan akhirat dengan cara dan beban yang tidak lebih ringan dari umatnya.²⁰⁴ Dengan perjuangan seperti itulah kesuksesan dapat diperoleh; masuk surga dan selamat dari neraka, yang salah satunya ditegaskan dalam Surat *al-Hasyr* [59] ayat 20 berikut:

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ
(الحشر: ٢٠)

Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah; penghuni-penghuni jannah itulah orang-orang yang beruntung.²⁰⁵

Hal itu baru dapat diwujudkan dengan sepenuhnya ber-*ta'abbud* kepada Allah dan menghindari semua bentuk sikap dan perbuatan syirik. Sikap *ta'abbud* dan menghindari syirik itu harus diwujudkan dalam setiap aktifitas kehidupan, baik personal dan komunal, politik dan ekonomi, serta perdata (ekonomi) dan pidana. Ketundukan menyeluruh itulah yang jadi syarat pencapaian tujuan syariat Islam. Sebagaimana ditegaskan Allah dalam surat *al-Baqarah* [2] ayat 208 berikut:

²⁰³ Lihat surat *Al-Shaff* [61] ayat 10-11: “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan (*tijarah*) yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu berimannya kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

²⁰⁴ Lihat surat *Al-Tauhah* [9] ayat 88: “Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. Lihat juga surat *Al-Tawbah* [9] ayat 20: “Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan”.

²⁰⁵ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 919



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرة: ٢٠٨)

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.²⁰⁶

Sehubungan dalam konteks “berhukum”, kesuksesan orang-orang beriman menghendaki ketundukan mutlak terhadap putusan dan ketetapan *Syari’* Allah dan Rasul-Nya. Hal itulah yang secara langsung dapat dipahami, salah satunya dalam firman Allah Surat *al-Nisa’* [4] ayat 65 berikut:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء: ٦٥)

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.²⁰⁷

Oleh karena itu, adalah tidak tepat kalau kemaslahatan yang jadi tujuan *syara’* itu “dibatasi” hanya pada kemaslahatan duniawi. Sebab sudah menjadi gaya bahasa Alquran dalam penyampaian pesannya bahwa tujuan penciptaan, penetapan hukum dan pengutusan rasul adalah dalam rangka pengukuhan tauhid (*ulūhīyah* dan *rubūbīyah*), menjunjung tinggi semua ketentuan-Nya (melebihi semua ketentuan lain), serta mengakui kekuasaan mengatur-Nya melebihi semua kekuasaan lain. Salah satu ayat yang

²⁰⁶ *Ibid.*, h. 50

²⁰⁷ *Ibid.*, h. 129

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menegaskan hal itu adalah firman-Nya dalam surat *al-Tawbah* [9] ayat 33 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (التوبة: ٣٣)

Dialah yang telah mengutus RasulNya (dengan membawa) petunjuk (Alquran) dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai.²⁰⁸

Gaya bahasa Alquran, termasuk sunnah, lainnya yang menunjukkan tujuan *syara'* adalah pembebanan (*taklīf*) yang urgensinya untuk menguji kepatuhan, kecintaan dan harapan manusia kepada-Nya melebihi kepatuhan dan ketakutan kepada selain-Nya, termasuk kepentingan pribadi dan orang-orang dekat.²⁰⁹ Hal itulah yang menjadi *katalisator* kedekatan hamba kepada-Nya, dan itu berkonsekuensi langsung pada kedekatan-Nya kepada hamba bersangkutan; semakin dekat dengan-Nya, semakin Dia mendekatkan diri dan mengangkat derajat hamba itu. Sebagai contoh, shalat yang jadi tiang agama dan jadi pembeda utama antara orang kafir dengan orang beriman, pada dasarnya adalah pen-*ta'zhim*-an Allah. Pada salah satu rukun utamanya, membaca surat *al-Fātihah*, Allah secara tegas “membagi” hak-Nya dengan hamba; sebagian untuk hamba dan sebagian untuk-Nya. Hal itu sangat jelas dipesankan Nabi dalam hadis, dengan matan Imam Malik, sebagai berikut:

²⁰⁸ *Ibid.*, h. 283

²⁰⁹ Salah satu ayat yang menegaskan pengujian Allah terhadap manusia adalah surat Muhammad [47] ayat 31. “Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu”. Ayat lain yang senada, diantaranya adalah QS. Hud [11]: 7, al-Mulk [67]: 1-2, al-Mā'idah [5]: 48, dan al-Baqarah [2]: 143.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مؤلى هشام بن زهرة، يقول: سمعت أبا هريرة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يقرأ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرَ تَمَامٍ قَالَ فَقُلْتُ يَا أبا هريرة إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ فَغَمَزَ ذِرَاعِي ثُمَّ قَالَ أَقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِي فَإِنِّي سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم، يقول: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ نِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم اقرؤوا يقول العبد { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: حَمْدِي عَبْدِي، ويقول العبد { مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ } يقول الله: بِحَمْدِي عَبْدِي، يقول العبد { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يقول العبد { اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ (رواه ما لك)²¹⁰

Dari Abi al-Saib, mantan budak Hisyam bin Zuhrah, ia berkata; saya mendengar Abu Hurayrah berkata, "Rasulullah bersabda: "Barangsiapa shalat namun tidak membaca *Umm Alquran (al-Fatihah)* di dalamnya, maka shalatnya kurang, shalatnya kurang, shalatnya kurang dan tidak sempurna". Abu al-Saib berkata, "Lalu saya berkata, "Ya Abu Hurayrah, aku kadang shalat di belakang imam". Abu al-Saib berkata, "Abu Hurayrah langsung memegang lenganku seraya berkata, "Bacalah dalam hatimu. Wahai orang Persi, karena saya telah mendengar Rasulullah bersabda. *Allah Jallā wa ‘Alā* berfirman: “Aku membagi shalat antara diriku dan hamba-Ku jadi dua bagian; sebagian untuk-Ku dan sebagian untuk hamba-Ku” Rasul melanjutkan: Bacalah oleh kalian (*al-Fatihah*, karena), jika seorang hamba mengucapkan: [Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam], Allah menjawab: “Hambaku telah memujiku”. Jika hamba mengucapkan: [Maha Pengasih lagi Maha Penyayang], Allah menjawab: "Hamba-Ku telah

²¹⁰ Mālik bin Anas bin Mālik bin ‘Amir al-Ashbahi al-Mdani (W. 179 H), *al-Muwaththa’ li Imām Dār al-Hijrah Mālik bin Anas: Riwayah Abī Mush’ab al-Zuhri al-Madani (150-242 H)*, *Penyahqiq: Basīsyar ‘Awwad Ma’ruf dan Mahmud Muhammad Khalil*, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1998), Cet. ke-3, Juz 1, h. 94



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Hassanudin Riau

menyanjung-Ku". Jika hamba mengucapkan: [Penguasa Hari Pembalasan], Allah menjawab: "Hamba-Ku telah memuji-Ku". Jika hamba mengatakan: [Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami minta pertolongan], maka "Ayat ini adalah pemisah bagian-Ku dengan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta. Jika hamba mengucapkan: [Tunjukilah kami jalan yang lurus: Jalan orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan (jalan) orang yang Engkau murkai, dan bukan pula (jalan) orang yang sesat], maka "Ayat itu adalah bagian hamba-Ku, dan bagi hambaku apa yang ia minta". (HR. Malik)

Hadis di atas, dinyatakan *shahīh* oleh al-Babānī.²¹¹ Hadis dengan substansi yang sama juga dapat ditemukan dalam berbagai *mushādir al-ashliyah* lainnya. Diantaranya adalah kitab *mushannaf* 'Abd al-Razzāq,²¹² *Musnad* Ishāq bin Rahawayh,²¹³ *Musnad* Ahmad,²¹⁴ *Shahīh* Muslim,²¹⁵ *Sunan* Ibn Mājah,²¹⁶ dan *Sunan* Abū Dāwud.²¹⁷

Berangkat dari pemahaman seperti itulah tiga ayat dalam surat *al-An'ām* [6]: 151-153, dapat dipahami secara "lurus":

قُلْ تَعَالَوْا أَنَا ذُنُوبِي وَإِنِّي لَأَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ
فُلْ تَعَالَوْا أَنَا ذُنُوبِي وَإِنِّي لَأَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ
تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِهْلَاقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَأُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ

²¹¹ Muhammad Nāshir al-Dīn al-Bānī, *Shahīh al-Jāmi' al-Shaghir wa Ziyādatuh (al-Fath al-Kabīr)*, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1988), Cet. ke-3, Juz 2, h. 797

²¹² Abd al-Razzāq Abū Bakr bin Hammam bin Nafi' al-Humayri (W. 211 H), *Al-Mushannaf*, Pen-Tahqīq: Habib al-Rahman al-'Azhami, (Gujarat: al-Majlis al-'Ilmi, 1972), Juz 2, h. 128

²¹³ Lihat: Ibn Rahawayh Abū Ya'qūb Ishāq bin Ibrāhīm bin Makhḥad bin Ibrāhīm al-Hanzhali al-Marūzī (W. 238 H), *Musnad Ishāq bin Rāhawayh*, Pen-Tahqīq: 'Abd al-Ghafur bin 'Abd al-Haq al-Bulūsī, (Madinah: Maktabah al-Ayman, 1991), Juz 1, h. 333

²¹⁴ Lihat: Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaybani (164-241 H), *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Pen-Tahqīq: Syu'ayb al-Ama'uth, dkk., (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), Juz 12, h. 239-240

²¹⁵ Lihat: Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husayn al-Qusyayrī al-Naysāburī (W. 261 H), *Shahīh Muslim (al-Musnad al-Shahīh al-Mukhtashar bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl Ila Rasulillah Shallallahu 'Alayh wa Sallam)*, Pen-Tahqīq: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, (Beirut: Dar Ihyā' al-Turats al-Arabi, t.th), Juz 1, h. 296

²¹⁶ Lihat: Ibn Mājah Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwayni (W. 273 H), *Sunan Ibn Mājah (al-Sunan)*, Pen-Tahqīq: Sya'ayb al-Arna'uth, dkk., (t.tp: Dar al-Risalah al-'Alimiyah, 2009), Juz 2, h. 124

²¹⁷ Lihat: Abū Dāwud Sulaymān bin al-Asy'ats al-Sajastani al-Azadi (202-275 H), *Sunan Abī Dāwūd*, Pen-Tahqīq: Muhammad Muhy al-Din 'Abd al-Hamid, (Beirut: Maktabah al-'Ashriyah, t.th), Juz 1, h. 21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٥٢) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٥٣).

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar ". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya) (151). Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) , dan penuhilah janji Allah . Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat (152). Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain) , karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa (153).²¹⁸

Rangkaian ayat itu jelas sekali diawali dari perintah memelihara agama berupa mengharamkan syirik. Hal itu terdapat dalam frase “ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ ”, begitu juga frase “ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ”. Deretan ayat itu dilanjutkan dengan perintah memelihara jiwa, berupa larangan membunuh kecuali yang dibenarkan; dalam rangka memelihara agama, pada *riddah*, memelihara jiwa, pada *qishash*, dan memelihara

²¹⁸ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 214-215



keturunan, pada *rajm*. Hal itu terdapat dalam frase firman Allah “ وَلَا تَقْتُلُوا ”, begitu juga “ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ”, “ وَأُولَٰدِكُمْ مِّنْ إِمْلَاقِي ”.

Perintah dalam ayat itu dilanjutkan pada memelihara keturunan, berupa larangan mendekati zina, disebut sebagai perbuatan yang keji. Hal itu terdapat dalam frase firman Allah “ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ”.

Rangkaian ayat itu juga terdapat perintah memelihara harta yang terdapat dalam frase “ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ”, begitu juga “ وَأَوْفُوا ”, “ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ”. Selanjutnya, dalam ayat itu juga terdapat perintah memelihara akal (pikiran), yang terindikasi dari frase di akhir ayat “ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ”.

Pengurutan perintah memelihara *al-dharūriyāt* dalam ayat di atas, sangat jelas memberikan pemahaman bahwa *dharūriyāt* utama yang harus dipelihara adalah tauhid, tidak menyekutukan Allah. Dalam *paradigma* ini, berbagai *dharūriyāt* lain bisa dikatakan sebagai tujuan *secondary* yang berfungsi mengukuhkan pencapaian tujuan utama. Kerangka pemahaman ini sepenuhnya membingkai pemahaman terhadap penggalan surat *al-Baqarah* [2: 175-185] sebagai berikut:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...²¹⁹

Kemudahan hakiki dan utama yang dimaksud dalam ayat ini, mengikuti *paradigma* sebelumnya, adalah kemudahan di akhirat, bukan semata kemudahan di dunia. Sebab, mustahil Allah menghendaki sesuatu

²¹⁹ Ibid., h. 45



yang sifatnya semu dan sementara. Hal itu juga diperkuat oleh kandungan makna yang terdapat diujung ayat sebelumnya (ayat 184),²²⁰ bahwa menunaikan puasa (walau diberi keringanan untuk berbuka) adalah lebih baik bagi orang-orang yang mengetahui (hakikat tujuan puasa khususnya dan tujuan syarak pada umumnya).

Sungguh tidak mudah memahaml ayat itu (*al-Baqarah* [2] ayat 185) kalau kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan duniawi (semata). Bagaimana mungkin dikatakan Allah menghendaki kemudahan, kalau Dia memerintahkan berbagai ibadah yang “memberatkan” yang jadi hakikat *taklif*, selain ibadah *mahdhah* yang tidak mudah, *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, serta jihad jauh lebih berat dan sulit.²²¹ Bagaimana mungkin dikatakan Allah memberikan kemudahan, kalau justru cara “mudah” mendapatkan keuntungan, seperti riba dan judi, justru dinyatakan haram. Ketidakmungkinan ini akan berderet semakin panjang kalau semua muatan hukum syarak diurut dan diteliti secara menyeluruh. Oleh karena itu, tak dapat tidak, kemudahan yang dimaksud Allah itu bukanlah kemudahan duniawi yang bersifat sementara dan semu.²²²

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²²⁰ Arti lengkap ayat itu: “(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

²²¹ Tentang jihad, salah satunya dapat dilihat dalam surat *al-Baqarah* [2] ayat 216: “Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu: Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

²²² Penjelasan sederhana tentang hal ini, lihat dalam: Haytsam bin Jawwad al-Haddad, *Ayn Akhtha' al-Maqāshid al-Judā' fi Nazharihim ilā maqāshid al-Syarī'ah*, (link bagian pertama dan kedua). Link bagian pertama: <http://dorar.net/article/526>, dan link bagian kedua: <http://dorar.net/article/5267>, diakses: 8 April 2018



Paradigma di atas, juga akan memberikan “warna” berbeda dalam

memahami firman Allah dalam surat *al-Anbiyā’* [21] ayat 107 sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Kami tidak akan mengutus engkau (hai Muhammad) kecuali memberi rahmat bagi seluruh alam.²²³

Pemaknaan yang tepat terhadap ayat ini, menurut Ibn ‘Abbas, Muhammad adalah rahmat bagi seluruh manusia; mereka yang beriman dan membenarkan ajarannya akan bahagia, tapi mereka yang tidak beriman dan tidak membenarkan ajarannya, ia berlepas tangan dari mereka terhadap azab.²²⁴ Penerjemahan rahmat pengutusan Muhammad ini juga tergambar dalam sejarah yang jadi *asbāb al-nuzūl* surat *al-Mu’minūn* [23] ayat 75-77,²²⁵ yang pada prinsipnya mengajarkan bahwa kesulitan (malah diperangi) adalah bagian dari pengajaran agar orang-orang yang engkar mau sadar dan menerima ajaran Muhammad.²²⁶

²²³ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 508

²²⁴ Ibn Zayd menegaskan bahwa maksud kata *al-‘ālamīn* hanya khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Lihat: Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Qurthubi al-Anshari (W. 671 H), *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’an (Tafsir al-Qurthubī)*, Pen-tashhih: Hisyām Samir al-Bukhārī, (Riyadh: Dar ‘Alim al-Kutub, 2003), Juz 11, h. 350

²²⁵ Artinya: “Andaikata mereka Kami belas kasihani, dan Kami lenyapkan kemudharatan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka (75)”. “Dan sesungguhnya Kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka, dan (juga) tidak memohon (kepada-Nya) dengan merendahkan diri (76)”. “Hingga apabila Kami bukakan untuk mereka suatu pintu tempat azab yang amat sangat (di waktu itulah) tiba-tiba mereka menjadi putus asa (77)”.

²²⁶ Menurut riwayat dari Ibn ‘Abbas, ayat itu turun berkaitan peristiwa Abu Umāmah Tsumāmah bin Atsāl (pemuka Banī Hanīfah, salah seorang Raja Yamamah). Setelah menolak surat Nabi pada tahun ke-6 H, Tsumāmah berangkat umrah ke Makkah dan di dekat Madinah ia ditawan oleh rombongan sahabat yang bertugas jaga, tapi kemudian ia dan rombongannya masuk Islam dan diizinkan untuk berumrah dengan cara yang diajarkan Nabi. Ia dan rombongannya yang pertama mengumumkan *talbiyah* di Makkah. Menyaksikan itu, masyarakat Quraysy menawannya, tapi ia kemudian dibebaskan, karena warga Makkah khawatir akan diembargo dari Yamamah, tapi Tsumāmah mengultimaturnya “Aku bersumpah Demi Tuhannya Ka’bah, tidak akan ada satu bulir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bukan hanya orang-orang kafir saja yang ditetapkan Allah mengalami “kesulitan” dan “kesempitan”, orang-orang yang mengaku berimanpun tidak bebas dari cobaan itu.²²⁷ Sebagai sebuah cobaan dan ujian; ketika mereka bisa bersabar dan *istiqāmah*, Allah akan memberikan ganjaran berupa kesuksesan dari cobaan dan kesempitan neraka; itulah kemaslahatan dan kelapangan yang sesungguhnya.

Semua penjelasan di atas, mengarahkan bahwa *maqāshid syarī'ah* yang sesungguhnya adalah ketundukan mutlak kepada Allah dan dengan itulah ridha-Nya dapat diraih. Upaya memperoleh ridha Allah itu bukanlah sesuatu yang mudah, orang-orang yang beriman disuruh berusaha maksimal (jihad) mematuhi semua tuntutan agama-Nya. Tidak satupun dari ajaran agama-Nya yang terkategori sebagai kesulitan hakiki. Kalaupun ada kesulitan di dalamnya, ia lebih bersifat sulit sementara (di dunia) untuk ringan, mudah dan bahagia selamanya di akhirat. Hal itu sangat gamblang digambarkan Allah dalam surat al-Hajj [22] ayat 78 sebagai berikut:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...²²⁸

bandung dan Yamāmah yang sampai ke Makkah, sebelum kalian mengikuti agama Muhammad, hingga masyarakat Quraysy mengalami kelaparan, sampai-sampai mereka memakan bangkai, anjing dan hyrax (sebangsa tikus). Ketika itu, sebagai bagian dari *diplomasi* penghapusan *embargo* itu, Abu Sufyān menanyai Nabi: “Bukankah engkau menyatakan bahwa Allah mengutusmu sebagai rahmat bagi sekalian alam?” Nabi menjawab “Iya”. Abu Sufyān melanjutkan: “Lalu kenapa kamu membunuh bapak-bapak kami dengan pedang, dan mematikan anak-anak kami dengan kelaparan”. Ketika itu turunlah rangkaian ayat itu. Lihat: Al-Qurṭhubi, *op. cit.*, Juz I2, h. 143

²²⁷ Hal itu sangat tegas disebutkan dalam surat al-Ankabut [29] ayat 2: “Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan “Kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi?”

²²⁸ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 523



c. Sejarah *Maqāshid Syarī'ah*

Muhammad Sa'ad al-Yūbi dalam bukunya *Maqāshid al-syarī'ah al-Islamiyah wa alāqatuha bi al-Adillah al-Syar'iyah* menyebutkan bahwa *maqāshid al-syarī'ah* sebagaimana juga bidang ilmu-ilmu *syar'i* lainnya tidak langsung menjadi satu bidang ilmu melainkan melalui beberapa fase sampai kepada fase terkodifikasinya *maqāshid syarī'ah* menjadi sebuah bidang ilmu seperti sekarang ini.²²⁹ Setidaknya terdapat tiga fase dalam perkembangan; *Pertama*, fase *maqāshid syarī'ah* belum dibicarakan dalam pembahasan tersendiri. *Kedua*, fase *maqāshid syarī'ah* telah dibicarakan terpisah dari bahasan *uṣūl fiqh* lainnya. *Ketiga*, fase *maqāshid syarī'ah* dibicarakan dalam kitab tersendiri.²³⁰

1) Periode Pertama, *Maqāshid Syarī'ah* Belum Dibicarakan dalam Pembahasan Tersendiri

Perkembangan *maqāshid syarī'ah* bersamaan dengan perkembangan hukum Islam, *maqāshid syarī'ah* muncul bersamaan dengan turunnya wahyu. Dalam Alquran dan Sunnah terdapat dimensi hukum yang memuat *maqāshid* akan tetapi belum termodifikasi dan belum menjadi sebuah bidang ilmu.²³¹ Alquran dan Sunnah banyak menjelaskan tentang *maqāshid syarī'ah*.²³² Adapun ayat Alquran yang menjelaskan tentang *maqāshid syarī'ah* adalah sebagai berikut:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²²⁹ Muhammad Sa'ad bin Sa'id al-Yūbi (al-Yūbi), *Maqāshid al-syarī'ah al-Islamiyah wa alāqatuha bi al-Adillah al-Syar'iyah*, (Riyādh: Dār al-Hijrah Li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1998), h. 41

²³⁰ *Ibid*

²³¹ Nur al-Dīn bin Mukhtār al-Khādīmi (al-Khādīmi), *Ilm al-Maqāshid al-Syarī'ah*, (Riyādh: Maktabah al-Abikān, 2001), h. 53

²³² al-Yūbi, *loc. cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a) *Al-Baqarah* [2]: 185

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... (البقرة: ١٨٥)

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.²³³

- b) *Al-Mā'idah* [5]: 6

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُم لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ... (المائدة: ٦)

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.²³⁴

- c) *Al-Hajj* [22]: 78

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ... (الحج: ٧٨)

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.²³⁵

Sedangkan di antara hadis yang menyebutkan *maqāshid syarī'ah*

adalah sebagai berikut:

- a) Hadis Riwayat Bukhari

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسَّرِينَ وَأَمْ تَبْعْتُوا مُعَسَّرِينَ²³⁶

Sesungguhnya kamu dibangkitkan dalam kondisi mudah dan kamu tidak dibangkitkan dalam kondisi sulit.

- b) Hadis Riwayat Ibnu Majah

وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ²³⁷

²³³ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 28

²³⁴ *Ibid.*, h. 108

²³⁵ *Ibid.*, h. 341

²³⁶ Muhammad bin Ismail Al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, (Beirut: Dār Ibnu Katsīr, 2002), Juz

1, h. 93



Allah telah menghilangkan kesulitan.

c) Hadis Riwayat Malik

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ²³⁸

Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan.

Pengkajian terhadap *maqāshid syarī'ah* mulai mendapat perhatian yang *intensif* pada masa sahabat dan tabi'in. Pada masa ini penggunaan *maqāshid syarī'ah* terlihat pada penggunaan *qiyas, rasio, urf, dan mashlahah*.²³⁹ Pada masanya para sahabat dihadapkan kepada berbagai persoalan baru dan perubahan sosial yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah masih hidup. Hal ini menuntut kreatifitas para sahabat untuk memecahkan persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perubahan sosial itu. Kreatifitas para sahabat itu juga dituntut untuk melakukan penelaahan terhadap *maqāshid syarī'ah* sebagai upaya melakukan terobosan-terobosan hukum untuk mengantisipasi perubahan sosial yang terjadi.²⁴⁰

Salah satu contoh penerapan *maqāshid syarī'ah* di kalangan sahabat adalah tentang pengucapan *thalaq* tiga sekaligus dihukum jatuh tiga. Pada masa Nabi Muhammad, dan masa Abu Bakar dan di awal pemerintahan Umar Ibn al-Khatib penjatuhan *thalaq* tiga sekaligus dihitung satu. Setelah melihat adanya perubahan yang terjadi di tengah-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²³⁷ Ibn Majah Muhammad bin Yazīd al-Qazwini, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār Ihyā' al-Kutub al-ʿArabīyah, t.th), Juz 2, h. 1137

²³⁸ Malik bin Anas, *Muwaththa' Mālik*, (t.tp: Musthafa al-Bab al-Halaby, 1985), Juz 2, h. 784

²³⁹ Al-Khādīmī, *Ilm al-Maqāshid...*, *op. cit.*, h. 54. Al-Yūbī, *op. cit.*, h. 44

²⁴⁰ Al-Khādīmī, *al-Ijtihād...*, *op. cit.*, h. 91



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Hassanudin Riau

tengah masyarakat waktu itu, Umar Ibn al-Khatab memutuskan bahwa penjatuhan *thalaq* tiga sekaligus itu dianggap jatuh tiga.²⁴¹ Keputusan Umar Ibn al-Khatab ini adalah untuk menutup peluang terjadinya tindakan semena-semena para suami yang waktu itu seringkali berbuat sewenang-wenang menjatuhkan *thalaq* kepada isteri-isteri mereka. Untuk menjaga *eksistensi* fungsi *thalaq* itu sendiri dan mengembalikan fungsi yang sebenarnya. Hasil dari keputusan itu menampakkan bahwa *thalaq* sebagai hak suami tidak diselewengkan sebagai alat menganiaya isteri. Pertimbangan *maqāshid al-syarī'ah* terlihat dalam ijtihad yang dilakukan Umar Ibn al-Khathab di atas.²⁴² Oleh karena itu, ijtihad Umar Ibn al-Khathab ini sesuai dengan *adagium fiqh* yang menyatakan bahwa “Perubahan suatu fatwa tergantung kepada perubahan zaman, keadaan, dan kebiasaan masyarakat itu”.²⁴³

Penggunaan *maqāshid syarī'ah* seperti ini berlanjut sampai pada masa imam mazhab yang empat, yakni: Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Pada masa imam mazhab ini terdapat kajian *ushul* mereka sebagai dasar *ijtihād* yang sangat berkaitan dengan *maqāshid* seperti *istishlah*, *istihsan*, *qiyas* dan lain sebagainya.²⁴⁴

²⁴¹ Muhammad Said Ramadhan al-Būthi, *Dhawābit al-Mashlahat fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1977), h. 140-141

²⁴² Al-Khādimi, *al-Ijtihād...*, *op. cit.*, h. 97

²⁴³ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqī'in 'an Rab al-'Alamin*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), Juz 3, h. 14

²⁴⁴ Al-Khādimi, *Ilm al-Maqāshid...*, *op. cit.*, h. 55



2) Periode Kedua, *Maqāshid Syarī'ah* Dibahas Secara Terpisah dari Pembahasan *Ushul Fiqh* yang Lain

Maqāshid Syarī'ah dibahas secara terpisah dimulai pada abad ke-IV H dan seterusnya. Pada abad ini *Maqāshid Syarī'ah* menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan yang mandiri. *Maqāshid Syarī'ah* merupakan ruh dari penegakan syarī'at Islam. Meski demikian tidak banyak catatan sejarah yang merekam kapan pastinya istilah ini untuk pertama kalinya diistilahkan. Menurut Raisuni²⁴⁵, kata *maqāshid* pertama kali digunakan oleh Al-Tirmidzi Al-Hakim (W. 279 H),²⁴⁶ melalui buku-bukunya, *al-Shalat wa Maqāshiduha*, *Al-Hajj wa Asraruh*, *Al-'Illah*, *'Ilal Al-Syarī'ah*, *'Ilal Al-'Ubudiyyah* dan *Al-Furuq*.

Setelah Al-Tirmidzi Al-Hakim kemudian muncul Abu Mansur Al-Maturidi (W. 333 H) dengan karyanya *Ma'khad Al-Syara'* disusul Abu Bakar Al-Qaffal Al-Syasyi (W. 365 H) dengan bukunya *Ushul Al-Fiqh* dan *Mahasin Al-Syarī'ah*, yang membahas alasan-alasan dan hikmah hukum supaya lebih mudah dipahami dan diterima oleh manusia. Setelah Al-Qaffal muncul Abu Bakar Al-Abhari (W. 375 H) dengan karyanya *Mas'alah Al-Jawab wa Al-Dalail wa Al-'Illah* dan *Al-Taqrīb wa Al-Irsyād fī Tartīb Thurūq Al-Ijtihād*. Setelah al-Abhari muncul Al-Baqillāni (W.

²⁴⁵ Al-Raysūni, *op. cit.*, h. 40-42

²⁴⁶ Tahun wafat tersebut adalah menurut al-Khādimi dalam bukunya *Ilm al-maqāshid...*, *op. cit.*, h. 56. Menurut Muhammad Sa'ad bin Sa'id al-Yūbi bahwa Al-Tirmidzi Al-Hakim wafat sekitar tahun 285 H. Sedangkan menurut Al-Raysūni tidak ada kepastian tentang tahun wafatnya, yang disepakati adalah bahwa Al-Tirmidzi Al-Hakim hidup pada abad ketiga hijriah. Baca Al-Yūbi, *op. cit.*, h. 48 dan Al-Raysūni, *op. cit.*, h. 40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

403 H) dengan karyanya *Kitāb al-Bayān ‘an Farāidh al-Din wa Syarā’i al-Islām*.²⁴⁷

Perkembangan selanjutnya muncul Imam Al-Haramain Al-Juwaini (W. 473 H), Al-Yūbi menyebutkan bahwa imam al-Haramain merupakan ulama pertama yang menulis tentang kaidah *maqāshid* dan pembagiannya dalam kitabnya *Al-Burhan*. Dalam kitab *al-Burhān* al-Haramain menyinggung tentang *dharuriyyat*, *tahsiniyat* dan *hajiyyat*, yang juga menjadi tema pokok dalam Ilmu *Maqāshid*.²⁴⁸ Kemudian datang Imam Al-Ghazali (W. 505 H) yang membahas beberapa metode untuk mengetahui *maqāshid*, dan menawarkan cara untuk menjaga *maqāshid syarī’ah* dari sisi *al-wujud* (yang mengokohkan eksistensinya) dan *al-‘adam* (menjaga ḥa-hal yang bisa merusak maupun menggagalkannya).²⁴⁹ Kemudian Imam Al-Razi (w. 606 H) dengan karyanya *al-Mahshūl*, lalu Imam Al-Amidi (W. 631 H) dengan karyanya *al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām*, dan ‘Izzuddin bin ‘Abd Al-Salam (W. 660 H) dengan karyanya *Qawā’id al-Ahkām fī Mashālih al-Anām*, kemudian Al-Qarāfi (W. 684 H) dengan karyanya *al-Furuq*, Al-Thuhi (W. 716 H), Ibnu Taimiyyah (W. 728 H), Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah (W. 751 H), baru setelah itu disusul oleh Imam Al-Syatibi.²⁵⁰

Substansi pembahasan *maqāshid syarī’ah* ini kemudian mulai berkembang dan mulai menjadi bahasan sendiri pada abad ke-5 Hijriyah.

²⁴⁷ *Ibid.*, h. 43-46

²⁴⁸ Al-Yūbi, *op. cit.*, h. 48

²⁴⁹ *Ibid.*, h. 51. Al-Raysūni, *op. cit.*, h. 52

²⁵⁰ *Ibid.*, h. 54-66



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Imam Al-Juwaini al-Imam al-Haramain Abi al-Ma'ali Abd al-Malik Ibn Abdullah Ibn Yusuf al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ulama *ushul* yang pertama kali meletakkan dasar kajian tentang *maqāshid syarī'ah* ini. Imam al-Juwaini mengatakan orang-orang yang tidak mampu memahami dengan baik tujuan Allah dalam memberikan perintah dan larangan-Nya, ia belum dipandang mampu menetapkan atau melakukan *istinbath* hukum-hukum *syarī'at*.²⁵¹

Kemudian Al-Juwaini mengelaborasi lebih jauh *maqāshid syarī'ah* itu dalam hubungannya dengan illat. Dalam kitabnya, *Al-Burhan fī Ushul Fiqh*, beliau menerangkan tentang *istinbath* hukum dengan mencocokkan realita yang terjadi tidak hanya mencari kesesuaian kaidah-kaidah dengan furu'nya imam-imam sebelumnya. Sesuatu yang dikuatkan oleh akal dan mempunyai dalil, maka itu adalah *al-ashl*. Imam Al-Haramain menyebutkan lafaz *al-maqāshid al-syarī'ah*, dan *al-qashdu* sebanyak 10 kali dalam kitabnya *Al-Burhan*.²⁵² Imam Al-Haramain merupakan pemimpin dalam hal *nazhariyah al-maqāshid* karena Imam Al-Haramain telah lebih dahulu memaparkan pembagian *maqāshid syarī'ah* dengan mengenalkan istilah dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat dalam penetapan suatu hukum beserta persyaratannya. Pemikiran Imam al-Juwaini ini selanjutnya dikembangkan oleh al-Ghazali. Imam al-Ghazali memahami

²⁵¹ Abu Al-Ma'ali Abd Al-Malik Ibn Abdullah Ibn Yusuf Al-Juwaini, *al-Burhan fī Ushūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Anshar, 1400 H), Juz 1, h. 295

²⁵² Al-Raysūni, *op. cit.*, h. 48



maqāshid al-Syarī'ah berkaitan dengan pembahasan tentang masalik *al-Munasabah* yang terdapat dalam *Masalik al-Ta'wil*.²⁵³

3) Periode Ketiga, *Maqāshid Syarī'ah* Dibahas dalam Suatu Kitab Tersendiri

Menurut al-Yūbi ulama penulisan *maqāshid* secara tersendiri dalam sebuah buku diawali oleh Izz al-Din Ibn abd al-Salām dengan bukunya *Qawā'id al-Ahkām fi Mashālih al-Anām* dan dilanjutkan oleh imam al-Syāthibi dengan bukunya *al-Muwāfaqāt*. Setelah al-Syāthibi muncul ulama-ulama kontemporer seperti Thahir Ibn Asyfir dengan bukunya *al-Maqāshid al-Syarī'ah al-Islāmiyah* dan Allal al-Fāsi dengan bukunya *Maqāshid al-Syarī'ah al-Islāmiyah wa makārimuha*.²⁵⁴

Apa yang ditulis oleh Imam al-Syāthibi melanjutkan yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya, apa yang dilakukan oleh Imam al-Syāthibi bisa menarik perhatian banyak pihak, karena ia mengumpulkan persoalan-persoalan yang tercecer dan dibahas sepotong-sepotong oleh orang-orang sebelumnya menjadi sebuah pembahasan tersendiri, ia mengkhususkan pembahasan mengenai *maqāshid* ini satu juz (yaitu juz dua) dari empat juz isi kitabnya. Ia juga mengembangkan dan memperluas yang dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya mengenai *maqāshid*, juga menyusunnya secara urut dan sistematis seperti sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Hal inilah yang menjadi kontribusi signifikan Imam al-Syāthibi dalam ilmu *maqāshid syarī'ah*, serta memberi inspirasi banyak orang untuk membahas *maqāshid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵³ Abu Hamid al-Ghazali, *Syifā' al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'wil*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999 M), h. 79

²⁵⁴ Al-Yūbi, *op. cit*, h. 73. Baca juga Al-Khādimi, *Ilm al-Maqāshid...*, *op. cit.*, h. 61



syarī'ah ini lebih jauh, hingga Ibnu 'Asyur (W. 1393 H) pada akhirnya mempromosikan *maqāshid syarī'ah* ini sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

Al-Syāthibi memahami *maqāshid syarī'ah* sangat urgen dilakukan ketika seorang ulama mujtahid ingin melakukan *istinbath* hukum, karena dengan memahami *maqāshid syarī'ah* ia akan dapat mengetahui apa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya. Oleh karena itulah al-Syāthibi menekankan keberhasilan penggalan hukum syara' secara optimal bagi seorang mujtahid tergantung pada pemahaman *maqāshid syarī'ah*.²⁵⁵

Kitab-kitab yang membahas *maqāshid syarī'ah* antara lain: *Al-Burhān fī Ushūl Al-Fiqh* karya Imam Al-Haramain Al-Juwaini (W. 478 H/1085 M), *Al-Mustashfā* dan *Al-Mankhūl* karya Abu Hamid Al-Ghazālī (W. 505 H/1111 M), *Al-Ihkām fī Ushūl Al-Ahkām* karya Saif Al-Dīn Al-Amidi (W. 621 H/1223M), *Al-Qawā'id Al-Kubra* karya Sulthān Al-Ulama Al-Izz Al-Dīn Ibn Abd Al-Salām (W. 550 H/1251 M), *Majmū' Fatawa Ibn Taimiyah* karya Taqiyuddin Ibn Taimiyah (W. 723 H/1327 M), *I'lām Al-Muwaqqi'īn 'an Rabb Al-'Alamīn* karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah (W. 751 H/1350 M), *Al-Qawā'id* karya Tajuddin Al-Subkiy (W. 756 H/1355 M), dan *Al-Muwafaqāt* karya Al-Syāthibi (W. 790 H/1388 M). Syaikh Thahir bin 'Asyur (W. 1973M) yang menulis buku dengan judul *Maqāshid*

²⁵⁵ Abu Ishāq Al-Syāthibi, *Al-Muwāfaqāt*, (Mesir: Maktabal al-Tijāriyah, t.th), Jilid IV, h. 89



Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah, dan Syaikh Alal Al-Fāsi (W. 1974 M) yang menyusun buku *Maqāshid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah wa Makārimuhā*.²⁵⁶

Pembagian *Maqāshid Syarī'ah*

1) Pembagian *Maqāshid Syarī'ah* dari Segi *Mashlahah* yang Harus Dipelihara

Maqāshid Syarī'ah dari segi *mashlahah* yang harus dipelihara, terbagi tiga, yaitu:

a) *Mashlahah Dhāruriyah*²⁵⁷

Mashlahah dhāruriyah adalah *mashlahah* yang harus ada guna terwujudnya kemashlahatan manusia dan seandainya tidak ada, maka kemashlahatan manusia tidak akan terwujud.²⁵⁸ Kemaslahatan *dhāruriyah* dapat diketahui dengan mempelajari secara menyeluruh ketentuan syara' pada lima persoalan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Lima hal terakhir inilah yang disebut dengan *maqāshid al-syara'* (tujuan syara').²⁵⁹

Memelihara lima dasar ini terlihat pada beberapa penetapan hukum, diantaranya:

(1) Dalam memelihara agama disyari'atkan membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada pembuat *bid'ah*

²⁵⁶ Al-Khādīmi, *Ilm al-Maqāshid...op. cit.*, h. 65

²⁵⁷ *Dharurah* secara bahasa berarti *al-Hājat al-Syadīdah* (sesuatu yang sangat dibutuhkan). Baca Majma' al-Lughah al-Arabiyah, *Mu'jam al-Wasīth*, (Mesir: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2004), Juz 1, h. 538. Adapun secara istilah *dharurah* adalah sampainya manusia pada batasan yang menyebabkan kebinasaan. Baca Jalāl al-Dīn al-Suyūti, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), h. 85

²⁵⁸ Al-Syāthibi, *op. cit.*, Juz 2, h. 17

²⁵⁹ Ibn Qudāmah, *Raudhat...*, *op. cit.*, Juz 1, h. 169-170

yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya, sebab hal ini (bila dibiarkan) akan melenyapkan agama umat.

- (2) Dalam memelihara jiwa disyari'atkan *qisas* (hukuman yang sama dengan kejahatannya), sebab dengan hukuman ini jiwa manusia akan terpelihara.
- (3) Dalam memelihara akal disyari'atkan kewajiban *hadd*, karena minum minuman keras, karena dengan sanksi ini akal akan terpelihara, dimana akal merupakan dasar pen-taklif-an.
- (4) Dalam memelihara keturunan disyari'atkan kewajiban *hadd* karena berzina, sebab dengan sanksi ini keturunan dan nasab akan terpelihara.
- (5) Dalam memelihara harta disyari'atkan memberi hukuman potong tangan kepada para penjahar dan pencuri, sebab dengan sanksi ini harta benda yang menjadi sumber kehidupan manusia itu akan terpelihara.²⁶⁰

Legalitas pemeliharaan *mashlahah dharūriyah* terdapat dalam Alquran dan Hadis Nabi. *Mashlahah dharūriyah* terdapat dalam surat *al-An'ām* ayat 151-152²⁶¹:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا

²⁶⁰ Al-Ghazālī, *op. cit.*, h. 417

²⁶¹ Disamping ayat di atas, terdapat ayat lain yang menyebutkan pemeliharaan *mashlahah*, yaitu surat al-Isra' ayat 23-36

بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٥٢)

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar ". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya) (151). Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) , dan penuhilah janji Allah . Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat (152).²⁶²

Ayat di atas, menyebutkan beberapa *mashlahah* yang harus dipelihara; *Mashlahah* agama disebutkan dalam kalimat “*janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia*”. *Mashlahah* jiwa disebutkan dalam kalimat, “*dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kamu akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka*”. *Mashlahah* keturunan disebutkan dalam kalimat “*dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi*”. *Mashlahah* harta disebutkan dalam kalimat “*Dan janganlah kamu dekati harta*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶² Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 148-149

anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa”.

Sehubungan dalam hadis nabi pemeliharaan *mashlahah* diantaranya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Masud:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِخْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيْبُ الزَّيْنِي، وَالنَّفْسُ
بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.²⁶³

Tidak halal darah seseorang muslim kecuali disebabkan tiga hal, yaitu: janda yang berzina, pembunuhan dan meninggalkan agamanya.

b) *Mashlahah Hājiyah*

Mashlahah Hājiyah adalah *mashlahah* yang dibutuhkan oleh manusia untuk mendapatkan kemudahan dan menghindari kesulitan dan kalau seandainya tidak terwujud akan menyebabkan munculnya kesulitan.²⁶⁴ Di antara bentuk *mashlahah hājiyah* adalah seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada batas *dharurah* (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan untuk mencari kesetaraan (*kafa'ah*) agar dapat dikendalikan, karena khawatir kalau kesempatan tersebut terlewatkan, dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa datang.²⁶⁵

Adapun dalam ibadah wujud *mashlahah hājiyah* terlihat pada beberapa pensyari'atan, diantaranya *qashar* dan *jama'* shalat bagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶³ Muhammad bin Ismail Al-Bukhāri, *op. cit.*, Juz 8, h. 163

²⁶⁴ Al-Syāhibi, *op. cit.*, Juz 2, h. 18. Al-Ghazālī, *op. cit.*, Juz 1, h. 289

²⁶⁵ Al-Ghazālī, *op. cit.*, h. 418. Ibn Qudāmah, *loc. cit.*



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

musafir, bolehnya berbuka bagi orang sakit dan musafir, boleh shalat duduk bagi orang yang tidak sanggup berdiri, tidak adanya kewajiban bagi orang nifas dan haid untuk shalat dan lain-lain.²⁶⁶ Dalam *muamalah* wujud *mashlahah hājiyah* terlihat pada pensyari'atan kebolehan transaksi-transaksi guna mewujudkan kebutuhan manusia berupa jual beli, sewa, syirkah, bolehnya bercerai, bolehnya wali menikahkan anaknya yang masih belia untuk memastikan *kafa'ah* dan lain sebagainya.²⁶⁷

Pemeliharaan *mashlahah hājiyah* disebutkan dalam nash, diantaranya adalah surat *al-Ma'idah* [5]: 6:

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدة: ٦)

...Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ni'mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.²⁶⁸

c) *Mashlahah Tahsīniyah*

Mashlahah tahsīniyah adalah *mashlahah* yang tidak sampai pada tingkat *dharūri* dan *hājiy*, namun hanya pada posisi *tahsīn* (mempercantik), *tazyīn* (memperindah), dan *taisīr* (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari, seperti status ketidaklayakan hamba sahaya sebagai saksi, padahal fatwa dan

²⁶⁶ Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 312

²⁶⁷ *Ibid.*

²⁶⁸ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 108



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

periwayatannya bisa diterima.²⁶⁹ *Mashlahah tahsīniy* tidak berimplikasi kepada munculnya kesulitan bagi manusia.²⁷⁰ Al-Rāzi mengatakan bahwa *mashlahah tahsīniy* merupakan pengakuan manusia terhadap akhlak yang baik.²⁷¹

Adapun dalam ibadah wujud *mashlahah tahsīniyah* terlihat pada beberapa pensyari'atan, diantaranya bersuci dan menutup aurat dalam shalat, memakai pakaian yang bagus ketika pergi ke masjid dan pertemuan. Dalam muamalah wujud *mashlahah tahsīniyah* terlihat pada larangan jual beli benda najis atau berbahaya, larangan membeli barang yang telah dibeli oleh orang lain dan lain sebagainya.²⁷²

2) Pembagian *Maqāshid Syarī'ah* dari Segi Tingkatan *Maqāshid* yang Ada

Maqāshid syarī'ah dari segi tingkatan *maqāshid* terbagi dua, yaitu:

a) *Maqāshid Asyliyiyah*

Maqāshid ashliyiyah adalah *maqāshid* yang tidak ada ruang bagi keterlibatan manusia (*mukallaf*) didalamnya sedikitpun, karena ia merupakan hal yang kodrati bagi semua agama secara mutlak, kapan dan dimanapun. *Maqāshid ashliyiyah* terbagi kepada *dharuriyah* 'ainiyah dan *dharuriyah kifa-iyah*.²⁷³ Adapun *dharurah* 'ainiyah, adalah kewajiban setiap orang *mukallaf*, sedangkan *dharurah kifa-iyah*, adalah kewajiban-kewajiban kolektif.²⁷⁴

²⁶⁹ Al-Ghazāli, *op. cit.*, h. 252

²⁷⁰ Al-Khādimi, *Ilm al-Maqāshid...op. cit.*, h. 72

²⁷¹ Al-Rāziy, *op. cit.*, Juz 2, h. 222

²⁷² Ahabah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 313

²⁷³ Al-Syāthibi, *op. cit.*, Juz 2, h. 177

²⁷⁴ *Ibid.*, h. 177



b) *Maqāshid Tabi'ah*

Maqāshid tabi'ah adalah *maqāshid* yang di dalamnya terdapat porsi keterlibatan orang *mukallaf*. Dari aspek ini dapat mewujudkan keinginan, yang bersifat kebutuhan manusia, dengan pemenuhan semua kebutuhan manusia itulah, urusan dunia dan agama dapat ditegakkan. Ini semua dengan sebab pemberian Allah yang Maha Bijaksana. Allah menciptakan untuk manusia keinginan untuk makan, minum, seks, keadaan panas, dingin, sehingga manusia perlu berusaha untuk mendapatkan makanan, minuman, pakaian, perempuan dan perumahan yang layak untuk mempertahankan hidupnya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Karena Allah juga menciptakan surga dan neraka dikirim RasulNya untuk menyampaikan bahwa tempat abadi bukanlah dunia ini, tetapi ada akhirat yang harus dipertanggungjawabkan, yang dapat membuat seseorang bahagia atau celaka selama-lamanya. Karena itu, *maqāshid tabi'ah* adalah pelengkap untuk *maqāshid ashliyyah*.²⁷⁵

3) Pembagian *Maqāshid Syarī'ah* dari Segi Kandungan *Maqāshid*

Maqāshid syarī'ah dari segi kandungan *maqāshid* terbagi tiga,

yaitu:

a) *Maqāshid 'Ammah*

Maqāshid 'ammah disebutkan oleh Ibnu Asyūr adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diisyaratkan oleh syarak di setiap kondisi *tasyri'* (penetapan hukum) atau pada umumnya dengan tidak

²⁷⁵ *Ibid.*, h. 179



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkhususkannya pada bentuk khusus dari hukum-hukum *syarī'ah*.²⁷⁶

Pemeliharaan *mashlahah dharūriyah al-khamsah* merupakan *maqāshid 'ammah* yang harus dipelihara dalam semua kondisi penetapan hukum secara umum. *Maqāshid 'ammah* sangat banyak yang paling utama adalah *jalb al-mashālih wa dar' al-mafāsiq* (mengambil manfaat dan menghindari kerusakan) bahkan merupakan tujuan utama.²⁷⁷ *Maqāshid 'ammah* lainnya adalah *raf' al-haraj* (menghilangkan kesulitan), *al-'adl* (adil), *al-ijtima'* (persatuan) dan lain-lain.

b) *Maqashid Khashshah*

Maqāshid khashshah adalah makna-makna dan tujuan yang yang terdapat pada bab tertentu dari beberapa bab *syarī'ah* seperti *maqāshid al-ibadāt*, *maqāshid al-muamalat*, *maqāshid al-jināyat* dan lain sebagainya.²⁷⁸ Ibnu Asyūr menyebutkan bahwa *maqāshid khashshah* adalah seperti *maqāshid* tentang keluarga, *maqāshid* tentang transaksi keuangan, *maqāshid* tentang peradilan dan kesaksian, *maqāshid* tentang pidana dan lain-lain.²⁷⁹

c) *Maqāshid Juz'iyah*

Maqāshid juz'iyah adalah *maqāshid* khusus untuk satu masalah saja, seperti *maqāshid wudhu'*, *maqāshid shalat*, *maqāshid jual beli* dan lain sebagainya. *Maqāshid juz'iyah* terlihat dalam kajian kitab-kitab fiqh dan syarah hadis, penulis yang paling utama dalam menulis

²⁷⁶ Muhammad Thāhit Ibn Asyūr, *op. cit.*, h. 171

²⁷⁷ Al-Yūbi, *op. cit.*, h. 389

²⁷⁸ *Ibid.*, h. 411

²⁷⁹ Muhammad Thāhit Ibn Asyūr, *loc. cit.*



tentang *maqāshid juz'iyah* adalah Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibn al-Qayyim al-Jauziyah.²⁸⁰

Essensi dan Eksistensi *Maqāshid Syari'ah*

Sebagai agama yang membawa misi *rahmah li al-'ālamīn*, dalam masalah hukum, tentunya Islam tidak akan begitu saja menetapkannya tanpa didasari pertimbangan *maslahat* bagi makhluk di dunia ini. Penelusuran terhadap ayat-ayat Alquran dan Sunnah dapat diketahui bahwa alasan logis penetapan hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia.²⁸¹

Atas dasar kemaslahatan sebagai tujuan dominan, al-Syāthibī menyimpulkan bahwa: Tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat sekaligus.²⁸² Pernyataan senada terlebih dahulu telah dikemukakan oleh Ibn al-Qayyim, sebagai berikut: sesungguhnya pondasi dan landasan *syari'ah* didasarkan atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Semua berdasar keadilan, rahmat, dan kemaslahatan. Setiap persoalan yang menyimpang dari keadilan kepada kecurangan, dari rahmat kepada lawannya (laknat), dari *maslahat* kepada *mafsadat*, dan dari hikmah kepada tindakan sia-sia, bukanlah *syariat*, meskipun bisa dimasukkan kedalamnya dengan cara *takwil*.²⁸³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸⁰ Musfir bin Ali al-Qathāniy, *Manhāj Istinbāth al-Ahkām al-Nawāzil al-Fikhiyah al-Mu'ashirah* (Jeddah: Dār al-Andalus al-Khadhrā', 2003), h. 550

²⁸¹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 233

²⁸² Al-Syāthibī, *op. cit.*, Juz 1, h. 7. Kesimpulan ini juga "diulang-ulang" oleh ulama lain. Diantaranya: Zakī al-Din Sya'bān, *op. cit.*, h. 381. 'Abd al-Kārim Zaydān, *op. cit.*, h. 384. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāshid Syari'ah Menurut al-Syāthibī*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 65

²⁸³ Ibn al-Qayyim Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'd Syams al-Dīn al-Jawziyah 691-751 H, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Pen-tahqīq: Muhammad 'Abd al-Salām Ibrāhīm, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), Juz 3, h. 11



Imam al-Syaukāni menjelaskan bahwa esensi maslahat itu

sesungguhnya memelihara tujuan syariat dengan menolak terjadinya kerusakan dalam kehidupan umat manusia.²⁸⁴ Dilihat dari segi *maqāshid syarī'ah*, eksistensi maslahat dapat dibedakan kepada tiga macam, seperti berikut ini:

- 1) Disebut dengan *mā syahid al-syar' bi i'tibārih*, yaitu maslahat yang dijelaskan langsung oleh syarak (*nash*) keberadaan dan wujudnya. Abū Zahrāh menyebutnya dengan *maslahah haqīqī*.²⁸⁵ Sementara ulama ushul lainnya menyebutnya dengan *mashlahah mu'tabarah*.
- 2) Disebut dengan *mā syahid al-syar' bi ilghā'ih*, yaitu maslahat yang ditolak atau yang bertentangan dengan syarak. Artinya maslahat yang eksistensinya berlawanan dengan apa yang disebutkan oleh syarak atau *nash*.
- 3) Disebut dengan *mā lam yasyhad lahā bi i'tibārah wa lā bi ilghā'ih*, yaitu maslahat yang tidak disebutkan secara jelas, baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya, tetapi eksistensinya sejalan dengan tujuan syariat serta sangat dihajatkan oleh umat. Maslahat jenis yang ketiga ini, sering pula disebut dengan *maslahat mursalah*.²⁸⁶

Ketiga macam *maslahat* di atas, terlihat bahwa ternyata ada *maslahat* yang didukung keberadaannya oleh *nash* tentang nilai kebaikan dan manfaatnya yang dapat menjamin kebahagiaan bagi umat manusia. Jenis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸⁴ Muhammad bin 'Ali bin Muhmmnad al-Syawkānī al-Shan'āni (W. 1250 H), *Irsyād al-Fuhūl ila Tahqīq al-Haqq Min 'Ilm al-Ushūl*, Pen-tahqīq: Abi Hafsh Sāmī bin al-'Arabi al-Usyari, (Damaskus: Dār al-Fadhilah, 2000), Juz 2, h. 990

²⁸⁵ Abū Zahrāh, *op. cit.*, h. 273

²⁸⁶ Abd al-Aziz bin 'Abd al-Rahman 'Ali bin al-Rubu'iyah, *al-Adillah al-Tasyrī' al-Mukhtalaf al-Ihtiqāt Bihā*. (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1979), h. 191-194



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maslahat yang ditolak oleh *nash* serta ada *maslahat* yang tidak dijelaskan oleh *nash*, baik dari segi penerimaan atau pengakuannya maupun dari segi penolakannya. Keberadaannya sejalan dengan tujuan *maqāshid syarī'ah* serta memang dihajatkan oleh masyarakat. Jenis *maslahat* yang disebutkan terakhir ini merupakan *maslahat* yang didiamkan oleh *syāri'*.

Abid bin Muhammad al-Sufyānī²⁸⁷ mengutip pendapat al-Ghazālī (W. 505 H), menjelaskan bahwa seluruh yang menyangkut tujuan syariat dan upaya untuk mewujudkannya adalah merupakan *mashlahah* serta bila diabaikan akan menimbulkan kerusakan dan menolak kerusakan akan melahirkan *kemaslahatan*. Dalam hubungan ini ada dua segi yang harus diperhatikan dalam melihat *eksistensi mashlahat* yang merupakan inti dari *maqāshid syarī'ah*.

Pertama, *maqāshid syarī'ah* dilihat dari maksud *syāri'* (pembuat hukum). Abū Ishāq al-Syāthibī²⁸⁸ menjelaskan bahwa ditinjau dari segi maksud *syāri'*, *maqāshid syarī'ah* tidak lain adalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, kemaslahatan dimaksud dapat dipilah jadi tiga tingkatan, yaitu *dharūriyāt*, *hājīyāt* dan *tahsīnīyāt*. Masing-masing tingkatan *maslahat* ini menunjukkan tingkat atau peringkat kepentingannya. *Maslahat dharūriyāt* merupakan peringkat pertama atau menyangkut kepentingan primer atau pokok. Ia menyangkut kepentingan dan kemaslahatan pokok yang tidak dapat tidak mesti ada, apabila tidak akan menimbulkan kerusakan bagi

²⁸⁷ Abid bin Muhammad al-Sufyānī, *Ma'ālim Tharīqah al-Salaf fī Ushul al-Fiqh*, (Makkah: Maktabah al-Manārah, 1988), h. 414

²⁸⁸ al-Syāthibī, *op. cit.*, Juz 2, h. 7-8



kelangsungan hidup manusia.²⁸⁹ Ada lima kepentingan pokok yang termasuk kedalam *maslahat dharūriyāt* ini, yaitu; terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kemudian *maslahat hājiyāt* menyangkut kepentingan atau *maslahat* yang sifatnya *sekunder*. Sekiranya aspek *hājiyāt* ini tidak atau belum terwujud tidaklah membawa atau menimbulkan bencana atau kerusakan, tetapi dapat menimbulkan kesulitan bagi manusia. Misalnya dalam lapangan ibadah kepada Allah memberikan jalan keluarnya, yaitu ada *rukhsah*. Seperti boleh tidak berpuasa apabila sakit atau safar dalam jarak tertentu, dan boleh mengqasar shalat dalam perjalanan.

Selanjutnya, *maslahat tahsīnīyāt* menyangkut kepentingan yang sifatnya pelengkap atau kesempurnaan saja. Sekiranya tidak terpenuhi tidaklah menimbulkan kesulitan dan tidak pula mengancam salah satu dari lima kepentingan pokok di atas. Menurut al-Syāhibī, kepentingan *tahsīnīyāt* ini hanya berkaitan dengan kepatutan dan kepantasan menurut adat kebiasaan (*mahāsin al-‘ādāt*), keindahan yang sesuai dengan ketentuan akhlak yang berlaku dalam kehidupan. Dalam lapang ibadat Islam menetapkan berhias dan menggunakan harum-haruman. Sehubungan dalam praktiknya, ketiga tingkatan *maslahat* di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pemahaman dan penerapan ketiga *maslahat* di atas, tidaklah secara *parsial*.²⁹⁰

²⁸⁹ Muthb Mushthafā Sanu, *Mu’jam Mushthalahāt Ushūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), h. 413.

²⁹⁰ Asafri Jaya Bakri, *op. cit.*, h. 72.

Kedua, *maqāshid syarī'ah* ditinjau dari segi maksud *mukallaf*.

Menurut Abū Ishāq al-Syāhibi,²⁹¹ dari segi ini ada empat hal penting yang harus diperhatikan:

- 1) Pensyariatan dan pembebanan hukum (*taklīf*) berpijak atas dasar kemampuan (*qudrah*) untuk dilaksanakan oleh *mukallaf*. Sekiranya *mukallaf* tidak memiliki kemampuan maka secara *syar'ī*, *taklīf* tidak dapat diberlakukan kepada *mukallaf* tersebut.
- 2) *Taklīf* tidaklah bermaksud menyulitkan manusia (*mukallaf*), tetapi justru akan melanggengkan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Banyak ayat-ayat Alquran yang menyebutkan tentang ini, misalnya dalam surat al-Baqarah [2] ayat 286, disebutkan *lā yukallif nafsan illā wus'ahā*, yang menegaskan bahwa Allah tidak akan memberikan beban (*taklīf*) kecuali menurut kemampuan seseorang dalam keadaan kesanggupannya.
- 3) Pensyariatan hukum bagi *mukallaf* adalah untuk menghindarkan mereka dari godaan dan dorongan hawa nafsu yang dapat merusak citra dirinya. Dengan adanya *taklīf*, maka *mukallaf* dapat menjadi hamba yang taat, sekalipun suatu ketika akan berhadapan dengan kesulitan dalam menjalankannya, karena manusia diciptakan hanya beribadah kepada Allah dan dilarang mempersekutukan-Nya. Pensyariatan hukum bertujuan untuk mengontrol atau menaungi manusia agar dapat menjalani hidup dengan tertib dan taat kepada Allah.

²⁹¹ Al-Syāhibi, *op. cit.*, Juz 2, h. 210





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pensyariatan hukum bertujuan agar manusia mengerti dan memahami *taklif* yang dibebankan kepadanya. Dengan memiliki pengetahuan dan memahami *taklif*, manusia akan menjadi cerdas dan beradab.

Keempat aspek di atas, dapat dipahami bahwa *maqāshid syarī'ah* dari segi maksud *mukallaf* adalah untuk kepentingannya *mukallaf* itu sendiri dan keempat aspek tersebut di atas, haruslah dipahami dan diaplikasikan secara *kumulatif*, bukan alternatif. Artinya, pensyariatan dan pembebanan hukum kepada *mukallaf* bukan saja dilihat dari segi kesanggupan untuk melaksanakannya, tetapi juga sekaligus akan melanggengkan kehidupannya, menjadikan *mukallaf* sebagai orang yang taat dan sekaligus mereka berada di bawah kontrol hukum. Secara bersamaan agar *mukallaf* memiliki kecerdasan dan berilmu pengetahuan tentang *taklif* yang akan dilaksanakannya.

Jadi, jangkauan *maqāshid syarī'ah* yang pada akhirnya akan mendatangkan kemaslahatan itu harus diupayakan dan diperjuangkan secara sungguh-sungguh dan terus menerus agar apa yang menjadi tujuan *syarak* seperti yang diharapkan oleh *syārī'*, yaitu terciptanya kemaslahatan bagi manusia (hamba) dan terhindar dari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat kelak dapat diwujudkan.

f. Urgensi *Maqāshid Syarī'ah*

Terkait dengan ini, al-'Izz bin Abd al-Salām mengungkapkan bahwa tujuan penulisan kitab ini adalah untuk: (1) Menjelaskan *maslahat-maslahat* yang ada dalam ketaatan kepada Allah, dalam *mu'amalah* dan semua perilaku baik, supaya manusia berusaha bersungguh-sungguh meraih ketaatan-ketaatan itu. (2) Menjelaskan akibat-akibat dari penyimpangan, supaya para hamba



Allah berusaha bersungguh-sungguh untuk menolak penyimpangan-penyimpangan itu. (3) Menjelaskan *maslahat-maslahat* yang ada dalam ibadah, supaya para hamba Allah selalu siap sedia melaksanakannya. (4) Menjelaskan sebagian *maslahat* yang perlu didahulukan dari *maslahat* lainnya. (5) Menjelaskan *mafsadat* mana yang harus diakhirkan dari *mafsadat* lainnya. (6) Menjelaskan apa saja yang masuk dalam kemampuan usaha manusia dan yang tidak masuk dalam kemampuan usaha mereka.

Syariat seluruhnya merupakan *maslahat*, baik yang bersifat menolak kerusakan maupun yang bersifat mendatangkan kebaikan. Jika engkau mendengar Allah memanggil (Hai orang-orang yang beriman), maka perhatikan pesan yang akan disampaikan sesudah itu. Engkau tidak akan mendapatkannya, kecuali kebaikan yang engkau dianjurkan untuk mendapatkannya, atau keburukan yang engkau dilarang untuk melakukannya, atau gabungan antara anjuran dan larangan. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan dalam kitab-Nya beberapa hukum yang berkaitan dengan kerusakan sebagai motivasi untuk menjauhi hal yang merusak dan menjelaskan beberapa hukum yang terkait dengan kebaikan sebagai motivasi untuk mewujudkan kebaikan itu.²⁹²

Terkait dengan panggilan Allah: “Hai orang-orang yang beriman”, terdapat *atsar* dari ‘Abdullāh bin Mas’ūd sebagai berikut:

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹² ‘Izz al-Dīn Abu Muhammad ‘Abd al-‘Aziz bin ‘Abd al-Salām bin Abi al-Qasim bib al-Hasan al-Samī Sulthan al-‘Ulama’ (577-660 H / 1181-1262 M), *al-Qawā’id fī Ikhtishār al-Maqāshid*, Pen-Tahqiq ‘Iyād Khālid al-Thabbā’, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1996), Juz 1, h. 10-11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَوْصِنِي، قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} فَأَصْنِعْ إِلَيْهَا سَمْعَكَ، فَإِنَّهُ خَيْرٌ تُؤْتَى بِهِ أَوْ سُوءٌ تُسْرِفُ عَنْهُ (رواه البيهقي)²⁹³

Dari Mis'ar bin Kidām, katanya: “Seseorang berkata kepada Ibn Mas'ūd: ‘Beri aku wasiat!’. Ibn Mas'ūd’ berkata: “Jika engkau mendengar Allah Subhanahu wata’ala berfirman (Hai orang-orang yang beriman!), maka perhatikan firman Allah itu pada telingamu. Karena sesungguhnya ia merupakan perintah, yang engkau diperintahkan untuk melaksanakannya atau larangan yang engkau dilarang darinya”. (HR. al-Bayhāqī)

Kutipan sederhana di atas, mencerminkan pentingnya memahami tujuan syariat bagi kaum Muslimin. Beberapa poin pentingnya adalah: *Pertama*, mengungkap tujuan, alasan, dan hikmah *tasyri'*, baik yang umum atau khusus, *integral* atau sebagian, di segenap bidang kehidupan dan di setiap ajaran Islam. *Kedua*, dapat menambah dan mengokohkan keimanan, hingga melahirkan *komitmen* yang tinggi dan bersungguh-sungguh melaksanakan ajaran Islam. *Ketiga*, menegaskan *karakteristik* Islam yang sesuai dengan setiap zaman, abadi dan *realistik*. *Keempat*, membantu ulama dalam berijtihad dalam bingkai tujuan syariat dengan memadukan secara seimbang prinsip ‘mengambil *zhāhir nash*’ dengan prinsip ‘memperhatikan *ru'ud* dan *substansi nash*’. *Kelima*, mempersempit perselisihan dan *ta'ashshub* di antara pengikut mazhab fiqh. *Keenam*, memberikan ketahanan dan kekuatan dalam menghadapi serangan pemikiran (*ghazw al-fikr; brain washing*) dan pendangkalan akidah. *Ketujuh*, memudahkan seorang muslim

²⁹³ Al-Bayhāqī, *Syū'b...., op. cit.*, Juz 3, h. 408



dalam menyelaraskan kehendak dirinya dengan kehendak syariat. *Kedelapan*, sebagai realisasi peribadatan secara nyata kepada Allah.

Metode Mengetahui *Maqāshid Syarī'ah*

Berangkat dari penjelasan al-Syāthibī, ada tiga metode yang dapat digunakan untuk memahami *maqāshid syarī'ah*, sebagai berikut:²⁹⁴

1) Mempertimbangkan makna *zhahir lafal*

Makna *zhahir* adalah makna yang dipahami dari apa yang tersurat pada *lafal-lafal nash* yang menjadi landasan utama dalam mengetahui *maqāshid syarī'ah*.²⁹⁵ Kecenderungan untuk menggunakan metode ini bermula dari suatu *asumsi* bahwa *maqāshid syarī'ah* adalah suatu yang *abstrak* dan tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk *zhahir lafal*. Petunjuk Tuhan itu tidak memerlukan penelitian yang pada gilirannya bertentangan dengan kehendak bahasa. Pengertian *hakiki* suatu *nash* tidak boleh dipalingkan (ditakwilkan) kepada makna *majāzī*, kecuali bila ada petunjuk jelas dari pembuat syariat bahwa yang dimaksudkan adalah makna tersirat tersebut.²⁹⁶

Metode ini dipelopori oleh Dawud al-Zhāhirī (W. 270 H), pendiri dari aliran al-Zhāhirīyah. Aliran ini menganut prinsip bahwa setiap kesimpulan hukum harus didasarkan atas maknanya yang *hakiki*, yaitu

²⁹⁴ al-Syāthibī, *op. cit.*, Juz 3, h. 132-134

²⁹⁵ Yamsul Bahri, dkk, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 107

²⁹⁶ lihat Satria Effendi M. Zein, *Metodologi Hukum Islam*, dalam Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 123



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

makna *zhahir nash*. Menurut aliran ini, pemalingan makna *zhahir* kepada makna *majāzī* merupakan suatu penyimpangan yang harus diluruskan.²⁹⁷

2) Mempertimbangkan makna batin dan penalaran

Makna batin adalah makna yang tersirat dari suatu teks. Makna batin menjadi dasar pertimbangan dalam mengetahui *maqāshid syarī'ah* adalah berpijak dari suatu asumsi bahwa *maqāshid syarī'ah* bukan dalam bentuk *zhahir* dan bukan pula yang dipahami dari pengertian yang ditunjukkan oleh *zhahir lafal nash* syariat.²⁹⁸ Al-Syāthibī menyebut kelompok yang berpegang dengan metode ini sebagai kelompok al-Bāthinīyah, yaitu kelompok ulama yang bermaksud menghancurkan Islam.

3) Menggabungkan makna *zhahir*, makna batin dan penalaran

Metode ini disebut juga metode perpaduan atau kombinasi, yaitu dengan menggabungkan dua metode menjadi satu, dengan tidak merusak arti *zhahir*. Sebagai salah seorang ulama yang mengembangkan *metode konvergensi*, al-Syāthibī memandang bahwa pertimbangan makna *zhahir*, makna batin dan makna penalaran memiliki keterkaitan yang bersifat *simbiosis*. Ada beberapa aspek yang menyangkut upaya dalam memahami *maqāshid syarī'ah*, yakni analisis terhadap lafal perintah dan larangan, penelaahan *ilat* perintah dan *ilat* larangan, analisis terhadap sikap diam *syari'* dan penetapan hukum sesuatu serta analisis terhadap tujuan *ashliyah* dan *thab'iyah* dari semua hukum yang telah ditetapkan *syari'*.

²⁹⁷ Ibid., h. 123

²⁹⁸ Yamsul Bahri, *op. cit.*, h. 110



Berdasarkan penjelasan di atas, *metode konvergensi* dalam memahami

maqāshid syarī'ah ini banyak digunakan oleh para ulama, di Indonesia termasuk kalangan NU dan Muhammadiyah.²⁹⁹ Terlebih lagi dalam penerapannya, metode ini diterima oleh jumhur ulama, termasuk ulama empat *madzhab*.³⁰⁰ Dengan demikian, jumhur ulama menggunakan pendekatan kebahasaan (pendekatan *tekstual*) dan pendekatan kemaslahatan (pendekatan kontekstual) dalam upaya memahami *maqāshid syarī'ah*.

h. *Maqāshid Syarī'ah* Kontemporer

Teori-teori *maqāshid* berkembang seiring bergantinya waktu, khususnya pada abad ke-20 M. Para fakih muslim, penggagas teori *maqāshid kontemporer*, telah mengkritik klasifikasi klasik di atas, diantaranya karena lingkup *maqāshid* klasik adalah syariat secara keseluruhan, makanya *maqāshid* itu tidak meliputi tujuan-tujuan spesifik. Klasifikasi *maqāshid* klasik hanya tertuju pada individu daripada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum. Subjek pokok dalam perspektif *maqāshid* klasik adalah individu (kehidupan, harga diri, dan harta individu), bukan masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, dan kekayaan atau ekonomi nasional).³⁰¹

Memperbaiki kekurangan pada *orientasi individualistik* dari klasifikasi *maqāshid* klasik, para ulama kontemporer telah memperluas konsep *maqāshid* meliputi jangkauan yang lebih luas seperti masyarakat, bangsa bahkan umat manusia secara umum. Ibn 'Āsyūr telah mendudukan *maqāshid* yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹⁹ Athurrahman Jamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), h. 155.

³⁰⁰ Yamsul Bahri, *op. cit.*, h. 115.

³⁰¹asser Auda, *Maqāshid al-Syarī'ah; a Beginner's Guide*, (London: The Internasional Institute of Islamic Thauht, 2008), h. 7-8.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan bangsa pada tingkat yang lebih tinggi daripada *maqāshid* yang berhubungan dengan individu. Rasyid Ridha memasukkan reformasi dan hak-hak perempuan dalam teorinya tentang *maqāshid*. Yusuf al-Qaradhāwī memasukkan harga diri manusia dan hak asasi.³⁰²

Sejak awal konsep *maqāshid* diperkenalkan ke publik berabad silam, ulama sulaf telah memagarinya dengan banyak rambu supaya tidak disalahpahami dan diselewengkan dari konsep aslinya. *Maqāshid syarī'ah* jika tidak dipagari oleh rambu-rambu itu, ia akan memakan induknya sendiri yaitu syariah Islam. Untuk kondisi kekinian, ada beragam gugatan terhadap hukum Islam yang digali dari dalil-dalil *partikularistik*, seperti tuntutan untuk menghapus hukum *hudud* dan *qisas*, menggugat kewajiban jilbab, menyamakan jatah waris anak laki-laki dan anak perempuan, menganulir keharaman kawin beda agama dan lain-lain. Hampir semua gugatan itu dikemukakan dengan dalih bahwa hukum formal syariah yang 'termaktub' dalam Alquran sudah tidak relevan lagi. Karenanya perlu diubah, direkonstruksi dan ditinjau ulang dengan cara penerapan '*pseudo*' *maqāshid* yang sudah bercorak liberal. *Maqāshid* mereka saat ini adalah HAM, *gender*, *demokrasi*, *humanisme*, *equality*, *pluralisme* agama dan sebagainya.

Sejalan dengan 'perbaikan' yang dilakukan beberapa ulama, juga terdapat berbagai pendapat dan pemikiran yang telah dengan sengaja meliberalkan syariah Islam dengan dalih bahwa *maqāshid syarī'ah* lebih utama dari bentuk formal syariah, karena *maqāshid* -versi mereka- bersifat *substansial* dan bisa dikontekstualkan dengan situasi kontemporer, sehingga

³⁰² *Ibid.*, h. 8



syariat Islam tidak kaku dan beku, mengikuti perkembangan sejarah dan sosio-budaya manusia. Beberapa tokoh dengan pemikirannya dapat dikemukakan berikut:

Pertama, Muhammad ‘Ābid al-Jābirī, setelah menyebutkan bahwa sejak dicetuskan di era imam al-Syāfi‘ī, hingga al-Ghazālī, ushul fiqh selalu mencari makna dari redaksi lahiriah teks, ia menyatakan bahwa: (Para ulama) memformat ijtihad hanya sebatas ijtihad di bidang bahasa Alquran saja. Akibatnya mereka disibukkan oleh pengkajian bahasa daripada *maqāshid syarī’ah*. Mereka mendalami logika/nalar *retoris* dan *system episteme* yang melandasi dua ciri khas berfikir: *Pertama*, bertolak dari redaksi untuk menuju makna, sehingga teks/redaksi berperan besar sekali dalam corak berfikir bayānī. *Kedua*, fokus pada hal-hal *partikuralistik* dan abai terhadap nilai-nilai *universal*, perhatian kepada lafal dan jenis-jenisnya, sehingga mengabaikan *maqāshid al-syarī’ah*.³⁰³

Kedua, Muhammad Jamāl Bārūt mengomentari pernyataan al-Syāthibi bahwa “tujuan dasar dari *maqāshid* adalah mengarahkan semua aktifitas manusia kepada ibadah”, dan ia mengatakan bahwa pernyataan itu bukanlah pembaharuan dalam fiqh. Sebab, yang disebut sebagai pembaharuan, menurut Bārūt bahwa pembaharuannya adalah kemampuan untuk membingkainya dalam ilmu *māqashid* dan *kaidah-kaidah kognitif* keilmuan terkait

³⁰³ Muhammad ‘Ābid al-Jābirī, *Bunyah al-‘Aql al-‘Arabī; Dirāsah Tahliīyah Naqdiyyah fi Nazhm al-Ma’rifah fi al-Tsaqāfah al-‘Arabiy*, (Beirut: Bināyah Bayt al-Nahdhah, 2009), Cet. ke-9, h.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penempatan tujuan (*maqāshid*) sebagai penentu bagi semua sarana/media hukumnya.³⁰⁴

Ketiga, ‘Abd al-Majīd al-Syarafi memberikan arahan yang lebih tegas dan pemihakan yang lebih jelas terhadap *maqāshid*. Menurutnya, yang dipegang atau dijadikan rujukan hukum bukanlah kekhususan sebab dan bukan pula keumuman lafal, seperti yang dikemukakan ulama terdahulu, melainkan tujuan pensyariaan (*maqāshid syarī’ah*). Hal itu ia kemukakan dalam tulisannya, bahwa yang dipegang bukanlah kekhususan sebab atau keumuman lafal, melainkan sesuatu yang ada di balik sebab khusus dan lafal yang digunakan yang mengacu pada tujuan dan maksud.³⁰⁵

Keempat, beberapa pandangan tersebut “diturunkan” dalam bentuk lebih spesifik oleh Muhammad Sa’īd al-‘Asymāwī. Menurutnya sistem hukum pidana Islam, yang tercermin pada syarat-syarat yang diberikan para ulama untuk menghukum pelaku kejahatan, pencuri dan pezina misalnya, sangat sulit untuk diwujudkan. Salah satu pernyataannya terkait hal itu adalah: Kejahatan perzinaan menurut syariat Islam dengan berbagai rukun dan syaratnya adalah kejahatan yang sulit untuk diaplikasikan. Kejahatan itu - walaupun ia mungkin diterapkan- adalah tindakan nyata terang-terangan -pada konsep pidana kontemporer- merupakan perbuatan tidak senonoh dan cabul di depan publik antara anggota masyarakat, sehingga kalau ia terjadi secara rahasia atau tidak memenuhi rukunnya atau tidak ada empat saksi yang adil,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰⁴ Muhammad Jamāl Bārūt, *al-Ijtihād; al-Nash, al-Wāqī’ wa al-Mashlahah*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Muṣṣhir, 2000), h. 112. Kitab ini ditulis dengan kolaborasi bersama Ahmad al-Raysūnī, tapi beliau hanya menulis sampai halaman 72, yaitu akhir dari bagian pertama (*al-qism al-awwal*) sementara sisanya ditulis oleh Muhammad Jamāl Bārūt.

³⁰⁵ Abd al-Majīd al-Syarafi, *al-Islām Bayn al-Risālah wa al-Tārīkh*, (Beirut: Dār al-Thāfi’ah, 2008), Cet. ke-2, h. 80



maka ia "selamat" dari sanksi hudud dan 'hanya' jadi dosa keagamaan yang dikutip di akhirat dan secara *metafora* di dunia ini.³⁰⁶

Pada bagian lain dari tulisannya itu, al-'Asymāwī menyebutkan bahwa berbagai sanksi pada hudud, seperti rajam, termasuk salah satu keistimewaan Rasulullah, sebagaimana keistimewaan yang hanya berlaku beliau pada menikah lebih dari empat isteri, tidak boleh menalak isterinya, para isterinya tidak boleh dinikahi orang lain, dan berbagai kekhususan lain. Salah satu pernyataannya yang mengandung muatan itu adalah: Jika Nabi telah menerapkan aturan hukum dalam Taurat, lalu kemudian ia memerintahkan rajam -disertai adanya keraguan bahwa rajam tersebut dilakukan setelah ayat dera diturunkan- apakah hal itu tidak menunjukkan bahwa Nabi sudah menasakh aturan Alquran dengan perbuatannya, atau apakah perbuatan beliau itu mengandung kemungkinan bahwa penetapan hukum hanya khusus buat Nabi sendiri!?.³⁰⁷

Kelima, lebih jauh dari itu, al-Shādiq Bal'īd justru menegaskan bahwa sanksi-sanksi pidana yang terdapat dalam syariat Islam tidak sesuai dengan spirit ajaran Islam itu sendiri, karena dinilai sadis, keras dan kejam oleh *opini public internasional*. Pernyataannya tersebut lengkapnya: Sesungguhnya berbagai sanksi pidana itu tidak sesuai dengan spirit ajaran Islam dan hukum-hukumnya, karena dinilai sadis, keras dan kejam oleh *opini public internasional*.³⁰⁸

³⁰⁶ Muhammad Sa'īd al-Asymāwī, *Ushul al-Syarī'ah*, (Beirut: Dār Iqra', 2003), h. 122

³⁰⁷ *Ibid.*, h. 121

³⁰⁸ al-Shādiq Bal'īd, *Alquran wa al-Tasyrī'*; *Qirā'ah Jadīdah fī Ayāt al-Ahkām*, (Tunisia: Dār al-Nasyr al-'Ilmi, 1999), h. 198. Lihat juga Shālīh bin Muhammad bin 'Umar al-Damījī, *Mawqif al-*



Sebagai perbandingan terhadap berbagai pandangan para pemikir

‘liberal’ tersebut, harus diketahui bahwa al-Syāthibī sama tidak keluar atau merevolusi system dan kerangka *ushul al-fiqh bayānī* salaf yang diprakarsai Imam al-Syāfi‘ī, sebab ia selalu menekankan dimensi redaksi bahasa Arab sebagai titik tolak memahami *maqāshid*. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa pokok penting (*highlights*) pernyataan kedua tokoh tersebut:

Imam al-Syāfi‘ī, dalam kitabnya *al-Risālah*, menyatakan hukum Islam dapat ditemui dengan cara ‘mencarinya’ dari petunjuk teks atau nash Alquran dan Sunnah. Menyatakan bahwa penegasan Imam Syāfi‘ī: Tiada satupun perkara/peristiwa yang dialami oleh pemeluk Islam kecuali di dalam kitabullah terdapat dalil petunjuk yang meneranginya.³⁰⁹

Pada dasarnya, dalam berbagai tulisannya Imam al-Syāfi‘ī menegaskan bahwa *konklusi* hukum Islam dapat ditempuh dengan cara menggantinya dari petunjuk teks atau nash Alquran dan Sunnah atau ijtihad yang telah Allah wajibkan kepada makhluk-Nya.³¹⁰ Sejalan dengan hal itu, Imam al-Syāthibī meyakini bahwa di dalam Alquran terdapat penjelasan segala sesuatu dari urusan agama. Berikut bagian dari keyakinannya itu: Alquran di dalamnya ada penjelasan segala sesuatu..., orang yang menguasainya secara benar, maka ia akan memahami seluruh syariah dan ia tidak akan kekurangan suatu apapun darinya.³¹¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Librālīyah fī al-Bilād al-‘Arabīyah min Muhakkamāt al-Dīn; Dirāsah Tahfīlīyah Naqdīyah, (Dubay: al-Minhal, 2012), h. 880

³⁰⁹ Al-Syāfi‘ī, *al-Risalah...*, *op. cit.*, h. 20

³¹⁰ *Ibid.*, h. 20-22

³¹¹ Al-Syāthibī, *op. cit.*, Juz 4, h. 184



Karena semua hal ada penjelasannya dalam Alquran, al-Syāthibī menegaskan bahwa setiap masalah yang ingin dipecahkan dan peroleh ilmunya secara sempurna, harus merujuk kepada Alquran. Berikut pernyataannya: Tak dapat tidak, dalam tiap masalah yang hendak diperoleh ilmunya secara sempurna harus merujuk kepada sumber asalnya di dalam Alquran. Kalau ditemukan tertulis langsung, atau substansinya, atau jenisnya, maka demikianlah adanya, tapi kalau tidak ditemukan yang demikian, maka takapan penelaahannya dapat dilakukan dengan bervariasi...³¹²

Berikutnya, karena Alquran adalah sumber asal, dan jika dalam soal-soal cabang syariah terdapat *kontradiksi* antara dalil *naql* dan akal, maka harus didahulukan dalil *naql*. Sederhananya, dalil *naql* itu harus dijadikan sebagai yang diikuti dan dalil akal harus mengekor. Berikut pernyataan al-Syāthibī: Jika *dalil naqli* dan akal bertentangan dalam persoalan syariah, maka syaratnya harus didahulukan dalil *naql*, karena ia harus diikuti, dan dikemudiankan dalil akal, karena ia harus mengikuti. Dalil akal tidak boleh lepas begitu saja dalam menilai persoalan, kecuali dalam batas yang telah diserahkan *dalil naql*.³¹³ Pernyataan lebih tegas al-Syāthibī, masih dalam *al-Muwāfaqāt*, terkait wilayah garapan rasio atau akal adalah sebagai berikut: Validitas daya nalar akal berada setelah syarak (dalil *naql*).³¹⁴

Adapun di dalam tulisannya yang lain, kitab *al-I'tishām*, al-Syāthibī memberikan pernyataan yang lebih jauh menekankan bahwa akal itu tidak *independen* sama sekali; ia harus berdiri di atas fondasi kuat, yaitu wahyu.

³¹² *Ibid.*, Juz 4, h. 197

³¹³ *Ibid.*, Juz 1, h. 125

³¹⁴ *Ibid.*, Juz 1, h. 30

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut pernyataannya: Akal itu tidak *independen* sama sekali dan tidak bisa ditegakkan tanpa dasar. Ia hanya bisa berdiri di atas fondasi yang lebih diprioritaskan dan ditaati secara *absolut*. Sementara dalam persoalan yang memiliki kaitan dengan akhirat tidak ada fondasi lain yang ditaati secara *absolut* selain wahyu (*naqli*).³¹⁵

Sehubungan di antara *argument* penting yang dikemukakan al-Syāhibī terkait hal itu adalah karena hanya ada dua pilihan ikutan akal, dalil syar'ī atau nafsu. Jika akal tidak mengikuti petunjuk dalil syar'ī, maka hawa nafsu lah yang jadi ikutannya. Berikut pernyataan al-Syāhibī tentang hal itu: Sebab, jika akal tidak mengikuli syarak, tidak ada yang tersisa untuk ia ikuti selain hawa nafsu dan syahwat.³¹⁶

Sehubungan dengan demikian, bahwa hukum yang tidak mengikuti dalil syarak adalah hukum yang ditetapkan berdasar nafsu. Hal demikian juga dinyatakan al-Syāhibī sebagai berikut: Sesungguhnya suatu persoalan berada pada pilihan antara aturan syarak dan hawa nafsu, maka goncanglah kaidah hukum akal semata. Seakan akal tidak memiliki wilayah apapun kecuali di bawah kendali hawa nafsu, yaitu mengikuti nafsu semata dalam membina hukum syariat.³¹⁷

Karena dalil syarak, Alquran dan Sunnah, menjadi sumber asasi segala hal khususnya dalam penetapan hukum, maka tidak ada jalan lain selain memahaminya dan meng-*istinbath*-nya secara benar. Untuk itu, tak dapat

³¹⁵ Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmī al-Syāhibī al-Gharnāthī (W. 790 H), *al-Tishām*, Pen-tahqīq: Muhammad bin 'Abd al-Rahman al-Syaqīr, dkk., (Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jawzī, 2008), Juz 1, h. 63

³¹⁶ *Ibid.*, Juz 1, h. 68

³¹⁷ *Ibid.*, Juz 1, h. 70



tidak pemahaman terhadap bahasa Arab, bahasa yang dipakai keduanya, menjadi syarat yang juga tak bisa ditinggalkan. Artinya, *metode bayani* yang hampir selalu “dicela” para pemikir liberal, menjadi cara terpenting untuk itu. Terkait hal ini, dalam *al-Muwāfaqāt*-nya, al-Syāhibī menyatakan bahwa kenyataan bahwa Alquran dan Sunnah berbahasa Arab...(maka) cara yang ditempuh dalam *istinbāth* dan *istidlāl* adalah metode orang Arab dalam menetapkan makna redaksionalnya dan berbagai variasi dalam tata ucap spesifiknya. Sungguh banyak orang yang mengambil dalil-dalil Alquran hanya sebatas yang diberikan akal, tidak mengikuti pemahaman kebahasaan sesungguhnya. Inilah pangkal kerusakan besar dan mengangkangi tujuan *syarī’*.³¹⁸

Penjelasan sederhana di atas, terlihat perbedaan mencolok antara *Islamis* dan *sekularis* dalam penentuan *maqāshid syarī’ah*. Perbedaan tersebut terlihat bahwa kaum *Islamis* mencari dan menggali hukum dan *maqāshid* dari teks, sementara kaum *sekularis* mencari-carinya sesuai maksud dan tujuan mereka semata, mengikuti *paradigma* yang dikemukakan al-Syāhibī, sesuai keakuan akal dan tuntutan nafsu mereka. Padahal *maqāshid* yang dimaksud para penggagasnya adalah suatu prinsip dasar ilmu *ushūl al-fiqh* yang memiliki aturan dan standar pasti tidak dijadikan alat untuk merelatifkan teks dan menganulirnya. Sebab penetapan tujuan-tujuan syarak tidak bisa dibangun atas dasar asumsi-asumsi dan prakiraan yang labil. Lebih dari itu, *prioritas* dan tujuan utama *syarī’* dalam penetapan syarak adalah dalam rangka mentauhidkan Allah. Terkait hal ini, al-Syāhibī menyatakan bahwa

³¹⁸ Ibid., Juz 1, h. 39



tujuan *syar'i* dalam penetapan syariah adalah membebaskan *mukallaf* dari ajakan nafsunya, agar ia jadi hamba Allah secara sadar maupun terpaksa.³¹⁹

Sehubungan dalam konteks ini, bukan berarti syariat Islam membenci dan “mengkebiri” syahwat dan nafsu. Dalam batasan-batasan wajar justru syariat Islam memberikan kelapangan dan dalam kondisi tertentu justru memerintahkan untuk menikmati kebutuhan fisik syahwatnya, agar tidak menimbulkan dampak *destruktif* dan efek yang mengganggu fungsi fisik dan sosial. Ahmad al-Raysūnī meringkas pandangan al-Syāhibī bahwa syariat dibuat agar hawa nafsu manusia tunduk dan ikut kepada tujuan *Syāri'*. Di sisi lain Allah telah melapangkan bagi manusia untuk menikmati kebutuhan fisik syahwatnya secara *proporsional*, dan Allah tidak membiarkan terjadinya kerusakan dan kesulitan.³²⁰

Tujuan *syāri'* dalam penetapan syariah adalah untuk membebaskan *mukallaf* dari kungkungan nafsunya, segala jenis kesulitan (*masyaqqah*) yang ditimbulkan, karena meninggalkan nafsu itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan *rukhsah* (keringanan). Hal itu juga tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa Allah tidak adil.³²¹ Secara pendek, hal itu dinyatakan al-Syāhibī bahwa kesulitan karena menyingkari nafsu tidak ada *rukhsah* didalamnya.³²²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹⁹ Dalam *al-Muwāfaqāt*, al-Syāhibī mengulang penegasan ini atau pernyataan dengan substansi yang sama di beberapa tempat, diantaranya: *Ibid.*, Juz 2, h. 289, h. 293, h. 328, Juz 5, h. 5 dan h. 285. Penegasan al-Syāhibī ini juga dinyatakan ulang dalam berbagai tulisan lain oleh ulama kontemporer. Diantaranya lihat: Nūr al-Dīn bin Mukhtār al-Khādimī, '*Ilm al-Maqāshid al-Syāri'ah*, (Riyad: Maktabah al-'Abīkān, 2001), h. 143.

³²⁰ Ahmad al-Raysūnī, *op. cit.*, h. 346

³²¹ *Ibid.*, h. 152-153

³²² al-Syāhibī, *op. cit.*, Juz 1, h. 516



Demikian juga, syariat Islam tidak membenarkan “penghalalan” segala

cara untuk memperoleh *maslahat*, karena tindakan melawan syarak tidak bisa disebut sebagai *maslahat*, maka *maslahat* yang diupayakan dengan cara melawan syarak sama artinya dengan membatalkan *maslahat* itu sendiri. Sebab, suatu tujuan yang diwujudkan dengan cara melawan tujuan itu sendiri hanya akan memunculkan lawan tujuan itu.³²³ Al-Raysūnī menyimpulkan pandangan al-Syāhibī bahwa orang yang mewujudkan *maslahat* bukan dengan cara yang disyariatkan, maka sama saja ia berusaha melawan kemaslahatan itu.³²⁴

Beberapa kaidah di atas, banyak kaidah lain yang relevan, adalah pukulan telak bagi para pemikir *secular* yang menghendaki pengabaian rincian dan *partikularitas* (*furu'*) syariat, dengan alasan menjaga dan memprioritaskan ruh, tujuan, atau esensinya saja. Padahal *partikularitas* syariat terikat dengan universalitasnya, dan universalitas syariat menjadi saksi bagi rincian-rinciannya.³²⁵ Al-Syāhibī menegaskan bahwa tidak dapat tidak, harus memelihara kekhasan dalil-dalil juz'ī berbarengan dengan penjagaan *dalil-dalil kullī*, dan demikian sebaliknya. Itulah puncak ketinggian analisis para

³²³ *Ibid.*, Juz 1, h. 536

³²⁴ Ahmad al-Raysūnī, *op. cit.*, h. 348

³²⁵ Al-Syāhibī menyatakan: Jika dalam syariat ada kaidah umum dalam soal *primer*, *sekunder* atau *tersier*, maka tidak bisa dianulir oleh *dalil-dalil partikular*. Demikian pula, kaidah umum syariat atau *partikularitasnya* harus sama-sama dipelihara. Sebab bentuk *partikular* itupun diinginkan dalam rangka menegaskan *dalil kullī*, supaya *dalil kullī* tidak tertinggal yang menyebabkan kemaslahatan yang diinginkan menjadi hilang, maka harus ada kebenaran *maqāsid* untuk menghasilkan *dalil-dalil partikular*. Sebagian soal itu tidak lebih utama dari sebagian lainnya, sehingga tujuan syariat dapat diperoleh semuanya. Itulah yang hendak dicari. Al-Syāhibī, *op. cit.*, Juz 2, h. 96-97



mujtahid. dan kepadanya berakhir tembakan mereka dalam tujuan-tujuan syariat.³²⁶

Oleh karena itu, orang yang hanya mengambil *dalil-dalil juz'ī* dengan menyampingkan tujuan *kulli*, maka ia tersesat dan salah. Demikian pula orang yang hanya mengambil *dalil-dalil kulli* dengan menyampingkan *dalil-dalil juz'ī* juga salah. Ini semua memberikan keyakinan bahwa yang dituntut adalah memelihara tujuan *syāri'*. Sebab *dalil kulli* dan *juz'ī* keduanya merujuk kepada maksud *syāri'*, hingga keduanya harus dipegang dalam menemukan hukum tiap masalah.³²⁷ Jelaslah bahwa konsep *maqāshid* bagi al-Syāhibī dan para ulama salaf berfungsi sebagai penataan dan penertiban metode pengambilan hukum dari dalil syarak (*istidlāl*), bukan alat untuk menghindari dari hukum atau menganulir dalil.

B. TINJAUAN PENELITIAN YANG RELEVAN

Ada beberapa kajian terdahulu yang relevan bagi penelitian ini, berupa penelitian ilmiah yang membahas tentang hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau dalam *perspektif maqāshid syarī'ah*. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa kajian dan penelitian yang membahas tentang hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau, yaitu:

1. Nola Putriyah P. meneliti tentang “Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu *Datuk* di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat”. Hasil penelitian Nola Putriyah P. mengungkapkan bahwa masyarakat nagari

³²⁶ *Ibid.*, Juz 3, h. 180

³²⁷ *Ibid.*, Juz 3, h. 175-176



Ampang Kuranji menganut sistem perkawinan eksogami yakni keharusan seseorang untuk mencari pasangan di luar suku atau klannya. Penerapan satu suku di nagari ini berbeda dengan nagari lainnya. Adanya pembagian datuak di setiap suku mengakibatkan kebolehan menikah dengan orang satu suku asalkan tidak satu datuak. Seseorang yang melanggar dengan melangsungkan perkawinan satu datuak akan dikenakan sanksi adat. Dalam Islam telah diatur kelompok wanita yang dilarang dan dibolehkan untuk dinikahi. Tulisan ini membahas tentang pernikahan *eksogami* pada masyarakat Nagari Ampang Kuranji dari perspektif *'urf*. Dapat dikatakan bahwa pernikahan eksogamus pada masyarakat Ampang Kuranji ini sebagai salah satu bentuk *'urf* sah dalam bidang perkawinan.

2. Abdi Wijaya meneliti tentang “Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu *Datuk* di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat”. Hasil penelitian Abdi Wijaya mengungkapkan bahwa dalam menyelesaikan sesuatu yang tidak memiliki dalil dalam menetapkan hukum, maka *maqāshid syarī'ah* diperlukan, sebab ia merupakan wasilah untuk memahami nash-nash Alquran dan Hadis, selain itu, *maqāshid syarī'ah* juga bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat manusia serta mampu memberikan solusi terhadap nash-nash yang kontradiktif. Untuk memahami *maqāshid syarī'ah*, ada beberapa cara yang dapat ditempuh diantaranya, pertama; analisis lafaz perintah dan larangan dan ini lebih banyak ditujukan pada masalah-masalah ibadah, cara kedua; penjelasan illah *amr* dan *nahy* yang ditujukan pada persoalan sosial masyarakat (muamalah) dan cara ketiga; *al-sukut 'an syar'iyyah al-'amal*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kajian-kajian tentang *maqâshid syarî'ah* berdasarkan pengamatan dan

penelusuran penulis, ada beberapa kajian dan penelitian yang membahas tentang hal tersebut, yaitu:

Hiya Sâmir Miftah menulis jurnal berjudul *Maqâshid al-Qur'ân al-Karîm 'Inda Syekh Ibn 'Asyûr*.³²⁸ Penulis menjelaskan bahwa tafsir *al-tahrîr wa al-tahwîr* secara khusus memuat penafsiran melalui pendekatan *maqâshid*. Tafsir ini telah memenuhi instrument mendeteksi *maqâshid al-syarî'ah*, sehingga nampak jelas *maqâshid al-Qur'ân* di dalamnya yang berperan sebagai perbaikan individu, masyarakat dan persada bumi (*li tahqîq shalâh al-fardwa al-jamâ'i wa al-'umrâni*). Ibnu 'Asyûr berpegang kepada *maqâshid al-syâri'* (tujuan pembuat syari'at) dalam menafsir ayat-ayat Alquran dan berpegang kepada teks yang memuat perintah dan larangan atau istinbath hukum syari'at.

2. Manubah Burhani menulis disertasi berjudul *al-Fikr al-Maqâshidî 'Inda Muhammad Rasyid Ridha*.³²⁹ Muhammad Rasyid Ridha adalah seorang ulama penerus pemikiran Muhammad Abduh dan telah melahirkan banyak karya yang memuat aspek *maqâshid*. Penulis menemukan dalam disertasi ini beberapa pokok pikiran Rasyid Ridha, yaitu kesungguhan Rasyid Ridha dalam menggali berbagai disiplin ilmu yang bermuara kepada *maqâshid*. Pemikiran *maqâshid* Rasyid Ridha banyak dipengaruhi oleh pendahulunya seperti al-Ghazali, al-Syâtibi, Ibnu Taimiyah, Izzu al-Dîn Abdu al-Salâm.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³²⁸ Hiya Sâmir Miftah menulis buku berjudul *Maqâshid al-Qur'ân al-Karîm 'Inda Syekh Ibn 'Asyûr*, (Journal of College of Sharia and Islamic Studies, Qatar University, vol. 29, 2011).

³²⁹ Manubah Burhani, *al-Fikr al-Maqâshidî 'Inda Muhammad Rasyid Ridha*, disertasi yang pernah diuji pada tahun 2006 di Universitas al-Hâj al-Hadhar Fakultas al-'Ulûm al-Ijtimâ'iyah wa al-Islâmiyah.



Menggunakan konsep *'illat al-hukm* sebagai penditeksian *maqâshid al-syarî'ah* dan menggunakan *'illat* dalam persoalan ibadah. Rasyid Ridha membuat defenis *al-maqâshid al-'âmmah* dan tidak menyebutkan *al-maqâshid al-khasshah*, menurutnya ia masuk dalam bagian *al-maqâshid al-'âmmah*.

Abdullah Akrizam menulis buku berjudul *al-Fikr al-maqâshidi fi tafsîr al-Manâr*.³³⁰ Madrasah al-Manâr telah memberi pengaruh terhadap perkembangan pemikiran *maqâshid*, buku ini mengangat beberapa tema penting mengungkap pemikiran *maqâshid* dalam tafsir al-Manâr, diantaranya pendekatan *maqâshid* yang digunakan dalam tafsir al-Manâr seperti istilah-istilah *maqâshid* dalam tafsir al-Manâr, *'illat hukum* sebagai alat menggali *maqâshid*. *Maqâshid al-wahy* dalam tafsir al-Manâr dan beberapa topik *maqâshid* seperti aspek akidah, ibadah, ekonomi, akhlak, sosial kemasyarakatan, politik dan sejarah kebudayaan.

4. Ahmad al-Raisûni menulis buku berjudul *al-Fikr al-Maqâshidi Qawâ'iduhu wa Fawâiduhu*.³³¹ Menurut al-Raisuni pemikiran *maqâshid al-syarî'ah* adalah pemahaman dan penguasaan terhadap teks-teks Alquran atau hadis Nabi saw melalui konsep *maqâshid al-syarî'ah* baik secara umum maupun khusus (*al-maqâshid al-'âmmah wa maqâshid al-khasshah*), secara konprehensif maupun parsial (*al-maqâshid al-kulliyah wa al-maqâshid al-juziyyah*) dan tidak hanya pada objek kajian hukum syari'at saja namun mencakup seluruh aspek baik yang bersifat teori maupun praktek (*fi kulli al-majallati al-'ilmiyah wa al-amaliyah*). Ahmad al-Raisuni menyusun konsep pemikiran *maqâshid* melalui

³³⁰ Abdullah Akrizam, *al-Fikr al-Maqâshidi Fi Tafsîr al-Manâr*, (Virginia, IIIT, 2017).

³³¹ Ahmad al-Raisûni, *al-Fikr al-Maqâshidi Qawâ'iduhu Wa Fawâiduhu*, (Rabath, Mathba'ah al-najâh al-jadidah, 1999).



empat kaidah umum, yaitu *كل ما فى الشريعة معلل وله مقصوده ومصالحته* (seluruh yang terdapat dalam syariat ada sebab dan memiliki tujuan dan kemashlahatan), *لا ترتب* (tidak dapat menggali tujuan syari'at kecuali dengan dalil), *التمييز بين المقاصد والوسائل* (tingkatan mashlahat dan mafsadat), dan *المصالح والمفاسد* (membedakan antara maqashid dan sarana). Al-Raisuni juga menjelaskan rambu-rambu dan manfaat konsep pemikiran *maqāshid*.

Doni Dermawan meneliti tentang “Pendekatan *Maqāshid Syarī'ah* dalam Memeriksa dan Memutuskan Perkara”. Hasil penelitian Doni Dermawan mengungkapkan bahwa pendekatan *maqāshid syarī'ah* dalam memeriksa dan memutuskan perkara sangat perlu dilakukan oleh hakim. Sebab dengan menggunakan pendekatan *maqāshid syarī'ah*, maka akan terwujud hukum yang berkeadilan dan berdasarkan kepada kebenaran, yang semuanya bermuara kepada terwujudnya kemaslahatan bagi masyarakat. Terwujudnya kemaslahatan yang ditandai dengan lahirnya putusan yang adil dan benar merupakan tujuan Allah dalam menetapkan hukum. Hakim sebagai penerjemah atau pemberi makna melalui penemuan hukum (*rechtschepping*) dan menciptakan hukum baru melalui putusan-putusannya (*Judge made law*), telah berusaha mewujudkan tujuan-tujuan Allah tersebut.

6. Ahmad Ghazali AB. meneliti tentang “*al-Maqāshid Syarī'ah* dalam Konfigurasi Hukum Islam”. Hasil penelitian Ahmad Ghazali AB. mengungkapkan bahwa hukum Islam merupakan fenomena yang bertalian erat dengan perkembangan yang terjadi dalam dinamika masyarakat, khususnya masyarakat Islam. Hukum Islam (fiqih) yang dikenal dewasa ini adalah hasil suatu proses perkembangan yang terus-menerus selama tersiarnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Islam dalam masa puluhan abad yang silam. Dalam perkembangannya hukum Islam berhadapan dengan dinamika sosial budaya manusia yang terus bergerak, dan itu menuntut pembaharuan konsep dan formulasi hukum Islam. Guna merespon dinamika sosial-budaya itulah diperlukan pemaknaan yang lebih baik terhadap *al-maqāshid al-syarī'ah*.

Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor meneliti tentang “Konsep *al-Maqāshid al-Syarī'ah* dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syathibi dan Jasser Auda)”. Hasil penelitian Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor mengungkapkan bahwa Al-Syathibi merupakan seorang ulama klasik yang banyak berbicara tentang *al-maqāshid al-syarī'ah* melalui karya monumentalnya *al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syarī'ah*. Disisi lain, Jasser Auda dengan bukunya *Maqāshid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* diterbitkan oleh IIIT di London pada tahun 2007 merupakan daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengetahui lebih dalam terkait pemikiran dua tokoh yang memiliki *concern* di bidang hukum Islam dari generasi yang jauh berbeda. Penulis memfokuskan penelitian ini pada: 1) Pandangan Jasser Auda dan Syāthibi mengenai *maqāshid al-syarī'ah*. 2) Peranan *maqāshid al-syarī'ah* dalam menetapkan hukum Islam menurut Jasser Auda dan al-Syathibi. Dengan pendekatan filsafat hukum Islam, penelitian yang sepenuhnya merupakan penelitian kualitatif ini berupaya untuk mengungkap secara sistematis pemikiran al-Syathibi dan Jasser Auda dalam menggunakan pertimbangan-pertimbangan *maqāshid al-syarī'ah* dalam menentukan lahirnya keputusan hukum. Adapun filsafat hukum Islam yang dimaksud adalah filsafat yang menganalisis hukum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

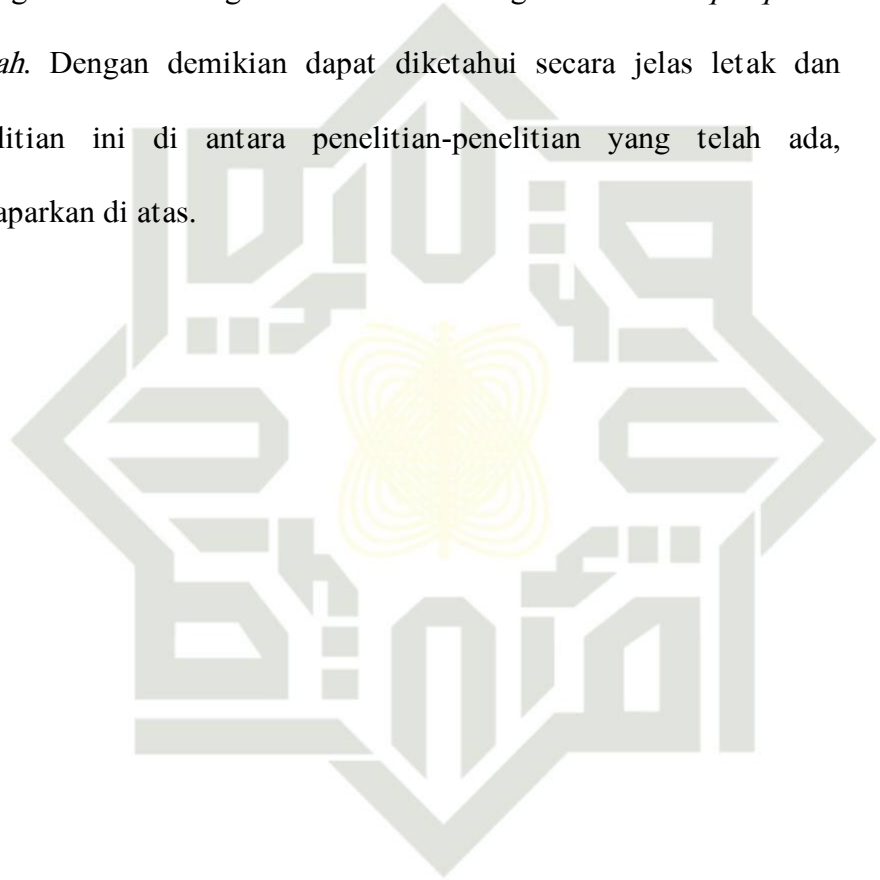
Islam melalui pemikiran para pakar hukum Islam beserta konsep-konsep hukumnya secara metodis dan sistematis, sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya.

Berdasarkan paparan di atas, belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas tentang hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau dalam *perspektif* *muqashid syari'ah*. Dengan demikian dapat diketahui secara jelas letak dan perbedaan penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang telah ada, sebagaimana dipaparkan di atas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif*. Moleong mendefinisikan penelitian *kualitatif* sebagai penelitian yang menghasilkan prosedur analisis dengan tidak menggunakan prosedur *analisis statistik* atau kuantifikasi lainnya. Penelitian *kualitatif* merupakan penelitian yang tidak menghasilkan perhitungan dalam bentuk apapun, akan tetapi merupakan kata-kata tertulis.¹ Karena penelitian ini lebih mengedepankan pencarian data, seorang peneliti harus memilih metode sesuai dengan karakteristik obyek studi dan konseptualisasi teoritiknya.²

Penelitian hukum Islam atau pemikiran hukum Islam digolongkan oleh para peneliti sebagai penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dalam perilaku yang diamati.³ Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang penemuan objeknya dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan, khususnya berupa teks, seperti buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen lain.⁴

Ada empat ciri utama penelitian kepustakaan, yaitu *pertama*, peneliti berhadapan langsung dengan teks dan data angka, bukan pengetahuan dari

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Rosdakarya, 2006), h. 6

²Neng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakeh Sarasih, 2000), h. 14

³Lexy J. Moleong, *op. cit.*, h. 3

⁴Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h.



lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. *Kedua*, data pustaka bersifat siap pakai. *Ketiga*, data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. *Keempat*, kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.⁵

Penelitian ini bersifat *diskriptif-analitis-kritis*. Deskriptif dimaksudkan untuk menjelaskan kebenaran atau kesalahan dari suatu fakta atau pemikiran yang akan membuat suatu kepercayaan itu benar.⁶ Analisis-kritis digunakan untuk melihat sisi-sisi analisis data yang dikembangkan secara seimbang dengan melihat kelebihan dan kekurangan objek yang diteliti.⁷ Penelitian dengan metode *diskriptif-analitis-kritis* dapat dipahami untuk menggambarkan apa yang menjadi obyek penelitian.

Sehubungan bersinggungan dengan hukum, penelitian ini bercorak penelitian hukum normatif yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum maupun asas-asas hukum pada umumnya. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum, baik primer maupun sekunder.⁸ Kajian hukum normatif melihat hukum dalam karakternya yang normatif yang berisi kaidah atau penormaan.

B. Sumber Data

Data merupakan hal penting dalam sebuah penelitian dan data sangat diperlukan sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilaksanakan. Oleh

⁵ *Ibid.*, h. 3

⁶ Jun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif*, (Jakarta: Gramedia, 1989), h. 77

⁷ *Ibid.*, h. 13

⁸ Soerjono Sockanto, & Sri Pamudji, *Pengantar Penelitian Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), h. 1



karena penelitian ini merupakan studi kepustakaan, maka dalam penelitian ini digunakan teknik dokumentasi. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dilakukan penelaahan terhadap buku-buku yang ada hubungannya topik yang akan dibahas. Data tersebut dikumpulkan dengan kategori dasar yang sesuai dengan pokok permasalahan. Kemudian diteliti secermat mungkin dan dijadikan sebagai bahan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dibahas.⁹ Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka penelitian, seperti mempertajam metodologi atau memperdalam kajian teoretis.

Adapun sumber data¹⁰ yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer¹¹ dalam penelitian ini adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dan berkaitan erat dengan pembahasan penelitian, misalnya dalam hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau tentu mengenai dasar-dasar hukum adat itu, dan begitupun mengenai dasar hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau dalam perspektif syariat Islam, seperti tambo Minangkabau.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), Cet. ke-XII, h. 131

¹⁰ Sumber data dapat diklasifikasikan mejadi dua jenis, yaitu: menurut bentuk dan isi. Menurut bentuknya jenis sumber data terbagi dua, yaitu: *Pertama*, sumber tertulis (*printed materials*) atau dokumen. *Kedua*, sumber bukan tertulis (*non printed material*). Sedangkan sumber data menurut isi, juga terbagi dua, yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. **Lihat Mestika Zed**, *op. cit.*, h. 82

¹¹ Sumber data primer adalah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung sehingga mereka dapat dijadikan saksi, seperti: buku, manuskrip, notulen dan lain sebagainya yang berasal dari tangan pertama. Sumber primer kedudukannya sangat utama dalam sebuah penelitian, karena dapat menunjukkan keaslian dan kemurnian isi sumber data. Dengan demikian data/bahan dapat lebih dipercaya dibandingkan sumber sekunder. **Lihat Mestika Zed**, *Ibid.*, h. 83



2. Data Sekunder

Data sekunder¹² yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data yang digali dari sumber-sumber yang difokuskan pada dua kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Literatur-literatur seputar hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau, seperti *Tambo Minangkabau: Suntingan Teks Disertasi Analisis Struktur* karya Edwar Djamaris, *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah* karya Tsuyoshi Kato, *Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau* karya Ali Akbar Navis, *Tambo Minangkabau dan Adatnya* karya A. Dt. Madjoindo, *Etnis dan Adat Minangkabau Permasalahan dan Masa Depan* karya N. Latief Datuak Bandaro, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau* karya M. Nasroen, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau* karya Chairul Anwar, *Cerita Rakyat dari Sumatera Barat 3* karya Ali Akbar Navis, *Pendidikan Matrilineal* karya Jamaris Jamna, *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau* karya Edison Piliang dan Nasrun Datuak Marajo Sungut, *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau* karya Mochtar Naim, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau* karya Firman Hasan, dan *Islam dan Adat Minangkabau* karya Hamka.
- b. Literatur-literatur seputar *maqāshid al-syarī'ah*, seperti *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah* karya Abu Ishāq al-Syātibi, *Maqāshid al-Syarī'ah al-Islāmīyah* karya Muhammad Thāhir Ibnu 'Asyūr, *Maqāshid al-Syarī'ah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹² Data sekunder adalah sumber bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami atau hadir pada waktu keadaan berlangsung. *Ibid.*, h. 83



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Literatur-literatur lain yang ada relevansinya dalam pokok bahasan dan proses penelitian ini, seperti hasil-hasil penelitian yang telah disebutkan pada kajian pustaka di atas, tulisan-tulisan mengenai hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau, kitab-kitab fikih dan ushul fikih, buku-buku kontemporer berbahasa Arab atau Indonesia yang berkaitan dengan topik bahasan dan jurnal nasional dan internasional.

Sehubungan untuk terjemahan ayat-ayat Alquran dalam penelitian ini, dikutip langsung dari Alquran terjemahan Kementerian Agama RI. Adapun hadis-hadis Nabi, penulis melakukan *takhrij* melalui program pustaka digital *al-maktabah al-syâmilah*, dengan pertimbangan isinya tersebut merupakan copy dari buku aslinya, sebagaimana *cross chek* yang dilakukan terhadap kitab-kitab yang penulis temukan aslinya di perpustakaan, ternyata isinya sama walaupun ada diantaranya yang berbeda halamannya dan penulis terjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Adapun kitab-kitab yang berbahasa Arab yang dianggap penting, penulis memunculkan teks aslinya dan diterjemahkan oleh penulis sendiri.



3. Data Tertier

Data tertier adalah data-data tambahan sebagai pelengkap pembahasan guna memperluas dan memperdalam pembahasan seperti data-data ensiklopedia, kamus, dan lain sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggali sumber primer dan sekunder. Dari sumber primer, penulis melakukan pengumpulan data mengenai konsep keluarga *matrilineal Minangkabau*. Selanjutnya menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter, yaitu teknik pengumpulan dengan cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, majalah, dan lainnya.¹³ Dengan teknik ini, setiap data diposisikan sama dalam perlakuannya untuk kemudian diklasifikasi, dianalisa dan diperbandingkan antara satu dengan yang lainnya.

Sedangkan data sekunder, penulis melakukan *studi literatur* yang relevan. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa karya-karya yang berkaitan dengan *maqâshid al-syar'ah*. Selain itu, penulis juga berupaya mencari buku-buku karya ulama lain dalam bidang *fikih*, *ushûl fikih*, *ilmu tafsir*, makalah, jurnal ilmiah, atau dokumen lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, h. 206. Lihat Jusuf Soewandi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 160



2. Teknik Analisa Data

Sehubungan untuk menganalisa data pada penelitian ini, penulis menggunakan dua metode, yaitu metode historis (*histirolcal Aproach*)¹⁴ dan metode analisis isi (*content analysis*).¹⁵ Pendekatan dengan menggunakan metode historis dalam konteks ini penulis menyelidiki tentang historis hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau. Metode ini dipergunakan untuk mengetahui dua hal, yakni latar belakang *eksternal* dan latar belakang *internal*.

Sedangkan metode analisis isi (*content analysis*) dipergunakan untuk menganalisis hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau, menganalisis hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau dalam perspektif *maqâshid al-syarî'ah* dan penerapan hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau melalui pendekatan *maqâshid al-Syarî'ah*. Dengan demikian ditemukan konsep dan posisi hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau dalam perspektif *maqâshid syarî'ah*.

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan digunakan *metode deduktif* dan *induktif*. *Metode deduktif* digunakan ketika menganalisis prinsip-prinsip hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau yang berlaku secara umum kemudian diteliti persoalan-persoalan yang berlaku secara khusus. *Metode induktif* digunakan ketika melacak hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau yang tersebar dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁴Penelitian Historis yaitu suatu metode penelitian yang meneliti sesuatu yang terjadi di masa lampau, dan bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis, objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. **Lihat Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian**, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 73. **Lihat Suryana, Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif**, (bahan ajar perkuliahan Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), h. 20

¹⁵Metode analisis isi (*content analysis*) adalah suatu teknik penelitian untuk menarik kesimpulan dari data-data yang sah (*valid*), dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya. **Lihat Klaus Krippendorff, Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi**, Penerjemah: Farid Wajdi, (Jakarta: Rawali Press, 1991), h.15



sumber *primer* dan *sekunder* untuk saling melengkapi agar dapat diketahui dalam perspektif *maqâshid syarī'ah* secara jelas.

Teknik penulisannya penulis berpedoman kepada buku panduan penulisan Proposal, Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana UIN Suska Riau tahun akademik 2017/2018.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari keseluruhan pembahasan dalam disertasi ini dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut ini:

Hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau pada aspek perkawinan perspektif *maqāshid syarī'ah* adalah: Masyarakat Minangkabau membagi larangan perkawinan menjadi tiga, yaitu: **Pertama**, *nikam bumi*. **Kedua**, *cegak telu*. **Ketiga**, *pecah pinggan*. Makna perkawinan secara prinsipil bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan *kemudharatan*. Ditinjau dari lima prinsip dasar (*al-Dharuriyah al-Khams*) atau *masalah* yang bersifat primer (*al-Maslahah al-Mu'tabarah*), makna perkawinan bisa dianalisa sebagai berikut: **Pertama**, untuk mewujudkan prinsip menjaga keturunan (*hifdzu al-Nas*). **Kedua**, menjaga agama (*hifdzu al-Dīn*). Kesamaan agama menjadi prinsip utama dalam perkawinan. **Ketiga**, sistem larangan kawin satu suku ini dipakai untuk mengekalkan kekerabatan *matrilineal*. Konsep *urf* berdasarkan pengertian mubah atau jaiz (pembolehkan) dapat dijadikan tolak ukurnya.

2. Hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau pada aspek tanggungjawab suami terhadap istri dan anak perspektif *maqāshid syarī'ah* adalah: Pergeseran atau tahapan bentuk perkawinan di Minangkabau ada tiga bentuk yang berimplikasi kepada tanggungjawab suami terhadap istri dan anaknya, yaitu perkawinan bertandang, perkawinan menetap dan perkawinan bebas. Seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan nafkah yang dihasilkan dari pekerjaan yang baik sesuai dengan kadar kemampuannya. Bagian *hifdzun an-nafs* diambil dari *masalahah*, tujuan syariat adalah untuk kemaslahatan kehidupan manusia, dan untuk menghindari *mafsadat* bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

Hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau pada aspek terjadinya perceraian perspektif *maqāshid syarī'ah* adalah: Perceraian dalam keluarga *matrilineal* Minangkabau adalah: **Pertama**, ketika terjadi perceraian, hak asuh anak berada pada istri. **Kedua**, ketika terjadi perceraian, suami yang berangkat (pergi) dari rumah. **Ketiga**, harta yang didapat selama hubungan pernikahan (harta pusako randah/harta gono gini) pada umumnya tidak dibagi secara hukum yang berlaku. Kewajiban memelihara, mendidik, mencukupi kebutuhan hidup anak, serta menjaga hak dan harta anak harus dilakukan untuk kepentingan anak. Dan ini terus berlaku walaupun terjadi perceraian.

4. Hukum keluarga *matrilineal* Minangkabau pada aspek harta pusaka perspektif *maqāshid syarī'ah* adalah: Ada 3 (tiga) asas pokok dalam hukum kewarisan Adat Minangkabau, yaitu: **Pertama**, asas *unilateral*. **Kedua**, asas *kolektif*. **Ketiga**, asas keutamaan. Secara umum *klasifikasi* harta di Minangkabau ada dua jenis, yaitu: Harta pusako tinggi adalah harta kaum yang diterima secara turun temurun dari ninik ke-mamak, dari mamak kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu diwariskan secara *kolektif* menurut garis keturunan ibu (*matrilineal*). Harta Pusako Randah adalah segala harta yang didapat dari hasil usaha pekerjaan sendiri, termasuk di dalamnya adalah harta pencaharian suami isteri. Harta pusaka rendah diwariskan menurut hukum faraidh. Harta pusaka tinggi dalam adat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minangkabau tidak bisa digunakan konsep warisan Islam, karena ia bukanlah harta warisan sebagaimana terdapat dalam *faraidh*. Adapun harta pusaka rendah adalah harta yang merupakan hasil pencaharian seseorang yang dia miliki secara utuh dan sempurna, dan dia punya kuasa penuh terhadap harta tersebut, sehingga konsep pewarisannya harus mengikuti *faraidh*.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini berimbas secara langsung kepada perubahan sosial dan dinamika masyarakat. Intensitas perubahan sosial tersebut pada gilirannya melahirkan persoalan hukum yang menuntut analisis posisinya dalam hukum Islam. Di era spesialisasi ini, dalam melakukan *istinbāt*, para ahli hukum Islam dituntut keterbukaannya dalam bekerja sama baik dengan ulama bidang keislaman yang lain maupun dengan para ilmuwan "umum" seperti ahli ekonomi, ahli psikologi, ahli antropologi, ahli sosiologi dan lain sebagainya. Sebab pemecahan persoalan-persoalan yang muncul selalu menuntut untuk dilihat dari berbagai sudut pandang.
2. Untuk mendorong pengembangan pemikiran hukum Islam, khususnya di bidang *istinbāt* hukum terhadap persoalan-persoalan baru, sangat urgen untuk dibentuk lembaga kajian hukum Islam khususnya di perguruan-perguruan tinggi Islam yang dipandang memiliki sumber daya manusia lintas disiplin ilmu sehingga secara kelembagaan dapat meningkatkan aktifitas dalam ikut memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang timbul. Lembaga-



lembaga ini dapat menjadi pusat-pusat pengembangan pemikiran hukum Islam yang pada gilirannya mampu menjadi sentra ijtihad kolektif melalui kerja sama dengan lembaga lain.

Akhirnya, tiada kata yang layak untuk diucapkan, selain ribuan syukur kehadiran Allah, dengan rahmat, taufiq, hidayah, dan *'ināyah*. Nyalah penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Dengan penuh kesadaran penulis mengakui kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam disertasi ini. Dengan harapan semoga segala kelebihannya dapat bermanfaat sebagai anugerah dari Tuhan dan segala kekurangannya datang dari pribadi penulis, karenanya kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan.

Segala kerendahan hati, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penulisan disertasi ini, semoga Allah memberikan ganjaran yang setimpal. Akhir kata, hanya kepada Allah tempat kembali dan semoga ridha Allah menjadi landasan bagi setiap amal perbuatan kita. Amin.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Uthman', Izz al-Dīn Abu Muhammad 'Abd al-'Aziz bin 'Abd al-Salām bin Abi al-Qasim bib al-Hasan al-Salmi Sulthan al- (577-660 H / 1181-1262 M), *al-Qawā'id fī Ikhtishār al-Maqāshid*, Pen-Tahqīq: Iyād Khālīd al-Thabbā', Damaskus: Dār al-Fikr, 1996, Juz 1
- Abdillah, M. Taufik, *Sejarah dan Masyarakat, Lintasan Historis Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987
- Achmad, Muhammad al-Amin bin Umar ibn, *Majmu' al-Rasā'il*, Lubnan: Dar Ibnu Hazm, 1986, Jilid ke-2
- , *Radd al-Mukhtâr 'alâ al-Durâr al-Mukhtâr*, Beirut: Dar Ihya' al-Turâts al-Arabi, t.th, Jilid ke-4
- Akus, Bustanuddin, *Islam dan Budaya Minang: Suatu kebutuhan dalam Menatap Masa Depan*, [tt]: [tp], 2005
- Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyât al-Maqâshid Inda al-Syâthibi*, Virginia, USA, IIIT, 1995
- Arizam, Abdullah, *al-Fikr al-Maqâshidi Fi Tafsîr al-Manâr*, Virginia, IIIT, 2017
- As Umar, Tasrif dan Faisal Hamdan, *Hukum Adat dan Lembaga Hukum Adat Daerah Sumatera Barat*, Padang: BPHN-Univ Andalas, 1978
- Asas, Malik bin, *Muwaththa' Mâlik*, t.tp: Musthafa al-Bab al-Halaby, 1985, Juz 2
- Anonim, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, 1984
- Anshari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Qurthubi al- (W. 671 H), *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an (Tafsir al-Qurthubî)*, Pen-tahhīh: Hisyâm Samir al-Bukhârī, Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub, 2003, Juz 11
- Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Arabiyah, Majma' al-Lughah al-, *Mu'jam al-Wasīth*, Mesir: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2004, Juz 1
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, Cet. ke-XII
- Arrasully, Syekh Sulaiman, *Pertalian Adat dan Syara'*, Jakarta: Ciputat Press, 2003



2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asyūmāwī, Muhammad Sa'īd al-, *Ushul al-Syārī'ah*, Beirut: Dār Iqra', 2003

Asyūr, Muhammad Thāhit Ibn, *Maqāshid al-Syārī'ah al-Islāmiyah*, Beirut: Dār al-Basha'ir li intajy 'ilmy, 1988

Asyūts, Abū Dāwud Sulaymān bin al-Asy'ats al-Sajastani al- (202-275 H), *Sunan Abī Dawūd*, Pen-Tahqīq: Muhammad Muhy al-Din 'Abd al-Hamid, Beirut: Maktabah al-'Ashriyah, t.th, Juz 1

Azyumardi, *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*, Penerjemah: Iding Rasyidin, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003, Cet. ke-1

Bani, Muhammad Nāshir al-Dīn al-, *Shahīh al-Jāmi' al-Shaghir wa Ziyādatuh (al-Fath al-Kabīr)*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1988, Cet. ke-3, Juz 2

Barūt, Muhammad Jamāl, *al-Ijtihād; al-Nash, al-Wāqī' wa al-Mashlahah*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'ashir, 2000

Bahri, Syamsul, dkk, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāshid Syārī'ah Menurut al-Syāthibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996

Bel'īd, Al-Shādiq, *Alquran wa al-Tasyrī'; Qirā'ah Jadīdah fī Ayāt al-Ahkām*, Tunia: Dār al-Nasyr al-Jāmi'ī, 1999

Bandaro, N. Latief Datuak, *Etnis dan Adat Minangkabau Permasalahan dan Masa Depan*, Bandung: Angkasa, 2002

Batuah, A. Datuak dan A. Datuak Madjoindo, *Tambo Minangkabau dan Adatnya*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999

Buthi, Muhammad Said Ramadhan al-, *Dhawābit al-Mashlahat fī al-Syārī'ah al-Islāmiyah*, Beirut: Muasasah al-Risalah, 1977

Bukhāri, Muhammad bin Ismail Al-, *Shahīh al-Bukhari*, Beirut: Dār Ibnu Katsīr, 2002, Juz 1

Damīji, Shālih bin Muhammad bin 'Umar al-, *Mawqif al-Librālīyah fī al-Bilād al-'Arabīyah min Muhakkamāt al-Dīn; Dirāsah Tahlīliyah Naqdīyah*, Dubay: al-Minhal, 2012

Daud, Haon, *Sejarah Melayu: Satu kajian dari pada Aspek Pensejarahan Budaya*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian dan Pendidikan Malaysia, 1993, Cet ke- II



- Daya, Burhanuddin, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1990
- Dayo, Ibrahim Dt. Sanggoeno, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2015, Cet. ke-2
- Djamaris, Edwar, *Tambo Minangkabau*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991
- Djauhar, Abdur Rahman I., *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Edwar, *Tanah Komunal (Memudarnya Soliodaritas Sosial pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*, Padang: Andalas University Press, 2006
- Fahri, 'Alī al-, *Maqāshid al-Syarī'ah wa Mākarimuhu*, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmy, 1993
- Fahridiy, Khalīl bin Ahmad al-, *Kitāb al-Ain*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, Juz 5
- Gharnāthi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmī al-Syāthibī al- (W. 790 H), *al-Muwāfaqāt*, Pen-tahqīq: Abu 'Ubaydah Masyhur bin Hasan al-Salman, Al-'Aqrabiyah: Dār Ibn 'Affān, 1997, Juz 2
- _____, *al-I'tishām*, Pen-tahqīq: Muhammad bin 'Abd al-Rahman al-Syaqīr, dkk., Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jawzī, 2008, Juz 1
- Ghazālī, Al-, *al-Mustashfā min ilm Ushūl*, Beirut: Al-Risālah, 1997
- Ghazali, Abu Hamid al-, *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'li*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999 M
- Graves, Elizabeth E., *Asal Usul Elite Minangkabau Modern: Respons terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007
- Gough, Schneider, D.M. dan K., *Matrilineal Kinship (Kekerabatan)*, Penerjemah: Arief Rahman, Jakarta: Jaya Press, 1994
- Hajizar, *Studi Tekstual dan Musikologis Kesenian Tradisional Minangkabau Sibang: Kaba Anggun Nan Tungga Magek Jabang*, Padang: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia, 1988
- Hakimai, Idrus, Dt. Rajo Pangulu, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Minangkabau Basandi Syarak*, [tt]: [tp], 2006
- Hakimy, Idrus Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994



2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. H. H. H., *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung: CV. Remaja Karya, 1984
1. H. H. H., *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*, Jakarta: Umminda, 1982, Cet. ke-4
1. H. H. H., *Islam dan Adat Minangkabau*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985
1. H. H. H., *Sejarah Islam di Sumatera*, Medan: Pustaka Nasional, 1950, Edisi ke-II
1. H. H. H., 1968. "Adat Minangkabau dan Harta Pusaka" dalam Mochtar Naim (Ed.), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang: Center for Minangkabau Studies Press, 1968
1. H. H. H., Erman, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1998
1. H. H. H., Muhammad, *Tali Kerabat pada Kekkerabatan Orang Minangkabau*, Bukittinggi: Internasional Seminar On Minangkabau, 1980
1. H. H. H., Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, a.b. Agah Garnadi, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994
1. Haviland, William A., *Antropologi*: Penj. R.G. Soekadijo. Judul Asli *Anthropology 4th Edition*, Jakarta: Erlangga, 1988, Edisi ke-IV, Jilid II
1. H. H. H., Hendak ke-Mana Hukum Islam, Jakarta: Tintamas, 1976
1. H. H. H., *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Penerbit: Tintamas, Jakarta, 1982
1. H. H. H., 'Abd al-Razzāq Abū Bakr bin Hammam bin Nafi' al- (W. 211 H), *Al-Mushannaf*, Pen-Tahqīq: Habib al-Rahman al-'Azhami, Gujarat: al-Majlis al-'Ilmi, 1972, Juz 2
1. Hilāl, Hafsam, *Mu'jam Muṣṭalah al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Jil, 2003
1. Hosen, Ibrahim, "Memecahkan Permasalahan Hukum Baru", dalam Jalaluddin Rahmat (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1992
1. Ibrahim, Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009
1. Iskandar Kemal, *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya Tinjauan Tentang Kerapatan Adat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009
1. Jamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995



- Jamnia, Jamaris, *Pendidikan Matrilineal*, Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2004, Cet. ke-I
- Jayyah, Ibn al-Qayyim Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'd Syams al-Dīn al- (691-751 H), *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Pen-tahqīq: Muhammad 'Abd al-Salām Ibrāhīm, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996, Juz 3
- Jayyah, Anita, *Wanita dan Rumah Tangga di Indonesia: Pengertian Budaya dan Praktek Sosial*, Jakarta: Jaya Nusa, 2000
- Jawhri, Abu Al-Ma'ali Abd Al-Malik Ibn Abdullah Ibn Yusuf Al-, *al-Burhan fi Ushūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Anshar, 1400 H, Juz 1
- Kato, Tetsushi, *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2005
- _____, *Nasab Ibu dan Merantau: Tradisi Minangkabau yang Berketerusan di Indonesia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989
- Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Firdaus*, Jakarta: Pustaka Al-Fadhīlat, 2012
- Kenedi, Gusril, "Model Konseling Pranikah Berorientasi Pengembangan Konsep Diri (Studi Kasus Tentang Persiapan Pernikahan Mahasiswa Etnis Minangkabau di IAIN Imam Bonjol Padang)", Disertasi doktor, Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2005
- Khādīmī, Nur al-Dīn bin Mukhtār al- (al-Khādīmī), *al-Ijtihād al-Maqāshidy*, Qatar: Wizārāt al-Awqāf wa Syuun al-Diniyyah, 1998
- _____, *Im al-Maqāshid al-Syarī'ah*, Riyādh: Maktabah al- Abikān, 2001
- Khayyath, Abdul Aziz al-, *Nazhariyah al-'Urf*, Amman: Maktabah al-Aqsha, 1397 H
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat, 1985
- _____, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- _____, *Bunga Rampai: Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990, Cet. ke- XIV
- _____, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004, Cet. ke- 20
- Krippendorff, Klaus, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, Penerjemah: Farid Wajdi, Jakarta: Rajawali Press, 1991



- Khadi, Ahmad al-Hajj al-, *al-Madkhal al-Fiqhi: al-Qawaid al-Kulliyyah*, Damsyik: Dar al- Ma'arif, 1980
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- UIN AM Sumatera Barat, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; Pedoman Hidup Banagari*, Padang: Sako Batuah, 2002
- Ukko, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INTIS, 1998
- Mahmud, St. dan A. Manan Rajo Pangulu, *Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah*, Medan: Pustaka Indonesia, 1987, Cetakan ke-IV
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Kumpulan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Manggis, M. Rasjid, *Minangkabau: Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Padang: tp, 1970
- _____, *Simpapeh: Adat Minangkabau*, Bukittinggi: Perc. Unit II Bukittinggi, 1975, Cet. ke-II
- Mansoer, M.D., cs, *Sejarah Minangkabau*, Jakarta: Bhatara, 1970
- Manzūr, Ibn, *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Dār Ihya’ al-Turāts al-‘Arabiyy, 1992, Juz 3
- Marhumah, *Memaknai Perkawinan dalam Perspektif Kesetaraan (Studi Kritis terhadap Hadis-Hadis tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009
- Marūzi, Ibn Rahawayh Abū Ya’qūb Ishāq bin Ibrāhīm bin Makhlad bin Ibrahim al-Hanzhali al- (W. 238 H), *Musnad Ishāq bin Rāhawayh*, Pen-Tahqīq: ‘Abd al-Ghafur bin ‘Abd al-Haqq al-Bulūsī, Madinah: Maktabah al-Ayman, 1991, Juz 1
- Madani, Mālik bin Anas bin Mālik bin ‘Amir al-Ashbahi al- (W. 179 H), *al-Muwaththa’ li Imām Dār al-Hijrah Mālik bin Anas: Riwayāh Abī Mush’ab al-Zhrī al-Madanī (150-242 H)*, Pen-tahqīq: Basysyar ‘Awwad Ma’ruf dan Mahmud Muhammad Khalil, Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1998, Cet. ke-3, Juz 1
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Rosdakarya, 2006
- MS, Amir, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: Citra Harta Prima, 2011
- _____, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian*, Jakarta: Citra Harta Prima, 2011



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muallim, Amir, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997

Muhammad Ato, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Kajian tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993

Muhammad, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakeh Sarasih, 2000

Muhammad 'Abid al-Jābirī, *Bunyah al-'Aql al-'Arabī; Dirāsah Tahliīyah Naqdīyah li-Nazhm al-Ma'rifah fi al-Tsaqāfah al-'Arabiy*, (Beirut: Bināyah Bayt al-Nahdhah, 2009, Cet. ke-9

Muhammad, Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991, Cet. ke-V

Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajawali Press, 2001

Muhyidin, Asep dan Agus Ahmad Safei, *Metode Pengembangan Dakwah*, Bandung: Pustaka Setia, 2002

Mulyana, Slamet, *Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara*, Jakarta: Bathara, 1963

Munawir, Ahmad Warson, dkk., *Kamus Al-Munawir; Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Munir, Misnal, "Sistem Kekerabatan dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Strauss", *Jurnal Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, Vol. 25, No. 1 Februari, 2015

Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Hukum Islam*, Penerjemah: Yudian W. Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991

Naim, Mohtar, *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984

Nasroen, M., *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971

Natin, S., "Perubahan Sosial Kedudukan dan Peran Mamak Terhadap Anak dan Kemenakan di Ranah Minang", *Mimbar Hukum*, Volume 20, Nomor 2, Juni, 2008

Navis, Albar, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Padang: PT. Grafika Jaya Sumbar, 2015

_____, *Cerita Rakyat dari Sumatera Barat 3*, Jakarta: Grasindo, 1992



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nasyaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husayn al-Qusyayrī al- (W. 261 H), *Shahīh Muslim (al-Musnad al-Shahīh al-Mukhtashar bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl Ila Rasulillah Shallallahu ‘Alayh wa Sallam)*, Pen-Tahqīq: Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, Beirut: Dar Ihyā’ al-Turats al-‘Arabi, t.th, Juz 1

Nur Hafid, Kuncara, *Skema dari pengertian-pengertian baru untuk mengupas sistem kekerabatan*, Jakarta Jaya Nusa, 2001

Nur Hayati, *Bundo Kandung dalam Kajian Islām dan Budaya*, Padang: Gunatama, 2004, Cet. ke-1

Nur Hidayat, Yus. Datuak, *Baringin Bonsai, Krisis Kepemimpinan Ninik Mamak di Gerbang Era Globalisasi*, Padang: Tanama Rekor, 1982, Side A

Priang, Edison dan Nasrun Datuak Marajo Sungut, *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2014, Cet. ke-IV

Qasim, Abd al-Rahman bin Abd al-, *Majmū’ al-Fatāwa Syaikh al-Islām Ahmad Ibn Taimiyah*, Madinah al-Munawwarah: Majma’ al-Malik Fahd Li Thibā’at al-Syarif, 2004, Juz 19

Qardāwi, Yūsuf al-, *Al-Ijtihād Fi al-Syarī’ah al-Islāmiyyah Ma’a Nazārāt Tahfīliyyah Fī al-Ijtihād al-Mu’āṣir*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1996

Quthāniy, Musfir bin Ali al-, *Manhāj Istimbāth al-Ahkām al-Nawāzil al-Fikhiyyah al-Mu’ashirah*, Jeddah: Dār al-Andalus al-Khadhrā’, 2003

Razwayni, Ibn Mājah Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al- (W. 273 H), *Sunan Ibn Mājah (al-Sunan)*, Pen-Tahqīq: Sya’ayb al-Arna’uth, dkk., Dar al-Risalah al-‘Alimiyah, 2009, Juz 2

Rāziy, Muhammad bin ‘Umar bin al-Husayn al- (al-Rāziy), *al-Mahshūil*, Riyād: Jamī’ah al-Imam Muhammad bin Su’ūd al-Islamiyyah, 1400 H, Juz 6

Raisūni, Ahmad al-, *al-Fikr al-Maqāshidi Qawā’iduhu Wa Fawāiduhu*, Rabath, Mathba’ah al-najāh al-jadīdah, 1999

_____, *Nazhariyyat al-Maqāshid ‘inda Al-Imām Asy-Syāthibi*, Beirut: Al-Muassasah Al-Jami’iyyah Li Al-Dirāsāt wa Al-Nasyr wa Al-Tauzī’, 1995

Rajafi, Ahmad, *Nalar Fikih Muhammad Quraish Shihab*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015

Ridha, Ahmad, *Mu’jam Matn al-Lughah*, Beirut: Dār Maktabah al-Hayah, 1960, Juz 4

Rubū’iyah, ‘Abd al-Aziz bin ‘Abd al-Rahman ‘Ali bin al-, *al-Adillah al-Tasyrī’ al-Mukhtalaf fi al-Ihtiqāt Bihā*, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1979



- Salim, Ampera, dan Zulkifli, *Minangkabau dalam Catatan Sejarah yang Tercecer*, Padang: Yayasan Citra Budaya Indonesia, 2004
1. Hadid, M. Duski, *Syekh Burhanuddin dan Islamisasi Minangkabau: Syarak Mandaki, Adat Manurun*, Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2002
2. Quthb Mushthafā, *Mu'jam Mushthalahāt Ushūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, 2000
3. Mubadi, Sukris, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013
4. Syagam, Gouzali, *Kamus Lengkap Bahasa Minang: Minang-Indonesia, Bagian Pertama*, Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), 2004, Cet. ke-I
5. Syuti, Azinar dan Rifai Abu, *Sistem Ekonomi Tradisional sebagai Perwujudan Tanggapan Aktif Manusia terhadap Lingkungan Daerah Sumatera Barat*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1995
6. Shabuni, Muhammad Ali al-, *Pembagian Warisan menurut Islam*, Depok: Fathan Prima Media, 2013
7. Shān'āni, Muhammad bin 'Ali bin Muhmmnad al-Syawkānī al- (W. 1250 H), *Irsyād al-Fuhūl ila Tahqīq al-Haqq Min 'Ilm al-Ushūl*, Pen-tahqīq: Abi Hafsh Sāmī bin al-'Arabi al-Uyari, Damaskus: Dār al-Fadhilah, 2000, Juz 2
8. Shihab, Alwi, *The Muhammadiyah Movment and It's Controversy with Cristian Missin in Indonesia*, Penerjemah: Ihsan Ali-Fauzy, *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Gerakan Penetrasi Kristen di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998, Cet. ke-I
9. Shihab, M. Quraish, *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2014, Cet. IV
10. ———, *Kaidah Tafsir*, Jakarta: Lentera Hati, 2015, Cet. ke-III
11. ———, *Pengantin Alquran Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007
12. Shihab, M. Quraish, *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Alquran*, Bandung: Mizan, 2014
13. ———, *Tafsir al-Mishbāh, Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, vol. 2

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau



, *Wawasan Alquran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996

1. Soerjanto, Soerjono, & Sri Pamudji, *Pengantar Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985
2. Soerjanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet ke-V
3. Soedjadi, R. Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, Bandung: PT Alumni, 2002, Cet. ke-I
4. Soewandi, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
5. Syafyāni, Abid bin Muhammad al-, *Ma'ālim Tharīqah al-Salaf fī Ushul al-Fiqh*, Makkah: Maktabah al-Manārah, 1988
6. Shairi, *Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan; Kritik atas Konsep Qat'i dalam Hukum Kewarisan Islami*, al-Manahij VI, No.1, t.tt, Januari 2012
7. Sibar.co, dalam <http://beritasumbar.com/5-alasan-mengapa-pernikahan-sesuku-dilarang-di-minangkabau/>, diakses pada Kamis, 04 Januari 2018, pukul 21:25 WIB
8. Sriasumantri, Jujun S., *Ilmu dalam Perspektif*, Jakarta: Gramedia, 1989
9. Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
10. Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bahan ajar perkuliahan Universitas Pendidikan Indonesia, 2010
11. Suyuti, Jalāl al-Dīn al-, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1983
12. Syāhibi, Abu Ishāq Al-, *Al-Muwāfaqāt*, Mesir: Maktabal al-Tijāriyah, t.th, Jilid IV
13. Syarafi, Abd al-Majīd al-, *al-Islām Bayn al-Risālah wa al-Tārīkh*, Beirut: Dār al-Thalī'ah, 2008, Cet. ke-2
14. Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984, Cet. ke-1
15. _____, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, Cet ke-I, Jilid 2
16. Syaūkāni, Muḥammad bin 'Alī al-, *Irsyād al-Fuḥūl Ilā Tahqīq al-Ḥaqq Min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz II, Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah, 2000

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Syaybani, Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al- (164-241 H), *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Pen-Tahqīq: Syu'ayb al-Ama'uth, dkk., Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001, Juz 12

Tirmidhiyah, Ibnu, *Majmū' al-Fatāwa*, Riyadh, Dār al-Wafa', 2005, Jilid XXXII

Tuanku, Darwis, *Seluk Beluk Adat Minangkabau*, Jakarta: N.V. Nusantara Bukittinggi, 2000

Umar, Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007

Wesenenk, L.C., *De Minangkabausche Nagari*, Penerjemah: Muhammad Hamdi, Bandung: Jaya Abadi, 1998

Yaqub, Isma'il, *Sejarah Islam di Indonesia*, Djakarta: Balai Pustaka, 1956

Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013

Yūbi, Muhammad Sa'ad bin Sa'id al- (al-Yūbi), *Maqāshid al-syarī'ah al-Islāmiyah wa alāqatuha bi al-Adillah al-Syar'iyah*, Riyādh: Dār al-Hijrah Li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1998

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 1990

_____, *Tafsir al-Qur'an al Karim*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1988, Cet. ke-XXVII

Yunus, Umar, *Kebudayaan Minangkabau dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008

Zein, Satria Effendi M., *Metodologi Hukum Islam*, dalam Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

_____, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008

Zuhaili, Wahbah al-, *Subul al-Istifādah Min al-Nawāzil Wa al-Fatāwā Wa al-'Amal al-Fiqhī Fī al-Taṭbīqāt al-Mu'āṣirah*, Damaskus, Dār al-Maktabī, 2001

_____, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2001, Jilid VII

_____, *Ushul al-fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1986, Jilid II



Haytsam bin Jawwad al-Haddad, *Ayn Akhtha' al-Maqāshīdīyūn al-Judad fi Nazharihim ilā maqāshid al-Syarī'ah*, (link bagian pertama dan kedua). Link bagian pertama: <http://dorar.net/article/526>, dan link bagian kedua: <http://dorar.net/article/5267>, diakses: 8 April 2018

<http://melayonline.com/ind/news/read/11500>. Diakses pada Rabu, 10 Oktober 2018, pukul 03:45 WIB.

<http://riampunjablog.blogspot.com/2011/01/sejarah-sistem-matrilineal-minangkabau.html>. Diakses pada Rabu, 10 Oktober 2018, pukul 05:45 WIB

www.republika.co.id, 14-10-2012. Diakses 22-12-2018

Yurnelis Ekk, *Persepsi Masyarakat tentang Perkawinan Sesuku di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok*, dalam <https://www.google.com/search?q=Persepsi+Masyarakat+Tentang+Perkawinan+Sesuku+di+Nagari+Air+Dingin+Kecamatan+Lembah+Gumanti+Kabupaten+Solok&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>, diakses pada Minggu, 29 Oktober 2017, pukul 08:25 WIB.

Jurnal

Adiani, Iva, "Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia", *Jurnal Filsafat*, Vol. 25, No. 1, Februari, 2015

Andriyaldi, *Teori Maqāshid Syari'ah dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibn 'Asyur*, jurnal Islam dan Realitas Sosial, vol. 7, No.1, Januari-Juni 2014

Arifin, Zainal, "Bundo Kandung: (hanya) Pemimpin di Rumah (Gadang)", *Antropologi Indonesia*, Volume 34, Nomor 2, July, 2013

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diarangi menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya. Penulisannya harus mencantumkan sumbernya. Diarangi menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya. Penulisannya harus mencantumkan sumbernya. Diarangi menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya. Penulisannya harus mencantumkan sumbernya.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UIN RIAU
SULTAN SYARIF KASIM

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الاسلاميه الحكومية

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Syamsi Yusrizal
ID Number : 31695104961
Date of Birth : September 22, 1984
Sex : Male
Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test	
Listening Comprehension	: 48
Structure & Written Expressions	: 53
Reading Comprehension	: 49
Overall Score	: 500

Expire Date : October 8, 2019

English Proficiency Test Certificate Provided by:
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
HP: 0852 7144 0823 Fax: (0761) 858832
Email : info@pusatbahasa.info Website : pusat-bahasa.info



The Head of Language Development Center
Drs. H. Kholiqo Hasibuan, M. Ed- TESOL
NIP: 196510281997031001

- a. Penguasaan hanya untuk kepentingan penunjang, penelitian, penunsaan karya ilmiah, penyusunan laporan, penunsaan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Penguasaan tidak merupakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





CURRICULUM VITAE

Data Personal

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Lengkap	: Syamsi Yusrizal	
NPM	: 31695104861	
Pekerjaan	: Mahasiswa Pascasarjana S3	
Tempat/Tgl. Lahir	: Kapujan, 22 September 1984	
Golongan darah	: 0	
Agama	: Islam	
Status (Menikah/Lajang)	: Menikah	
Kewarganegaraan	: Indonesia	
Tinggi Badan/ Berat	: 165 cm/65 Kg	
Pendidikan Terakhir	: (S3) Program Studi Hukum Keluarga (AH) Jurusan Pascasarjana S3 UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2016-2019	
Alamat	: Jl. Pasar Baru-Asam Kumbang, Simpang Super, Kenagarian Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat	
Telepon/ Hp	: 081374146251	
Agama	: Islam	
Email	: syamsiyusrizal84@yahoo.com	
Hobby	: Baca dan traveling	
Motto	: Jalani Seperti Air Mengalir	



Pendidikan Formal

1. Tamatan (SD)/Thn : SDN Inpres 33 Kapujan Tahun (1991-1997)
2. Tamatan (SMP)/Thn : MTs MST Parabek Bukittinggi Tahun (1997-2000)
3. Tamatan (SMA)/Thn : MAS MST Parabek Bukittinggi tahun (2000-2003)
4. Tamatan (S1)/Thn : Program Studi Hukum Keluarga Jurusan Syariah STAIN Sjech M. Djamil Djabat Bukittinggi Tahun (2003-2007)
5. Tamatan (S2)/Thn : Konsentrasi Hukum Islam Program Pascasarjana S2 UMSB Padang Tahun (2007-2012)
6. Studi S3/Thn : Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal-Al Syakhshiyah) Program Pascasarjana S3 UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun (2016-2019)

Pengalaman Kerja

1. Penyuluh Agama Islam Non PNS KUA Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-Sekarang
2. Dosen STAI Madrasah Arabiyah Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-Sekarang
3. Dosen STAI Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-Sekarang.



Pengalaman Organisasi

1. Departemen Kajian MUI Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-Sekarang
2. Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-Sekarang
3. Sekretaris MUI Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-Sekarang

Karya Ilmiah

1. Peranan Biro Konseling Agama Masjid Istiqamah Muallimin Sawah Dangka dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Skripsi)
2. Persepsi Anggota Jamaah Tabligh tentang Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Tapan Kabupaten Pesisir Selatan) (Tesis)
3. Hukum Keluarga *Matrilineal* Minangkabau dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Disertasi)
4. Dll

Pekanbaru, Oktober 2019
Yang Bersangkutan,

Syamsi Yusrizal